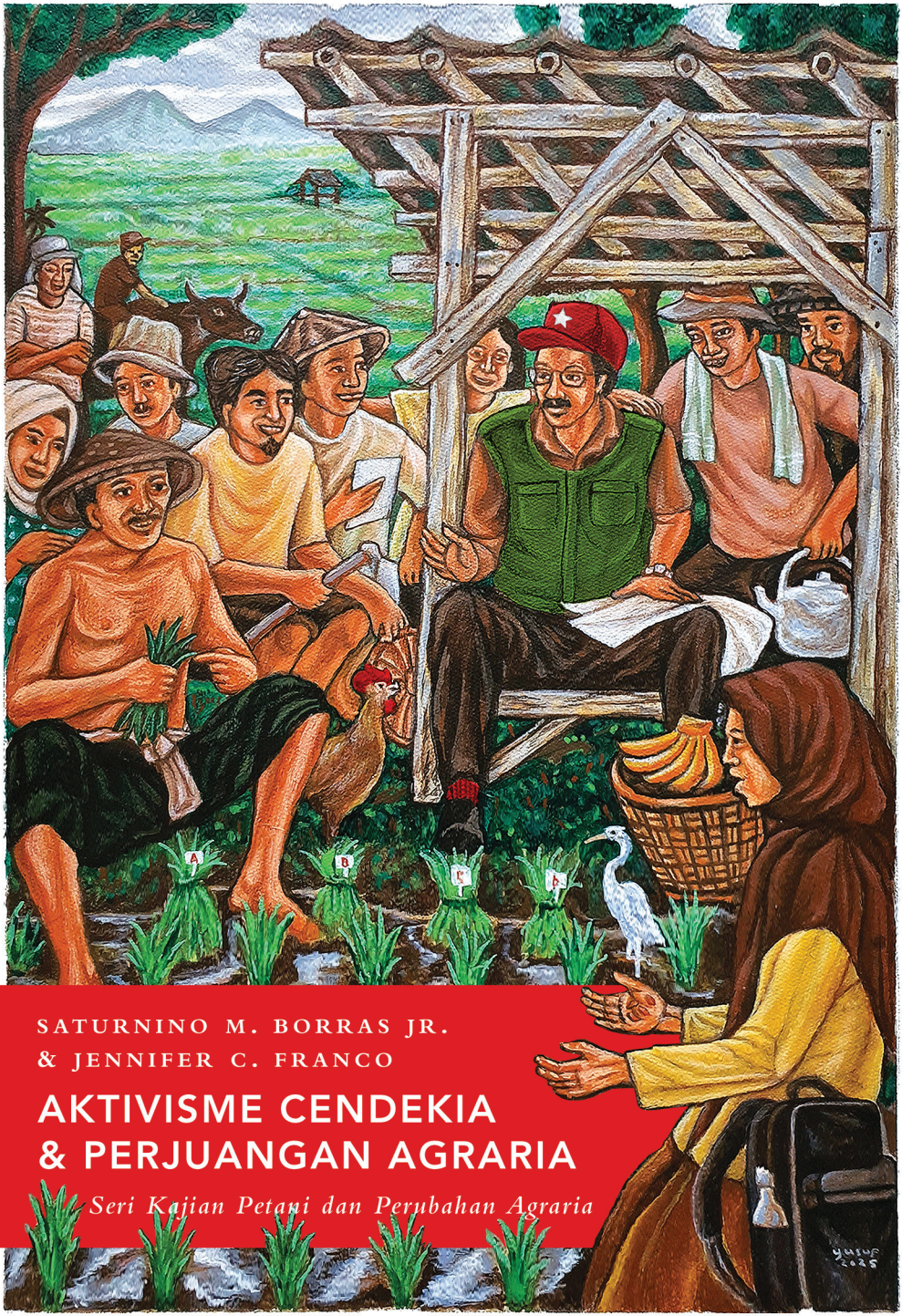

SATURNINO M. BORRAS JR.
& JENNIFER C. FRANCO

AKTIVISME CENDEKIA & PERJUANGAN AGRARIA

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria

insist
INDONESIAN SOCIETY for SOCIAL TRANSFORMATION

AKTIVISME CENDEKIA & PERJUANGAN AGRARIA

DR. SATURNINO M. BORRAS JR.

Guru Besar Kajian Agraria di International Institute of Social Studies (ISS), Den Haag, Belanda; Profesor Kehormatan di College of Humanities and Development Studies (COHD), Universitas Pertanian Tiongkok di Beijing; dan peneliti di Transnational Institute, Belanda. Dia adalah penulis bersama (Marc Edelman) buku lain di seri ini, *Dinamika Politik Gerakan Transnasional Agraria* (2026).

DR. JENNIFER C. FRANCO

Peneliti di Transnational Institute, khususnya dalam program Myanmar-in-Focus serta Keadilan Agraria dan Lingkungan. Dia juga merupakan profesor tamu di College of Humanities and Development Studies (COHD), Universitas Pertanian Tiongkok di Beijing, serta editor bersama Saturnino M. Borras Jr. untuk *The Oxford Handbook of Land Politics* (2023).

Sebuah buku sangat penting, yang akan menjadi bacaan utama bagi kalangan cendekiawan-aktivis yang berkecimpung di masalah pertanahan serta agraria seantero dunia.

***Ian Scoones**, Institute of Development Studies, University of Sussex, Inggris*

Inilah karya yang bisa disebut "klasik praktis", hasil permenungan mendalam Borras dan Franco tentang peran akademisi yang bekerja dengan gerakan untuk perubahan agraria. Buku kecil ini bisa dipastikan bakal segera dan memang selayaknya masuk ke dalam kepustakaan utama kajian agraria kritis, tapi bukan berarti menjadi karya "cepat saji". Buku ini disusun berdasarkan pengalaman puluhan tahun dalam perpaduan kerja keilmuan dan aktivisme, di tingkat tertinggi dan dengan pertaruhan terbesar. Kerja seumur hidup kedua penulis di kedua arena diperas hingga menghasilkan sari pati beberapa halaman buku yang sangat berkesan dan menghentak. Seandainya saja saya memulai perjalanan kerier saya dengan bekal buku ini; tapi belum terlambat untuk berefleksi pada gagasan yang diusung *Aktivisme Cendekia dan Perjaungan Agraria*.

***Raj Patel**, University of Texas at Austin, Amerika Serikat*

Dengan kerangka historis dan intelektual yang luas, dipadukan dengan contoh-contoh nyata di lapangan, Jun dan Jenny berhasil menunjukkan bukan saja peliknya tantangan dan ketegangan yang dihadapi aktivisme cendekia, tetapi juga kekuatan di dalamnya—dan bagaimana aktivisme cendekia mampu dan memang telah memperkuat perjuangan agraria. Sulit membayangkan ada sosok yang lebih pas untuk memandu sekaligus menantang kita dalam membangun praksis ini.

***Ruth Hall**, PLAAS, University of the Western Cape, Afrika Selatan*

Kehadiran buku ini sudah dinanti selama puluhan tahun, dan rasanya begitu lega akhirnya mendapatinya. Sejauh ini, inilah buku paling serius tentang aktivisme cendekia, yang membahas cita-citanya, keterbatasannya, dan kontradiksinya. Pembahasannya solid dan meyakinkan, mencerminkan keterlibatan serta pengalaman panjang kedua penulisnya yang begitu kaya dalam upaya kritis mereka untuk mengaitkan lembaga pengetahuan, jaringan internasional, dan gerakan agraria radikal.

***Jan Douwe van der Ploeg**, penulis* Petani dan Seni Bertani *serta* The New Peasantries

Dengan bahasa yang gamblang, buku ini membawa kita menjelajahi sejarah dan masa kini perjuangan politik agraria yang penuh pergulatan, menawarkan pemahaman yang berprinsip tapi tetap inklusif. Sebuah buku yang bisa dijadikan acuan inspiratif dan teman penuh semangat bagi mahasiswa serta aktivis yang bekerja untuk keadilan dan masa depan nonkapitalis.

***Yan Hairong**, Tsinghua University, Tiongkok*

Buku ini menyuguhkan kekayaan sejarah keterlibatan langgeng penulisnya dengan gerakan sosial (agraria), dua sosok cendekiawan-aktivis yang "terlibat secara kritis". Inilah *tour de force*, karya cemerlang, pada titik saling keterkaitan antara aktivisme cendekiawan dan perjuangan agraria. Mahasiswa, akademisi, dan aktivis yang menekuni dinamika politik agraria di Selatan Global sangat saya sarankan membaca buku ini.

***Walter Chambati**, Sam Moyo Africa Institute for Agrarian Studies*

Buku ini membahas bagaimana keilmuan yang terlibat dan praksis politik saling membentuk, juga tentang kontradiksi, ketegangan, dan konflik di dalamnya. Tapi tidak berhenti di sana: buku ini juga berisi refleksi mendalam tentang politik pertanahan dan peran teori serta praksis dalam menggapai sebuah dunia yang lebih adil. Sebuah kado indah bagi siapa saja yang tertarik pada keadilan agraria.

***Diana Ojeda**, La Universidad de los Andes, Kolombia*

Borras dan Franco memadukan pengalaman panjang mereka di lapangan dan di kelembagaan dalam sebuah panduan etis yang reflektif bagi para cendekiawan-aktivis yang bergiat bersama gerakan agraria pedesaan maupun perkotaan, sekaligus berhadapan dengan dunia akademik yang korporatis. Monograf penting ini menawarkan dua arahan mendasar: pertama, menempatkan pengalaman menyejarah yang khas dari komunitas-komunitas agraris tertentu sebagai aspek kritikal dalam politik pengetahuan gerakan; kedua, meninjau ulang implikasi metodologis dari transformasi kapitalisme yang terus berlangsung di dunia agraria, dengan hubungan kepemilikan yang makin beragam dan mengancam hak-hak asasi manusia serta hak-hak pekerja-produsen di tengah krisis ekologis. Melalui buku ini, kedua penulis menghadirkan terobosan yang kuat serta tepat waktu dalam membicarakan ulang peta perebutan ruang global dan ranah kajian agraria.

***Philip McMichael**, Cornell University, Amerika Serikat;*
penulis buku Rezim Pangan dan Masalah Agraria

Jenny dan Jun punya kemampuan luar biasa untuk berbicara sekaligus sebagai cendekiawan dan aktivis, sambil menantang kedua posisi melalui perkawanan. Mereka mendorong kita untuk melampaui konsep, imajinasi, dan keyakinan menuju ide-ide radikal yang benar-benar dibutuhkan serta mendesak untuk mengubah masyarakat menjadi lebih adil dan berkelanjutan.

***Lyda Fernanda**, Integracion de Educacion Ambiental y Social (IDEAS), Kolombia*

Sebuah buku yang penuh inspirasi dan menjadi peletak dasar bagi gerakan cendekiawan-aktivis. Meski berakar kuat pada isu-isu agraria, buku ini juga sangat berharga bagi para peneliti keadilan lingkungan, pendukung gerakan pascapertumbuhan (*degrowth*), dan banyak kalangan lain yang berjuang bukan hanya untuk memahami tapi juga untuk mentransformasikan tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia kita hari ini.

***Arnim Scheidel**, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), Universitat Autónoma de Barcelona, Spanyol*

Kedua penulis mengupas secara mendalam peran cendekiawan-aktivis; sumbangsih kritikal yang dapat mereka berikan bagi gerakan; dan juga ketegangan, risiko, tantangan, serta jebakan yang menyertai kerja mereka …. Buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang percaya bahwa pengetahuan semestinya ditujukan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, dan bagi mereka yang berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup selaras dengan komitmen tersebut.

***Pietje Vervest**, Hamza Hamouchene, Katie Sandwell Transnational Institute (dari Pengantar)*

BUKU-BUKU SERI KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

***Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria* (Edisi Revisi) (2019)**, terjemahan dari *Class Dynamics of Agrarian Change* (2010) karya Henry Berstein

***Petani dan Seni Bertani: Maklumat Chayanovian* (2020)**, terjemahan dari *Peasants and The Art of Farming: A Chayanovian Manifesto* (2013) karya Jan Douwe van der Ploeg

***Rezim Pangan dan Masalah Agraria* (2021)**, terjemahan dari *Food Regimes and Agrarian Questions* (2013) karya Philip McMichael

***Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan* (2021)**, terjemahan dari *Sustainable Livelihoods and Rural Development* (2015) karya Ian Scoones

***Dinamika Politik Gerakan Agraria Transnasional* (2026)**, terjemahan dari *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements* (2016) karya Marc Edelman dan Saturnino M. Borras Jr.

***Pertanian dan Masalah Generasi* (2026)**, terjemahan dari *Agriculture and the Generation Problem* (2020) karya Ben White

KAJIAN PETANI & PERUBAHAN AGRARIA

Edisi Indonesia dari *Agrarian Change and Peasant Studies Series*, buku-buku kecil dengan isu besar, yang dikelola oleh jaringan internasional cendekiawan-aktivis agraria dalam wadah Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS).

EDITOR SERI

Saturnino M. Borras Jr., International Institute of Social Studies (ISS), Den Haag, Belanda
Sergio Coronado, Center for Research and Popular Education (CINEP), Kolombia
Ruth Hall, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS), Universitasy of the Western Cape, Afrika Selatan
Max Spoor, ISS, Den Haag, Belanda
Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko
Jingzhong Ye, College of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University, Tiongkok

KOMITE PENASIHAT EDITORIAL INTERNASIONAL

Duygu Avci, Sabanci Üniversitesi, Turki
Gonzalo Colque, Fundación Tierra, Bolivia
Alessandra Corrado, Università della Calabria, Italia
Raúl Delgado-Wise, Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko
Bernardo Mançano Fernandes, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (UNESP), Brasil
Sayaka Funada-Classen, Jepang
Hamza Hamouchene, SIYADA Network dan Transnational Institute (TNI) MENA Programmes
Shuji Hisano, Kyoto University, Jepang
Umut Kocagöz, International Institute of Social Studies (ISS), Belanda
Koichi Ikegami, Kindai University, Jepang

Alexander Nikulin, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Rusia
Fatih Özden, Ege Üniversitesi, Turki
Laksmi Adriani Savitri, FIAN, Indonesia
Sergio Schneider, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
Wonkyu Song, Research Institute of Agriculture and Peasant Policy, Korea Selatan
Chayan Vaddhanaphuti, Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), University of Chiang Mai, Thailand

AKTIVISME CENDEKIA & PERJUANGAN AGRARIA

SATURNINO M. BORRAS JR. & JENNIFER C. FRANCO

PENERJEMAH
Rassela Malinda

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria

insist PRESS

Anggota Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)

Aktivisme Cendekia dan Perjuangan Agraria
© Saturnino M. Borras Jr. dan Jennifer C. Franco

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris dengan judul *Scholar-Activism and Land Struggles* pada 2023 oleh Practical Action Publishing, Inggris (www.practicalactionpublishing.com) sebagai buku No. 11 dalam *Agrarian Change and Peasant Studies Series* (Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria).

Diterbitkan INSISTPress atas kerjasama dengan Initiative in Critical Agrarian Studies (ICAS) serta dukungan dari International Institute of Social Studies (ISS)/Erasmus University Rotterdam (EUR), Belanda; PLAAS (Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies), University of Western Cape (UWC), Afrika Selatan; dan College of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University (CAU), Tiongkok.

College of Humanities and Development Studies (COHD)

Penerjemah: Rassela Malinda
Penyunting Ahli: Ben White dan Laksmi A. Savitri
Penyunting: Achmad Choirudin
Penyusun Atak: Damar N. Sosodoro
Ilustrasi Sampul: Muhammad Yusuf (Ucup)

xxxiv + 182 halaman/14 x 20 cm
ISBN: 978-623-6179-35-2 [cetak]
ISBN: 978-623-6179-36-9 [PDF]

Cetakan pertama, Februari 2026

INSISTPress
Kampus Perdikan-INSIST, Jl. Kaliurang Km. 18,
Padukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582
Telepon: +6285102594244 | Surat-el: redaksi@insistpress.id
Tapakmaya: www.insistpress.id

Kami persembahkan buku ini untuk mengenang
Manuel P. Quiambao (1954–2012)
a.k.a Ka Taning, Gerry Acuña, Steve, Steve Guerrero,
Esteban, Teban, Tebs, Maning
mentor, kamerad, kawan, dan *ninong*

DAFTAR ISI

AKRONIM & SINGKATAN — xv
PENGANTAR ISS/EUR — xvii
PENGANTAR EDITOR SERI — xxiii
PENGANTAR TRANSNATIONAL INSTITUTE — xxvii
PRAKATA PENULIS — xxxi

BAB 1 CENDEKIAWAN, AKTIVIS, & PERJUANGAN AGRARIA — 1
Perjuangan dan Keilmuan — 1
Akar Sejarah Perdebatan tentang Politik Agraria dan Sekutu — 15
Akar Sejarah Politik Agraria Kontemporer — 21
Konjungtur Hari Ini — 34

BAB 2 POLITIK PERTANAHAN — 41
Demam Perburuan Tanah Skala Global Terkini — 41
Memperluas Lingkup Politik Pertanahan — 45
Gerakan Agraria — 51

BAB 3 AKTIVISME CENDEKIA — 65
Kajian tentang Aktivisme Cendekia — 66
Aktivisme Cendekia dalam Kajian Agraria Kritis — 82
Aktivisme Cendekia dan Lembaga Akademik — 87
Aktivisme Cendekia dan Aktivisme Politik — 102

BAB 4 APA YANG HARUS DILAKUKAN? TANTANGAN AKTIVISME CENDEKIA AGRARIA DI MASA DEPAN — 115
Tujuan: Akses, Kesetaraan, Otonomi — 122
Pengetahuan Transformatif — 129
Langkah Afirmatif — 137
Solidaritas dan Internasionalisme — 139

PUSTAKA — 149

AKRONIM & SINGKATAN

BIPOC	*Black*, *Indigenous*, *Colour* (Kulit Hitam, Pribumi, Kulit Berwarna)
BRICS	Brasil, Russia, India, Tiongkok, dan Africa Selatan
CASAS	Collective of Agrarian Scholar-Activists in the South (Kolektif Cendekiawan-Aktivis Selatan Global)
COP	Conference of the Parties (Konferensi Para Pihak)
FPIC	Free, Prior and Informed Consent (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan [Padiatapa])
GMO	*genetically modified organism* (organisme hasil rekayasa genetika)
IAASTD	International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Asesmen International atas Pengetahuan, Sains, dan Tekhnologi untuk Pembangunan)
ICAS	Initiatives in Critical Agrarian Studies
ISS	International Institute of Social Studies
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Gerakan Pekerja Tunakisma), Brasil
OMS/LSM	organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat
ODA	*official development aid* (bantuan resmi)
PLAAS	Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies
RANEPA	Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
RCSD	Regional Center for Social Science and Sustainable Development

REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
GAT	gerakan agraria transnasional (*transnational agrarian movements*)
UNESP	Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
USDA	US Department of Agriculture (Departemen Pertanian Amerika Serikat)

PENGANTAR ISS/EUR

Gagasan-gagasan yang membebaskan bisa saja lahir dari rahim politik pengetahuan yang sangat tidak demokratis—yaitu soal siapa yang berhak memproduksi dan menggunakan pengetahuan, sejauh mana, bagaimana caranya, dan untuk tujuan apa? Pengetahuan siapa yang dianggap absah? Di tingkat global, sirkulasi pengetahuan—bagaimana pengetahuan dihasilkan, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, dan dimanfaatkan—mirip seperti barang dagangan lain dalam kehidupan sehari-hari: dikuasai segelintir pihak, dimonopoli, dan diperjualbelikan demi keuntungan. Di dunia sekarang ini, setidaknya di bidang ilmu sosial, sirkulasi pengetahuan terpusat di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang kaya sumberdaya di negara-negara Utara, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan. Untuk bisa mengikuti perkembangan mutakhir dunia akademik—yang menjadi prasyarat agar seseorang bisa menghasilkan ide penelitian, proposal, atau publikasi yang dianggap "orisinal"—seorang peneliti harus punya akses ke berbagai hal: pendanaan penelitian, kesempatan menulis untuk jurnal dan penerbit buku bergengsi, langganan jurnal akademik, biaya penerbitan tulisan dalam skema akses terbuka/gratis (*open access*), dan perpustakaan dengan koleksi lengkap.

Namun, berbagai syarat keuangan dan logistik semacam itu jelas jauh di luar jangkauan banyak pemerintah, perguruan tinggi, maupun peneliti di Selatan Global. Pada 2024, biaya langganan tahunan untuk salah satu jurnal ilmu sosial papan atas mencapai US$6.500 (sekitar Rp110 juta)—dengan jumlah artikel per edisi yang lebih banyak dibandingkan jurnal pada umumnya. Jurnal lain dari penerbit yang sama, yang juga tergolong "papan atas" tapi lebih rata-rata, mematok biaya langganan tahunan sebesar US$2.700 (sekitar Rp45 juta). Dengan langganan jur-

nal, masyarakat luas bisa mengakses artikel-artikel di balik "gerbang berbayar". Penulis bisa memilih skema Akses Terbuka agar tulisannya dapat diakses secara gratis, tapi dia harus membayar penerbitnya. Biaya penerbitan artikel berskema Akses Terbuka dikenal dengan istilah *Article Publishing Charge* (APC); di jurnal yang pertama tadi itu, misalnya, APC satu artikel bisa mencapai US$4.300 (sekitar Rp70 juta) belum termasuk pajak. Bandingkan dengan gaji dosen-tetap perguruan tinggi negeri di banyak negara berpendapatan rendah–menengah di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia, yang mungkin hanya sekitar US$300 (sekitar Rp5 juta) per bulan. Gambaran ini menunjukkan betapa tidak demokratisnya struktur global dalam politik pengetahuan. Dari struktur timpang ini, muncul berbagai pandangan menyimpang tentang dunia beserta kehidupan di dalamnya. Dan dunia akademik bisa dan memang pernah dimanfaatkan untuk memproduksi pengetahuan yang justru membenarkan eksploitasi, penindasan, dan perusakan ekologi.

Tidak ada yang alamiah dari struktur politik pengetahuan global yang tidak demokratis ini. Ia merupakan perpanjangan dari logika kapital—dari perkembangan kapitalisme global yang penuh ketimpangan. Perguruan tinggi di seluruh dunia telah mengalami neoliberalisasi dalam berbagai bentuk, di mana keberhasilan peneliti dan lembaga secara individual lebih dihargai ketimbang etika moral komunitas akademik secara kolektif.

Para peneliti dan aktivis di balik serial buku kecil *Kajian Petani dan Perubahan Agraria* (yang tergabung dalam Initiatives in Critical Agrarian Studies [ICAS]), yang mulai digagas pada 2008, tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang turut melegitimasi *status quo* politik pengetahuan global. Mereka ingin memberikan sumbangsih kecil untuk mempertanyakan watak tidak demokratis dan struktur tak adil dari sirkulasi pengetahuan yang berlaku saat ini. Mereka ingin ikut membongkar struktur tersebut—dari cara pengetahuan diproduksi, diberi nilai, diedarkan, dipertukarkan, hingga digunakan—seraya membangun

alternatifnya. Demokratisasi politik pengetahuan hanya bisa terwujud melalui banyak prakarsa serupa di berbagai penjuru dunia, dan melalui gerakan massa. Para peneliti akademik yang menempati posisi bawah dalam piramida politik pengetahuan global yang tak adil ini mesti mengambil peran penting dalam upaya membongkar sistem yang berlaku sekaligus merintis jalan baru. Inilah yang mendasari terbentuknya *Collective of Agrarian Scholar-Activists in the South* (CASAS, Kolektif Cendekiawan-Aktivis di Selatan Global) sebagai sesuatu yang menjanjikan, menggugah, dan menginspirasi.

Struktur politik pengetahuan global yang timpang tidak hanya berlaku dalam dunia akademik. Dalam ilmu-ilmu sosial—khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis—setidaknya ada tiga ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kelahiran dan penggunaan pengetahuan yang membebaskan, yakni dunia akademik, komunitas lokal beserta basis rakyat gerakan sosialnya, dan lembaga penelitian serta pengembangan yang bercorak otonom. Komunitas ICAS memandang ketiganya sebagai komunitas-komunitas horizontal yang saling beririsan, bukan sebagai struktur hierarkis dengan para akademia di puncaknya. Para pengorganisir dan pemimpin serikat tani, misalnya, punya pengetahuan sangat mendalam tentang kehidupan petani—pengetahuan yang bahkan tidak bisa digapai oleh kalangan akademia atau peneliti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi nonpemerintahan (ornop), meskipun mereka bisa menghasilkan pengetahuan tersendiri dari mempelajari kondisi produksi dan reproduksi sosial kalangan petani yang sama. Dunia akademik memang kerap memegang peranan dominan, dan tak jarang juga secara sadar dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan ilmiah yang absah. Anggapan seperti ini layak dipertanyakan, karena komunitas ICAS memandang pengetahuan yang lahir dari luar dunia akademik juga sama pentingnya. Yang tak kalah penting ialah kemungkinan sinergi dari pertemuan tiga lingkaran penghasil pengetahuan yang berlainan ini. Inilah bagian dari proses demokratisasi politik pengetahuan.

Serial buku kecil ICAS merupakan suatu prakarsa yang bertujuan memberikan sumbangsih kecil dalam upaya demokratisasi politik pengetahuan. Edisi Indonesia ini kami anggap sangat penting dalam serial ini. Buku-buku ICAS—meskipun penyebarannya kami sadari belumlah merata—telah tersedia dalam belasan bahasa, antara lain Inggris, Spanyol, Portugis, Mandarin, Jepang, Thai, Korea, Italia, Rusia, Arab, dan Burma. Tidak semua buku edisi awal bahasa Inggris seri ini diterjemahkan ke tiap bahasa tersebut, karena masing-masing tim penerjemah kolega kami di setiap bahasa memilih sendiri judul-judul yang mereka terjemahkan, dan mereka tidak punya sumberdaya logistik yang memadai untuk menerjemahkan dan menerbitkan semua volume secara bersamaan.

Dengan hadirnya edisi Indonesia serial buku kecil ICAS, kami berharap prakarsa sederhana ini dapat membantu membuka ruang-ruang interaksi dalam politik pengetahuan, khususnya di bidang Kajian Agraria Kritis, dan secara lebih luas dalam kajian pembangunan. Kami berharap edisi Indonesia ini bisa memberikan dorongan tambahan bagi para peneliti dan aktivis di Indonesia untuk terlibat lebih aktif dan berkesinambungan dengan rekan-rekan mereka di mancanegara. Dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks inilah Erasmus University Professor Programme (demi dampak sosial yang positif) dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, melalui sub-program khusus bertajuk "Democratizing Knowledge Politics Initiative" (Prakarsa Demokratisasi Politik Pengetahuan), memberikan dukungan pendanaan sederhana untuk menjadikan edisi Indonesia ini tersedia secara Akses Terbuka (untuk format buku-el). Prakarsa dari universitas ini mendukung pendekatan kerja bergaya cendekiawan-aktivis, yang berupaya membangun ruang-ruang interaksi antara komunitas penghasil dan pengguna pengetahuan—baik dari dalam maupun luar dunia akademik. Perluasan serial buku kecil ICAS ke

dalam bahasa Indonesia merupakan langkah besar dalam proses demokratisasi politik pengetahuan.

Saturnino M. Borras Jr.
Guru Besar Kajian Agraria, International Institute of Social Studies (ISS)
Erasmus Professor, Erasmus University Rotterdam, Belanda
5 Mei 2025

PENGANTAR EDITOR SERI

Aktivisme Cendekiawan dan Perjuangan Agraria adalah buku kesebelas dalam *Agrarian Change and Peasant Studies Series*—atau buku keenam dalam edisi Indonesia, Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria—yang dikelola oleh Initiative in Critical Agarian Studies (ICAS, Inisiatif Kajian Agraria Kritis).

Semua buku dalam seri ini menegaskan kembali relevansi strategis dan signifikansi penerapan analisis ekonomi-politik agraria dalam kajian agraria kritis di masa kini. Semuanya juga memberi isyarat bahwa buku-buku berikutnya dalam seri ini akan terus menjaga keketatan ilmiah sekaligus relevansi politiknya.

Uraian singkat tentang seri ini akan membantu menempatkan buku karya Borras dan Franco ini dalam perspektif yang selaras dengan proyek intelektual dan politik ICAS.

Hari ini, kemiskinan global masih menjadi fenomena khas pedesaan: hampir tiga perempat penduduk miskin dunia tinggal di pedesaan. Masalah kemiskinan global, beserta tantangan multidimensinya (ekonomi, politik, social, budaya, gender, lingkungan hidup, dsb.) yang mesti diakhiri, sangat erat kaitannya dengan dua hal: perlawanan kaum pekerja pedesaan terhadap sistem yang terus memproduksi sekaligus mereproduksi kondisi kemiskinan pedasaan itu sendiri, dan perjuangan mereka untuk mewujudkan penghidupan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan pedesaan menjadi fokus penting dalam pemikiran pembangunan. Namun, perhatian pada pedesaan ini bukan berarti memisahkan diri dari masalah perkotaan. Tantangannya justru terletak pada bagaimana memahami keterkaitan antara keduanya secara lebih baik. Sebab, jalan keluar dari kemiskinan pedesaan, yang didorong oleh kebijakan neoliberal serta program "perang melawan kemiskinan global"

yang dipimpin lembaga keuangan dan pembangunan internasional arus utama, sering kali hanya mengeser kemiskinan pedesaan menjadi bentuk baru kemiskinan perkotaan.

Di ranah akademis, pendekatan arus utama dalam kajian agraria mendapat pendanaan besar, sehingga mampu mendominasi produksi pengetahuan dan publikasi seputar isu agraria. Banyak lembaga yang mempromosikan pemikiran ini (seperti Bank Dunia) berhasil menguasai keterampilan dalam menghasilkan dan menyebarluaskan publikasi yang mudah diakses, berorientasi kebijakan, dan disebarluaskan secara masif ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemikir kritis di lembaga akademik terkemuka sesungguhnya punya kemampuan untuk menantang pendekatan arus utama tersebut, tetapi peredaran karya mereka terkungkung di kalangan akademia, dengan jangkauan ke khalayak dan dampak yang terbatas.

Masih terdapat kesenjangan besar dalam pemenuhan kebutuhan para akademisi (pengajar, peneliti, dan mahasiswa), aktivis gerakan sosial, dan praktisi pembangunan—baik di Selatan maupun Utara Global—akan buku-buku kajian agraria kritis yang ketat secara ilmiah tetapi tetap mudah diakses, relevan secara politik, berorientasi pada kebijakan, dan harga terjangkau. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ICAS meluncurkan seri buku kecil ini. Tujuannya adalah menghadirkan buku-buku ringkas tapi "mutakhir", yang membahas isu-isu pembangunan tertentu melalui serangakain pertanyaan kunci: Apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik? Siapa saja pemikir dan praktisi kebijakan yang relevan? Bagaimana posisi-posisi tersebut berkembang dari waktu ke waktu? Ke mana arah kemungkinan perubahannya di masa depan? Apa sumber-sumber utama yang bisa dirujuk? Mengapa dan seberapa pentingnya para pegiat organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis gerakan sosial, lembaga bantuan pembangunan resmi, lembaga donor nonpemerintah, mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pakar kebijakan untuk terlibat secara kritis dengan poin-poin penting yang dijelaskan dalam buku-buku seri ini? Setiap buku dirancang un-

tuk menjembatani teori dan praktik: memadukan diskusi politik yang berakar pada kerangka teoretis dengan contoh-contoh empiris dari berbagai latar nasional dan lokal.

Kami bercita-cita, dan terus mengupayakan, agar sebagian besar buku dalam seri ini dapat tersedia dalam berbagai bahasa selain bahasa Inggris, antara lain: Mandarin, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thailand, Jepang, Korea, Italia, Rusia, Turki, dan Arab. Edisi mandarin diterbitkan melalui kerjasama dengan Fakultas Humaniora dan Pembangunan, Universitas Pertanian Tiongkok di Beijing, yang dikoordinasikan oleh Ye Jingzhong; edisi bahasa Spanyol diterbitkan melalui kerjasama dengan dua pihak: program doktoral Kajian Pembangunan di Universidad Autónoma de Zacatecas, Meksiko, yang dikoordinasikan oleh Raúl Delgado-Wise, dan dengan Fundación Tierra di Bolivia yang dikoordinasikan oleh oleh Gonzalo Colque; edisi bahasa Portugis dengan dua lembaga di Brasil: Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente (UNESP), dengan koordinator Mançano Fernandes, dan Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dengan koordinator Sergio Schneider; edisi Indonesia diterbitkan bersama INSISTPress, dengan koordinator Laksmi A. Savitri; edisi Thailand dengan RCSD Universitas Chiang Mai, dikoordinasikan oleh Chayan Vaddhanaputi; edisi Italia dikoordinasikan oleh Alessandra Corrado di Universitas Calabria; edisi Jepang dikoordinasikan oleh Shuji Hisano dari Universitas Kyoto, Koichi Ikegami dari Universitas Kindai, dan Sayaka-Funada-Classen; edisi Korea melalui kerjasama dengan Research Institute of Agriculture and Peasant Policy, dikoordinasikan oleh Wonkyu Song; edisi Rusia bersama Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), dikoordinasikan oleh Alexander Nikulin; edisi Turki dikoordinasikan oleh Umut Kocagöz dan Duygu Avci; dan edisi Arab dikoordinasikan oleh Hamza Hamouchene dari Transnational Institute.

Sejalan dengan tujuan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria, mudah dipahami mengapa kami begitu gembira dapat menghadirkan karya Borras dan Franco ini sebagai salah satu buku dalam seri ini. Se-

belas buku pertama (dalam bahasa Inggris)—atau tujuh buku pertama dalam edisi Indonesia—ini saling melengkapi, baik dalam hal tema, keterjangkauan, relevansi politik, maupun keketatan kaidah ilmiah. Kami pun menantikan dengan antusias kelanjutan seri penting ini di masa datang.

Buku ke-11 ini diterbitkan melalui kemitraan dan kolaborasi dengan Transnational Institute.

Saturnino M. Borras Jr., Sergio Coronado, Ruth Hall,
Max Spoor, Henry Veltmeyer, & Ye Jingzhong

PENGANTAR TRANSNATIONAL INSTITUTE

Kita sedang hidup di tengah momen kritis perjuangan keadilan global. Dampak krisis iklim yang kian mendalam mulai tampak jelas bagi semua orang. Ketimpangan kian merajalela dan terus memburuk. Represi dan pengawasan oleh negara terus meningkat. Berbagai "solusi" yang ditawarkan untuk mengatasi krisis iklim—mulai dari pasar karbon hingga bahan bakar nabati (BBN)—justru memperparah situasi. Sebab, "solusi-solusi" ini sepenuhnya bertumpu pada praktik perampasan tanah, ekstraktivisme, dan penciptaan wilayah pengorbanan baru dan rakyat yang mudah-ditumbalkan di seluruh dunia—semua ini pada akhirnya hanya akan memperdalam ketimpangan dan memperkaya segelintir orang. Gerakan sosial berjuang keras tidak hanya untuk menghadang terjadinya kemungkinan terburuk, tapi juga untuk membangun dunia yang lebih adil, merumuskan kembali hubungan kita dengan alam dan satu sama lain, juga melawan dan mengulung ketamakan serta penghancuran akibat akumulasi kapitalis. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi sungguh luar biasa. Karena itu, kebutuhan untuk analisis yang mendalam, berani, dan berakar pada realitas hidup orang banyak makin mendesak, terutama saat gerakan-gerakan ini harus menghadapi realitas baru yang berubah begitu cepat.

Di saat yang sama, hubungan antara pengetahuan, kebenaran, dan keadilan hari ini sarat dengan ketegangan . Berbagai perjuangan penting dalam proses penciptaan pengatahuan telah mempertanyakan kembali peran, struktur, dan kepentingan lembaga-lembaga akademik; peran produksi pengetahuan dalam mengabsahkan dan melanggengkan kuasa sosial dan ekonomi telah tersingkap dan banyak dikritik; beragam kritik dari perspektif dekolonial, feminis, dan masyarakat adat telah meng-

gugat klaim-klaim abstraksi dan kepastian; pengumpulan dan penggunaan data serta informasi pun menjadi medan perjuangan yang krusial. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan mendesak untuk menyingkap dan memulihkan potensi emansipatoris dari pengetahuan, juga kekuatan transformatif (daya ubah) dari penelitian dan pemikiran yang berakar pada keberagaman realitas sosial dan komitmen tegas pada keadilan.

Buku ini memberikan sumbangsih vital dan tepat-waktu bagi perjuangan-perjuangan tersebut. Kedua penulis buku ini telah lama terlibat dalam kerja-kerja panjang dengan dan untuk gerakan keadilan agraria serta lingkungan. Dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang lahir dari keterlibatan itu, kedua penulis mengulas secara mendalam peran cendekiawan-aktivis; sumbangsih kritikal yang dapat mereka berikan bagi gerakan; dan juga ketegangan, risiko, tantangan, serta jebakan yang menyertai kerja mereka. Buku ini menaruh perhatian khusus pada perjuangan atas tanah, dengan mengakui betapa penting dan mendesaknya gerakan ini dalam konteks krisis iklim saat ini, dan juga pada peluang yang ditawarkan gerakan ini untuk menyatukan berbagai kelompok rakyat pekerja dari beragam latar. Tidak hanya menawarkan eksplorasi teoretis yang kaya tentang peran dan pentingnya cendekiawan-aktivis dalam perjuangan keadilan agraria dan iklim, buku ini juga menjadi panduan bagi siapa saja yang percaya bahwa pengetahuan semestinya ditujukan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, dan bagi mereka yang berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup selaras dengan komitmen tersebut.

Secara kolektif, kami (para penulis pengantar ini) memiliki pengalaman selama puluhan tahun dalam menapaki batas-batas yang canggung namun subur antara aktivisme dan produksi pengetahuan, juga dalam mempertemukan cendekiawan-aktivis dengan gerakan sosial untuk membangun argumentasi, usulan, pengetahuan bersama demi dunia yang lebih baik. Kami bekerja bersama cendekiawan-aktivis muda dan calon cendekaiwan-aktivis, juga dengan berbagai gerakan yang ter-

libat dalam perjuangan akar rumput di berbagai penjuru dunia. Dengan pengalaman inilah kami dapat menyatakan dengan yakin bahwa buku ini akan menjadi panduan yang sangat berharga bagi cendekiawan-aktivis, baik yang berbasis di lembaga akademik, terlibat langsung dalam gerakan, maupun bekerja di lembaga penelitian independen berbasis aktivisme seperti Transnational Institute, tempat kami bernaung.

Kami beruntung dapat bekerja bersama Jenny dan Jun, dan menyaksikan langsung bagaimana ide serta pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini tumbuh dan berkembang. Jun sudah lama menjadi kolega di Transnational Institute. Sementara Jenny telah menjadi bagian dari tim Keadilan Agraria dan Lingkungan serta tim Myanmar di Transnational Institute selama lebih dari sepuluh tahun, dan memainkan peran kunci dalam membentuk arah kerja kedua tim tersebut. Mereka pun membawa pengetahuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dari berbagai perjuangan keadilan sosial yang telah mereka saksikan dan gumuli secara langsung. Melalui pengalaman panjang cendekiawan-aktivisme itu, keduanya telah membantu lebih dari 35 tahun dalam menjelajahi hubungan rumit dengan gerakan agraria dan kedaulatan pangan di seluruh dunia, dan juga membangun hubungan dengan akademisi progresif melalui inisiatif-inisiatif seperti Emancipatory Rural Politics Initiative, Land Deal Politics Initiative, dan ICAS—yang semuanya telah mengintegrasikan Transnational Institute dalam jaringan cendekiawan-aktivis lebih luas.

Kami sungguh berterima kasih kepada Jun dan Jenny atas buku yang mereka tulis ini. Buku ini meyuguhkan uraian yang penuh empati tapi tanpa kompromi terhadap berbagai ketegangan, tantangan, dan masalah yang harus dihadapi cendekiawan-aktivis—catatan yang pantas menjadi bacaan wajib bagi generasi cendekiawan-aktivis di masa datang. Di saat yang sama, buku ini membawa harapan: bahwa menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut bukanlah tugas individual, melainkan kerja kolektif, dan mengundang kita semua untuk turut ambil bagian—

mendorong gerobak bersama—dalam meneruskan perjuangan membangun dunia yang lebih adil dan layak huni.

Pietje Vervest, Hamza Hamouchene, & Katie Sandwell
January 2023

PRAKATA PENULIS

Buku kecil ini lahir dari kerja koloboratif yang telah kami jalani selama lebih dari tiga dasawarsa, dalam konteks perjuangan politik untuk keadilan agraria. Kami mulai berkolaborasi pada 1992 di Filipina. Saat itu Jenny adalah penerima beasiswa Fulbright yang sedang melakukan penelitian lapangan untuk kajian doktoralnya, sementara Jun merupakan aktivis purnawaktu di Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP, Gerakan Tani Filipina). Sejak itu, lingkup kerja kami meluas ke beberapa negara lain—terutama, dalam kasus Jenny, ke Myanmar. Seiring waktu dan dalam berbagi kesempatan, kami berdua telah bekerja dalam tiga ranah kelembagaan yang menjadi basis politik pengetahuan: lembaga akademik, lembaga penelitian independen nonakademik, dan gerakan agraria. Saat ini, Jenny bekerja di Transnational Institute, sebuah lembaga penelitian independen berbasis aktivisme, sementara Jun bekerja di kampus International Institute of Social Studies (ISS)—keduanya berbasis di Belanda. Namun, kerja-kerja aktivisme masing-masing dari kami telah dimulai jauh sebelum itu. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, Jenny bekerja di Durham, North Carolina dan Boston, Massachusetts, bersama gerakan mahasiswa dan perempuan, juga terlibat dalam kerja solidaritas dengan gerakan kiri non-Amerika Serikat. Sementara Jun telah terlibat dalam gerakan petani radikal di Filipina sejak awal 1980-an, dan kemudian, secara internasional, menjadi bagian dalam proses pembentukan La Vía Campesina pada 1993. Kerja individu maupun kolaboratif kami sebagian besar berfokus pada politik pertanahan dan peran gerakan agraria radikal.

Sejak memulai kolaborasi, kami telah bersepakat untuk menempatkan perjuangan keadilan sosial kelas pekerja pedesaan sebagai kompas politik dan intelektual kami, dan menjadikan cendekiawan-aktivisme

sebagai metode kerja kami. Tidak pernah mudah untuk menjadi—atau berupaya menjadi—cendekiawan-aktivis. Dalam banyak kesempatan, kami kerap diragukan dan diabaikan, dipandang sebelah mata dan dipertanyakan oleh para kamerad maupun kolega—karena dianggap "terlalu akademik" saat bekerja di lingkaran aktivisme, atau "terlalu aktivis" saat berada di ranah akademik. Namun, kami mencoba melihat semua pengalaman itu sebagai momen penguatan diri, karena kami selalu belajar hal-hal baru—meski sering kali lewat cara yang sulit—tentang bagaimana menjadi lebih baik dalam kerja kami, dan bagaimana mendekatkan diri pada aktivisme cendekia yang kami idamkan. Kami merasa bahwa kami belum benar-benar mencapai idealitas itu, tapi kami juga merasa telah menempuh perjalanan cukup jauh untuk menggapainya dan memperoleh cukup banyak wawasan kritis untuk memberanikan diri menulis sintesis awal dari refleksi kami tentang aktivisme cendekia dan perjuangan agraria, dalam bentuk buku kecil ini.

Kami memandang kerja-kerja kami sebagai bagian dari medan lebih luas dan proses panjang dalam kerja intelektual dan aktivisme politik yang berbasis kolektif. Tidak selalu mudah bagi kami untuk mencantumkan nama kami sebagai penulis karya tertentu, karena kami menyadari bahwa gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya lahir dari proses sosial di tengah komunitas-komunitas lebih luas—sering kali tanpa bentuk—yang selama ini kami jadikan tempat untuk menumbuhkan perasaan memiliki dan menjadi bagian di dalamnya. Dalam pengertian ini, gagasan-gagasan dalam buku ini bukan sepenuhnya milik kami, melainkan terbentuk melalui percakapan panjang di berbagai komunitas, sesi-sesi penyusunan strategi dalam gerakan agraria, obrolan santai bersama para kader kunci gerakan di lapangan, maupun pertukaran pemikiran dengan sesama peneliti di lembaga akademik. Kami tidak bisa—dan memang mustahil—menyebutkan secara lengkap siapa saja yang berkontribusi dalam perumusan ide-ide yang kami paparkan di buku ini. Bahkan jika kami mencoba pun, senarai panjang semua orang yang pernah terlibat dalam proses intelektual dan politik kolektif ini akan

memakan terlalu banyak halaman. Karena itu, kami memilih untuk tidak membuat daftar siapa saja yang berkontribusi—karena kami pasti akan gagal memberikan penghargaan yang layak kepada semua pihak. Tapi kami berharap banyak kamerad, kawan seperjuangan, dan sahabat kami akan membaca buku kecil ini, dan mendapati diri mereka sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan berbagai gagasan yang tertuang. Untuk itu, kami sangat berutang budi dan berterima kasih.

Selama tiga dekade terakhir, banyak lembaga dan organisasi yang telah menyediakan dukungan finansial untuk kerja-kerja cendekiawan-aktivis kami, terutama penelitian. Tidak mungkin kami menyebut satu per satu untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka semua. Namun, kami ingin secara khusus berterima kasih kepada dua lembaga yang berperan besar dalam proses lahirnya gagasan buku ini dan mewujudkannya: Kerja-kerja Jenny mendapat dukungan dana dari Transnational Institute, sementara kerja-kerja Jun didukung oleh European Research Council Advanced Grant (Grant No. 834006). Kami juga berterima kasih kepada Transnational Institute yang turut mendanai penerbitan buku ini.

Beberapa bagian dalam buku kecil ini mengacu pada publikasi sebelumnya, baik yang kami tulis secara individu maupun bersama. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ISS, Transnational Institute, serta beberapa jurnal yang menerbitkan artikel-artikel kami: *Globalizations*, *Journal of Agrarian Change*, *Land Use Policy*, dan *Third World Quarterly*.

Akhir kata, kami sangat berterima kasih kepada Sergio Coronado, Jonathan Fox, Ruth Hall, Phil McMichael, Jesse Ribot, Ian Scoones, dan Annie Shattuck atas semua komentar dan saran mereka yang kritis dan sangat berguna terhadap draf awal buku ini. Kami juga berterima kasih kepada Paula Bownas atas kerja penyuntingan naskah yang cemerlang; juga kepada Eva Broer,Veronika Goussatchenko, dan Chaya Raghoenath dari ISS Projects Office atas segala dukungan mereka terhadap kerja-

kerja Jun. Dan yang tak kalah penting, kami mengucapkan terima kasih kepada Jutta Mackwell, Rosanna Denning, dan Chloe Callan-Foster dari Practical Action Publishing yang telah membantu mewujudkan terbitnya buku ini.

Jun & Jenny
Den Haag, Desember 2022

BAB 1

Cendekiawan, Aktivis, & Perjuangan Agraria

PERJUANGAN & KEILMUAN

Aktivisme cendekia adalah suatu cara kerja yang berupaya mengubah masyarakat dengan memadukan karakter terbaik dari tradisi akademik dan aktivisme politik radikal—meskipun hal ini tak lepas dari berbagai kontradiksi dan tantangan. Alih-alih netral secara politis, bentuk keilmuan ini berpihak secara politis dan memiliki asumsi normatifnya sendiri. Kompas intelektual, politik, dan moralnya adalah perjuangan keadilan sosial demi dunia yang lebih adil, setara, dan manusiawi. Keilmuan seperti ini tentu mengandung bias yang berpihak pada kelas serta kelompok sosial yang tereksploitasi dan tertindas. Para ilmuwan sosial yang mendaku diri netral kerap menyamakan netralitas dengan disiplin ilmiah, padahal keduanya tidaklah sebangun. Disiplin ilmu sosial boleh jadi sangat ketat, tapi sulit membayangkannya netral secara politis. Kita memilih untuk mempelajari masalah sosial karena kita menilai masalah itu penting. Cara kita mendefinisikan masalah pun selalu melibatkan nilai-nilai sosial, dan upaya untuk mengatasi masalah itu juga memerlukan penilaian normatif. Metode yang digunakan bisa bersifat netral, tapi pilihan metode yang akan digunakan jelas dipengaruhi oleh cara kita mendefinisikan dan membingkai penelitian—dan pembingkaian itu sendiri bersifat normatif. Pilihan alat analisis kita juga mengandung asumsi tertentu, yang memengaruhi tidak hanya metode yang kita gunakan dan data empiris yang kita kumpulkan, tetapi juga hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang ingin kita temukan. Karena itu, pembingkaian penelitian merupakan suatu tindakan normatif atau tindakan aktivis.[1]

Di buku ini, kami menjabarkan dua bentuk aktivisme cendekia. Yang pertama ialah kerja akademik yang berupaya *tidak hanya* memahami dunia, *tetapi juga sekaligus* mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik, lebih manusiawi, lebih adil, *dan* di mana para cendekiawan-aktivis secara terbuka dan tanpa ragu berpihak pada gerakan sosial dan/atau proyek politik tertentu. Yang kedua ialah kerja aktivis yang bertujuan menjadi lebih efektif dan berbobot, yakni dengan menggunakan analisis yang ketat dan penelitian sistematis di mana perdebatan politik diarahkan pada skala sistem dan masyarakat lebih luas. Pada analisis ketat dan penelitian sistematis ini, teori menjadi bagian tak terpisahkan; sebab, teori menyediakan seperangkat lensa konseptual logis untuk memahami dunia yang sebenarnya, dan juga membantu kita untuk membangun cita-cita normatif tentang perubahan seperti apa yang kita harapkan, siapa yang bakal diuntungkan dan yang dirugikan dalam perubahan itu, serta mengapa dan bagaimana mewujudkannya. Tapi teori juga bisa jadi problematik, jika tidak dibangun melalui analisis mendasar tentang masalah yang diteliti, yang umumnya memerlukan metode historis. Teori (mestinya) menjadi landasan perjuangan politik kita, sementara praksis politik (mestinya) menjadi landasan kerja teoretis kita. Tantangannya ialah bagaimana menggeluti keduanya, baik dalam teori maupun politik praktis, sembari menghindari perangkap dogmatisme dan empirisme. Memperjelas asumsi, titik acuan normatif, dan sikap politik (baik dalam teori maupun praksis politik) akan membantu memperjelas posisi kita terhadap sejumlah masalah mendasar dan penting, yang kemudian membedakan jenis aktivisme cendekia yang kita jalani dan yakini. Sebagai contoh, komitmen dan niat politik para calon cendekiawan-aktivis memang penting, tetapi itu saja tidak cukup untuk menjamin bahwa karya ilmiah mereka akan relevan dan mengandung ketajaman analisis. Bahkan istilah "relevansi" atau "relevansi sosial" pun terasa terlalu longgar—sebuah frasa-yang-mencakup-semua-hal yang justru bisa mengaburkan apa yang kita maksud sebagai keilmuan aktivis atau aktivisme cendekia. Misalnya, melakukan penelitian bersama se-

buah organisasi konservasi internasional besar yang menerapkan konsep "*fortress conservation*" (konservasi benteng) (Brockington 2002) dan didanai perusahaan energi fosil mungkin memiliki relevansi sosialnya tersendiri; tapi relevansi itu tidak sejalan dengan apa yang kita maksud sebagai kerja cendekiawan-aktivis yang bertujuan mengubah dunia menuju keadilan sosial yang lebih besar. Selain itu, seperti yang akan dibahas selanjutnya, perumusan agenda (*agenda-setting*) di kalangan cendekiawan-aktivis dari berbagai jenis dan beragam latar kelembagaan memang sarat perdebatan dan ketegangan. Berbagai dilema dan kontradiksi, ketegangan dan kemungkinan sinergi yang muncul dalam proses penyatuan niat politik, kerja ilmiah, serta berbagai agenda (yang acap saling bertentangan) menjadi salah satu benang merah tematik buku ini.

Di buku ini, kami mengakui, menegaskan, dan merayakan metode kerja cendekiawan-aktivis serta peran penting mereka dalam perjuangan keadilan sosial secara umum dan perjuangan atas tanah secara khusus. Namun, pengakuan ini tidak kami sampaikan dengan nada romantik; kami justru menempatkan kerja cendekiawan-aktivis pada titik pertemuan antara kerja keilmuan dan praksis politik—sebuah titik yang dibentuk oleh dinamika politik yang penuh kontradiksi, ketegangan, dan konflik. Interaksi antara cendekiawan-aktivis, akademisi, dan gerakan sosial amat jarang berlangsung rapi dan bebas-konflik; yang justru lebih sering terjadi ialah interaksi semrawut dalam aliansi kekuatan sosial yang sulit diatur, yang pada akhirnya menghidupkan sirkuit global politik pengetahuan dan perjuangan atas tanah.

Saat ini, berbagai perjuangan emansipatoris untuk keadilan menyasar, dalam berbagai cara, bangunan eksploitasi dan penindasan sosial akibat kapitalisme. Meskipun kapitalisme bukan satu-satunya kekuatan besar yang bekerja, ia tetap menjadi sistem hegemonik utama yang membentuk kehidupan sosial global, termasuk dunia universitas (Burawoy 2014). Perjuangan politik untuk keadilan dan dunia yang lebih baik—dan, karena itu, juga kerja para cendekiawan-aktivis—selalu berlangsung di dalam dan terkait proses-proses kapitalistis. Tak satu pun dari kita bisa

begitu saja melepaskan diri dari kapitalisme atau dari kondisi materiel dan sosial yang diciptakannya. Dalam konteks ini, perjuangan politik kontemporer dapat dipandang sebagai antikapitalis sejauh ia secara sadar berupaya mengikis atau membongkar kapitalisme dan membangun tatanan sosial alternatif.

Pemahaman kami tentang aktivisme cendekia tidaklah dimiliki bersama oleh semua pihak. Bagi sebagian kalangan, aktivisme cendekia tidak harus berarti terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang antikapitalis. Sementara yang lain memandang bahwa samangat dasar aktivisme cendekia bisa saja antikapitalis, tetapi haluannya tidak serta-merta sosialis. Dan bahkan dalam definisi sempit seperti dikemukakan di atas, terdapat banyak variasi dalam hal karakter, skala, maupun arahnya. Namun, pertanyaannya bukanlah seperti apa aktivisme cendekia yang baik, lebih baik, ataupun terbaik, melainkan bagaimana seseorang mendefinisikan upayanya sendiri dalam medan ini. Sebab, teori apa pun, tak peduli tambatan ideologisnya, berisiko kehilangan relevansi—atau bahkan menjadi berbahaya—bagi kelas pekerja atau kelompok yang tereksploitasi dan tertindas, jika teori itu tercerabut dari realitas sosial dan politik praktis, atau bersikap "netral" terhadap masalah-masalah keadilan. Hal yang sama berlaku untuk aktivisme politik. Di tengah dunia yang terus berubah, di mana medan perjuangan dan makna keadilan berubah, setiap bentuk aktivisme politik yang menghindari pijakan normatif dan berjalan tanpa jangkar konseptual juga berisiko tersesat dan bahkan bisa saja menyakiti mereka yang diklaim sedang diperjuangkan.

Kerja cendekiawan-aktivis bukanlah satu-satunya upaya yang mencoba mengubah tradisi keilmuan dan masyarakat; sumbangsih mereka mungkin hanya setetes kecil di tengah komunitas akademia dan aktivis yang lebih luas. Ada banyak pemikir radikal yang menelurkan ide-ide penting bagi perjuangan politik, tapi tidak berkomitmen pada proyek politik tertentu, gerakan tertentu, atau metode dan protokol penelitian tertentu yang secara resmi disepakati oleh gerakan sosial. Ada juga aktivis yang benar-benar disibukkan dengan praksis politik "di garis depan",

yang kerja-kerjanya dipandu oleh teori dan konsep yang tepat. Mereka tersebar di berbagai sektor, dari gerakan lingkungan hingga serikat pekerja. Demikian pula, kerja dan kontribusi para cendekiawan-aktivis memang penting bagi kerja-kerja politik, tapi porsinya tetap saja hanya secuil dari keseluruhan kerja politik itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disebut Deslippe *et al*. (2016: 4) sebagai "pentingnya gesekan, serta pengakuan bahwa kerja akademik dan intelektual bersifat melengkapi—bukan menggantikan—aksi bersama dan kerja membangun gerakan."

Buku ini membahas aktivisme cendekia yang terhubung dengan perjuangan atas tanah—yakni aktivisme cendekia *agraria*. Dua hal yang sangat menentukan dalam hal ini yakni letak spesifik suatu gerakan sosial dalam lanskap produksi serta reproduksi sosial yang lebih luas, dan kaitannya dengan proses pembentukan kelas dalam suatu masyarakat. Kekhasan ini ikut menentukan kawan perjuangan yang dibutuhkan, untuk tujuan apa, dan melalui hubungan seperti apa. Misalnya, hubungan antara cendekiawan-aktivis dan serikat buruh kereta api di New York City, Amerika Serikat akan sangat berbeda dengan hubungan antara mereka dan perjuangan atas tanah di Myanmar. Irama dan lintasan hubungan tersebut kemungkinan besar juga berbeda-beda. Aktivisme cendekia seperti apa yang dibutuhkan, untuk mencapai apa, bersama siapa, dengan harapan dan sumberdaya seperti apa, serta di bawah tekanan seperti apa—jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk arah dan dinamika aliansi yang terbangun. Kami berangkat dari asumsi bahwa persoalan tentang sekutu dari luar (eksternal)—terutama sekutu intelektual—merupakan isu yang amat rumit dalam konteks perjuangan agraria, khususnya di Selatan Global. Inilah salah satu tema yang dibeberkan di buku ini.

Di buku ini, frasa "perjuangan agraria", dan lebih khusus "perjuangan atas tanah", merujuk pada pertarungan politik di dalam negara dan masyarakat dan di antara keduanya, di dan terkait pedesaan; pertarungan ini menyangkut bagaimana kekuasaan politik dibentuk, diperebutkan,

dan diubah dalam kaitannya dengan relasi kepemilikan, rezim tenaga kerja, distribusi pendapatan, pengerukan keuntungan, dan reproduksi sosial. Saat ini, seluruh proses sosial tersebut, secara tidak merata, terkait dengan dan digerakkan oleh kapitalisme global. Dengan demikian, komunitas agraria dan pedesaan dimaknai sebagai kelompok yang secara sosial terpilah, tidak hanya berdasarkan kelas, tetapi juga seturut poros perbedaan lain seperti ras, etnisitas, kasta, gender, generasi, agama, dan kebangsaan. Dalam medan yang penuh batasan dan perbedaan ini—di mana gerakan sosial dan aktivisme cendekia sama-sama berupaya mendorong perubahan—menjadi penting untuk memperjelas posisi kerja cendekiawan-aktivis dalam hubungannya dengan gerakan. Di tengah keberagaman aktor yang terpilah-pilah dalam gerakan, siapa sebenarnya cendekiawan-aktivis yang turun langsung di garis depan perjuangan? Jawabannya tidaklah sederhana. Dalam beberapa tradisi intelektual, pertanyaan itu sendiri masih diperdebatkan. Mengelompokkan aktor dan menetapkan batas di dalam gerakan selalu merupakan perkara rumit dan penuh jebakan; pada dasarnya, ini adalah soal siapa yang dianggap "di dalam" gerakan, siapa yang "di luar", dan siapa yang berkuasa memutuskannya. Padahal, gerakan itu sendiri pada dasarnya sangatlah dinamis dan tanpa bentuk ; batas-batasnya, serta identitas yang menjadi penopangnya, bisa lebih atau kurang lentur, mudah ditembus, gampang diubah, setidaknya secara politis. Justru kelenturan dan keterbukaan inilah yang mungkin turut membuat gerakan mampu bertahan lama, beradaptasi, dan tetap relevan. Karena itu, meski ada yang menganggap bahwa cendekiawan-aktivis ialah orang "dalam" gerakan, tidak sedikit pula yang tidak melihatnya demikian.

Gramsci mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: "Apakah kaum intelektual merupakan kelompok sosial yang otonom dan independen, ataukah setiap kelompok sosial memiliki kategori intelektualnya tersendiri?" (1971: 3). Sebelum menjawabnya, Gramsci menekankan bahwa "masalahnya cukup rumit, karena dalam sejarahnya, proses pembentukan pelbagai jenis intelektual telah mengambil banyak

bentuk yang begitu beragam" (1971: 3). Baginya, gagasan bahwa kaum intelektual merupakan "kategori sosial tersendiri dan tidak bergantung pada kelas ialah mitos belaka" (1971: 1). Titik tolak gagasanya ialah bahwa "semua orang bisa menjadi intelektual, dalam arti memiliki dan menggunakan kecerdasannya, tapi tidak semua orang adalah intelektual berdasarkan fungsi sosialnya. Dalam pengertian fungsional ini, kaum intelektual terbagi menjadi dua kelompok," yakni:

> Yang pertama ialah para intelektual profesional "tradisional"—seperti sastrawan, ilmuwan, dsb.—yang posisinya berada di sela-sela masyarakat dan tampak seolah-olah melintasi batas kelas. Namun, sebenarnya, posisi ini berakar pada hubungan kelas, baik yang berlangsung di masa lalu maupun masa kini, dan menyimpan keterikatan dengan berbagai formasi kelas dalam sejarah. Yang kedua ialah kaum "intelektual organik", yakni mereka yang menjadi elemen pemikir dan pengorganisir dalam suatu kelas sosial fundamental. Yang membedakan intelektual organik ini bukanlah profesinya, karena mereka bisa saja bekerja di bidang apa pun yang lazim di kelas sosialnya, melainkan peran mereka dalam merumuskan gagasan dan cita-cita kelas tempat mereka secara organik menjadi bagian di dalamnya. (Gramsci 1971: 1)

Yang menjadi perhatian khusus kami di sini ialah catatan Gramsci mengenai kepetanian, bahwa kaum tani, meski memegang peran penting dalam proses produksi,

> tidak melahirkan intelektual organiknya sendiri, dan juga tidak menarik, memengaruhi, atau menyerap lapisan intelektual "tradisional" mana pun [ke dalam perjuangan kelas petani]. Padahal, banyak kelompok sosial lain menuai intelektual mereka dari kaum tani, dan sebagian besar intelektual tradisional juga berasal dari kaum tani. (Gramsci 1971: 6)

Di sini Gramsci berasumsi bahwa ketika seseorang dari latar belakang tani menjadi "intelektual" (misalnya menjadi pengacara), dia tidak lagi memeliki keterikatan organik dengan kelas asalnya (1971: 6, catatan kaki 4). Pandangan ini cukup kontroversial dan tentu terbuka untuk diperdebatkan.

Barangkali titik awal yang baik untuk memulai percakapan terkini mengenai topik ini ialah analisis Jess Gillbert (2015) tentang "intelektual agraria" di era New Deal 1930-an di Amerika Serikat. Hal ini relevan, antara lain karena gagasan New Deal belakangan "kembali ditemukan" dan dibayangkan lagi dalam konteks dunia pascapandemi yang juga bergulat dengan krisis iklim (Patel and Goodman 2020; Ajl 2021; Selwyn 2021). Gilbert berpendapat bahwa "para pemikir agraria terkemuka di USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat) adalah 'intelektual organik' dari kelas petani-keluarga di wilayah barat-tengah (Midwestern). Intelektual organik adalah mereka yang mengidentifikasi diri dengan kelas asalnya dan bekerja untuk kelas tersebut" (Gilbert 2015: 8). "Mereka menciptakan dan memopulerkan cara pandang alternatif atas realitas—sebuah narasi tandingan yang menantang dominasi masyarakat arus utama," lanjutnya. Gilbert menyimpulkan: "Para intelektual agraria di era New Deal berasal dari dan tidak pernah melupakan—bahkan mereka memang bekerja demi—kepentingan masyarakat tani tersebut" (2015: 8). Jika Gilbert menganggap para intelektual agraria era New Deal mencukupi prasyarat sebagai "intelektual organik", maka barisan intelektual La Vía Campesina juga termasuk dalam kategori itu, begitu pula petani kulit hitam di seluruh wilayah Amerika Serikat, baik di masa lalu maupun masa kini, yang oleh Monica White disebut sebagai "intelektual organik dari kelasnya sendiri" (White 2018: 69–71). Bagaimana hal ini terhubung dengan gagasan Gramsci soal intelektual organik dan kaum tani menjadi salah satu topik yang juga dibahas di buku ini.

Seperti yang tersirat di atas, gerakan agraria merupakan komunitas yang terpilah-pilah dan bersifat hierarkis. Secara umum, gerakan

ini mencakup beberapa kategori yang berbeda tapi saling bertumpang tindih: "kader", yakni segelitintir elite pucuk pimpinan gerakan; "militan", yakni para penggerak dan pemimpin tingkat menengah yang lebih banyak; "anggota biasa", yakni mereka yang secara formal terdaftar dalam organisasi yang terhubung dengan gerakan; dan "basis", yakni komunitas-rakyat tanpa bentuk yang, pada derajat tertentu, dipengaruhi oleh gerakan. Kategori-kategori ini turut memperjelas pemilahan (diferensiasi) antara intelektual tradisional dan organik dalam tradisi Gramscian. Penting untuk menyadari bahwa dalam gerakan keadilan sosial, hierarki kekuasaan seperti ini lazim ditemukan. Kesadaran ini membantu kita menghindari anggapan bahwa gerakan selalu bersifat seragam dan utuh di setiap tempat dan waktu; ini juga memungkinkan kita untuk menelusuri asal-usul dan representasi dari pelbagai gagasan yang muncul dari dalam gerakan, atau dari bagian-bagian tertentu dalam gerakan. Misalnya, sebuah gagasan yang diklaim seorang kader mewakili suara gerakan belum tentu diakui demikian oleh sebagian anggota biasa gerakan. Penting untuk mengenali adanya hierarki dan jalinan relasi kuasa yang belangsung di dalam gerakan maupun antargerakan, juga untuk memahami di mana posisi para intelektual gerakan dan peran apa yang mereka mainkan. Hal ini relevan dalam pembahasan tentang hubungan cendekiawan-aktivis dan gerakan yang menjadi benang merah buku ini, karena sangat penting untuk menemu-kenali dengan kelompok mana dalam sebuah gerakan para cendekiawan dari luar menjalin keterlibatan, dan sejauh mana mereka terlibat. Pengategorisasian kasar atas pengelompokkan hierarkis dalam sebuah gerakan ini bukanlah hasil kajian teoretis semata, melainkan berangkat dari pengalaman panjang kami bekerja langsung bersama gerakan agraria.

Bentuk-bentuk pertarungan politik yang terorganisir, terstruktur, dan terbuka memang mudah terlihat, tapi sesungguhnya tidak terlalu umum. Orang-orang biasa dari kalangan kelas pekerja pedesaan tidak serta-merta terlibat dalam politik pertarungan yang terbuka dan terorganisir atau dalam gerakan sosial. Simpulan ini muncul dari berbagai

pendekatan teoretis yang saling berseberangan, mulai dari "moral ekonomi" dari James Scott (1976, 1985; lihat juga Kerkvliet 2009) hingga "petani rasional" ala Popkin (1979). Kepustakaan tentang aktivisme cendekia yang bekalangan berkembang banyak membahas hubungan antara peneliti-aktivis dan gerakan sosial. Ini tentu penting. Tapi hal ini juga memunculkan pertanyaan lanjutan: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan aktivisme cendekia? Dan apa peran yang bisa mereka mainkan dalam konteks atau situasi ketika tidak ada pertarungan politik yang berkelanjutan atau ketika gerakan keadilan sosial yang terorganisir tidak hadir? Justru dalam situasi beginilah—ketika tidak ada gerakan yang terorganisir atau pertarungan politik yang terbuka—kerja cendekiawan-aktivis lebih mendesak dan dibutuhkan. Ada satu asumsi penting dalam kajian politik agraria dan gerakan agraria: perseteruan politik terbuka maupun gerakan agraria itu sendiri pada hakikatnya sangatlah beragam, menunjukkan karakteristik berbeda-beda dan mengikuti jalur perkembangan yang berlainan di tiap masyarakat dari waktu ke waktu. Misalnya, kondisi umum gerakan agraria nasional yang otonom dan terlibat dalam politik perlawanan terbuka saat ini terlihat cukup solid dan berkembang di Kolombia, sementara di Myanmar masih terlalu dini, dan di Ethiopia sama sekali absen. Karena itu, komitmen utama yang dipegang aktivisme cendekia sebaiknya tidak hanya dibicarakan dalam kaitannya dengan gerakan agraria yang sudah terorganisir, tetapi juga dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk politik agraria yang tidak berbasis gerakan, di mana tugas cendekiawan-aktivis bisa berupa membuka jalan bagi terbentuknya gerakan. Poin ini amat penting, terutama karena buku ini melihat bahwa salah satu ciri utama aktivisme cendekia adalah sifatnya yang relasional: jika kita membatasi keberadaannya hanya pada konteks gerakan yang sudah terorganisir, maka kita meniadakan peran aktivisme cendekia di tempat-tempat yang justru paling membutuhkannya.

Cendekiawan-aktivis bisa saja berkecimpung di lembaga akademik, di lembaga penelitian otonom, atau di organisasi gerakan agraria—dan

sebagian dari mereka bahkan melintasi batas-batas kelembagaan ini. Dalam praktiknya, ada irisan yang nyata maupun potensial antara aktivis gerakan dan cendekiawan-aktivis. Di sini, aktivis gerakan agraria (baik kader, militan, anggota, maupun basis) dibedakan dengan cendekiawan-aktivis yang terlibat dalam perjuangan agraria, meski ada cendekiawan-aktivis yang menganggap dirinya bagian dari kader, militan, atau anggota gerakan. Dengan kata lain: tidak semua kader, militan, atau anggota gerakan agraria merupakan cendekiawan-aktivis; sebaliknya, cendekiawan-aktivis tidak harus menjadi kader, militan, atau anggota gerakan agraria, sekalipun mereka membaktikan diri pada perjuangan gerakan tersebut.

Hal ini kemudian mengangkat isu tentang "sekutu eksternal", atau singkatnya "sekutu", yang—dengan berbagai alasan yang akan dibahas lebih lanjut di berbagai bagian buku ini—menjadi kategori aktor sosial yang telah lama hadir dan terus diperdebatkan dalam kaitannya dengan gerakan agraria. Pertanyaan tentang siapa saja yang bisa dianggap sekutu penting diangkat di sini karena, setidaknya dari perspektif gerakan agraria, cendekiawan-aktivis umumnya dipandang sebagai bagian dari kategori sekutu lebih luas. Kategori luas ini bisa mencakup kelompok kelembagaan atau sosial mana pun (seperti partai politik kiri dan gerakan keadilan sosial lintas-sektor), juga individu-individu (termasuk tokoh agama seperti pastor dan biksu, guru di kota-kota kecil, bloger dan vloger, seniman dan pembuat film, dan masih banyak lagi). Dengan demikian, misalnya, Transnational Institute dapat disebut sebagai sekutu bagi La Vía Campesina—gerakan internasional yang didirikan pada 1993 dan utamanya beranggotakan kaum tani tak bertanah serta petani kecil dan menengah baik di Selatan maupun Utara Global—sebagaimana pelukis aktivis Filipina Boy Dominguez juga merupakan sekutu bagi berbagai gerakan agraria di dalam dan luar Filipina (Iles 2022). Cendekiawan-aktivis merupakan bagian kecil dari kategori sekutu ini. Isu tentang siapa para sekutu itu dan apa yang mereka lakukan menjadi penting, baik dalam kajian agraria maupun perjuangan agraria. Jika kita menganggap

para cendekiawan-aktivis sebagai bagian dari apa yang umumnya dianggap sebagai sekutu, maka menjadi relevan untuk meninjau kembali sejarah panjang yang penuh perdebatan seputar hubungan antara sekutu dan perjuangan agraria; hal ini dibahas di bagian berikutnya.

Lebih luas lagi, dinamika sosial dalam suatu masyarakat umumnya tak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di sektor agrarianya, begitu pula sebaliknya. Misalnya, meski sorotan media kerap mengarah pada perdebatan antara individu dan kelompok ternama di pusat-pusat kota besar, pergantian rezim politik nasional sering kali justru ditentukan oleh dinamika yang berlangsung di desa (Fox 1990; lihat Franco 2001; Coronado 2019). Hal ini bahkan terbukti relevan di negara-negara modern dan maju seperti Amerika Serikat, sebagaimana terlihat dari hasil pemilu presiden 2016, ketika konstituen pedesaan, pinggiran kota, dan kota-kota kecil menjadi basis kuat dukungan bagi Donald Trump (Scoones *et al*. 2018). Contoh lainnya yakni kenyataan bahwa gagasan dan inisiatif praktis untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dalam berbagai cara, berkaitan erat dengan dunia pedesaan, sumberdaya apa yang dapat dikeruk dari sana, dan limbah apa yang dapat dibuang ke sana (Borras *et al*. 2022a). Demikian pula, persoalan tentang bagaimana memberi makan dunia dan bagaimana mengatasi kelaparan kronis yang dialami semiliar orang juga menjadi tantangan yang dibebankan kepada sektor agraria. Secara historis, perkembangan kapitalisme yang tidak merata sebagian besarnya bertumpu pada seberapa banyak sumbangsih yang bisa diperas dari sektor pertanian dan pedesaan, termasuk tanah dan tenaga kerja (Wuyts 1994; Kay 2009). Karena itu, perjuangan agraria pun menjadi salah satu pilar strategis dalam perjuangan politik di dalam kapitalisme maupun untuk melawannya, dan gagasan tentang "keadilan agraria" menjadi komponen kunci dari konsep lebih luas "keadilan sosial". Keadilan agraria, dalam kajian agraria kritis, secara longgar dimaknai sebagai suatu titik acuan normatif yang bersifat aspiratif—yakni menuntut adanya kesadaran akan perlakuan tidak adil yang selama ini dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang secara historis di-

eksploitasi dan ditindas. Ketakadilan ini mengakar dalam relasi kelas yang saling terkait dan saling membentuk dengan identitas-identitas seperti ras, etnisitas, gender, kasta, generasi, dan kebangsaan.

***

Di buku ini, yang kami maksud sebagai cendekiawan-aktivis ialah mereka yang terlibat dalam perjuangan agraria dan berkomitmen pada gerakan agraria. Artinya, ini merujuk pada kelompok yang sangat kecil dari kalangan pemikir akademisi progresif, sebagian kecil dari aktivis radikal, dan bagian lebih kecil lagi dari kategori cendekiawan-aktivis secara umum. Namun demikian, meski jumlah mereka terbilang kecil, dampak langsung maupun tidak langsung dari kerja-kerja mereka bisa jadi penting dan meluas. Ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi arti penting kerja cendekiawan-aktivis meningkat tajam di masa kini—zaman yang ditandai oleh krisis lingkungan dan iklim (Foster 1999; Moore 2017), bangkitnya populisme regresif (Scoones *et al*. 2018), serta bercokolnya sistem pangan global yang gagal memberi makan semiliar orang yang kelaparan sambil "salah memberi makan" semiliar lainnya yang menderita penyakit akibat buruknya pola makan. Di saat yang sama, sekitar seperlima populasi pekerja dunia hidup dalam kondisi kerja rentan dan tak menentu (Weis 2010). Faktor-faktor inilah, antara lain, yang telah memicu "pertempuran" demi masa depan pertanian skala kecil (Patel 2007; Weis 2007; Schneider and Niederle 2012; untuk perspektif yang secara khusus menyorotai dimensi generasi, lihat Rigg *et al*. 2020; White 2020 [2026]). Karena itulah, memahami bagaimana watak aktivisme cendekia berkembang di masa kini, serta tantangan apa saja yang dihadapinya dalam konteks perjuangan atas tanah, tidak hanya penting, tapi juga mendesak.

Narasi keseluruhan di buku ini ialah sebagai berikut. Terlepas dari laju urbanisasi, separuh dari delapan miliar penduduk dunia saat ini masih hidup dan bekerja di wilayah pedesaan. Separuh ranah pedesaan ini layak mendapat perhatian tersendiri. Di negara-negara maju seperti Ame-

rika Serikat dan Prancis, meski penduduk desanya terhitung minoritas, mereka tetap penting untuk dipahami—setidaknya untuk menjelaskan pergeseran besar mereka ke haluan politik sayap kanan, seperti terlihat dalam dukungan untuk Donald Trump di Amerika Serikat atau untuk Marine Le Pen di Prancis. Pergeseran ini berdampak luas terhadap arah politik nasional. Lebih jauh lagi, dunia pedesaan memegang peran kunci untuk memahami akar masalah, kondisi, dan dampak dari proses urbanisasi itu sendiri. Di tengah berbagai tantangan yang menandai era kontemporer tersebut, menelaah peran dunia pedesaan dalam proses transisi menuju masa depan yang lebih baik menjadi sangat penting. Namun, seperti apa sebenarnya "transisi berkeadilan" dan "masa depan lebih baik" bila dilihat dari sudut pandang pedesaan? Jawabannya tidaklah sederhana, bahkan menjadi medan tarik-menarik politik—termasuk di kalangan akademisi dan aktivis progresif. Bagaimana narasi dan narasi-tandingan dibingkai, oleh siapa, dan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang seperti apa, semua ini perlu dipertimbangkan. Dalam konteks inilah peran cendekiawan-aktivis yang terlibat dan berkomitmen dalam perjuangan agraria menemui relevansinya. Namun, peran tersebut pun tidak bisa dipandang sederhana, sekalipun kerap diasumsikan atau dirayakan secara berlebihan seolah-olah sudah pasti membawa dampak positif.

Buku ini tanpa tedeng aling-aling merangkul sebagian dari kecenderungan tersebut. Buku ini merayakan sumbangsih dan pencapaian aktivisme cendekia masa kini dalam perjuangan atas tanah dan dunia keilmuan—sumbangsih yang mungkin tampak kecil, tapi sebenarnya cukup penting. Buku ini menegaskan arti penting aktivisme cendekia; tetapi bukan itu tujuan utamanya. Lebih dari sekadar perayaan dan pengakuan, buku ini pada hakikatnya bertujuan menggali berbagai kontradiksi dan tantangan yang dihadapi aktivisme cendekia. Karena itu, buku ini tidak sedang mengagung-agungkan capaian aktivisme cendekia, dan juga bukan kumpulan resep tentang bagaimana cara "melakukan" aktivisme cendekia yang ideal. Buku ini justru membahas sejumlah persoalan

kontroversial, yang umumnya jarang dibahas secara terbuka, atau hanya disinggung secara canggung ketika memang tak bisa dihindari untuk dibahas. Buku ini merupakan undangan untuk membuka percakapan mengenai topik-topik tersebut, sebuah percakapan yang bertujuan mencari cara memanfaatkan sinergi potensial sekaligus menghadapi—alih alih memunggungi—persoalan sensitif dan rumit. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai tandingan terhadap kepustakaan yang sudah ada, yang mendukung dan menunjukkan arti penting aktivisme cendekia; sebaliknya, buku ini merupakan sumbangsih pelengkap, sebuah upaya untuk memperdalam dan memperluas diskusi yang sudah bergulir.

AKAR SEJARAH PERDEBATAN TENTANG POLITIK AGRARIA & SEKUTU

Perdebatan masa kini di kalangan aktivis dan akademisi progresif maupun radikal, terutama yang berhaluan antikapitalisme, mengenai politik agraria dan keterkaitannya dengan politik kelas yang lebih luas, serta tentang peran para sekutu, sangat dipengaruhi oleh karya Marx *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1968 [1852]) beserta perdebatan yang dipicunya. Salah satu pokok bahasan dalam analisis Marx adalah dukungan politik dari populasi sangat besar petani skala kecil di Prancis kepada Louis Napoleon Bonaparte, yang pada Desember 1851 melakukan kudeta, membubarkan parlemen nasional, mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum, dan mengangkat dirinya sebagai presiden untuk masa jabatan sepuluh tahun, tanpa batasan periode. Setahun kemudian, dia menganugerahi dirinya dengan gelar Napoleon III, Kaisar Prancis. Marx menulis: "Bonaparte mewakili suatu kelas, dan kelas yang paling banyak jumlahnya dalam masyarakat Prancis saat itu, yaitu *petani skala kecil [Parzellen]* (1968: 170, penekanan sesuai sumber). Bertolak dari pengamatan tersebut, Marx kemudian menguraikan beberapa analisisnya yang paling berpengaruh dan bertahan lama mengenai politik petani skala kecil, analisis yang menjadi titik awal penting bagi percakapan tentang aktivisme cendekia dan perjuangan agraria masa

kini. Menyajikan pokok-pokok pikiran ini menjadi relevan, karena pengaruhnya yang langgeng dalam kerja-kerja aktivisme maupun akademik. Selain itu, penting untuk merujuk secara langsung pada apa yang sebenarnya dikatakan Marx, daripada sekadar mengulang penyederhanaan yang paling sering dikutip dari *The Eighteen Brumaire*, yakni ungkapan tentang "kaum tani seperti sekarung kentang."

Bagi Marx, agar dapat memahami politik, kita perlu memahami posisi orang-orang dalam ruang produksi ekonomi. Dalam kata-katanya:

> Petani kecil membentuk massa yang sangat besar. Para anggotanya hidup dalam kondisi serupa tetapi tanpa menjalin beragam relasi satu sama lain. Cara produksi mereka justru membuat mereka terisolasi satu sama lain, alih-alih membawa mereka ke dalam hubungan timbal balik. (Marx 1968: 170)

Marx menjelaskan bahwa "isolasi ini diperparah oleh buruknya sarana komunikasi di Prancis serta kemiskinan kaum tani," dan bahwa "lahan garapan mereka yang kecil tidak memungkinkan adanya pembagian kerja dalam bertani, tidak memungkinkan penerapan ilmu pengetahuan, dan oleh karenanya tidak menghasilkan keragaman dalam perkembangan, keberagaman bakat, atau kekayaan hubungan sosial" (1968: 170).

Sifat dari ranah produksi, pertukaran, dan reproduksi sosial menjadi inti dari kerangka Marx dalam memahami politik kaum tani: "Setiap keluarga tani nyaris mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri; mereka secara langsung memproduksi sebagian besar kebutuhan konsumsinya sendiri dan dengan demikian memperoleh sarana kehidupannya lebih melalui pertukaran dengan alam ketimbang melalui interaksi dengan masyarakat" (1968: 170). Dia kemudian menguraikan pandangan-pandangannya yang sangat berpengaruh, meski juga kontroversial:

> Sebidang pertanian kecil, seorang petani dan keluarganya; di samping mereka terdapat pula sebidang pertanian kecil lainnya, yang digarap oleh seorang petani lain dan keluarganya. Beberapa puluh di antaranya membentuk sebuah desa, dan beberapa puluh desa membentuk satu wilayah. Dengan cara ini, sebagian besar bangsa Prancis terbentuk hanya melalui pejumlahan sederhana dari unit-unit serupa yang jumlahnya sangat besar, seperti halnya kentang dalam karung membentuk sekarung kentang. Selama jutaan keluarga hidup dalam kondisi ekonomi yang memisahkan cara hidup, kepentingan, dan kebudayaan mereka dari kelas-kelas lainnya, dan menempatkan mereka dalam posisi berseberangan dengan kelas-kelas lain itu, maka mereka membentuk sebuah kelas. Namun, selama keterkaitan di antara para petani pemilik lahan kecil ini hanya bersifat lokal, dan kesamaan kepentingan mereka tidak melahirkan komunitas, tidak membentuk ikatan nasional, serta tidak menghasilkan organisasi politik bersama, maka mereka tidaklah membentuk sebuah kelas. Karena itu mereka tidak mampu memperjuangkan kepentingan kelas atas nama mereka sendiri, baik melalui parlemen maupun konvensi. Mereka tidak bisa mewakili diri sendiri; mereka harus diwakili. Perwakilan mereka harus sekaligus tampil sebagai tuan mereka, sebagai otoritas di atas mereka, sebagai kekuasaan pemerintah tanpa batas yang melindungi mereka dari kelas-kelas lain, dan yang dari atas mengirimkan hujan dan sinar matahari bagi mereka. Maka pengaruh politik petani pemilik lahan kecil, pada akhirnya, menemukan ekspresinya dalam kekuasaan eksekutif yang menundukkan seluruh masyarakat di bawah kendalinya. (Marx 1968: 170–171)

Namun, politik petani dalam konteks ini tidaklah terbatas pada versi konservatif ikonik seperti dijelaskan di atas. Marx menjelaskan lebih lanjut:

> Tapi jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Yang dipresentasikan dinasti Bonaparte bukanlah petani revolusioner, melainkan petani konservatif; bukan petani yang berjuang keluar dari kungkungan kondisi sosialnya—yakni kepemilikan tanah kecil—melainkan petani yang justru ingin mempertahankan kepemilikan tanah kecil itu; bukan rakyat desa yang, bersama kota, ingin menggulingkan tatanan lama dengan kekuatannya sendiri, melainkan mereka yang, terbius oleh tatanan lama ini, membayangkan diri mereka dan bidang-bidang tanah kecil yang mereka miliki itu diselamatkan dan dilindungi oleh hantu kekaisaran. Ia bukanlah perwujudan dari pencerahan kaum tani, melainkan takhayulnya; bukan wujud dari penilaian kaum tani; melainkan prasangkanya; bukan masa depannya; melainkan masa lalunya. (Marx 1968: 171)

Gagasan tentang politik petani yang diilhami *The Eighteenth Brumaire* sangatlah kontroversial sekaligus berpengaruh. Banyak poin penting yang dikemukakan Marx dalam karya itu akan menjadi benang merah dalam pembahasan selanjutnya di buku ini. Setidaknya ada tiga poin yang penting disorot pada titik ini. Pertama, hubungan timbal balik antara ranah produksi ekonomi dan reproduksi sosial di satu sisi, dan politik agraria di sisi lain, merupakan kunci untuk memahami politik agraria secara lebih mendalam. Meski dinamika produksi ekonomi dan reproduksi sosial tidak serta-merta menentukan sifat dan lintasan politik kaum tani, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kepustakaan kajian agraria kritis, akan sangat keliru kalau mencoba memahami politik agraria tanpa mengaitkannya dengan analisis atas dua ranah tersebut. Kedua, persoalan tentang hubungan kelas dan politik kelas menjadi ihwal yang sangat penting. Bagaimana hubungan kelas terbentuk dan bagaimana ia berubah menjadi kekuatan politik—transformasi dari "kelas-di-dalam-dirinya-sendiri" (*class-in-itself*) menjadi "kelas-bagi-dirinya-sendiri" (*class-for-itself*)—merupakan dua proses sosial yang tak terpisahkan, baik secara politis maupun analitis. Ketiga, karena kelas terben-

tuk bersama dengan poros-poros perbedaan sosial lainnya—seperti ras, etnisitas, kasta, gender, generasi, agama, atau kebangsaan—maka pemahaman kita tentang "agensi kelas" dan "kelas-bagi-dirinya-sendiri" mesti didasarkan pada berbagai hubungan yang saling membentuk ini.

Hal ini membawa kita pada sebuah petunjuk analitis penting tentang kelas dan kesadaran kelas yang dikemukakan oleh E.P Thompson, dengan gagasan utamanya bahwa kelas bersifat relasional dan menyejarah, yakni sebagai hubungan kesejarahan. Thompson berpendapat bahwa "hubungan harus selalu diwujudkan dalam diri orang-orang yang nyata dan dalam konteks yang nyata … kita tidak bisa memiliki dua kelas yang berbeda, masing-masing dengan keberadaan yang berdiri sendiri, dan baru kemudian mempertemukan mereka *dalam* suatu hubungan" (Thompson 1991 [1963]: 8, penekanan sesuai sumber). Dia melanjutkan: "kelas terbentuk ketika sekelompok orang, sebagai hasil dari pengalaman bersama (baik yang diwariskan maupun dialami bersama), merasakan dan mengartikulasikan kesamaan kepentingan di antara mereka, dan berhadap-hadapan dengan orang lain yang kepentingannya berbeda (dan biasanya berlawanan) dengan kepentingan mereka" (1991: 8–9). Thompson menekankan:

> Pengalaman kelas sangat ditentukan oleh beragam relasi produktif di mana manusia terlahir atau memasukinya tanpa kehendaknya. Kesadaran kelas adalah cara di mana pengalaman-pengalaman ini diolah secara kultural: diwujudkan dalam tradisi, sistem nilai, gagasan, dan bentuk-bentuk kelembagaan. Jika pengalaman tampak sebagai sesuatu yang ditentukan, kesadaran kelas tidak demikian. Kita dapat melihat adanya *logika* dalam respons kelompok-kelompok kerja serupa yang mengalami pengalaman serupa, tapi kita tidak bisa meramalkan *hukum* apa pun. Kesadaran kelas muncul dengan cara yang sama di berbagai waktu dan tempat, tapi tidak pernah dengan cara yang benar-benar sama. (1991: 9, penekanan sesuai sumber)

Thompson menekankan dimensi kesejarahan kelas: "semua ini adalah persoalan kesejarahan. Jika kita menghentikan sejarah pada titik tertentu, maka tidak ada kelas, melainkan kerumunan individu dengan berbagai macam pengalaman" (1991: 10). Namun, dia menjelaskan lebih lanjut:

> jika kita mengamati orang-orang ini dalam rentang waktu perubahan sosial yang cukup lama, kita akan melihat pola dalam hubungan, gagasan, dan kelembagaan mereka. Kelas ditentukan oleh manusia sebagaimana mereka menjalani sejarah mereka sendiri, dan, pada akhirnya, ini hanyalah definisinya. (1991: 10).

Dia menyimpulkan: "kita tidak dapat memahami kelas kecuali kita melihatnya sebagai suatu formasi sosial dan kultural, yang muncul dari proses-proses yang hanya bisa dipelajari saat proses-proses itu berlangsung dalam rentang kesejarahan yang cukup panjang" (1991: 10–11).

Singkatnya, penting untuk menjernihkan pemahaman kita tentang hubungan kelas agraria, politik agraria, dan siapa saja yang menjadi sekutu, guna menempatkan diskusi tentang aktivisme cendekia dan perjuangan agraria secara tepat. Tanpa pemahaman normatif tentang hubungan kelas dan politik kelas, kita tak akan mampu memahami dengan jernih siapa yang untung dan siapa yang rugi dalam perubahan sosial yang sedang kita upayakan melalui perjuangan politik kita, atau siapa yang benar-benar bersama kita secara sadar dan aktif dalam perjuangan (kekuatan subjektif), siapa sekutu yang dapat diandalkan, sekutu yang plin-plan, dan siapa lawan kita, serta mengapa. Karena itu, tanpa jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut, cendekiawan-aktivis akan kesulitan menentukan bagian mana dari gerakan agraria yang patut didukung dan digumuli. Sebenarnya ini bukanlah pandangan baru. Sejarah panjang kajian agraria mengenai hubungan kelas, politik agraria, dan aliansi telah berulang kali menegaskan pentingnya menanamkan analisis politik dalam kerangka hubungan kelas, meski hubungan kelas

bukan satu-satunya penentu dinamika politik. Namun demikian, bahkan konsep-konsep lama seperti "sekutu" pun belum tentu didefinisikan secara tepat atau diperbarui agar relevan dengan situasi kekinian. Misalnya, apa sebenarnya arti menjadi sekutu bagi gerakan kedaulatan pangan? Bahkan di kalangan cendekiawan-aktivis sendiri, pertanyaan ini masih menyisakan kebingungan. Sebagaimana dicatat oleh Duncan *et al*. (2021: 880): "Tapi kepustakaan tentang kedaulatan pangan sejauh ini belum membahas bagaimana membangun aliansi atau koalisi antara cendekiawan-aktivis dan aktor-aktor lain dalam gerakan tersebut."

AKAR SEJARAH POLITIK AGRARIA KONTEMPORER

Debat politik dan penelitian akademik tentang kondisi dunia agraria pernah menjadi pusat perhatian dalam rumpun ilmu sosial sepanjang abad XX. Periode ini diapit oleh dua tonggak besar: dimulai dari Revolusi Meksiko 1910 dan ditutup oleh Revolusi Sandinista di Nikaragua pada 1979 serta kesepakatan politik pada 1980 yang melahirkan negara Zimbabwe. Di antara dua peristiwa tersebut, ada beragam proyek politik radikal yang mengubah wajah dunia agraria, mulai dari reformasi demokratis yang dipimpin kaum borjuis hingga revolusi bersenjata proletariat, dari kemenangan elektoral gerakan sosialis berbasis petani hingga perang pembebasan nasional yang juga digerakkan kaum tani. Beberapa dari proyek politik itu membawa kemenangan yang mengguncang dunia, yang memungkinkan kaum revolusioner sosialis merebut kekuasaan negara, seperti di Tiongkok dan Vietnam (Wolf 1969). Namun, sebagian lainnya berakhir tragis, dengan para petani dibantai dalam aksi balasan militer yang brutal, seperti yang terjadi di Indonesia pada 1965–1966 (White 2016). Ada pula yang hanya menghasilkan konsesi-konsesi kecil dari elite, reformasi setengah hati, atau bahkan—mengikuti istilah Diskin (1989)—"reformasi yang mencegah perubahan." Transformasi sosial yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa dramatis ini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan. Banyak dari transformasi agraria yang berdampak luas ini—yang ditandai dengan

runtuhnya sebagian dunia sosial agraria lama, bertahannya sebagian lainnya, dan munculnya bentuk-bentuk baru—telah memengaruhi watak serta arah pembangunan nasional dan budaya poitik di berbagai masyarakat.

Di jantung berbagai transformasi agraria itu ialah politik pertanahan. Politik pertanahanlah yang mempertahankan atau menggoyahkan pola-pola distribusi kekuasaan politik di antara kelas-kelas dan kelompok sosial dalam negara maupun masyarakat, sekaligus menentukan sejauh mana akses atas tanah dan sumberdaya alam bisa diperoleh di bawah berbagai bentuk relasi kepemilikan. Karakter politik pertanahan ini, pada gilirannya, menempa dan merombak ulang ruang-ruang kehidupan sosial global, mulai dari pangan, ekologi, tenaga kerja, kewarganegaraan, hingga geopolitik.

Para akademisi telah mengamati dengan cermat perkembangan politik agraria selama seabad terakhir. Perdebatan utama dalam kajian ini antara lain berkisar pada persoalan bagaimana mendefinisikan siapa itu "petani" (Wolf 1966; Edelman 2013)—atau dalam istilah lain, "produsen komoditas skala kecil" (*petty commodity producers*) (Harris-White 2022)—dan bagaimana peran tanah serta relasi kepemilikan (properti) menentukan arah politik petani. Pertanyaan terakhir ini menyoroti keinginan kuat petani untuk memiliki sebidang tanah garapan, yang kerap dipandang sebagai sumber dari kecenderungan politik borjuis kecil di kalangan petani. Berangkat dari beberapa fondasi konseptual yang diletakkan Marx dalam *The Eighteenth Brumaire*, pendirian politik petani umumnya dipandang—terutama dalam tradisi intelektual Marxis—sebagai sesuatu yang terus-menerus berada dalam posisi ambivalen terhadap proyek-proyek politik revolusioner sosialis (Hobsbawm 1973; Mintz 1973; Lehmann 1974; Kay 2002).

Kajian-kajian klasik politik agraria, yang sangat dipengaruhi pemikiran Marxis, umumnya berupaya mempersoalkan dan mengurai gagasan tentang "kelas-dalam-dirinya-sendiri" dan "kelas-untuk-diri-

nya-sendiri", dengan perhatian khusus pada tantangan besar dalam mengubah yang pertama menjadi yang kedua (lihat, misalnya, Byres, 1981). Hubungan kelas dan politik kelas menjadi sentral dalam kajian-kajian ini. Salah satu perdebatan penting yang muncul adalah tentang lapisan mana dari struktur sosial petani yang paling mungkin terbuka terhadap perubahan revolusioner. Di sinilah para pemikir radikal terbelah. Sebagian mendukung apa yang disebut sebagai "tesis petani menengah" dari Eric Wolf, yang mengasumsikan bahwa tingkat otonomi sosial-ekonomi dan politik lapisan petani ini memungkinkan mereka melakukan tindakan kolektif politik dengan hambatan lebih kecil (Wolf 1969). Posisi petani menengah yang senantiasa berada dalam ancaman—terutama dari kekuatan yang mendorong komodifikasi atas tanah, alam, dan tenaga kerja di pedesaan—turut mendorong proses radikalisasi dan memicu kesiapan mereka untuk bergerak dalam aksi kolektif, sebagai bentuk perlawanan terhadap arus pemisahan dan peminggiran sosial akibat penetrasi kapitalis ke wilayah pedesaan. Pandangan tandingan, yang dikemukakan oleh Jeffrey Paige (1978), dirangkum dalam sebuah skema sederhana tapi kuat. Paige mengidentifikasi bahwa kaum proletar tak bertanah—khususnya buruh tani migran yang bekerja untuk kelas tuan tanah tradisional—punya potensi terbesar untuk mengupayakan perubahan revolusioner yang paling radikal dan transformatif, yaitu menuju sosialisme. Gerrit Huizer (1975) mendedikasikan sebagian besar karya ilmiahnya untuk menjawab pertanyaan yang sangat penting pada masa itu: kapan dan mengapa kaum tani menjadi revolusioner (atau sebaliknya: kapan dan mengapa mereka tetap bersikap konservatif atau bahkan reaksioner)? Pertanyaan ini memantik perdebatan tajam, dan sampai saat ini masih terbuka. James C. Scott menawarkan perspektif "ekonomi moral" yang berfokus pada perlawanan kaum tani terhadap kekuatan kapitalis yang melemahkan atau mengancam kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Sebaliknya, Samuel Popkin mengajukan perspektif tandingan dari tradisi *pilihan rasional*, yang me-

nekankan dorongan petani untuk memaksimalkan keuntungan—bukan untuk melawan kapitalisme, melainkan justru agar bisa masuk dan beruntung di dalamnya (Scott 1976; Popkin 1979).

Penerapan analisis kelas dalam mempelajari politik agraria dan dalam menjalankan praksis politik di ranah agraria tetaplah sangat penting. Tapi pendekatan ini perlu disesuaikan dengan perubahan konfigurasi hubungan agraria yang terus berkembang, terutama karena kategori sosial ikonik "petani" atau "proletariat" kini makin jarang ditemui dalam bentuknya yang klasik. Sebagai gantinya, kita menjumpai kelas-kelas agraria yang terfragmentasi, yang memadukan beragam cara untuk memenuhi kebutuhannya di berbagai latar yang membentang antara pedesaan dan perkotaan, antara pertanian dan industri (Bernstein 2006, 2010; Shivji 2017).

Sebagaimana Marx pernah mempertanyakan jenis politik yang ditempuh kaum tani Prancis pada pertengahan abad XIX, para pemikir revolusioner abad XX juga berupaya memahami bagaimana kaum tani menggumuli politik radikal dalam tekad mengubah kondisi hidup mereka, atau bagaimana mereka menjadi radikal atau bahkan revolusioner. Selama tiga perempat pertama abad XX, pertanyaan ini menjadi kerangka utama, baik secara intelektual maupun politis, untuk menelaah aksi-aksi kolektif berskala besar yang terorganisir, terstruktur, dan terbuka (kadang bersenjata) sebagai bentuk perlawanan. Wolf (1969) dan Paige (1978) adalah dua contoh klasik yang menonjol, sementara Barrington Moore Jr. (1967) membuka jalur baru dalam kajian agraria dengan menyelidiki bagaimana politik pertanahan dan struktur agraria membentuk kembali kelembagaan politik masyarakat secara lebih luas.

Pandangan Marx tentang politik petani memang sangat berpengaruh dalam membentuk tradisi keilmuan kritis di bidang politik agraria, tapi bukan satu-satunya. Satu tradisi lain yang berumur panjang dan punya beragam bentuk ialah "populisme agraria". Tradisi ini bisa dimaknai sebagai bentuk pengakuan, pelengkap, atau bahkan arus tandingan terhadap pandangan Marxis ortodoks tentang politik agraria.

Politik agraria radikal hari ini, setidaknya yang bernuansa antikapitalis secara umum, bukanlah aliran tunggal, melainkan terdiri atas berbagai posisi atau pendirian yang terbentang dalam spektrum antara tradisi Marxis ortodoks di satu ujung dan tradisi yang sebagiannya terilhami oleh populisme Rusia paruh kedua abad XIX beserta pandangan-pandangan yang dipengaruhinya, dalam berbagai tingkatan, sepanjang waktu; dan semuanya masih menjadi medan perdebatan, baik di ranah akademik maupun politik (Shanin 1983a, 1983b). Aktivisme cendekia mesti dilihat dan dipahami dalam konteks spektrum analitis dan politik yang terbentang antara dua tradisi tersebut.

Menjadi relevan untuk kemudian meninjau kembali secara singkat akar sejarah dari populisme agraria kontemporer, sebab ini bukan sekadar kisah tentang sejarah politik agraria yang populis, tetapi juga tentang jejak-jejak awal dari sebagian unsur dalam aktivisme cendekia agraria.

Dalam kajian agraria kritis, akar populisme agraria kontemporer bisa ditelusuri hingga ke gerakan Narodnik sayap kiri Rusia pada paruh kedua abad XIX. Gerakan ini bertujuan menggulingkan kekuasaan Tsar, melawan kapitalisme, dan menyelamatkan komune-komune petani Rusia (*obshchina*) beserta struktur organisasinya (*mir*), yang diyakini mengandung benih masa depan sosialis. Narodnisme (dari kata *narod* yang secara umum bermakna "rakyat") merupakan perjuangan restoratif yang cenderung meromantisasi komunitas di mana hubungan kapitalis belum sepenuhnya mengakar. Dalam pandangan ini, kepetanian diposisikan sebagai sebuah jalur menuju sosialisme tanpa harus melalui fase perkembangan kapitalisme terlebih dahulu.

Diperkirakan sekitar 2.000–3.000 mahasiswa kota turun ke pedesaan Rusia pada 1874 secara spontan, tanpa program tertulis ataupun organisasi terstruktur. Para intelektual muda ini tidak banyak tahu corak kehidupan petani ataupun praksis kerja politik yang efektif. "Berpindah dari satu desa ke desa lainnya, mereka menyebarkan pamflet revolusioner dan berbicara langsung dengan siapa saja petani yang mereka temui tentang perlunya redistribusi tanah secara radikal dan keterlibatan dalam

revolusi" (Taggart 2000: 50). Kaum Narodnik segera dibuat frustasi oleh apa yang mereka temukan tentang politik petani: ternyata kaum tani tidak terarik pada revolusi. Para intelektual kota itu membayangkan dan mengharapkan kaum tani sebagai golongan yang "tertindas, idealis, dan siap menggerakkan revolusi. Tapi, kenyataannya, mereka justru mendapati petani yang serakah, konservatif, dan sangat mencurigai mahasiswa" (Taggart 2000: 52). Banyak petani bahkan membocorkan kepada pihak berwenang tentang keberadaan orang-orang Narodnik. Pada 1877, sekitar 1.611 mahasiswa telah ditangkap. Taggart mengatakan: "Musim panas 1874 menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh sekolompok aktivis. Lebih dari itu, musim ini menunjukkan apa yang tidak akan dilakukan oleh kaum tani" (2000: 52). Kaum Narodnik pun mengubah strategi, dari mendidik kaum tani menjadi terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata untuk membunuh para penguasa di sekitar Tsar dan khusunya Tsar sendiri. Beberapa aksi berhasil, tapi kebanyakan gagal. Dari pergeseran strategi ini, lahirlah dua kelompok organisasi: *Zemlya i Volya* (Tanah dan Kebebasan) dan *Narodnaya Volya* (Kehendak Rakyat); kelompok terakhir inilah yang berhasil membunuh Tsar Alexander II pada 1881.

Para intelektual dalam organisasi Kehendak Rakyat membaca buku *Capital* dan bahkan berkontak langsung dengan penulisnya, Karl Marx. Salah satunya,Vera Zasulich, bersurat kepada Marx:

> kami sering mendengar pendapat bahwa komune pedesaan adalah bentuk kuno yang ditakdirkan binasa oleh sejarah, sosialisme ilmiah, dan, singkatnya, segala sesuatu yang tak terbantahkan. Mereka yang mengkhotbahkan pandangan seperti ini menyebut diri mereka sebagai murid Anda yang paling sejati: "Marksists".

Dia melanjutkan:

> Argumen terkuat mereka sering kali hanyalah: "Marx sendiri yang berkata begitu." Akan sangat membantu bagi kami jika Anda bersedia menguraikan gagasan Anda mengenai kemungkinan nasib komune pedesaan kami, dan juga tentang teori bahwa setiap negara di dunia perlu melewati semua fase produksi kapitalis sebagai suatu keniscayaan sejarah. (1983: 98–99 [aslinya tertanggal 16 Februari 1881])

Marx kemudian menjawab, setelah terlebih dahulu menyusun beberapa draf panjang tanggapannya:

> Analisis di dalam *Capital* … tidak menyediakan alasan-alasan yang mendukung ataupun yang menentang daya hidup komune Rusia. Namun, kajian khusus yang telah saya lakukan, termasuk penelusuran sumber-sumber asli, meyakinkan saya bahwa komune itu merupakan titik tumpu bagi regenerasi sosial di Rusia. (1983: 124 [aslinya tertanggal 8 Maret 1881])

Tukar pendapat antara Zasulich dan Marx telah menjadi pokok kontroversi dan debat panjang dalam kepustakaan kajian agraria Marxis yang membahas populisme (lihat Shanin 1983a; Bernstein 2018).

Walaupun populisme Rusia yang asli itu berumur pendek, warisan dan pengaruhnya terus bertahan, sebagian karena komitmen utamanya pada sosialisme, meski berupaya menempuh jalur melalui kepetanian. Sebagaimana dikatakan Hobsbawm:

> [Narodnisme] tidaklah signifikan karena pencapainnya, yang nyaris tidak berarti apa-apa; bukan pula karena jumlah orang yang berhasil dimobilisasi, yang bahkan tidak mencapai beberapa ribu … [melainkan karena ia] … menjadi semacam laboratorium kimia tempat semua gagasan revolusioner utama abad XIX diujicobakan, dipadu-

> kan, dan dikembangkan menjadi gagasan-gagasan abad XX. (1987: 199, dikutip dalam Bernstein 2018: 1131)

Gagasan-gagasan ini terkait erat dengan perdebatan yang berlangsung beriringan dengan gagasan populisme agraria Rusia dan lanjutannya dalam tradisi Marxisme: mulai dari rumusan Engels tentang masalah petani dan rumusan Kautsky tentang "masalah agraria" (Engels 1894; Kautsky 1988 [1899]); gagasan dan praksis revolusioner Rusia; Leninisme dan logika sosio-ekonomi Chayanov tentang ekonomi petani (Lenin 2004 [1905]; Chayanov 1966 [1925]); hingga Marxisme kontemporer (lihat Akram-Lodhi dan Kay 2010a, 2010b; Levien *et al.* 2018)—yang semuanya masih relevan hingga awal abad XXI ini. Bagi Shanin:

> Inti dari orisinalitas dan daya pikat revolusioner populisme Rusia terletak … pada kemampuannya mengajukan sejumlah persoalan fundamental tentang masyarakat kapitalis, wilayah-wilayah "pinggirannya", dan proyek sosialis itu sendiri. Upaya untuk menepis persoalan tersebut sebagai sekadar masalah masa lalu—yakni cerminan keterbelakangan sosial Rusia pada 1880-an atau sifat borjuis kecil dari kaum taninya—terbukti keliru berdasarkan pengalaman historis. Kemunduran masyarakat tani Rusia tidak membuat persoalan-persoalan itu menghilang; justru sebaliknya, sebagian besarnya makin mengemuka dalam skala global dan relevan dalam lingkungan superindustrialis. Selama dibiarkan tak terjawab, persoalan-persoalan itu akan terus menghantui kaum sosialis, dan akan terus kembali hingga benar-benar dihadapi, baik secara teoretis maupun politis. Mengabaikan persoalan-persoalan itu hanya akan membahayakan sosialisme. (1983b: 271)

Teori-teori Chayanov tentang ekonomi petani membawa pengaruh besar pada diskursus agraria di masa-masa berikutnya dan di kalangan cendekiawan agraria kunci seperti Shanin, Scott, dan van der Ploeg (lihat

Shanin 1971, 1972, 1973; Scott 1976; van der Ploeg 2013). Namun, klaim tentang seberapa besar pengaruh Narodnisme yang asli dan pemikiran Chayanov dalam mengilhami populisme agraria kontemporer, menurut kami, lebih sering bersifat asumsitif atau dikira-kira secara teoretis, alih-alih ditunjukkan melalui bukti nyata. Hal ini penting dicermati karena sebagian besar gerakan agraria *kontemporer* yang menonjol tidak secara eksplisit menyebutkan asal-usul teoretis kerangka politik mereka. Kalaupun ada yang secara terbuka menyebut inspirasi teoretis mereka, biasanya mereka mengacu pada Marx—dan kadang juga Lenin—tapi hampir tidak pernah menyebut Herzen, Chernyshevsky, Chayanov, atau Shanin (meski van der Ploeg makin sering dijadikan sumber inspirasi oleh gerakan agraria masa kini).

Penting untuk memperjelas satu poin utama: bagaimana istilah "populisme" yang sarat muatan politis—dan, sebagai perluasannya, "neopopulisme"—muncul, berkembang, dan memiliki konotasi yang begitu negatif dalam tradisi akademik dan politik Marxis? Dalam sejarah beberapa partai komunis, (neo)populisme dipandang melalui kerangka revolusioner-kontrarevolusioner (R-KR). Posisi ini, yang dipegang oleh sebagian kecil tapi cukup berpengaruh dari kalangan Marxis ortodoks, bisa—dan memang bisa—mengarah pada pembersihan faksional yang getir dan berulang. Kita kembali mengacu pada Shanin untuk interpretasinya atas sejarah istilah ini, yang relevan bagi diskusi tentang aktivisme agraria masa kini. Dia menjelaskannya dalam konteks Marxisme dan kaum Narodnik, dengan menunjukkan bahwa sejarah istilah ini terjalin erat dengan populisme sayap kanan:

> Label "populis", seperti halnya "marxis", sangat kurang teliti; keberagaman kedua kubu sama-sama cukup besar. Dalam bahasa Rusia, seorang populis (*narodnik*) bisa merujuk pada siapa saja, mulai dari teroris revolusioner hingga tuan tanah dermawan. Yang memperburuk keadaan ialah kenyataan bahwa saat ini tidak ada pewaris politik yang mengeklaim dan mempertahankan warisan populisme

> Rusia—para pecundang politik jarang punya kerabat setia, sementara para pemenang memonopoli media, dana, dan imajinasi. Karya utama Lenin … yang menjadi rujukan generas-generasi sosialis dalam mempelajari terminologi Rusia, menggunakan istilah "populisme" sebagai label untuk segelintir penulis saja yang saat itu berada di sayap kanan ekstrem kaum populis …. Hal ini membuat argumen antipopulis Lenin pada 1898 menjadi lebih mudah diterima, namun sekaligus makin mengaburkan kredo populisme bagi para pembacanya di masa kini. (Shanin 1983a: 8)

Populisme telah menjadi frasa-yang-mencakup-semuanya, terutama di tengah bangkitnya populisme regresif saat ini (Scoones *et al*. 2018; McCarthy 2019; Borras 2020). Populisme *agraria* secara konseptual bersifat jamak dan beragam. Karena itu, penting untuk menjelaskan secara singkat apa maksud istilah ini dalam ranah kajian agraria kritis. Terry Byres, dalam kritik klasiknya pada 1979 terhadap populisme yang dikemukakan oleh Michael Lipton (1977), mengidentifikasi tiga jenis populisme agraria: populisme klasik, neopopulisme, dan populisme liberal (Byres 1979).

Byres berpendapat bahwa Lipton menganut *populisme klasik* karena dia, sedikit banyak, memiliki "keyakinan yang hampir mistis terhadap massa rakyat (yang kebetulan adalah 'rakyat desa')—bukan hanya sebagian dari rakyat, tetapi semuanya, yang diyakini mampu … bersatu melawan penindas mereka di perkotaan dan membangun Utopia egaliter" (Byres 1979: 238). Dia juga menyoroti keyakinan Lipton bahwa "petani kecil lebih efisien … dibandingkan petani besar," serta menunjukkan "ketaksukaanya terhadap industri dan keyakinannya bahwa industrialisasi … tidak diinginkan; sikap antikapitalis; suatu tekad untuk menantang dan menolak Marxisme, yang dipadukan dengan ketertarikan ganjil pada ide-ide Marxis …." (1979: 238).

Byres, yang menganggap Chayanov sebagai bapak neopopulisme, kemudian berpendapat bahwa Lipton adalah seorang *neopopulis* karena

"pembelaannya … terhadap kaum tani kaya … dalam klaimnya bahwa dia sebenarnya menerima perlunya industrialisasi, tapi masih jauh di masa depan, dan tidak menerima industrialisasi jika pertanian yang efisien memungkinkan; dan karena keengganannya terhadap revolusi" (Byres 1979: 238).

Akhirnya, Byres berpendapat bahwa Lipton adalah seorang *populis liberal* karena "keengganannya terhadap revolusi" dan "keyakinan yang dia nyatakan atas solusi-solusi reformis serta kekuatan nalar dan argumen untuk mewujudkan keadilan sosial (bahkan dari para diktator sekalipun)" (Byres 1979: 238).

Sekitar 25 tahun kemudian, Byres (2004) mengkritik karya Griffin, Khan, dan Ickowitz (2002) tentang reforma agraria, dan mengemukakan argumen bahwa Griifin *et al.* dan Lipton sesungguhnya adalah "neopopulis neoklasik", dengan tumpuan ekonomi neoklasik. Dasar pemikiran Byres bagi penggolongan ini mencakup posisi yang mereka ambil terkait diferensiasi sosial di kalangan kaum tani, definisi kelas dan peran individu, peran petani kaya, industrialisasi, revolusi, kepemilikan pribadi, dan sosialisme. Ini adalah alat heuristik yang berguna untuk membantu memperdalam pemahaman kita tentang apa yang disebut gerakan-gerakan populis agraria yang aktif hari ini, dan sangat membantu dalam membantah narasi yang menganggap bahwa versi populisme yang berakar pada ekonomi neoklasik itu progresif, sementara advokasi Marxis untuk sosialisme dianggap usang dan dogmatis.[2] Alat ini juga menjadi pengingat bahwa meski populisme kanan memang harus dikalahkan, gagasan tentang populisme kiri pun belum tentu bebas masalah, seperti yang ditunjukkan oleh Andrade (2020) dalam kasus Brasil (lihat juga Tilzey 2019; Monjane dan Bruna 2020).

Aktivisme cendekia tidak bisa dianggap sebagai suatu tradisi yang seragam, baik secara kesejarahan maupun dalam konteks hari ini. Ketika kita bicara tentang aktivisme cendekia yang umumnya membasis dalam perjuangan di dalam dan melawan kapitalisme, penting untuk melihat aktivisme cendekia dalam keterikatan dinamis nan rumit yang

juga terjalin antara Marxisme ortodoks dan populisme agraria. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme cendekia kontemporer dalam perjuangan agraria pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ketegangan dan sinergi antara dua kutub ideologis historis yang mendominasi kajian dan perjuangan agraria. Mereduksi keterikatan ini menjadi pilihan sederhana antara populisme agraria dan kemurnian kelas, secara politik maupun intelektual tidaklah produktif. Tantangannya adalah bagaimana menjelajahi bentangan spektrum ini tanpa menghindari teka-teki yang belum terpecahkan, rumusan politik yang tidak sempurna, dan kontradiksi yang melekat di dalamnya, juga bagaimana menemukan inspirasi serta energi intelektual dan politik dari teka-teki dan kontradiksi tersebut.

Bukti menunjukkan bahwa ada upaya pluralis yang aktif dan dinamis untuk menjelajahi spektrum politis dan analitis seperti yang dijelaskan di atas. Dalam konteks ini, kita sebaiknya mempertimbangkan saran (yang tak terduga) dari seorang skeptis terkemuka terhadap gerakan agraria dan kedaulatan pangan, Henry Bernstein, yakni untuk melampaui "zona nyaman purisme kelas" dan tidak serta-merta menolak populisme agraria kontemporer. Meninjau ulang revolusi Rusia, Bernstein mencatat bahwa penganut ekonomi-politik Marxis—yang kekuatannya berada pada analisis sosial-ekonomi—punya tantangan utama untuk memiliki pemahaman lebih baik tentang politik agraria:

> Upaya untuk melangkah dari yang pertama [analisis sosial-ekonomi] menuju yang kedua [politik agraria] melibatkan banyak hal: mempertimbangkan faktor-faktor penentu lain dan berbagai kerumitan; kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tak niscaya, tak pasti, dan tak terduga; serta kesanggupan untuk mengubah posisi—semua ini melampaui zona nyaman purisme kelas serta berbagai ilusi lainnya …. Ini mengarah pada suatu paradoks … yakni: meskipun Marxisme yang terbaik tetap unggul secara analitis dalam membedah dinamika kelas dalam perubahan agraria, untuk berbagai alasan populisme

> agraria justru muncul sebagai kekuatan ideologis dan politik yang lebih vital …. Menurut saya, politik agraria Marxis—apa pun bentuknya—akan lebih efektif menjawab berbagai tantangannya jika secara kritis terlibat dengan populisme agraria masa kini yang paling progresif (antikapitalis) serta beragam perjuangan pedesaan yang diusungnya. Ini jauh lebih berguna ketimbang mengabaikan semua populisme agraria secara apriori, seolah semuanya selalu "salah" dan "reaksioner" dalam derajat yang sama. (Bernstein 2018: 1146)

Sejalan dengan seruan ini, Michael Levien, Michael Watts, dan Yan Hairong belakangan mencatat: "Sementara kalangan Marxis sejak lama mengkritik kalangan 'populis' karena mengabaikan kapitalisme dan kelas, kalangan populis kerap menuding kalangan Marxis terlalu terobsesi pada akumulasi dan kelas, tidak peka terhadap ketakpastian (kontingensi) dalam sejarah, serta buta terhadap banyak aspek dalam hal gender dan identitas" (2018: 853). Mereka menyimpulkan:

> Di satu sisi, kajian-kajian yang lebih "populis"—baik yang fokus pada isu perampasan tanah, kedaulatan pangan, maupun reforma agraria—kini jauh lebih terbuka dalam memadukan gagasan Marxis tentang kelas dan dinamika kapitalisme, dibanding sebelumnya. Di sisi lain, banyak kajian yang secara eksplisit berpendekatan Marxis justru makin menjauh dari penolakannya terhadap agensi politik petani, dari pendekatan hiperstrukturalis dalam perdebatan tentang corak produksi, serta dari konsepsi sejarah yang linier dan terpusat pada Eropa sebagaimana terkandung dalam problematika transisi dan "dogma-kepetanian yang ditakdirkan mati ". (Levien, Watts, dan Hairong 2018: 854)

Hubungan timbal balik intelektual dan politik ini tidak melemahkan pendirian fundamental dari masing-masing kubu. Teodor Shanin pernah mencatat proses interaksi antara kalangan intelektual Narodnaya

Volya dengan Marx: bagaimana kedua pihak saling menganggap serius pandangannya dan bersedia mengakui unsur-unsur penting dalam perspektif satu sama lain. "Hal itu tidak membuat Marx menjadi seorang populis, atau menjadikan anggota Narodnaya Volya sebagai Marxis diam-diam. Mereka adalah sekutu politik yang saling mendukung dan memengaruhi" (Shanin 1983b: 268). Hubungan ini merupakan pertemuan produktif dalam hal ideologi, politik, maupun ekologi dari gerakan dan perjuangan agraria beserta para sekutu mereka; inilah yang menjadi konteks kunci dan objek perhatian aktivisme cendekia di medan agraria global masa kini. Tatanan dunia kita saat ini, dan bagaimana ia sampai pada titik ini, sebagiannya dipengaruhi oleh proses historis keterikatan rumit antara penganut Marxisme ortodoks dan para pengusung populisme agraria radikal.

KONJUNGTUR HARI INI

Saat ini, tiga dari empat orang miskin di dunia menganggap pedesaan sebagai tempat tinggal utama mereka. Fakta ini saja sudah cukup menjadi alasan mengapa kajian agraria seharusnya tetap menjadi pilar utama dalam kajian ilmu-ilmu sosial, dan mengapa politik agraria perlu dipandang sebagai fondasi penting dalam perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Dalam banyak hal, kajian agraria dan perjuangan agraria memang beririsan dan menempati ruang yang sama. Namun, hubungan ini tidak lepas dari berbagai perubahan besar dari masa ke masa, juga dari tantangan-tantangan baru yang terus berkembang di masa datang. Perang petani yang pernah marak pada abad lalu mulai mereda atau berakhir seiring menguatnya neoliberalisme sejak awal 1980-an. Tak lama kemudian, konteks besar yang membayangi perang petani—yakni Perang Dingin—juga ikut berakhir. Sebagian besar eksperimen sosialis runtuh, bersamaan dengan bubarnya banyak struktur penopangnya seperti pertanian kolektif dan usaha tani milik negara (Spoor 2008). Reforma agraria konvensional nyaris menghilang dari agenda resmi kebijakan negara, kecuali segelintir prakarsa nasional. Sejak 1980-an, ke-

bijakan pertanahan didominasi oleh promosi reforma agraria berbasis pasar, perdagangan tanah, formalisasi hak milik tanah pribadi, serta upaya pembalikan sebagian hasil reforma agraria sebelumnya (Akram-Lodhi *et al*. 2007; Lahiff *et al*. 2007; Dwyer 2015). Para akdemisi pun mengikuti kecenderungan ini dalam penelitian mereka.[3]

Selama periode ini, ketika gerakan pembebasan nasional dan pemberontakan yang dipimpin partai komunis mulai berhasil merebut kekuasaan negara dan lantas terlembagakan dalam konteksnya masing-masing, atau justru melemah dan/atau hancur, berbagai jenis gerakan agraria baru mulai bermunculan seantero dunia. Sebagian besar gerakan ini bersifat otonom, yang tumbuh sebagai reaksi terhadap neoliberalisme, dengan haluan ideologis dan politis serta bentuk organisasi yang sangat berbeda dengan kelompok-kelompok gerakan pembebasan nasional di masa lalu. Banyak dari gerakan agraria ini mengambil inspirasi ideologis tertentu dari Marxisme, meski sebagian besar bukanlah gerakan sosial berbasis partai, dan bahkan sangat menjaga jarak serta secara aktif mempertahankan otonomi dari partai politik.[4]

Kemunculan gerakan-gerakan agraria ini membawa beberapa kontradiksi. Di satu sisi, mereka muncul sebagai reaksi terhadap neoliberalisme (Edelman 1999), tetapi di sisi lain, mereka dapat dikatakan mendapat manfaat dari neoliberalisme. Salah satu bentuk manfaat itu adalah munculnya kompleks donor nonpemerintah dan LSM/OMS, yang keberadaannya sangat ditopang oleh neoliberalisasi sistem bantuan global dan agenda tata kelola. Donor dan LSM/OMS ini kemudian menyalurkan sumberdaya logistik dan finansial dalam jumlah besar, yang mendukung terbentuknya gerakan agraria yang tidak dapat—atau memang memilih untuk tidak—menggantungkan diri pada sumberdaya tersebut dari partai politik. Selama periode ini, rekonfigurasi antara partai politik dan gerakan agraria telah mengubah cara-cara terbentuknya aliansi petani. Partai politik makin tersisih ke belakang, sementara LSM/OMS dan lembaga donor nonpemerintah justru makin mengakar (Biekart dan Jelsma 1994; Borras dan Franco 2009; Edelman dan Borras 2016). Dalam

konteks inilah suatu perkembangan penting berlangsung di gelanggang agraria global, yang kemudian membangkitkan minat dan gairah yang mendalam dan meluas di kalangan generasi aktivis dan peneliti masa kini: kebangkitan gerakan agraria transnasional (GAT). Istilah GAT di sini digunakan secara longgar untuk merujuk pada berbagai bentuk gerakan: mulai dari gerakan tunggal, gabungan beberapa gerakan, hingga koalisi dan jaringan (untuk pembahasan lebih rinci dan bernuansa, lihat Fox 2010).

Karya akademik pun mencerminkan arah perkembangan ini. Kajian-kajian tentang reforma agaria konvensional, konfigurasi kelas dan politik kelas dalam gerakan agraria, serta hubungan mereka dengan partai politik (revolusioner) menghilang dari peredaran—kecuali beberapa kajian serius yang mengulik kasus nasional tertentu, seperti di Brasil, Chiapas di Meksiko, mobilisasi tanah pasca-1997 di Zimbabwe, dan berbagai kantong pergolakan yang bersifat individual dan lokal di kalangan petani Tiongkok yang tanahnya dirampas di tengah ekspansi modal industri dan perdangangan di negara itu.[5] Dalam hal penelitian tentang politik agraria dan masalah agensi petani, dua aspek yang paling penting pada periode ini bagi kajian agaria kritis ialah meluasnya kajian serta dokumentasi tentang La Vía Campesina, serta berkembangnya gagasan dan praksis kedaulatan pangan (Desmarais 2007; Patel 2009; Pimbert 2009; Wittman *et al.* 2010; Mills 2021). Namun, lonjakan gairah intelektual ini tidak bisa sepenuhnya diklaim sebagai milik kajian agraria, karena banyak karya penting juga dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu dan kepentingan lain, termasuk kajian mengenai pangan, lingkungan, dan hak asasi manusia (lihat, misalnya, Claeys 2015; Monsalve 2013). Dan meskipun kepustakaan yang merayakan kedaulatan pangan menarik untuk diatelusuri, sama pentingnya untuk serius mencermati pandangan kritis dari para cendekiawan seperti Agarwal (2014), Bernstein (2014), Hospes (2014), Jansen (2015), Li (2015), Henderson (2018), dan Soper (2020). Tak kalah penting ialah para pendukung kedaulatan pangan yang mengangkat isu-isu rumit dan menantang yang

membutuhkan pendalaman teoretis serta penyelidikan empiris lebih lanjut; beberapa diantaranya mencakup persoalan perdagangan jarak jauh (Burnett dan Murphy 2014), masyarakat adat (Daigle 2019), dan "pelokalan" (Robbins 2015).

Namun, belakang ini, terjalin konvergensi proses sosial-politik, ekologis, dan ekonomi di tingkat global yang menempatkan kajan agraria kritis kembali jadi sorotan. Sekitar 2007–2008, serangkaian krisis muncul serentak: harga pangan melonjak, krisis bahan bakar dan energi, serta krisis keuangan. Konvergensi krisis ini sebagian dipicu oleh desakan untuk mencari solusi atas perubahan iklim, seperti produksi BBN (*biofuel*), yang justru memicu krisis lanjutan di berbagai sektor lain, termasuk pangan. Situasi ini juga berkelindan dengan munculnya pusat-pusat modal global terbaru (seperti BRICS dan beberapa negara berpendapatan menengah) yang mengubah peta kepentingan internasional dan regional dalam produksi, perdagangan, dan konsumsi di bidang pertanian (Scoones *et al*. 2016). Pergeseran ini menandai dimulainya era baru perampasan tanah berskala global oleh korporasi yang kembali berlangsung secara masif, yang dalam banyak kasus justru dipicu dan dilakukan oleh negara-bangsa sendiri (Levien 2013, 2018; Dell'Angelo *et al*. 2017).[6] Bersamaan dengan itu, mencuat pula perubahan penting lainnya: kemunculan "tanaman dan komoditas serbaguna" (*flex crops and commodities*) dengan banyak kegunaan untuk pangan, pakan, bahan bakar, bahan baku industri, maupun sebagai barang dagangan. Tanaman dagang yang masuk kategori ini yakni tebu, kedelai, kelapa sawit, jagung, dsb., yang banyak di antaranya dapat digunakan untuk BBN (yang dipromosikan sebagai solusi untuk perubahan iklim), atau sebagai komoditas pangan atau pakan lainnya. Fenomena ini menegaskan kembali pentingnya mempelajari rantai komoditas atau rantai nilai di sektor-sektor tertentu, tetapi juga sekaligus mendorong kita untuk melacak dan memahami "rantai dari berbagai rantai" yang baru muncul, atau yang disebut juga "jejaring nilai" (Borras *et al*. 2016). Konvergensi berbagai krisis global ini telah memperumit persoalan politik seputar tata

kelola (global) bagi lembaga-lembaga (antar)pemerintah dan advokasi kebijakan bagi aktivis pemantau serta gerakan sosial. Dan kini, wacana perubahan iklim makin berkait erat dengan narasi-narasi keadilan agraria (Borras dan Franco 2018; Franco dan Borras 2019). Karena isu-isu keadilan agraria, pangan, dan iklim kini makin terhubung erat satu sama lain, kalangan gerakan sosial global pun turut memadukan agenda-agenda ini dalam perjuangan mereka mendorong keadilan (Claeys dan Delgado Pugley 2017; Tramel 2016).

Perkembangan politik terkini di ranah agraria global ini, dalam beberapa hal, turut mengubah lagi unit analisis serta cara mempelajari dinamika perubahan sosial di dan terkait dunia pedesaan, juga sasaran utama dari berbagai pertarungan politik. Transformasi-tranformasi ini telah melahirkan sinergi, tapi juga ketegangan, baik di dalam maupun antara gerakan agraria dan gerakan lain yang berorientasi keadilan sosial seperti gerakan keadilan pangan dan kedaulatan pangan, gerakan keadilan lingkungan, gerakan keadilan buruh, dan yang akhir-akhir ini mencuat, gerakan keadilan iklim. Berbagai perubahan ini, termasuk yang menyangkut politik pertanahan—baik dalam aspek materiel, diskursif, maupun politik—membawa dampak besar terhadap cara kita memahami dan mempraktikkan aktivisme-cendekia agraria dewasa ini. Perubahan-perubahan tersebut juga telah mengubah watak serta membentuk ulang agenda aktivisme cendekia, termasuk gaya, metode, strategi, dan taktiknya.

Yang menempati jantung transformasi agraria global ialah dinamika politik pertanahan. Cara kita memahami permasalahan dunia yang sedang berubah hari ini akan membantu kita membingkai penelitian. Demikian pula, cara gerakan agraria memahami dinamika transformasi agraria masa kini, terutama perubahan dalam politik pertanahan, akan membantu mereka dalam membingkai perjuangan politik. Cendekiawan-aktivis perlu terlibat dalam kedua proses ini sekaligus: menafsirkan dunia melalui lensa keilmuan dan turut ambil bagian dalam perjuangan politik untuk mengubahnya. Namun demikian, cara cendekiawan-akti-

vis membingkai penelitiannya akan memengaruhi bagaimana perjuangan politik dapat atau seharusnya dibingkai; begitu pula sebaliknya, bagaimana perjuangan politik dibingkai akan memengaruhi bagaimana penelitian dapat atau seharusnya dibingkai. Bab berikutnya membahas lebih lanjut tentang perubahan dalam politik pertanahan ini.

CATATAN

1 Kami sangat berterima kasih kepada Jesse Ribot atas masukan-masukannya untuk rumusan alinea pembuka ini.

2 Untuk pembahasan terkini lainnya tentang populisme agraria, lihat van der Ploeg (2013), Bernstein (2018), dan White (2018).

3 Untuk mendapatkan gambaran umum tentang periode ini, lihat Deininger dan Binswanger (1999), dan de Janvry *et al*. (2001) untuk perspektif arus utama; dan untuk perspektif lebih kritis, lihat Zoomers dan van der Haar (2000) serta Akram-Lodhi *et al*. (2007).

4 Untuk analisis kritis dan latar belakang beberapa gerakan nasional yang ikonik, lihat Moyo dan Yeros (2005) tentang kasus-kasus internasional; Putzel (1995) serta Caouette dan Turner (2009) untuk Asia Tenggara; Wolford (2010), Fernandez (2013), serta Welch dan Sauer (2015) untuk kasus Brasil; Vergara-Camus (2014) untuk kasus Brasil dan Chiapas; Veltmeyer (1997) serta Petras dan Veltmeyer (2001) untuk Amerika Latin; Harvey (1998) untuk kasus Chiapas; dan Bachriadi (2010) untuk kasus Indonesia.

5 Untuk kajian-kajian terpilih, lihat Wolford (2010), Carter (2015), Fernandes (2013), dan Pahnke *et al*. (2015) tentang Brasil; Harvey (1998) untuk Chiapas (dan edisi spesial *Journal of Peasant Studies* 32(3–4), 2005; Vergara-Camus (2014) untuk perbandingan antara Chiapas dan Brasil; Scoones (2010), Moyo (2011), dan Mudimu *et al*. (2022) untuk Zimbabwe; O'Brien dan Li (2006), Ho (2001), Yan dan Chen (2015); Ye (2015), Yeh *et al*. (2013), serta O'Brien dan Li (2006) untuk Tingkok.

6 Dapat merujuk pada White *et al*. (2012) untuk gambaran mengenai perampasan tanah oleh korporasi; Fairhead *et al*. (2012) untuk "perampasan hijau"; Mehta *et al*. (2012) dan Franco *et al*. (2013) untuk "perampasan air"; Wolford *et al*. (2013) untuk peran negara; Margulis *et al*. (2013) untuk tata kelola global; Hall (2011), Moyo *et al*. (2012), Edelman dan León (2013), serta Edelman *et al*. (2013) untuk analisis ekonomi-politik transaksi tanah global; Hall *et al*. (2015) untuk tema perlawanan terhadap perampasan tanah; serta Park dan White (2017) untuk dimensi gender dan generasi.

BAB 2

Politik Pertanahan

Transformasi agraria berskala besar dibentuk oleh politik pertanahan; sebaliknya, politik pertanahan dibentuk oleh transformasi agraria yang lebih luas. Transformasi agraria dapat dikatakan benar-benar berskala global ketika proses sosial di Utara Global sama penting dan menariknya untuk diulas sebagaimana yang terjadi di Selatan Global (van der Ploeg 2018; Hisano *et al*. 2018; Magnan *et al*. 2022), dan ketika konteks serta sasaran perjuangan atas tanah telah berubah. Salah satu hasil dari transformasi ini adalah makin beragamnya isu agraria global yang memengaruhi bagaimana perjuangan atas tanah dibingkai dan diupayakan. Perkembangan ini, pada gilirannya, membawa implikasi penting pada cara pandang kita tentang aktivisme cendekia terkait masalah pertanahan dan perjuangan atas tanah.

DEMAM PERBURUAN TANAH SKALA GLOBAL TERKINI

Rezim pangan global telah mengalami perubahan sejak runtuhnya "Rezim Pangan Kedua" di awal 1970-an (Friedmann dan McMichael 1989; McMichael 2013; McMichael 2020). Perubahan terkininya bertepatan dengan bertemunya ragam krisis di sektor pangan, energi, iklim, dan keuangan. Dalam narasi dominan terkini tentang krisis-krisis ini, terdapat satu asumsi penting yang berasal dari ekonomi arus utama: bahwa sebagian solusi untuk ragam krisis ini terletak pada tersedianya tanah-tanah marginal, kurang dimanfaatkan, kosong, dan menganggur (Deininger 2011[1]). Gagasan utamanya adalah merespons berbagai krisis ini dengan menggunakan tanah-tanah tersebut secara lebih efisien untuk memproduksi komoditas (seperti bahan pangan dan BBN) melalui pertanian cerdas-iklim (*climate-smart agriculture*)[2], dan membatasi

serta mengamankan area penyerap karbon. Semua ini, konon, dapat dilakukan tanpa harus menggusur masyarakat lokal, karena tanah-tanah tersebut dianggap kosong dan kurang dimanfaatkan. Asumsi ini, beserta berbagai anjuran tindakan yang menyertainya, telah mengantar masuk era terkini perampasan tanah global (Cotula 2013). Meski mengakui adanya berbagai permasalahan dalam proses maupun hasil dari transaksi tanah berskala besar, para pemikir arus utama percaya bahwa persoalan ini dapat diatasi dengan menerapkan solusi "menang-menang"; mereka pun mendorong strategi jalan tengah seperti "bisnis dan hak asasi manusia" dan "tanggung jawab sosial korporasi" (CSR), dengan tujuan memperluas bisnis sembari tetap menjunjung HAM dan mendukung mata pencaharian masyarakat miskin.[3] Karena itulah kita menyaksikan menjamurnya berbagai inisiatif pengaturan mandiri yang bersifat sukarela oleh perusahaan, seperti kemitraan lintas pihak untuk menerapkan standar global minyak sawit yang bertanggung jawab (RSPO) dan banyak mekanisme serupa lainnya; di saat bersamaan, meluas pula manipulasi atas semangat dan niat awal mekanisme FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan [Padiatapa]) (Franco 2014). Berbagai inisiatif semacam ini sebagiannya telah mengabsahkan praktik perampasan tanah oleh perusahaan dan negara-bangsa, yang terus berlangsung hingga hari ini, sekaligus membuka jalan bagi para aktor lain untuk ambil bagian dalam gelombang perburuan tanah global terkini.[4]

Luas tanah yang menjadi sasaran perburuan tanah global ini kemungkinan jauh lebih besar dari yang selama ini diperkirakan—mungkin mendekati seperempat miliar hektare. Kami telah menjelaskan alasan di balik hal ini dalam tulisan tentang "transaski tanah yang gagal" (Borras *et al.* 2022b). Besar kemungkinan, perburuan tanah ini akan berlanjut dan terus mendapatkan momentumnya, mengingat makin populernya solusi berbasis tanah untuk mengatasi perubahan iklim yang diadopsi dalam proses Konferensi Para Pihak (COP) di bawah Konvensi

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) (Franco dan Borras 2021; McElwee 2022).

Sebagian besar karena perburuan tanah global ini, politik pertanahan kembali menjadi sorotan di panggung global. Pandangan arus utama yang membingkai dinamika terkini dari perampasan tanah global saat ini dibangun di atas dua narasi yang saling menguatkan dan berakar kuat pada gagasan ekonomi neoklasik serta ekonomi kelembagaan baru. Narasi ini menyatakan bahwa jenis-jenis sistem produksi agraria, penggunaan tanah, dan pengguna-tanah tertentu—seperti pertanian rakyat, dan khususnya perladangan, penggembalaan nomaden, dan perikanan tradisional—yang umumnya dijalankan dalam tata pemangkuan tanah (tenurial) adat (lihat Peters 2022), dianggap *tak efisien* secara ekonomi sekaligus *merusak* secara ekologis.

Menganggap kelembagaan akses dan kontrol atas tanah, serta cara produksi dijalankan dan diorganisir dalam masyarakat tani dan penggembala, tak efisien secara ekonomi telah menjadikan argumen efisiensi sebagai salah satu narasi paling kuat yang secara tersirat maupun tersurat membenarkan perburuan sumberdaya alam global masa kini. Tersirat dalam narasi ini bahwa meskipun ekonomi petani dan penggembala mungkin masih bisa membantu penduduk miskin pedesaan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, model ekonomi ini tidak akan mampu memberi makan penduduk dunia yang terus bertambah dan sebagian besarnya kini tinggal di perkotaan.

Klaim lama lainnya yang terus bercokol ialah anggapan bahwa bentuk-bentuk tetentu sistem produksi pedesaan bersifat merusak secara ekologis. Dulu, lembaga-lembaga konservasi arus utama dan negara-negara pusat melancarkan berbagai kampanye untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi praktik-praktik tradisional seperti pertanian berpindah, penggembalaan ternak, perikanan tradisional, dan penghidupan berbasis hutan. Mereka menerapkan berbagai skema yang didasarkan pada versi modifikasi dari pertanian menetap dan peternakan berpagar,

sering kali dengan iming-iming sertifikat pemilikan tanah pribadi sebagai modus untuk membujuk komunitas agar menyetujui perubahan tersebut. Kampanye semacam ini telah menyebabkan terganggunya mata pencaharian dan tergusurnya komunitas pedesaan, mulai dari Asia Tenggara hingga Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin. Namun, banyak komunitas petani dan penggembala yang bertahan dan melawan. Hari ini, sebagai upaya untuk menghidupkan kembali taktik-taktik lama, narasi arus utama menemukan pembenaran baru dalam wacana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perladangan bergilir, misalnya, kini dibingkai sebagai salah satu penyebab perubahan iklim, dan karenanya dianggap sebagai praktik yang harus dihentikan.

Narasi bahwa sistem produksi petani dan penggembala tak efisien secara ekonomi atau merusak secara ekologis sangatlah kuat. Kedua tudingan ini pun makin menyatu, yang kemudian dijadikan pembenaran untuk merebut sumberdaya (tanah, air, hutan) dari rakyat miskin pedesaan (Franco dan Borras 2019; Paprocki 2019). Dalam konteks klaim politik tentang tanah, perkembangan terbaru ini telah mengubah dasar pemikiran di balik kebijakan redistribusi tanah. Reforma agraria konvensional umumnya didasarkan pada gagasan redistribusi tanah-tanah milik tuan tanah besar kepada petani tak bertanah atau nyaris tak bertanah; tujuannya untuk membentuk usaha tani kecil berbasis keluarga secara masif, atau kolektif pertanian milik negara, atau perpaduan keduanya; pendekatan inilah yang selama ini dibingkai sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas (Griffin *et al*. 2002). Konteks baru ini berangkat dari kerangka reforma agraria konvensional, tetapi jauh melampauinya; ia mendorong perjuangan atas tanah yang dijalankan secara bersamaan di bawah panji-panji "keadilan agraria" dan "keadilan iklim" (Newell 2022)—atau bahkan "keadilan iklim-agraria"—yang menegaskan bahwa kedua medan perjuangan ini makin tak terpisahkan.

Perburuan tanah terkini bersifat global, dalam artian ia berlangsung tidak hanya di negara-negara berkembang yang miskin, tetapi juga di

negara-negara anggota OECD, serta di negara-negara seperti Tiongkok, Brasil, dan India yang merupakan rumah bagi perusahaan-perusahaan perampas tanah.[5] Demam perburuan ini juga mencakup sumberdaya alam yang lebih luas—yakni sumberdaya yang dimanfaatkan oleh penduduk desa tidak hanya untuk produksi ekonomi (seperti lahan pertanian), tetapi juga untuk menunjang reproduksi sosial yang lebih menyeluruh.

Meski perburuan tanah saat ini pada dasarnya berfokus untuk memperoleh penguasaan tanah, logika yang mendorongnya kini telah melampaui gagasan konvensional tentang "tanah-untuk-pertanian"; proses ini juga melibatkan berbagai mekanisme kelembagaan (*Borras et al.* 2012), seperti pertanian kontrak (Oya 2012; Nino 2017). Tidak cuma tanah, sumberdaya lain seperti air, hutan, mineral bawah tanah, dsb. juga ikut dirampas.[6] Demam perburuan tanah terkini juga tak lagi semata soal pertanian, sebab tanah-tanah yang diperebutkan kini juga mencakup lahan nonpertanian pedesaan seperti wilayah adat dan ruang-ruang pedesaan lainnya (Moreda 2017; Brent 2015). Tanah-tanah ini diburu untuk berbagai tujuan, termasuk untuk perumahan; proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), ladang pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan proyek penyerapan karbon; juga untuk memenuhi melonjaknya minat pada pertanian kota dan ruang hijau komunitas (Dunlap 2018; Stock dan Birkenholtz 2021; Torres Contreras 2021). Beberapa pihak membingkai transformasi agraria saat ini dalam konteks ekstraktivisme.[7] Banyak masalah yang muncul merupakan isu-isu lama yang terjadi dalam konteks baru, sementara sebagian lainnya adalah isu-isu baru yang dikemukakan dengan kemasan lama.

MEMPERLUAS LINGKUP POLITIK PERTANAHAN

Salah satu dampak transformasi politik pertanahan global adalah ditegaskannya kembali relevansi reforma agraria konvensional, tetapi di saat yang sama, perannya jadi relatif mengecil. Isu-isu pertanahan kontemporer dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Reforma agraria

konvensional—yang bisa dirangkum sebagai "isu pedesaan/pertanian di Selatan dan Utara" (tipe I)—kini hanya mencakup satu dari empat kategori politik pertanahan yang ada. Di ranah akademik, kategori ini menunjukkan pentingnya pendekatan ekonomi-politik dalam kajian agraria, yang menekankan perlunya memahami dinamika transformasi agraria akibat penetrasi kapitalis ke wilayah pedesaan.

Tiga kategori lainnya (tipe II, III, dan IV)—yang bisa dikatakan sudah lama ada tapi belum pernah menjadi tema utama dalam kajian agraria—kini justru makin relevan dan cukup penting. Kategori "pedesaan/nonpertanian/Selatan dan Utara" (tipe II) telah, atau seharusnya, menjadi kategori yang sama pentingnya untuk penelitian akademik dan aksi politik dalam konteks aktivisme cendekia agraria. Kategori ini berkaitan dengan ragam program serta isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama ekspansi besar-besaran proyek konservasi nonpertanian berhaluan neoliberal dan proyek penyerapan karbon; bangkitnya kembali proyek-proyek PLTA serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan ladang turbin PLTB; ekspansi masif "zona larangan tinggal" di wilayah yang dianggap "rapuh" akibat perubahan iklim; serta tanah dalam konteks reproduksi sosial lebih luas, termasuk untuk pekarangan, kebun rumah, dsb. (lihat Shah dan Lerche 2020; Borras *et al.* 2021; Cousins 2022). Mengingat banyaknya orang pedesaan yang terdampak langsung oleh kebijakan dan program ini, serta logika yang mendasarinya, kategori ini pun mesti dimasukkan sepenuhnya ke dalam kajian agraria kritis.

Hubungan pedesaan-perkotaan dan pertanian-industri (Kay 2009[8]) tetap menjadi isu yang relevan hingga kini; bahkan perkembangan terkini menjadikannya makin sentral dalam kajian agraria klasik maupun kajian agraria kritis (Borras 2023; Pattenden 2023), meskipun dengan cara yang berbeda sama sekali. Perubahan demografis dan pola akumulasi kapital belakangan ini telah mengubah sebagian hubungan dan arus tradisional pedesaan-perkotaan, termasuk yang berkaitan dengan tanah, tenaga kerja, hunian, pangan, air, hutan, lingkungan, dan

keuangan. Batas antara kategori pedesaan dan perkotaan belum pernah seburam ini, demikian juga dengan politik yang mengiringi hubungan kedua ranah. Lebih jauh lagi—bahkan bisa dibilang lebih penting—koridor pedesaan-perkotaan telah menjadi ruang utama bagi aktivitas produksi dan reproduksi sosial berbagai kelas pekerja, atau yang disebut sebagai "kelas-kelas pekerja" (Bernstein 2006; Pattenden 2023; lihat juga Borras *et al*. 2021). Karena itu, kategori "perkotaan/pertanian/Selatan dan Utara" (tipe III) dan "perkotaan/nonpertanian/Selatan dan Utara" (tipe IV) menjadi penting dengan sendirinya, seiring upaya kapital untuk merebut sebanyak mungkin sumberdaya, ruang, dan tenaga manusia demi memaksimalkan akumulasinya; di saat bersamaan, kelompok-kelompok pekerja juga membawa beberapa aspek praktik agraris ke ruang-ruang perkotaan (McClintock 2014; Roman-Alcalá 2015; Jacobs 2018; Siebert 2020). Dalam dua dekade terakhir, kita menyaksikan ledakan konflik pertanahan di berbagai belahan dunia yang berbasis di wilayah perkotaan/pinggiran kota, yang melibatkan isu pertanian maupun nonpertanian.

Pertentangan utama di pedesaan, sebagaimana dirumuskan dalam kajian agraria klasik, mengemuka sebagai konflik antara kaum tani dan kelas pemilik tanah (atau negara yang mewakili kepentingan pemilik tanah), dengan fokus utamanya pada pertanian dan isu-isu yang lebih luas terkait pembangunan ekonomi nasional. Hari ini, pertentangan yang berakar pada isu pertanahan jauh lebih beragam. Kelas pemilik tanah, termasuk tuan tanah besar (*latifundista*) dan pemilik perkebunan agribisnis, masih mendominasi dan menjadi kelas reaksioner utama di banyak masyarakat. Namun, konteks saat ini telah melibatkan kekuatan-kekuatan sosial lain yang tak kalah atau bahkan lebih ganas. Di antaranya korporasi-perampas-tanah generasi baru, baik transnasional maupun domestik; para pembeli tanah perorangan lintas batas nonkorporasi yang merajalela, seperti pelaku usaha tani, makelar, penyewa, penipu, pemalsu, dan kelompok yang dikenal sebagai "mafia tanah" (Sud 2014; Levien 2021); lembaga keuangan seperti dana pensiun (Sauer dan Leite 2012;

Clapp 2014; Fairbairn 2014, 2020; Isakson 2014; Visser *et al*. 2015; Sosa dan Gras 2021); jaringan pasar swalayan dan "imperium bisnis pangan" (van der Ploeg 2008; Arboleda 2020); penggunaan teknologi digital hipermodern dalam sistem pertanahan dan pangan (Fraser 2019; Carolan 2020); berbagai investor nontradisional di sektor pertanian, mulai dari perusahaan otomotif hingga pengolahan hasil ternak (Franco *et al*. 2010); serta kalangan konservasionis kelas kakap (Brockington dan Duffy 2011; Arsel dan Büscher 2012; Büscher *et al*. 2012; Temudo 2012; Pellegrini *et al*. 2014). Sebagian besar tanah yang jadi sasaran diklaim sepihak oleh negara pusat, sehingga menjadikan negara sebagai makelar tanah kelas kakap, yang memungkinkan dan melancarkan perampasan tanah, yang kerap menggunakan pemaksaan di luar mekanisme ekonomi (Levien 2013; Wolford *et al*. 2013; Andreas *et al*. 2020).

Dalam latar di mana yang dibutuhkan hanyalah tanahnya, dan bukan orang-orangnya, sebagaimana dirumuskan Tania Li (2011), penduduk desa sangat mungkin terusir dari tanah mereka. Situasi ini makin relevan, seiring pesatnya perkembangan perkebunan dengan berbagai tipenya di masa kini (Ito *et al*. 2014; Hall *et al*. 2017; Li dan Semedi 2021). Semua ini telah memicu minat kajian multidisiplin tentang kehidupan di perkebunan, dan juga mendorong sebagian besar ilmuwan untuk membingkai persoalan ini melalui lensa "*plantationocene*" (epoh perkebunan) (Davis *et al*. 2019; Wolford 2021; Wang dan Xu 2022). Akan tetapi, kapital tidak pernah terikat pada satu mekanisme atau bentuk pengusaan tanah tertentu, selama usahanya menghasilkan keuntungan. Perampasan tanah, dengan demikian, bisa terjadi melalui hubungan pasar, seiring berbagai mekanisme lain untuk merampas penguasaan tanah, yang kerap melibatkan pemaksaan di-luar-ekonomi (Grajales 2011; Levien 2018), seperti dalam kasus ketika penduduk desa tidak langsung diusir dari tanahnya, tetapi justru diserap ke dalam bisnis kapitalis yang sedang berkembang. Seluruh dinamika ini telah menghidupkan kembali poros-poros lama konflik politik sekaligus memicu poros-poros baru, dan memicu berbagai reaksi politik dari bawah (Adnan 2013; Borras

dan Franco 2013; Hall *et al*. 2015; Fameree 2016). Ketika dijalankan di lapangan, berbagai bentuk transaksi tanah berdampak pada komunitas-komunitas yang sudah beragam dan terdiferensiasi secara sosial. Dampaknya pun berlainan bagi kelompok sosial yang berbeda-beda, memicu reaksi politik yang beragam, kompleks, dan kerap kontradiktif dalam hal kelas dan poros-poros perbedaan yang saling membentuk: ras, etnis, kasta, gender, generasi, agama, dan kebangsaan (lihat, misalnya, Gyapong 2019).

Dinamika politik dalam keempat kategori yang dipaparkan di atas pada dasarnya semuanya berkaitan dengan politik pertanahan, tetapi tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam narasi politik pertanahan konvensional atau bentuk-bentuk agitasi politik masa lalu. Struktur sosial yang terlibat serta prasyarat kelembagaan untuk memperluas ke kategori-kategori baru sangat berbeda dengan yang biasanya dikaitkan pada narasi konvensional seputar politik pertanahan. Karena itu, meski cara-cara lama dalam mengajukan pertanyaan masih tetap relevan, diperlukan juga cara-cara baru.[9] Beberapa intelektual menyerukan agar cakupan tematik kajian agraria kritis diperluas, untuk mencakup bidang-bidang yang selama ini kerap dianggap tak lazim, seperti sistem penggembalaan (*pastoralism*) (Scoones 2021), migrasi dan pekerja migran sektor pertanian (Corrado *et al*. 2016; Delgado-Wise dan Veltmeyer 2016; Xiuhtecutli dan Shattuck 2021; Pelek 2022), tenaga kerja (Oya 2013; Chambati 2017; Pye 2021), serta produksi ekonomi dan reproduksi sosial (Pattenden 2018; Shah dan Lerche 2020; Cousins 2022). Perangkat analisis klasik memang tetap relevan, tapi perangkat analisis baru—yang bahkan mungkin belum terbayangkan atau diciptakan—sangat dibutuhkan untuk mendalami makna dan implikasi dari apa yang sedang berlangsung di medan konflik pertanahan global. Mayoritas gerakan agraria progresif masih membingkai perjuangan atas tanah dalam kerangka konvensional perjuangan untuk "reforma agraria", dengan penekanan tambahan pada isu "wilayah" untuk masyarakat adat (Rosset 2013). Pendekatan ini tentu sangat penting. Namun, bahkan gerakan nasional kontemporer yang

paling terorganisir sekalipun masih cenderung berfokus pada isu-isu tipe I (pedesaan/pertanian).

Jika kita mendefinisikan aktivisme cendekia hanya sebatas keterlibatan dengan gerakan agraria yang sudah terorganisir, dan sepenuhnya mengikuti arahan dari gerakan-gerakan ini, maka aktivisme cendekia pada dasarnya hanya akan mencerminkan kondisi gerakan agraria yang ada saat ini. Secara logis, ini juga berarti bahwa ruang gerak aktivisme cendekia akan terbatas—dan cukup puas—dengan sekadar mengulang seruan untuk reforma agraria konvensional, dan karenanya akan tetap terfokus pada isu-isu tipe I, seperti yang memang terjadi saat ini. Padahal, ada jauh lebih banyak masyarakat dan konteks sosial di mana masalah pertanahan sangat mendesak, tetapi tidak menjadi medan juang politik gerakan sosial mana pun, karena berbagai alasan, termasuk karena absennya pertarungan atau gerakan politik yang terorganisir, atau kalau pun ada, pertarungan dan gerakannya terlalu lokal, berskala kecil, dan terisolasi (Malseed 2008). Dilema yang muskil pun muncul: apa yang harus dilakukan dalam situasi ketika kerja-kerja cendekiawan-aktivis (termasuk, misalnya, analisis berbasis lapangan atas berbagai persoalan yang ada, atau dukungan dalam merumuskan tuntutan dan memperluas jangkauan mobilisasi politik) sangat dibutuhkan, tapi tidak ada gerakan terorganisir dari kelas pekerja pedesaan? Jika pintu masuk utama cendekiawan-aktivis ke dalam kerja lapangan hanya melalui gerakan yang sudah terorganisir, maka kemungkinan besar kerja mereka akan lemah di tempat-tempat yang justru paling membutuhkannya. Dalam tipologi isu, perjuangan, dan gerakan agraria yang dibahas sebelumnya, terlihat jelas bahwa politik pertanahan jadi makin beragam, tapi gerakan-gerakan agraria masih terkonsentrasi pada tipe I (pedesaan/pertanian). Jika kita memahami hubungan antara aktivisme cendekia/cendekiawan-aktivis dan perjuangan atas tanah/gerakan agraria bersifat interaktif, maka cendekiawan-aktivis mestinya memberi perhatian yang sama besarnya pada konteks-konteks di mana belum ada gerakan yang terorganisir. Artinya, cendekiawan-aktivis perlu bekerja pada semua enam tipe ideal

politik pertanahan; inilah salah satu cara untuk merespons berbagai situasi dalam isu dan perjuangan atas tanah masa kini yang masuk tipe-tipe ideal tersebut, terutama di tengah lemahnya keberadaan gerakan agraria yang terorganisir di banyak tempat yang justru paling membutuhkan kehadiran mereka. Kita akan kembali membahas persoalan ini di Bab 3, saat membicarakan dinamika "*vanguardism*" (kepeloporan) dan "*tailism*" (pengekoran) dalam aktivisme cendekia dan gerakan agraria.

GERAKAN AGRARIA

Perubahan konteks dalam lanskap politik agraria, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, membawa pengaruh besar pada kemunculan gerakan agraria, perkembangan watak politiknya, juga ragam bentuk dan tingkat pembangunan gerakan maupun aksi kolektif yang menyertainya. Dalam dua hingga tiga dasawarsa terakhir, telah terjadi dua transformasi politik penting dalam gerakan agraria yang perlu disoroti secara singkat: transnasionalisasi dan perluasan gerakan.

Transnasionalisasi

Globalisasi neoliberal telah dan terus membawa dampak luar biasa luas terhadap masyarakat pekerja di seluruh dunia, yang memicu beragam reaksi dari bawah. Bagi kaum tani dan dunia pedesaan, dampak ini sebagian besarnya buruk. Inilah konteks penting bagi proses transnasionalisasi banyak gerakan keadilan sosial, termasuk yang terlibat dalam perjuangan agraria (lihat, misalnya, Keck dan Sikkink 1998; Tarrow 2005; Baksh-Soodeen dan Harcourt 2015). Meskipun perjuangan petani sudah mengalami internasionalisasi sebelum pendirian La Vía Campesina pada 1993, kajian agraria klasik tentang politik gerakan agraria cenderung berfokus pada tingkat lokal dan nasional. Bisa dimengerti kalau sebagian besar kajian menaruh perhatian utama pada dinamika politik antara lokal dan nasional, mengingat banyak masyarakat tani hidup dalam keterisolasian geografis dan politik dari pusat-pusat kekuasaan negara, yang merupakan titik acuan utama bagi gerakan agraria.

Sejak 1980-an, banyak negara-bangsa mulai terdesak oleh neoliberalisme dari tiga arah: dari bawah, yakni oleh dorongan kuat untuk desentralisasi politik dan fiskal serta dekonsentrasi administratif; dari samping, melalui privatisasi besar-besaran atas struktur dan tanggung jawab tata kelola pemerintahan; dan dari atas, oleh globalisasi serta pelimpahan sebagian kewenangan negara kepada lembaga-lembaga antarpemerintah dan keuangan internasional. Negara-bangsa dan pola-pola tata kelola pemerintahannya pun mengalami perubahan signifikan, demikian pula dengan masyarakat sipil dan gerakan agraria (McKeon 2009). Perubahan ini berdampak luas pada persoalan pertanahan yang berkaitan erat dengan negara dan otoritas (Lund 2016). Karena yang menjadi acuan utama gerakan agraria ialah negara-bangsa, transformasi negara-bangsa pun memicu transformasi gerakan agraria. Banyak gerakan mengikuti tiga jalur transformasi seperti yang dialami negara-bangsa. Beberapa gerakan agraria mulai berfokus pada arena pertarungan di tingkat subnasional dan lokal, sebagian lainnya mengikuti jalur privatisasi dan terlibat dalam kompleks inisiatif "substitusi negara" (program-progam untuk menggantikan peran negara) yang sedang bermunculan seperti keuangan mikro dan asosiasi irigasi swadaya. Ada pula gerakan yang dengan berani melintasi batas dan membangun jaringan serta koalisi internasional, tetapi meninggalkan medan juang lokal dan nasional. Banyak gerakan agraria yang bergeser dari pusat nasional, meski tidak semuanya. Beberapa tetap mencoba menjalin benang merah politik dan keorganisasian yang bisa menyatukan gerakan serta aksi kolektif dari masyarakat lokal ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Gerakan sosial (agraria) semacam ini telah berkembang menjadi jaringan yang terhubung secara vertikal (Gaventa dan Tandon 2010). Pola serupa juga terlihat dalam politik pertanahan yang berkaitan dengan gerakan agraria, setidaknya dalam hal perjuangan atas tanah di tingkat lokal dan nasional (Lund 2021).

Kelompok yang paling padu secara politik dan paling menonjol di antara berbagai GAT kontemporer ini ialah La Vía Campesina. Basis

massanya beragam dalam hal ideologi, namun kepemimpinan globalnya dipegang kuat oleh para "populis agraria radikal" yang terinspirasi dan dipengaruhi—baik secara eksplisit maupun implisit—oleh gabungan gagasan Marxis dan Chayanovian. Kepemimpinannya saat ini berpegang teguh pada gagasan "otonomi" gerakan agraria dari partai politik.[10] Salah satu kampanye global yang dipelopori La Vía Campesina sejak 1990-an adalah reforma agraria, yang diambil dari kerangka reforma agraria redistributif konvensional seperti yang dibahas di atas.

Diversifikasi Isu, Perjuangan, & Gerakan Agraria

Karena terjadi perubahan konteks global, gerakan keadilan sosial yang peduli pada isu pertanahan tidak lagi terbatas pada gerakan petani yang menuntut reforma agraria untuk membangun pertanian skala-kecil berbasis keluarga. Kini kita menyaksikan kemunculan berbagai gerakan sosial yang mencerminkan perubahan watak politik pertanahan dan kehidupan sosial lebih luas. Kapitalisme menembus pedesaan dalam berbagai bentuk dan melalui beragam mekanisme baru, termasuk yang secara diskursif dikaitkan dengan agenda perubahan iklim, seperti proyek konservasi raksasa, tanaman serbaguna dan komoditas, serta perluasan wilayah perkotaan dan pinggiran kota untuk permukiman, bisnis, dan kawasan industri, hingga kompleks wisata (Zoomers 2010; Ojeda 2012). Semua ini kemudian memicu reaksi dari berbagai kelompok sosial dan kelas yang menghadapi beragam persoalan pertanahan, yang sebagian tercermin pada munculnya mobilisasi dan pertarungan politik seputar tema pertanian pedesaan, nonpertanian pedesaan, pertanian perkotaan, dan nonpertanian perkotaan, baik di Selatan maupun Utara Global.

Gerakan Agraria & Pertanian

Gerakan agraria yang berakar dan berorientasi pada pertanian baik di Selatan maupun Utara Global masih menjadi bentuk utama gerakan agraria hari ini. Seperti di masa lalu, mobilisasi gerakan ini cenderung berpusat pada perebutan kepemilikan dan/atau persoalan produksi. Na-

mun, di masa kini, gerakan agraria yang secara kuat berfokus pada perjuangan reforma agraria bisa dikatakan relatif lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, beberapa gerakan agraria nasional tetap berhasil membawa dampak cukup penting atau bahkan dramatis dalam konteks nasional masing-masing, dan dalam beberapa kasus menarik perhatian serta menjadi sumber inspirasi di tingkat internasional (Moyo dan Yeros 2005). Gerakan agraria nasional yang terorganisir cukup padu dalam kategori ini termasuk Gerakan Pekerja Tunakisma (MST) di Brasil (Wolford 2020) dan di Kolombia (Coronado 2022; Sankey 2022); sejumlah gerakan agraria di Indonesia (Bachriadi 2010; Lund 2021) dan di India (Levien 2018); para pengeklaim tanah yang terorganisir maupun yang tanpa bentuk di Zimbabwe (Moyo 2011); serta gerakan-gerakan agraria di Filipina yang menggunakan beragam strategi klaim (Franco 2008a, 2008b). Di beberapa negara lain, seperti Afrika Selatan (Kepe dan Hall 2018) dan Ethiopia, isu pertanahan juga menjadi arena perebutan yang cukup sengit, tetapi para aktor kuncinya bukanlah gerakan petani nasional yang besar dan terorganisir secara padu, melainkan perpaduan antara LSM/OMS, lembaga pembangunan, dan akademisi radikal. Ada juga negara-negara yang berada di antara dua kategori ini, di mana gerakan agraria nasionalnya yang baru berkembang menunjukkan tingkat partisipasi cukup tinggi dalam pertarungan politik terkait pertanahan, meskipun gerakan-gerakan ini belum sepenuhnya terorganisir atau mapan. Contohnya adalah Myanmar selama periode 2010 hingga kudeta militer pada Februari 2021 (Ra dan Ju 2021).

Selain itu, konsentrasi-ulang tanah yang secara signifikan terjadi di Utara Global telah memicu kembali minat dan mobilisasi di kalangan petani di sana. Hal ini sebagiannya dilatarbelakangi oleh dua fenomena: skema subsidi yang timpang, yang lebih menguntungkan pertanian skala menengah dan besar yang kuat secara komersial, serta raksasa industri pangan dan agribisnis, di samping kesulitan petani muda dan calon petani untuk mendapatkan akses tanah atau masuk ke sektor pertanian, sebagaimana disoroti dalam kajian lintas negara oleh European

Coordination Via Campesina dan Transnational Institute (Franco dan Borras 2013; van der Ploeg *et al.* 2015). Sementara itu, konteks khusus negara-negara pascasosialis di Utara telah membuka kembali perdebatan dan mobilisasi terkait kebijakan pertanahan dan gerakan agraria. Hal ini, misalnya, dibahas oleh Mamonova (2015) dalam kajiannya tentang Ukraina, Visser *et al.* (2012) mengenai Rusia, dan Magnan *et al.* (2022) tentang Kanada.

Banyak gerakan agraria kontemporer telah bekerja di seputar isu-isu produksi dan perdagangan, khususnya organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dan bioteknologi, dominasi korporasi (*corporate capture*) atas pertanian, perdagangan, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Bello 2003), serta pembangunan sistem pertanian dan pangan alternatif, termasuk kedaulatan pangan. Beberapa gerakan, seperti MST Brasil, berhasil memadukan mobilisasi yang berorientasi pada tanah dengan masalah-masalah produktivisme (gagasan memaksimalkan produksi seturut rezim neoliberal yang ditentang oleh gerakan agraria progresif). Organisasi petani di Utara secara khusus cukup aktif bekerja di seputar isu-isu ini. Mobilisasi terkait perdagangan internasional, bioteknologi/GMO, dan dominasi korporasi di sektor pertanian sangatlah pekat, dan beberapa gerakan mampu memanfaatkan masalah-masalah ini untuk menggerakkan protes pada 1990-an. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan surutnya mobilisasi massa dan agitasi yang berfokus pada masalah-masalah itu. Masih harus dilihat apakah protes petani di India pada 2020–2021 merupakan pengecualian atau justru menjadi sinyal bergesernya fokus gerakan yang kembali ke isu-isu tersebut (Baviskar dan Levien 2021; Jodhka 2021; Kumar 2021; Lerche 2021).

Selain itu, ada berbagai isu yang secara langsung berkaitan dengan masalah agraria dan seharusnya menjadi bagian dari perjuangan gerakan agraria, tetapi belum digarap secara memadai dan konsisten. Kerangka dominan reforma agraria, yang diwarisi gerakan agraria dari perjuangan atas tanah klasik, pada dasarnya berfokus pada reformasi hubungan

kepemilikan *tanah pertanian*. Kerangka ini terutama berorientasi pada aspek produksi ekonomi. Menurut kami, perspektif ini memang diperlukan, tetapi tidak cukup, untuk memahami masalah pertanahan dan perjuangan atas tanah saat ini; sebab, dalam banyak konteks masyarakat, tanah juga merupakan hal sentral bagi kebutuhan reproduksi sosial pekerja pedesaan. Di pedesaan, selain menyediakan akses atas lahan pertanian, tanah juga berarti akses atas semua atau sebagian dari hal-hal berikut: pekarangan rumah; kebun dapur; kebun komunitas; hutan masyarakat; sungai, danau, atau mata air; taman bermain untuk anak-anak; tempat-tempat spiritual; padang penggembalaan bersama; jalur lebih aman dan lebih singkat untuk perjalanan; dsb. Hilangnya atau berkurangnya akses secara tiba-tiba atas semua atau beberapa hal tersebut dapat berdampak buruk, dengan derajat berbeda-beda, terhadap kemampuan rumah tangga untuk mereproduksi tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan dasar hidup: pangan, sandang, papan, dan perawatan. Sejauh mana sebuah rumah tangga punya akses atas berbagai jenis tanah yang dibutuhkan untuk reproduksi sosial akan memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas di ranah produksi. Yang jelas, ranah produksi dan reproduksi sosial saling membentuk (Bhattacharya 2017; Pattenden 2018; Shah dan Lerche 2020; O'Laughlin 2021; Cousins 2022). Masalah pertanahan pun seharusnya dipahami dengan cara demikian, dan karena itu, perjuangan atas tanah juga perlu dibingkai dengan kerangka tersebut. Jika kita memetakan akses tanah dan sumber penghidupan rumah tangga agraris dari perspektif yang berpusat pada produksi, dengan jalur akses digambarkan secara grafis sebagai garis-garis lurus, maka yang terlihat ialah gambaran minimalis: sebidang pekarangan dan lahan pertanian milik petani. Namun, jika kita menggambar peta akses tanah dan sumber penghidupan dengan mempertimbangkan dimensi produksi maupun reproduksi sosial, maka yang muncul ialah gambaran yang jauh lebih kompleks, menyerupai jaring-jaring yang saling terhubung. Pendekatan terakhir ini dapat memperlihatkan dengan gamblang bagaimana penghidupan agraris te-

lah dipisahkan secara tidak alami dan merusak dari keterikatannya yang bercorak sosial-agroekologis. Memandang tanah dari perspektif yang menggabungkan produksi dan reproduksi sosial berarti memahami akses atas tanah sebagai "serangkaian akses atas berbagai jenis lahan dan alam" (Ribot dan Peluso 2003; Borras *et al*. 2021). Pandangan ini membantu kita untuk memahami masalah agraria secara lebih tepat dalam upaya strategis seperti transisi menuju agroekologi (Perfecto dan Vandermeer 2010; Altieri dan Toledo 2011; Rosset dan Altieri 2017; Akram-Lodhi 2021; Holt-Giménez *et al*. 2021).

Gerakan Agraria Nonpertanian

Dalam tiga dasawarsa terakhir, salah satu perkembangan politik paling penting di ranah pedesaan adalah munculnya kebutuhan—baik di Selatan maupun Utara—Global akan gerakan rakyat yang berakar kuat di desa tapi tidak menjadikan pertanian sebagai kepentingan dan tuntutan utamanya. Jenis gerakan ini tampaknya akan makin penting di zaman perubahan iklim, perburuan sumberdaya global, dan munculnya kaum prekariat[11] global. Ketika kapital terus memperluas wilayah geografis yang disasar demi mendapatkan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, atau bahkan gratis, serta membuka pasar baru, makin banyak pula ruang yang ditembus, dan makin banyak orang yang terseret ke dalam proses akumulasi kapital. Mekanisme merembesnya kapitalisme nonpertanian ke pedesaan telah berkembang biak dalam beragam bentuk. Yang paling menonjol ialah proyek konservasi besar terkait hutan, perikanan, keanekaragaman hayati, dan margasatwa; juga skema kompensasi karbon seperti REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dan "karbon biru". Semua ini telah mendapat penguatan politis dan logistik sangat besar dari wacana arus utama tentang perubahan iklim dan kebijakan-kebijakan baru yang menyertainya seputar mitigasi dan adaptasi (lihat, misalnya, Corbera 2012; Barbesgaard 2018). Banyak proyek konservasi skala besar itu juga dijalankan secara militeristik (Dressler dan Guieb 2015; Verweijen dan Marijnen 2018). Beberapa

proyek pembangunan modernis berskala besar yang konvensional pun kini diberi label baru sebagai proyek mitigasi perubahan iklim; misalnya megaproyek PLTA dan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) yang dalam satu atau dua dasawarsa terakhir mengalami ekspansi besar-besaran dengan luasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal hutan yang dibongkar dan luas tananam (Hunsberger *et al*. 2017; Lamb dan Dao 2017; Scheidel dan Work 2018; Borras *et al*. 2020). Ada kecenderungan global menuju perubahan zonasi dan klasifikasi ulang ruang, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rapuh akibat perubahan iklim; akibatnya, orang-orang diusir atau dilarang mempertahankan akses mereka atas ruang-ruang itu, baik itu tanah, air, maupun hutan.

Jenis-jenis penetrasi kapitalis ke pedesaan ini telah memicu lahirnya gerakan keadilan sosial yang isu, tuntutan, dan perjuangannya tidak melulu berfokus pada pertanian. Misalnya, masyarakat adat bergerak untuk mempertahankan wilayah mereka; gerakan keadilan sosial tumbuh dari kampanye antibendungan; gerakan melawan proyek perkebunan/pertanian tanaman sejenis (monokultur) industrial; komunitas pesisir melawan perampasan ruang yang dijalankan atas nama adaptasi perubahan iklim; dan warga desa melancarkan gerakan menentang berbagai bentuk eksplorasi tambang yang menyerobot dan mengeksploitasi ruang hidup mereka. Wacana arus utama tentang perubahan iklim terus mendapatkan momentum (Ribot 2014, 2022; Borras *et al*. 2022a), dengan membingkai konsep-konsep luas seperti "efisiensi", "ketangguhan" (resiliensi), dan "kelangkaan" dalam perspektif ekonomi neoklasik atau ekonomi kelembagaan baru (Scoones *et al*. 2019; Vigil 2022). Walhasil, kita menyaksikan makin maraknya perampasan ruang dan pengusiran, yang diiringi meningkatnya mobilisasi politik dan berbagai bentuk pertarungan. Semua ini mendorong munculnya lebih banyak gerakan yang mencakup beragam bentuk perjuangan atas tanah, tapi tidak sepenuhnya atau secara klasik bercorak agraris. Perpaduan antara kampanye dan gerakan keadilan agraria, lingkungan, dan iklim merupakan

hasil yang tengah mengemuka dari serangkain perubahan ini di wilayah pedesaan (Yaşın 2022).

Masih banyak masalah pertanahan di pedesaan yang bersifat nonagraris dan jarang disentuh oleh gerakan agraria kontemporer, baik dalam kerja pengorganisasian dan aksi langsung maupun melalui kerja koalisi dengan gerakan dan kelompok politik nonagraris lainnya. Ada masalah pertanahan yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan bagi kelas pekerja pedesaan yang tinggal di pusat-pusat desa maupun kota-kota kecil dan menengah, yang sumber penghidupannya tidak langsung terkait dengan aktivitas agraris. Kelompok ini mencakup para pengangguran, terutama kaum muda; pedagang kaki lima; pegawai pemerintah berupah rendah seperti petugas kebersihan jalan; pekerja lepas berupah murah di sektor jasa; pengrajin; penambang tradisional; buruh tambang dan pabrik; dsb. Banyak dari mereka tinggal di rumah atau gubuk yang berdiri di atas tanah dengan status kepemilikan yang tidak terjamin. Akses atas berbagai jenis lahan sangatlah krusial bagi kegiatan reproduksi sosial seperti yang dibahas di atas. Kelompok-kelompok ini menghadapi masalah pertanahannya sendiri, dan kebutuhan mereka untuk berjuang secara terorganisir demi mengamankan atau mempertahankan akses atas tanah yang mereka perlukan sangatlah mendesak. Banyak kalangan populis sayap kanan kontemporer telah memanfaatkan isu-isu tersebut dan berhasil meraih dukungan dari komunitas pedesaan semacam itu (Edelman 2021; Scoones *et al*. 2018). Namun, berbagai masalah pertanahan ini tidak bersifat agraris semata, dan karenanya tidak seharusnya dileburkan begitu saja ke dalam bingkai utama gerakan agraria. Isu-isu ini tersebar cukup luas, mengingat besarnya jumlah kelas pekerja pedesaan yang hidup dalam kondisi rentan di seluruh dunia; tapi justru inilah salah satu jenis persoalan yang paling jarang diperhatikan oleh gerakan antikapitalis yang terorganisir. Gerakan agraria kontemporer (dan juga cendekiawan-aktivis) akan mengemban peran penting dalam membangun kerja-kerja koalisi bersama sektor ini.

Geliat Baru Gerakan & Inisiatif Pertanian Kota

Seiring meluasnya wilayah perkotaan dan pinggiran kota secara eksponensial, berbagai masalah pedesaan dan perkotaan makin terkait erat melalui pertanian dan industri, arus tenaga kerja, serta politik pangan. Ketika makin banyak tanah pertanian yang dicaplok untuk perluasan perkotaan, makin banyak pula ruang pedesaan dan pertanian yang tercakup ke dalam wilayah yang secara resmi dikategorikan perkotaan (Jacobs 2018; Siebert 2020). Sebaliknya, penduduk perkotaan pun meluber ke pedesaan, memperluas komunitas pinggiran kota (suburban/periurban), seperti yang terlihat dalam kasus menjamurnya rumah kebun (*dacha*) di Rusia (Mamonova dan Sutherland 2015). Ketika kota-kota besar makin sesak, kita pun menyaksikan munculnya inisiatif swasembada yang tidak terorganisir dan tanpa bentuk dari penduduk kota, baik di Selatan maupun Utara Global. Mereka menanam tanaman pangan di petak-petak tanah kecil di mana saja seadanya—di pinggir jalan, tepi rel kereta api, kapling kosong—sering kali secara informal dan/atau ilegal. Praktik ini berjalan beriringan, dan kadang bertumpang tindih, dengan bentuk pertanian kota yang lebih terorganisir (McClintock 2014). Gerakan-gerakan baru ini berskala kecil, tersebar, sering kali bentuknya samar, dan bersifat spontan, tetapi inisiatif-inisiatif ini sendiri beserta logika yang melatari kemunculannya merupakan fenomena menarik yang perlu ditelaah lebih dalam, baik secara ilmiah maupun politik; sebab, ada kemungkinan kelompok ini akan terus tumbuh dengan signifikansi politik yang makin besar. Semua ini membuat masalah agraria jadi makin kompleks untuk dipelajari dan, di sisi lain, membuat pembacaan atas masalah perkotaan (*urban question*) jadi lebih rumit (Brenner dan Schmid 2014).

Geliat Baru Gerakan & Inisiatif Perkotaan yang Berorientasi pada Tanah Nonpertanian

Akhirnya, penting juga mencermati munculnya gerakan dan mobilisasi perkotaan yang berorientasi pada persoalan pertanahan tapi tidak

berpusat pada pertanian. Misalnya, di banyak negara berkembang, masyarakat pesisir perkotaan sedang mengalami penggusuran atau ancaman pengusiran oleh pemerintah yang menggunakan narasi adaptasi perubahan iklim sebagai dalih. Kapital terus melahap ruang hijau umum atau area yang berpotensi dijadikan taman kota, sementara pemerintah berdalih kekurangan dana guna membenarkan praktik privatisasi tanah-tanah publik yang tersisa, atau merampas tanah komunal dan menjualnya kepada perusahaan. Kita telah menyaksikan kecenderungan ini di berbagai penjuru dunia, terutama dalam beberapa dekade terakhir, dan kita juga menyaksikan meningkatnya gerakan komunitas lokal yang melawan bentuk-bentuk pemagaran tersebut. Ini jelas merupakan masalah pertanahan di ruang perkotaan: meski berbeda dari konsep konvensional dalam kajian agraria, tapi tetap saja ia merupakan "masalah pertanahan".

Singkatnya, selama tiga dekade terakhir, politik pertanahan telah bertransformasi, begitu pula perjuangan atas tanah. Isu-isu lama kembali muncul dalam konteks baru, seperti berlanjutnya perjuangan atas tanah dalam konteks reforma agraria yang berpusat pada lahan pertanian untuk produksi ekonomi, meskipun perjuangan ini jauh lebih sedikit dan secara politik lebih lemah dibandingkan yang berlangsung di abad XX. Sementara itu, banyak isu baru yang dibingkai dalam konteks lama: misalnya, pertarungan politik seputar langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis tanah kini makin sering dianggap sebagai perjuangan atas tanah, yang tumpang tindih dengan perjuangan atas tanah konvensional. Salah satu perubahan paling penting dalam perjuangan agraria global adalah munculnya perjuangan keadilan lingkungan (Peluso *et al*. 2008; Martinez-Alier *et al*. 2016; Scheidel *et al*. 2020). Perjuangan ini telah meluas ke dan menyatu dengan perjuangan atas tanah untuk keadilan agraria serta keadilan lingkungan dan iklim. Istilah singkat yang kami gunakan untuk menyebut bentuk bauran ini ialah "keadilan iklim-agraria", yang barangkali menjadi ciri khas utama perjuangan atas tanah abad XXI (Borras dan Franco 2018; Calmon *et al*. 2021; Sekine 2021; Shah 2022; Yaşın 2022).[12] Para aktivis terus men-

cari jalur ideologis dan politik untuk menghadapi berbagai perubahan yang mengancam keberlangsungan hidup dan sumber penghidupan rakyat pekerja, baik di pedesaan maupun perkotaan, di seluruh dunia. Namun, transformasi semacam ini juga membuka peluang politik yang belum pernah ada sebelumnya bagi perjuangan keadilan sosial. Konteks yang tengah berubah inilah yang menyediakan lahan subur bagi lonjakan gelombang aktivisme cendekia agraria kontemporer, sekaligus membentuk karakternya dalam hal aktor utama, agenda, lokasi perjuangan, dan politik pengetahuan dalam perjuangan atas tanah dan aktivisme cendekia.

CATATAN

1 Untuk kritik, lihat White *et al.* (2012), Wolford *et al.* (2013), serta Montefrio dan Dressler (2016).

2 Untuk kritik, lihat Clapp *et al.* (2018), Newell dan Taylor (2018), serta Taylor (2018).

3 Lihat Claeys (2015), Claeys dan Edelman (2020), serta Monsalve (2013) untuk masukan kritis.

4 Untuk masukan kritis yang umum mengenai skema sukarela CSR berbasis pasar, lihat O'Laughlin (2008), de Schutter (2011), serta Tsikata dan Yaro (2014); untuk studi kasus lokal, lihat Thuon (2018).

5 Untuk konteks Eropa, lihat laporan Transnational Institute tentang perampasan tanah dan konsentrasi tanah (Franco dan Borras 2013) serta van der Ploeg *et al.* (2015); lihat juga Andreas *et al.* (2020) untuk kaus India dan Tiongkok; Visser *et al.* (2012) untuk kasus Russia; Ashwood *et al.* (2020) untuk kasus Amerika Serikat; dan Xu (2019) untuk kasus Tiongkok.

6 Untuk kajian tentang air, lihat Mehta *et al.* (2012), Woodhouse (2012), dan Franco *et al.* (2013); tentang hutan dan perampasan hijau, lihat Benjaminsen dan Bryceson (2012) serta Fairhead *et al.* (2012); tentang tenaga kerja, lihat Oya (2013); mengenai berbagai bentuk penguasaan tanah yang dihasilkan oleh semua hal tersebut, lihat Hall *et al.* (2010) serta Peluso dan Lund (2011).

7 Kepustakaan tentang ekstraktivisme mengalami lonjakan luar biasa akhir-akhir ini. Untuk beberapa hal penting yang relevan dengan argumen kami di sini, lihat Chagnon *et al.* (2022), Nygren *et al.* (2022), Burchardt dan Dietz (2014), Veltmeyer dan Petras (2014), Arsel *et al.* (2016), McKay (2017), Alonso-Fradejas (2021), Kroger (2021), serta McKay *et al.* (2021).

8 Lihat juga Nikulin dan Trotsuk (2016) untuk kasus spesifik Rusia.

9 Beberapa kajian kunci yang relevan adalah Deere (1995), Agarwal (1994), Bernstein dan Byres (2001), Wolford (2005, 2010), Scoones (2009a, 2015), Akram-Lodhi dan Kay (2010a, 2010b), Shah dan Harriss-White (2011), serta Moyo *et al.* (2013).

10 Uraian sejarah yang berharga tentang kebangkitan La Vía Campesina beserta ciri-ciri utamanya dapat ditemukan dalam kajian Desmarais (2007), Wittman *et al.* (2010), Martinez-Torres dan Rosset (2010), serta Edelman dan Borras (2016).

11 *Catatan terjemahan*: Kelas (pekerja) yang sedang terbentuk, dicirikan oleh kondisi hidup yang serba tidak pasti dan tidak aman, yang berdampak pada kesejahteraan materiel maupun psikologis (Guy Standing 2011).

12 Untuk pembahasan tentang pembingkaian serupa, yang berangkat dari Marxisme ekologis dan kasus historis Dust Bowl tahun 1930-an di Amerika Serikat, lihat Holleman (2018).

BAB 3

Aktivisme Cendekia

Para filsuf selama ini hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal, yang utama ialah bagaimana mengubahnya.

—Karl Marx

Saat saya masuk ke dalam kelas, atau memberikan kuliah umum, saya berusaha memanfaatkan seluruh "daya abstraksi" dan semua penelitian yang saya punya, dengan harapan dapat mengubah pikiran orang-orang. Bagi saya, itulah komitmen radikal yang sejati. Ironinya, tentu saja, yang dibutuhkan komitmen seperti itu bukanlah penguatan hubungan dengan para aktivis atau pihak lain "di luar akademia", melainkan justru, setidaknya untuk sementara, memutus hubungan tersebut. Solidaritas—dan melakukan jenis penelitian yang mungkin memberi manfaat—kadang memerlukan kesendirian. Tanpa waktu yang dihabiskan di perpustakaan, di rumah di ruang kerja saya untuk berpikir, membaca, dan menulis, saya tidak dapat membawa "daya abstraksi" ke dalam perjuangan, dan tidak ada fakta yang meyakinkan. Jadi, poin utama perlu ditekankan lagi: terkadang, cara terbaik bagi seorang ilmuwan radikal untuk "memberi pengaruh melampaui akademi" justru dengan berkomitmen pada penelitian yang bermutu, radikal, dan progresif dari dalam lembaga akademik. Tanpa penelitian radikal, peluang untuk memperoleh hasil yang radikal pun akan hilang: itulah pembelajaran sejati dari jam-jam kerja Marx yang panjang di British Museum, dan itulah kesempatan yang diwariskan kepada kita oleh para ilmuwan radikal pendahulu kita. Pelajaran ini, dan kesempatan ini, tidak boleh disia-siakan.

—Don Mitchell (2004)

> Saya tetap menolak patuh pada hal-hal yang diagungkan. Saya masih merasa jijik yang sama, dan tetap menolak, terhadap keputusan yang katanya objektif, yang dibuat tanpa gairah dan kemarahan. Objektivitas, seperti klaim bahwa seseorang tidak berpihak, biasanya hanyalah tameng pembelaan mereka yang takut larut dalam semangat, keberpihakan, konflik, dan perubahan yang meramu kehidupan; mereka takut akan kehidupan. Keputusan "objektif" umumnya tak bernyawa. Ia bersifat akademik, dan kata "akademik" sendiri tak lain ialah sinonim dari "tidak relevan".
>
> —Saul Alinsky (1969: ix [1946])

KAJIAN TENTANG AKTIVISME CENDEKIA

Sebagaimana dijelaskan di awal buku ini, yang dimaksud dengan cendekiawan-aktivis di sini ialah mereka yang tidak hanya berupaya menafsirkan dunia secara ilmiah, tetapi juga secara sadar bertekad untuk mengubahnya, dan juga terhubung dengan gerakan sosial atau proyek politik yang berhaluan keadilan sosial. Dalam konteks buku ini, upaya itu diarahkan untuk memahami dan mengubah corak, lintasan, dan arah transformasi agraria—dengan politik pertanahan sebagai inti persoalan yang menjadi fokus penelitian cendekiawan-aktivis; pada saat yang sama, mereka juga berupaya menafsirkan ulang sekaligus mengubah basis kelembagaan politik pengetahuan itu sendiri. Dalam pengertian luas ini, dan berdasarkan basis kelembagaan mereka, ada tiga jenis cendekiawan-aktivis yang akan kami bahas: (i) cendekiawan-aktivis yang berbasis utama di lembaga akademik, yang terlibat dalam kerja-kerja aktivisme sekaligus terhubung dengan proyek politik atau gerakan sosial; (ii) cendekiawan-aktivis yang bekerja di lembaga penelitian independen non-perguruan tinggi, yang juga menjalankan kerja-kerja aktivisme dan berjejaring dengan proyek politik atau gerakan sosial; dan (iii) cendekiawan-aktivis yang utamanya berbasis di sebuah gerakan sosial atau proyek politik dan melakukan kerja aktivisme cendekia dari dalam (lihat tipologi terkait dari Croteau 2005: 32–35). Secara keseluruhan, kelompok-kelompok ini

hanyalah bagian kecil dari "intelektual" yang dipahami secara lebih luas dalam pengertian Gramscian (Gramsci 1971).

Kategorisasi yang diusulkan dan digunakan secara heuristik di sini sebagiannya terinspirasi dari pemikiran Marc Edelman. Dalam menelaah hubungan antara akademisi dan aktivis dalam konteks kajian dan aktivisme agraria, pendekatan Edelman

> dimulai dengan membedaan secara analitis antara tiga kelompok: aktivis gerakan, peneliti akademik di universitas atau lembaga sejenis, dan peneliti profesional di lembaga nonakademik seperti LSM/OMS. Namun, pembedaan ini sebagiannya bersifat heuristik, meski tidak seutuhnya, dan bahwa dalam praktiknya batasan antara peneliti-aktivis dan peneliti lainnya kerap samar. Yang membuat persoalan ini makin muskil, atau setidaknya lebih kompleks, ialah adanya kerangka heuristik lain yang sebenarnya berguna tapi langsung runtuh begitu ditelaah lebih dekat, padahal kerangka inilah yang justru dijadikan dasar dalam permusuman persoalan ini. Yakni pembedaan antara aktivis dan peneliti (dari beragam jenis) yang bertumpu pada pemisahan semu antara "bertindak" dan "berpikir". Meski dalam praktiknya pemisahan semacam itu meragukan, ia tetap punya nilai analitis terbatas, mengingat aktivis dan peneliti profesional (baik akademisi maupun jenis lainnya) sering kali menempati peran sosial dan ruang kelembagaan yang berbeda serta menekankan jenis tindakan sosial yang berbeda pula. (Edelman 2009: 246)

Kepustakaan yang membahas tentang cendekiawan-aktivis umumnya merujuk pada akademisi yang terhubung dengan gerakan sosial atau proyek politik, dan melalui hubungan itulah mereka melakukan penelitian akademik yang berpijak pada semangat aktivis. Seperti dijelaskan Charles Hale (2008: 3), mereka "umumnya masih berada di pinggiran lembaga arus utama dan sering kali lebih memilih bersuara dari posisi pinggiran itu." Pokok bahasan penting dalam khazanah kepustakaan

ini ialah bagaimana cendekiawan-aktivis bisa muncul, bertahan, dan berkembang di dalam lingkungan akademik; bagaimana ketegangan dan sinergi muncul dalam keterlibatan mereka dengan proyek politik dan gerakan sosial; dan apa dampaknya bagi lingkungan akademik dan gerakan sosial. Dalam kepustakaan yang ada, tersirat kecenderungan untuk menganggap bahwa penelitian akademik yang "layak" hanya dapat dilakukan oleh akademisi yang ada di perguruan tinggi. Beberapa refleksi penting tentang aktivisme cendekia, serta penyelidikan intelektual tentang aktivisme itu sendiri, memang banyak dilakukan oleh cendekiawan-aktivis terkemuka yang berbasis di perguruan tinggi; beberapa sorotan utama dari pemikiran mereka dipaparkan di bawah ini.

Siapa saja cendekiawan-aktivis kontemporer? Frances Fox Piven (2010: 806) menawarkan perspektif yang berpusat pada Amerika Serikat, yang mungkin berguna untuk konteks lebih luas. Dia menggambarkan cendekiawan-aktivis sebagai "akademisi (yang) ingin karya mereka relevan secara politik (pada 1970-an, 'relevan' menjadi 'sandi' bagi cendekiawan-aktivis). Mereka memosisikan diri sebagai bagian dari politik sayap kiri, dan mereka ingin memberikan sumbangsih bagi reformasi gerakan kiri." Menurut Piven, "banyak orang memasuki dunia akademik dengan tekad menjadi cendekiawan, karena mereka memang ingin menjadi akademisi cum aktivis." Dia mencatat bagaimana kecenderungan ini mulai menonjol setelah gelombang gerakan protes pada 1960-an dan 1970-an, yang melibatkan banyak kaum muda. Dia juga menjelaskan bahwa dorongan utamanya datang dari gagasan bahwa "karya akademik bisa berguna untuk mengatasi masalah besar dalam masyarakat kita," dan banyak akademisi memang aktif berupaya memengaruhi kebijakan (Piven 2010: 806).

Sementara itu, Peters (2005: 46) berpendapat bahwa tugas-tugas rutin akademisi, bahkan jika tugas-tugas itu secara politis radikal dan relevan, tidak serta-merta menjadikan mereka cendekiawan-aktivis. Bagi Peters, "Menjadi seorang aktivis bukan berarti mempelajari … perjuangan orang lain." Sebaliknya, "aktivisme sejati berarti benar-benar terlibat

dalam kerja-kerja pengorganisasian, bekerja secara kolektif dengan orang lain, dan menjalani proses yang lambat, melelahkan, dan menjemukan dalam menyatukan orang-orang demi membuat perubahan" (2005: 46). Pernyataan Peters ini tidak hanya menegaskan relevansi keilmuan radikal seperti yang dijelaskan Mitchell (2004), tetapi juga memperjelas kekhasan kelompok aktivisme cendekia yang jauh lebih kecil. Dengan kata lain, aktvisme cendekia adalah bentuk keilmuan radikal, sedangkan keilmuan radikal tidak selalu mesti dicirikan dengan cendekiawan-aktivis.

Semua bentuk keilmuan radikal bisa dipastikan menimbulkan ketegangan dengan universitas yang umumnya telah mengalami neoliberalisasi (Castree 2000; Mitchell 2004; Burawoy 2014; Deere 2018). Namun, ketegangan yang ditimbulkan aktivisme cendekia punya ciri khas tersendiri. Di sinilah kita kembali pada Piven, yang mengingatkan bahwa ketegangan itu muncul "ketika kita berkomitmen pada tuntutan yang lebih meresahkan, yakni tuntutan yang memperjuangkan kepentingan dan gagasan kelompok-kelompok yang berada di pinggiran kehidupan publik—orang-orang yang tidak memiliki suara, terhinakan, dan dieksploitasi" (Piven 2010: 808). Dia menambahkan, situasinya jadi lebih pelik

> ketika kita memilih terlibat langsung dalam gerakan, yang sering kali *tidak teratur*, yang mencoba memperjuangkan kepentingan politik kelompok-kelompok tersebut; ketika kritik kita terhadap tatanan kelembagaan yang ingin diubah oleh gerakan kita padukan dengan komitmen pada gerakan itu sendiri. (Piven 2020: 808, penekanan ditambahkan)

Dia menyimpulkan, "Justru komitmen yang terbelah—antara karier akademik dan terlibat dalam aktivisme yang membangkang—inilah yang memantik kita untuk merefleksikan bagaimana menjalankan keduanya secara bersamaan" (Piven 2020: 808).

David Meyer (2005:193) menyoroti tantangan dalam upaya memenuhi komitmen ganda semacam itu, mengingat dunia akademik dan aktivisme menuntut hal-hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama menuntut keketatan dan kejujuran intelektual. Dia menyatakan bahwa "jika penyelidikan intelektual tentang aktivisme politik dipisahkan dari kerja aktivisme itu sendiri, salah satu kemungkinan yang muncul ialah aktivis ataupun akademisi yang mencoba menggabungkan kedua kerja itu justru kesulitan menjalankan keduanya dengan baik." Dia menguraikan lebih lanjut:

> Aktivisme dan kajian akademik tentang aktivisme sering kali berjalan terpisah secara dikotomis; aktivis kerap tak punya cukup waktu untuk berpikir melampaui tuntutan praktis dari kampanye yang sedang dijalankan, sementara akademisi cenderung tenggelam dalam abstraksi teoretis yang—meski mungkin berguna untuk membangun pengetahuan dasar—terlalu jauh dari persoalan-persoalan mendesak masa kini; walhasil, karya-karya akademik semacam itu mudah diabaikan, tanpa menimbulkan risiko konsekuensi apa pun, kecuali mungkin bagi mereka yang menjadi sumber inspirasi (subjek kajian) karya-karya itu. (Meyer 2005: 193)

Sumbangsih Charles Hale, yang menulis berdasarkan pengalamannya sendiri melakukan penelitian aktivis dalam konteks perjuangan atas tanah di Nikaragua, selaras dengan pandangan kami tentang persoalan ini. Hale mendefinisikan penelitian aktivis sebagai "sebuah metode di mana kita menegaskan keberpihakan politik pada kelompok yang tengah berjuang secara terorganisir, dan membiarkan dialog bersama mereka membentuk setiap tahap proses penelitian" (2006: 97). Bagi Hale, kesetiaan ganda—pada lembaga akademik dan perjuangan politik—merupakan ciri khas cendekiawan-aktivis (2006: 100). Dia berpendapat:

> komitmen politik ganda ini secara langsung mengubah metode penelitian kita: mulai dari perumusan topik penelitian hingga penyebarluasan hasilnya, semuanya memerlukan kolaborasi, dialog, dan standar akuntabilitas yang oleh metode konvensional kerap diabaikan. (Hale 2006: 104)

Hale menggarisbawahi adanya ketegangan: "Loyalitas ganda—terhadap kelompok terorganisir yang sedang berjuang dan terhadap analisis akademik yang ketat—sering kali tidak sepenuhnya sejalan. Keduanya berada dalam ketegangan, dan pada titik tertentu, ketegangan itu bisa berubah menjadi pertentangan tajam" (2006: 105). Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketegangan semacam itu tidak selalu negatif. Bahkan,

> ketegangan semacam itu sering kali sangat produktif. Ia tidak hanya menghasilkan temuan penelitian yang berpotensi sangat bermanfaat bagi perjuangan politik yang kita dukung; tetapi juga bisa menghasilkan wawasan serta pengetahuan baru yang menantang dan mengubah kebijaksanaan akademik konvensional. (Hale 2006: 105)

Hale menyimpulkan dengan kembali menegaskan posisi intelektual dan politik yang lebih luas dari seorang peneliti-aktivis. Menurutnya:

> metode penelitian aktivis bukannya cocok untuk semua proyek akademik, bukan pula bahwa semua pengetahuan inovatif, radikal, atau transformatif dihasilkan dengan cara ini. Sebaliknya, metode penelitian aktivis adalah salah satu pilihan dari banyak pendekatan lain yang tersedia. Tetapi metode ini menjadi sangat tepat digunakan ketika sekelompok orang yang tengah berjuang secara terorganisir benar-benar peduli pada persoalan analitis yang sedang dihadapi, dan ketika kondisi perjuangan mereka secara langsung menantang paradigma analisis yang mapan. (Hale 2006: 108)

Bagaimana kita dapat memahami dan mengatasi ketegangan serta kontradiksi yang melekat dalam loyalitas ganda semacam itu? Titik tolak untuk menjawabnya dapat ditemukan dalam pemikiran Piven, yang memperluas pembahasan ini dengan merujuk pada Alinsky dan mengambil arah yang sejalan dengan pandangan kami. Dia berpendapat bahwa, sebagai seorang cendekiawan-aktivis di dalam akademi:

> kita terus-menerus dihadapkan, dalam rutinitas harian, pada sistem penghargaan dan sanksi yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat maupun oleh kelompok rujukan akademik yang lebih luas …. Dan setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang siap memberi penghargaan ataupun sanksi kepada kita." (Piven 2010: 808)

Dalam kondisi seperti ini, tekanan dari dalam akademi untuk melakukan apa yang akademisi "normal" lakukan menjadi sangat kuat. Piven berpendapat bahwa kita perlu secara aktif membentuk lingkungan kelembagaan yang memungkinkan komitmen aktivis bisa tumbuh dan berkembang. Dia menjelaskan: "kita juga, dalam berbagai taraf, bisa memilih siapa rekan sejawat dan kelompok rujukan, serta asosiasi dan jurnal akademik tempat kita bernaung." Selain itu, secara strategis penting pula untuk mempertimbangkan

> di mana kita menempatkan diri dalam dunia akademik yang kompleks … memilih tempat kita berpijak bukan hanya berdasarkan prestise lembaga, tetapi juga sejauh mana lembaga itu akan memungkinkan kita menjalankan kerja-kerja politik yang kita tekuni. (Piven 2010: 809)

Pembahasan oleh Hale, Piven, dan beberapa pemikir lainnya sangat penting untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang aktivisme cendekia kontemporer. Hale dan Piven secara khusus mengangkat persoalan seputar aktivisme cendekia dalam konteks cendekiawan-

aktivis yang berbasis di lembaga akademik. Ini tentu relevan, tetapi hanya mewakili salah satu dari tiga kategori cendekiawan-aktivis yang disebutkan sebelumnya. Dua kategori cendekiawan-aktivis lainnya (yakni yang berbasis di lembaga penelitian independen non-perguruan tinggi dan yang berbasis di gerakan sosial) mungkin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mereka yang berbasis di akademi, namun peran mereka tak kalah penting dan justru sangat kuat secara politis, serta krusial bila kita ingin memahami aktivisme cendekia secara lebih luas. Dua kategori terakhir memainkan peran penting, baik dalam penelitian akademik maupun penelitian aktivis, juga dalam kerja-kerja politik. Namun, mereka sering kali kurang dihargai dan jarang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Karena itu, kita memerlukan pemahaman tentang cendekiawan-aktivis yang lebih luas dan inklusif dibandingkan pandangan dominan selama ini. Cendekiawan-aktivis yang tidak berbasis di lembaga akademik memainkan peran penting dalam produksi pengetahuan dan aksi politik. Mereka secara umum berbeda dari rekan-rekan mereka yang berbasis di akademi—meski sering kali bekerjasama atau beririsan: batas antara berbagai jenis cendekiawan-aktivis sering kali kabur, dan persilangan antarranah ini pun biasa terjalin.

Karena terlalu menitikberatkan pada aktivisme cendekia yang berbasis di akademi, sebagian besar kepustakaan akademik tentang topik ini tanpa sengaja menciptakan kesan bahwa: (i) gerakan sosial dan lembaga penelitian independen merupakan dua ranah yang sama; dan (ii) kerja-kerja yang dilakukan oleh cendekiawan-aktivis di dua ranah non-akademik tersebut tidak memiliki nilai atau bobot yang setara dengan pekerjaan mereka yang berbasis di lingkungan akademik.

Kembali pada tiga kategori besar yang telah dibahas, cendekiawan-aktivis atau peneliti-aktivis dapat dikenali berdasarkan lokasi kelembagaan utama mereka serta jenis kerja intelektual dan politik yang mereka tekuni. Namun, pengenalannya harus selalu ditempatkan dalam perspektif relasional dan historis. Ketiga kategori ini sama-sama melakukan penelitian yang relevan secara politik dan terlibat dalam gerakan atau

proyek politik yang bertujuan untuk menafsirkan sekaligus mengubah dunia, meski mereka berbeda dalam hal metode, tradisi, serta kendala dan peluang kelembagaan yang mereka hadapi. Seturut definisinya sendiri, aktivisme cendekia mengandaikan bahwa para cendekiawan-aktivis dari tiga ranah kelembagaan itu saling berinteraksi dan memengaruhi; karena itu, mereka hanya bisa dipahami dalam konteks relasional. Selain itu, aktivisme cendekia merupakan produk dari zamannya masing-masing. Aktivisme cendekia yang lahir dalam konteks pemberontakan kelas pekerja di Eropa pada 1848 sangat berbeda dengan aktivisme cendekia lain yang muncul pada pemberontakan mahasiswa global pada 1968, dan kedua gelombang ini juga tentu berbeda dengan bentuk aktivisme cendekia yang berkembang pada awal abad XXI.

Dalam pengalaman kami, lembaga penelitian independen yang progresif dan nonakademik cenderung punya otonomi cukup tinggi; banyak di antaranya memiliki ruang gerak lebih leluasa dalam hal penelitian aktivis (berpihak), strategi penelitian, maupun dalam menentukan tujuan politik yang hendak dicapai melalui penelitian tersebut. Secara umum, lembaga-lembaga semacam ini cenderung kurang formal ataupun birokratis, tidak terlalu berorientasi pada transaksi bisnis, dan tidak terlalu menekankan kinerja, pencapaian, serta pengakuan individual. Namun, lembaga-lembaga ini juga sangat beragam: beberapa cukup konservatif secara politik, sementara yang lain lebih radikal. Di kategori radikal, ada yang menjadi rumah kelembagaan bagi intelektual publik, yakni yang secara sadar memilih bekerja di lingkungan yang lebih longgar, baik secara politik maupun kelembagaan, sambil tetap berkomitmen pada keketatan/ketelitian penelitian akademik. Mereka termasuk beberapa intelektual publik terkemuka di dunia, yang telah memberikan sumbangsih besar bagi kerja aktivisme cendekia dan bahkan mungkin lebih dikenal luas dibanding cendekiawan-aktivis yang berbasis di akademi. Ada yang sepenuhnya berada di luar akademi, tapi ada pula yang secara rutin keluar masuk melalui "pintu putar" antara lembaga akademik dan lembaga penelitian independen.

Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih penting dalam produksi pengetahuan yang secara akademik solid sekaligus bermuatan politik tidaklah dimonopoli oleh satu kategori aktivisme cendekia, melainkan bisa lahir dari tiga kategori tersebut. Cendekiawan-aktivis yang berbasis di lembaga penelitian independen sering kali sangat produktif, meskipun sumberdaya penelitian mereka terbatas dan kerja-kerja mereka tidak selalu mendapatkan pengakuan serta penghargaan yang pantas.

Otonomi politik dan pendanaan yang fleksibel menjadi dua ciri penting yang memungkinkan lembaga penelitian independen menjalankan agenda. Oleh karenanya, penting untuk membahas secara singkat berbagai sumber pendanaan yang memengaruhi tingkat otonomi dan kapasitas lembaga penelitian non-perguruan tinggi serta gerakan sosial.

Yang pertama ialah iuran keanggotaan dan sumbangan rutin individu. Ini merupakan jenis pendanaan paling ideal, karena jelas memberikan tingkat otonomi tertinggi dalam penggunaan dana dan dalam menentukan tujuan aktivisme politik yang hendak dicapai.

Yang kedua ialah pendanaan dari donor nonpemerintah, yang meningkat sejak 1980-an, dan biasanya cukup fleksibel secara politik. Sebagian besar pendanaan jenis ini berasal dari organisasi sukarela yang berhaluan progresif liberal atau kiri, yang menghimpun sumbangan dari masyarakat sekitar melalui kampanye penggalangan dana.

Jenis pendanaan ketiga berbentuk dana besar dari pemerintah yang disalurkan melalui LSM/OMS untuk didistribusikan secara "eceran". Skema ini menjadi bagian dari neoliberalisasi bantuan pembangunan yang dimulai pada akhir 1980-an, ketika sebagian dari bantuan pembangunan resmi (*overseas development agency* [ODA]) suatu negara disalurkan melalui LSM/OMS yang kemudian meneruskan dana tersebut kepada berbagai mitra di negara-negara miskin. Beberapa LSM/OMS tradisional tetap melanjutkan kegiatan penggalangan dana konvensional, sembari memanfaatkan dana bantuan pemerintah untuk memenuhi sebagian besar anggaran mereka. Skema ini berlangsung hampir tiga dasawarsa, tetapi

mulai terkikis beberapa tahun belakangan, sebagian karena kebijakan penghematan resmi dan sebagian lagi sebagai reaksi pemerintah terhadap lobi sayap kanan di negara-negara donor ODA.

Pendanaan juga bisa berasal dari yayasan politik yang disalurkan melalui LSM/OMS, terutama di Eropa. Ini merupakan variasi dari jenis ketiga, tetapi patut disebutkan karena besaran dananya bisa meningkat atau menyusut tergantung pada kinerja partai politik dalam pemilu nasional: partai-partai politik mendirikan yayasan yang menerima dana dari pemerintah, yang mana besarannya bergantung pada jumlah perolehan suara atau kursi parlemen yang dimenangkan dalam pemilu.

Sumber pendanaan kelima ialah dana dari yayasan yang didirikan, misalnya, oleh korporasi besar dan kerajaan bisnis.

Terakhir, sumber pendanaan lainnya ialah lembaga-lembaga yang memberikan hibah penelitian. Lembaga semacam ini secara tradisional berorientasi murni pada dunia akademik, tetapi belakangan ini mulai membuka diri pada lembaga penelitian non-perguruan tinggi, setidaknya dalam skema penelitian kolaboratif antara akademisi dan nonakademisi.

Banyak lembaga penelitian memperoleh dana dari perpaduan pelbagai sumber pendanaan tersebut. Yang penting dicatat ialah bahwa menilai tingkat otonomi dan kapasitas lembaga penelitian cendekiawan-aktivis, secara umum, bergantung pada pemahaman tentang jenis dana yang mereka terima dan dari mana asalnya. Hal ini, pada gilirannya, menuntut pemahaman utuh tentang politik jaringan pendanaan global untuk lembaga penelitian independen, terutama bagi mereka yang memegang teguh posisi politik radikal. Meski jenis pendanaan tidak seutuhnya menentukan karakter politik lembaga penelitian cendekiawan-aktivis, ia tetap membawa pengaruh dalam derajat tertentu. Masalahnya, akhir-akhir ini pendanaan untuk kelompok penelitian yang independen secara politis (terutama yang radikal) telah berkurang secara substansial dan terus merosot, terutama di tengah kebangkitan partai-partai dan kelompok-kelompok populis sayap kanan di sejumlah

negara kunci asal lembaga donor (Scoones *et al*. 2018). Bahkan ketika donor masih mendanai kerja-kerja cendekiawan aktivis, syarat-syarat keterlibatannya sering kali dipertanyakan dan dinegosiasikan secara politis. Masalah seperti ini tidak hanya dialami cendekiawan-aktivis di luar perguruan tinggi: mereka yang berbasis di akademi pun terus-menerus menghadapi tekanan dari lembaga pemberi hibah penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat maupun tersirat. Tantangan bagi cendekiawan-aktivis nonakademisi bukan hanya soal pendanaan yang stabil, tetapi juga tekanan dari para pendonor dan pengguna pengetahuan yang mengharuskan mereka menghasilkan *keluaran yang ketat secara akademik*, sementara para *kamerad* dari gerakan sosial mengharapkan mereka menghasilkan penelitian *yang ketat secara politis*. Mereka terus-menerus dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan biner: Apakah mereka akademisi atau aktivis? Apakah mereka bagian dari lembaga penelitian atau kelompok advokasi? Apakah mereka akan tunduk pada tekanan dari pendonor atau pada harapan dari gerakan? Dengan demikian, kategori cendekiawan-aktivis ini memiliki keistimewaan besar karena bisa menjangkau baik lingkaran gerakan sosial maupun akademisi. Namun, pada saat bersamaan, mereka juga terus ditarik ke dua arah sekaligus: menuju keketatan akademik yang lebih besar, atau militansi politik yang lebih kuat.

Yang terakhir ialah cendekiawan-aktivis yang berkecimpung terutama dalam gerakan sosial. Dari tiga kategori cendekiawan-aktivis, mungkin merekalah yang paling jarang diakui sebagai cendekiawan-aktivis. Aziz Choudry menyayangkan bahwa kepustakaan tentang keilmuan radikal dan aktivisme cendekia "jarang sekali membahas kekayaan ragam produksi pengetahuan yang lahir dari dalam gerakan sosial" (2020: 28). Dia menjelaskan:

> Banyak karya tentang "aktivisme cendekia" memang menekankan upaya dan pengalaman para dosen atau mahasiswa pascasarjana, implikasinya bagi karier akademik, kredibilitas ilmiah, dan dampaknya

> terhadap disiplin akademik tertentu, alih-alih menyoroti kegunaan, hubungan, atau relevansinya bagi perjuangan untuk perubahan. (Choudry 2020: 28)

Cendekiawan-aktivis jenis ini jumlahnya memang tidak banyak—bukan karena alasan yang dikemukakan Gramsci (bahwa kaum tani tidak memiliki intelektual organiknya sendiri), melainkan karena alasan utama yang lebih praktis: tidak ada jaminan stabilitas kelembagaan, tidak ada rencana programatik atau pendanaan untuk penelitian ilmiah internal, dan tidak ada sumber pendapatan tetap, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan minimum peneliti.

Banyak intelektual kunci dalam gerakan, khususnya mereka yang lebih senior, menjadi penggerak utama di balik tajamnya analisis dan kuatnya posisi politik gerakan, tetapi mereka memilih tetap anonim. Namun demikian, meski jumlah mereka sedikit, hampir selalu ada kelompok inti cendekiawan-aktivis internal dalam tubuh gerakan sosial utama: aktivis yang tetap berkomitmen untuk melakukan penelitian aktivis secara serius dan mematuhi standar ketat kaidah akademik, di tengah hiruk pikuk pekerjaan harian mereka dalam gerakan. Beberapa cendekiawan-aktivis paling berpengaruh dalam gerakan sektoral dapat disebut sebagai intelektual organik: kaum tani masa kini dan gerakan mereka dengan demikian telah melahirkan intelektual organiknya sendiri, dalam pengertian Gramscian (lihat juga kerangka "intelektual kerakyatan" dari Baud dan Rutten 2004: 8; Tadem 2016).

Karena kepustakaan kontemporer menaruh perhatian terlalu besar pada cendekiawan-aktivis yang berbasis di akademi, para peneliti jadi sulit mencapai pemahaman lebih mendalam tentang aktivisme cendekia secara umum dan, khususnya, aktivisme cendekia di lembaga dan organisasi nonakademik. Interaksi antara ketiga kategori cendekiawan-aktivis yang berbeda ini juga jarang sekali diteliti ataupun dipahami. Gambar 3.1 memerikan titik-titik dan ruang-ruang kemungkinan terjadinya interaksi. "Interaksi" ini dapat ditelaah setidaknya dari empat

perspektif: keterlibatan yang (tidak) saling melengkapi, ketakterlibatan, persilangan/pintu putar, dan kehadiran di dua atau bahkan di ketiga ranah secara bersamaan. Penting untuk menyelisik sudut pandang ini, karena ada alasan kuat untuk meyakini bahwa cendekiawan-aktivis yang berada di berbagai lingkungan kelembagaan saling berinteraksi dan terlibat dalam aliansi, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, dalam menghasilkan pengetahuan dan aksi politik. Kami menduga bahwa interaksi semacam ini memainkan peran yang jauh lebih kritikal dalam penelitian akademik dan kerja politik dibandingkan yang selama ini diakui atau disadari.

GAMBAR 3.1
Cendekiawan-Aktivis di Tiga Ranah Kelembagaan

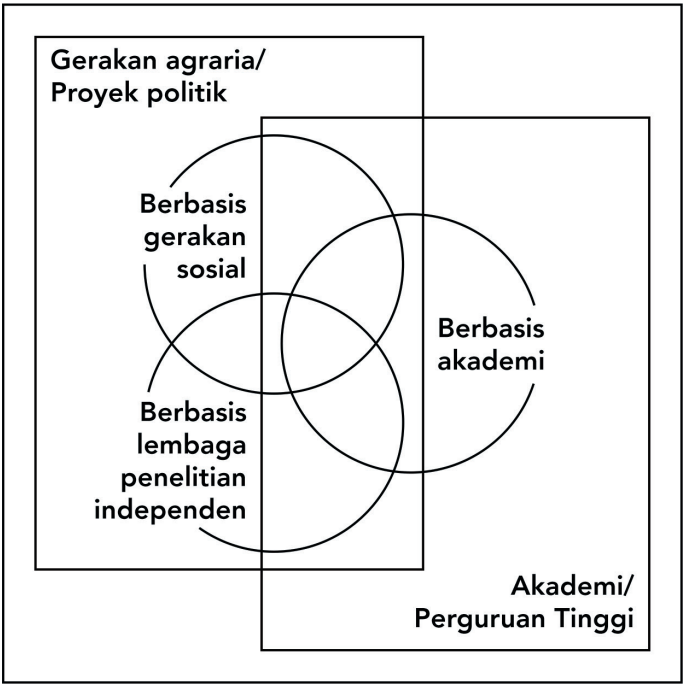

Diskusi di atas membawa kita pada tiga unsur utama yang membentuk aktivisme cendekia, yakni sifatnya yang *relasional*, *menyejarah*, dan *kultural*.

Pertama, aktivisme cendekia bersifat dinamis, tidak bisa dibekukan menjadi sebuah kategori tetap yang berada di tengah-tengah antara aktivisme tipe ideal di satu sisi dan keilmuan akademik tipe ideal di sisi lain. "Kadar aktivisme cendekia" dalam hubungan antara kerja akademik dan kerja aktivis ialah soal derajat: bisa lebih dekat ke idealitas aktivisme politik, atau lebih dekat ke idealitas keilmuan akademik. Dengan demikian, mendefinisikan aktivisme cendekia berarti juga menentukan hubungan seseorang dengan berbagai lembaga dan aktor, baik di dalam maupun di luar ruang akademik, dan dengan sesama cendekiawan-aktivis di berbagai ruang kelembagaan.

Kedua, karena sifat bawaan manusia selalu cair (berubah-ubah), cendekiawan-aktivis tidak dapat dibekukan pada satu momen dalam kategori tertentu. Mengandalkan kesan sekilas pada seseorang sama saja dengan membekukannya pada satu momen tertentu, yang bisa saja memberikan gambaran keliru tentang posisinya di antara dua kutub ideal: aktivis dan akademisi. Cendekiawan-aktivis dan aktivisme cendekia hanya dapat dikenali jika dilihat melalui kaca mata kesejarahan, dan hanya dengan cara itu mereka dapat ditempatkan pada spektrum yang membentang antara dua kutub tersebut. Ada banyak peneliti radikal yang cemerlang, misalnya, karena pernah terlibat dalam satu proyek penelitian kolaboratif bersama gerakan keadilan sosial radikal, tetapi keterlibatan sekali itu tidak pernah terulang lagi. Sebaliknya, ada pula yang sudah lama berkecimpung sebagai cendekiawan-aktivis, tetapi dalam masa tertentu bekerja sebagai akademisi "murni", untuk sementara waktu terpisah dari gerakan politik, menghabiskan seluruh waktunya di perpustakaan untuk melakukan "abstraksi" (Mitchell 2004). Sehingga akan keliru jika hanya berdasarkan periode tertentu itu lalu menyimpulkan bahwa seseorang tersebut bukanlah cendekiawan-aktivis, melainkan cendekiawan radikal. Seorang individu bisa mengombinasikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas antara kerja aktivis dan akademik.

Ketiga, meski kita cukup mudah menyepakati gagasan universal tentang keilmuan akademik—tentu saja dengan berbagai catatan terkait tradisi kolonial dan dekolonial, barat dan nonbarat, serta perbedaan disiplin ilmu—akan jauh lebih sulit untuk merumuskan gagasan universal tentang apa yang dimaksud dengan "kerja aktivis". Kesulitan ini, sebagiannya, terkait dengan gagasan nonuniversal (pandangan tak seragam) tentang apa yang mencirikan dan membatasi gerakan keadilan sosial maupun pertarungan politik. Sebuah gerakan agraria progresif ideal di Amerika Latin, misalnya, mungkin akan terlihat berbeda—baik dari segi profil organisasinya, budaya politik sehari-hari dalam membangun gerakan, strategi politik atau cara berekspresi, maupun jenis sekutunya—dibandingkan gerakan-gerakan di Afrika, yang mungkin juga berbeda dengan gerakan di Asia, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Timur Tengah, atau di Tiongkok. Sebagai contoh, pasti terjadi variasi kerja-kerja cendekiawan-aktivis di antara para akademisi aktivis ataupun aktivis politik dalam sistem pangan secara luas (mulai dari produksi, sirkulasi, pertukaran, sampai konsumsi) di Utara Global. Bagaimana prinsip-prinsip panduan dan protokol untuk kerja cendekiawan-aktivis ditafsirkan dan dijalankan tentu akan berbeda di berbagai komunitas, meskipun mereka mungkin berbagi norma yang tampaknya berlaku selaras secara universal: "produksi pengetahuan bersama", "transparansi", "partisipasi", dan "solidaritas", misalnya (Brem-Wilson 2014; Levkoe *et al*. 2019; Duncan *et al*. 2021; Levkoe 2021; de Wit *et al*. 2021). Cara khusus prinsip serta protokol tersebut muncul dan dibentuk juga bisa bervariasi—misalnya, antara bekas negara penjajah dan negeri jajahan yang pernah dijarah—dan dalam hal itu ditopang oleh relasi kuasa kolonial dan pascakolonial. Dengan kata lain, apa yang dianggap aktivisme cendekia di satu masyarakat belum tentu dianggap sama di masyarakat lain. Begitu pula cara proyek politik seperti kedaulatan pangan dirumuskan, dibangun, dan dijalankan oleh cendekiawan-aktivis di Tiongkok (Day dan Schneider 2018; Yan *et al*. 2021) bisa sangat berbeda dengan cara yang dilakukan di Brasil atau Amerika Serikat.

Pembahasan sejauh ini menegaskan kembali poin yang sudah dikemukakan di awal buku ini: bahwa aktivisme cendekia *agraria* memiliki karakteristik bawaan yang tidak ditemukan pada jenis aktivisme cendekia lainnya; dan jika dikerucutkan lagi pada aktivisme cendekia agraria di Selatan Global, hal ini akan makin tampak nyata (lihat, misalnya, manifesto Collective of Agrarian Scholar-Activists in the South [CASAS][1]). Ihwal ini menjadi topik utama dalam bagian berikutnya. Pada akhirnya, aktivisme cendekia hanya dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara inheren bersifat relasional, menyejarah, dan kultural—memiliki beberapa kemiripan dengan cara E.P. Thompson mendefinisikan kelas dan kesadaran kelas.

AKTIVISME CENDEKIA DALAM KAJIAN AGRARIA KRITIS

Pembahasan kami sekarang beralih ke lingkup yang lebih spesifik dari kategori cendekiawan-aktivis secara umum, yakni mereka yang bekerja di bidang kajian agraria kritis dan aktivisme gerakan agraria. Di bagian ini, kami tidak akan membahas secara rinci pemahaman kami tentang bidang kajian agraria kritis, tetapi kami berangkat dari periodisasi sejarah dan karakterisasi yang ditawarkan oleh Borras (2023), yaitu bahwa bidang ini berkembang dari kajian agraria klasik yang telah mengalami masa kejayaan sejak 1950-an hingga paruh pertama 1980-an, dan kini ditandai oleh tiga ciri yang saling terkait: terlibat/berpihak secara politis, berhaluan pluralisme, dan berwawasan internasionalisme.

Istilah "cendekiawan-aktivis agraria" dan "aktivisme cendekia agraria" akan digunakan untuk merujuk pada kelompok khusus (subkategori) cendekiawan-aktivis ini dan jenis kerja yang mereka lakukan. Sebagian besar cendekiawan-aktivis dan gerakan sosial yang dikaji dalam kepustakaan kekinian tentang aktivisme cendekia berasal dari disiplin ilmu yang tidak terkait langsung dengan kajian agraria, dan umumnya berfokus pada tema perdamaian/antiperang, pekerja, ras, gender, dan lingkungan. Kajian tentang aktivisme cendekia yang mengambil isu

agraria dan gerakan agraria sebagai konteksnya masih jarang. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, isu-isu agraria merupakan kunci untuk memahami permasalahan global; sehingga memahami aktivisme cendekia agraria menjadi kunci untuk memahami dengan lebih baik aktivisme cendekia secara lebih luas. Dibandingkan cendekiawan-aktivis yang bekerja di sektor atau tema lain, cendekiawan-aktivis yang bekerja di kajian agraria kritis dan bersama gerakan agraria mungkin menghadapi tantangan lebih banyak karena berbagai alasan, termasuk soal "jarak" (geografis, logistik, kelembagaan, intelektual, dan politik). Yang lebih penting, ada tantangan teoretis dan politis yang khas bagi kelas-kelas agraria—sebagaimana dibahas di Bab 1 terkait pandangan Marx, Gramsci, dan para populis agraria klasik yang tetap relevan hingga kini.

Seperti dijelaskan sebelumnya, penting untuk memahami aktivisme cendekia agraria dengan mengaitkannya pada gerakan agraria dan pada persoalan tentang sekutu eksternal serta aliansi, terlepas dari—atau justru karena—batasan dalam membingkai perjuangan atas tanah hanya dalam kategori tipe I (pedesaan/pertanian) terkait masalah pertanahan, sebagaimana dibahas di Bab 2. Penataan produksi dan reproduksi sosial, kemiskinan dan jerih payah, serta keterjeratan dalam struktur sosial tertentu dan lembaga-lembaga agraria, semuanya bersekongkol menciptakan hambatan besar bagi kemampuan masyarakat pedesaan—terutama mereka yang berada di jajaran kelas pekerja agraria dan, khususnya, kelompok-kelompok sosial yang tersisih atau terdiskriminasi—untuk mengaktifkan agensi agar dapat menerjemahkan dan mengubah kondisi materiel mereka. Oleh karenanya, dibutuhkan sekutu eksternal yang dapat membantu mengatasi berbagai kendala dan hambatan terhadap aksi kolektif, dan seperti yang telah kami bahas, diperlukan pula peran cendekiawan-aktivis untuk menangani isu-isu yang berada di luar lingkup kerja gerakan agraria yang ada.

Sekutu hadir dalam berbagai bentuk. Di sepanjang abad lalu, sekutu paling konsisten bagi kaum tani dan gerakan agraria ialah partai politik revolusioner—komunis dan sosialis. Di dalam dan di luar lingkup

aliansi formal dengan partai politik, ada pula sekutu lain yang hadir dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa: guru; pemimpin ibadah seperti pastor, biarawati, dan biksu; pengacara; dokter; serta pemimpin serikat pekerja dan mahasiswa yang membantu memahami kerumitan dokumen negara dan korporasi, menganalisis kasus dan merumuskan petisi, menyediakan dukungan logistik untuk memudahkan perjalanan ke pusat-pusat kekuasaan, atau menulis materi agitasi-propaganda (agit-prop). Dari sudut pandang ini, banyak pihak lain juga bisa tercakup dan terlibat: penyanyi, penulis lagu, penyair, pelukis, fotografer, jurnalis, pembuat film, pendongeng, novelis, penulis naskah drama, pemain film, pemain teater, dan aktivis HAM. Kenyataannya, mereka mampu menangkap kondisi dan perjuangan kelas pekerja agraria serta menyampaikannya melalui medium mereka dengan cara dan jangkauan yang tidak pernah bisa dicapai oleh teks akademik ataupun tulisan politik; kenyataan ini pun menjadikan mereka sebagai jenis sekutu yang penting.

Inilah konteks politik luas pada masa kejayaan kajian agraria klasik di abad XX, ketika kaum intelektual kiri radikal yang berhasil memperoleh posisi atau perlindungan politik di lembaga akademik dan lembaga penelitian radikal independen berupaya menjawab persoalan potensi revolusioner kaum tani dan kelas pekerja, serta alternatif politik sosialis mereka. Era jenis aktivisme cendekia ini telah berakhir pada 1980-an.

Satu hal yang mirip dengan aktivisme cendekia dalam kajian agraria kritis masa lalu adalah bahwa generasi hari ini juga mencakup barisan intelektual muda yang cemerlang, berkomitmen kuat secara politis, dan sangat berdedikasi. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi para cendekiawan-aktivis yang bekerja di lembaga akademik juga tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi generasi sebelumnya. Lembaga akademik tidak selalu nyaman atau mendukung aktivisme cendekia radikal dengan berbagai alasan, termasuk latar belakang pendiriannya serta sifat dan sumber pendanaan maupun dukungan logistik yang di-

milikinya. Dua jenis lembaga berikut kerap menjadi tantangan paling sulit bagi cendekiawan-aktivis yang berbasis di akademi: (i) lembaga yang dijalankan oleh jajaran pimpinan yang memiliki langgam politik konservatif, atau setidaknya memilih bersikap netral secara politik di tengah situasi ketidakadilan dan ketimpangan besar di dunia, yang pada praktiknya sebenarnya berpihak pada mereka yang berkuasa dan menindas; (ii) lembaga yang dikelola oleh teknokrat apolitis, yang dipandu oleh gagasan produktivitas dan efisiensi finansial, tanpa minat pada politik keilmuan emansipatoris. Yang paling ideal ialah lembaga yang berkomitmen pada keadilan sosial—tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan—dan dijalankan oleh akademisi berdedikasi, dengan dukungan teknokrat yang setidaknya toleran, dan akan lebih baik jika mereka menghormati serta menghargai kerja cendekiawan-aktivis. Namun, kondisi ideal seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pertarungan politik.

Lantas, siapakah yang dapat disebut sebagai cendekiawan-aktivis *agraria* kontemporer? Mereka adalah individu yang luas dan beragam, bahkan mungkin lebih beragam dibandingkan pendahulunya. Mereka mencakup orang-orang dari lintas generasi, disiplin ilmu akademik, pandangan ideologis/politik, serta minat sektoral/tematik; keberagaman ini sebagiannya mencerminkan corak kajian agraria kritis yang berkembang hari ini, seperti dijelaskan oleh Edelman dan Wolford (2017) serta Borras (2023). Sebagian kecil adalah aktivis kawakan yang pernah terlibat secara mendalam dalam gelombang protes pada 1960-an dan 1970-an, dan/atau dalam proyek revolusioner pembebasan nasional. Banyak dari mereka telah beralih menekuni aktivisme cendekia kontemporer, baik di dalam maupun di luar dunia akademik. Sebagian besar cendekiawan-aktivis agraria masa kini muncul dari prakarsa gerakan sosial pascapartai politik sejak 1980-an, yang telah direkrut ataupun bergabung ke dalam gerakan keadilan sosial melalui berbagai pintu, termasuk beragam perjuangan tematik dan sektoral hingga kerja solidaritas: perjuangan atas tanah, advokasi masyarakat adat, atau organisasi advokasi

lingkungan. Bagian penting dari lonjakan terkini gelombang aktivisme cendekia agraria datang dari gerakan pangan yang mengalami dinamika dan perluasan besar sejak 1990-an, yang sebagiannya terinspirasi dan didorong oleh isu-isu advokasi seperti kampanye anti-GMO, dukungan untuk pertanian berbasis komunitas, dan kedaulatan pangan (Holt-Giménez dan Shattuck 2011). Baru-baru ini, muncul gelombang baru perluasan aktivisme cendekia agraria melalui jalur keadilan lingkungan dan iklim (Martinez-Alier *et al.* 2016) yang menghidupkan kembali isu-isu advokasi lama sekaligus menginspirasi isu-isu baru, seperti agroekologi. Lingkup disiplin akademik yang terlibat juga meluas, melampaui batas konvensional ekonomi-politik agraria, mencakup ekologi-politik, geografi, dan lainnya. Selain itu, berkembang pula kajian politik pangan yang lebih luas di berbagai wilayah dunia.

Sejak dulu hingga kini, kemampuan untuk menyampaikan berita dan informasi dari pedesaan ke dunia luar—beserta waktu dan kecepatan penyampaiannya—menjadi acuan penting dalam penelitian akademik agraria maupun dalam aktivisme politik. Hal ini disebabkan oleh adanya "jarak multidimensi" (fisik, kelembagaan, politik, dll.) antara dunia agraria dan pedesaan dengan pusat-pusat kekuasaan, serta bagaimana jarak tersebut memengaruhi otonomi dan kapasitas warga desa miskin untuk terlibat dalam pertarungan politik. Salah satu perubahan paling mencolok dalam cara cendekiawan-aktivis menjalankan kerja mereka tercermin pada medium yang dipilih untuk pertukaran dan penyebaran pengetahuan: media sosial. Penggunaan internet telah meluas (dan makin meningkat dengan kemudahan dan keterjangkauan pembuatan situs web), begitu pula X (Twitter), Facebook, Weibo, YouTube, TikTok, Instagram, wahana konferensi audio/video seperti Zoom (yang popularitasnya melonjak tajam dalam konteks pandemi global), WhatsApp, WeChat, Viber atau Signal, SMS, perekaman video dan fotografi digital, teknologi GPS, drone, serta publikasi versi elektronik yang dapat dengan mudah dikirim melalui surat elektronik (*email*).

Semua ini telah mengubah secara radikal bentuk interaksi (di) antara para cendekiawan-aktivis dan gerakan agraria dalam hal produksi serta pertukaran pengetahuan dan aksi politik, dibandingkan dua atau tiga dekade lalu. *Kecepatan*, *ketepatan waktu*, *aksesibilitas*, dan *penjangkauan* menjadi kunci keberhasilan penelitian aktivis, dan para cendekiawan-aktivis agraria masa kini pun berupaya memaksimalkan teknologi komunikasi yang tersedia untuk mendukung kerja aktivisme cendekia, baik untuk menjangkau masyarakat luas maupun mengembalikan hasil penelitian kepada gerakan agraria. Di banyak kesempatan, cendekiawan-aktivis yang tidak berbasis di akademi justru jadi lebih efektif dibandingkan rekan-rekan mereka yang berbasis di akademi, baik dalam hal penyebaran pengetahuan populer maupun dalam memanfaatkan media sosial digital sebagai kanal komunikasi. Menjelang akhir 2021, Transnational Institute memiliki lebih dari 12.000 pelanggan aktif untuk buletin elektroniknya, lebih dari 22.500 pengikut di X, dan lebih dari 21.700 pengikut di Facebook; La Vía Campesina memiliki 23.300 pengikut di X, sementara Friends of the Earth International memiliki 44.200 pengikut. Statistik unduhan publikasi mereka mencapai ribuan untuk setiap artikel. Sebagai perbandingan, seorang penulis artikel jurnal akademik sudah merasa gembira jika artikelnya diunduh lebih dari 500 kali dalam periode lima tahun, dan meraih skor sepuluh di Altmetric (metrik yang melacak penyebutan sebuah artikel di media populer). Tentu saja kecepatan, ketepatan waktu, dan jangkauan kerja cendekiawan-aktivis adalah satu hal—kekuatan politik untuk membuat intervensi seperti itu benar-benar efektif adalah hal lain.

AKTIVISME CENDEKIA & LEMBAGA AKADEMIK

Apa saja ciri-ciri dari seorang aktivis? Dalam buku klasiknya yang terbit pada 1971, *Rules for Radicals*, Saul Alinsky menjabarkan karakter kunci seorang aktivis radikal yang baik, yang menurut dia mencakup rasa ingin tahu, sikap tak gentar terhadap hal-hal yang diagungkan, imajinasi, sele-

ra humor, serta visi tentang dunia yang lebih baik. Seorang aktivis radikal pengorganisir komunitas, kata Alinsky:

> membenci dogma, menentang segala definisi mutlak tentang moralitas, memberontak segala bentuk pengekangan atas pencarian gagasan secara bebas dan terbuka, tak peduli ke mana pun gagasan itu akan mengarah. Dia menantang, memaki, mengusik, menjatuhkan kredibiltas. Dia mengobarkan kegelisahan. Sebagaimana kehidupan, ini adalah paradoks, sebab ketakpatuhannya berakar pada penghormatan yang mendalam terhadap misteri kehidupan, serta pencarian tanpa henti akan maknanya. (1971: 73)

Seorang aktivis yang baik menolak patuh pada hal-hal yang diagungkan, subversif, dan penuh gairah. Seorang akademisi yang baik, dalam pemahaman kami, selalu presis, penuh rasa hormat, dan klinis (menelaah berdasarkan bukti). Bisakah dua bundel sifat yang tampaknya sulit dipertemukan ini berpadu dalam satu individu? Jawabannya, tentu saja, adalah bahwa para cendekiawan-aktivis justru terus berupaya melakukannya: memadukan kedua karakter tersebut dalam kerja mereka, di mana pun mereka bernaung secara kelembagaan. Dua bundel sifat yang tampaknya bertolak belakang itu sebenarnya saling membentuk cendekiawan-aktivis: kedua bundel itulah yang menjadi ciri khas cendekiawan-aktivis.[2] Cendekiawan-aktivis selalu menjadi kelompok kecil di mana pun mereka bekerja: segelintir akademisi di perguruan tinggi, dan segelintir aktivis di organisasi-aktivis atau gerakan agraria. Di lembaga akademik, karya mereka selalu berisiko dianggap "kurang akademik/terlalu aktivis", sementara di lingkaran gerakan sosial justru dicap "terlalu akademik/kurang aktivis". Mereka sudah terbiasa dengan perasaan tidak sepenuhnya diterima atau dianggap bagian di basis kelembagaan mereka, merasa terasing, seperti orang luar. Ini adalah kondisi canggung yang permanen, suatu ketegangan atau rasa ketakcocok-

an yang senantiasa dialami oleh cendekiawan-aktivis ketika berusaha menjaga keseimbangan posisi sebagai akademisi dan aktivis.

Konteks kelembagaan bagi cendekiawan-aktivis yang berbasis di akademi sangatlah rumit dan kadang keras. Di banyak kasus, "organisasi profesional akademik mengucilkan cendekiawan-aktivis melalui sensor mandiri sekaligus penerapan kerangka intelektual yang kerap tidak sejalan dengan keilmuan yang berpihak pada gerakan" (Greenwood 2006: 319). Misalnya, apa yang disebut "materi abu-abu"—mencakup publikasi gerakan sosial, kajian oleh lembaga penelitian independen, atau laporan LSM/OMS—kerap dianggap kurang ketat secara ilmiah. Bagi cendekiawan-aktivis yang bekerja di lembaga akademik, tugas mereka secara inheren bersifat dua dimensi: di satu sisi menghubungkan diri dengan gerakan keadilan sosial yang sudah ada, atau, jika belum ada, membantu membangunnya; di sisi lain mengorganisir serta memobilisasi di dalam kampus untuk mendorong perubahan pada basis kelembagaan mereka sendiri. Universitas menjadi konteks sekaligus objek kerja intelektual dan politik mereka. Situasi kompleks ini tergambar dengan baik dalam refleksi Walter Rodney (1942–1980, sejarawan-aktivis kulit hitam radikal di Guyana, yang menulis di antaranya *How Europe Underdeveloped Africa* (1972), yang dibunuh dengan bom mobil atas perintah rezim Guyana), yang bisa disebut sebagai salah satu pelopor utama cendekiawan-aktivis masa kini:

> Sistem ini akan memberimu rumah yang nyaman, taman depan yang indah, mobil, dan saldo bank yang memadai. Mereka akan berkata, "Gadaikan jiwamu yang berkulit hitam." Itulah syarat keberadaanmu sebagai seorang intelektual di masyarakat. Bagaimana kita bisa keluar dari penawanan Babilonia ini? … Saranku, pertama-tama, intelektual atau akademisi … harus menyerang segala bentuk distorsi/penyimpangan yang telah diciptakan oleh imperialisme kulit putih, imperialisme budaya kulit putih, di semua cabang keilmuan. (Rodney 2019: 66)

Dukungan Rodney untuk demokratisasi dan dekolonisasi universitas merupakan salah satu medan pertempuran utama bagi cendekiawan-aktivis saat ini (lihat, misalnya, de Jong *et al*. 2017). Hal ini memperbesar tantangan dalam menghadapi dinamika dan tuntutan kerja akademik. Tantangan-tantangan itu hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk menavigasi "kesetiaan ganda" (Hale 2006) atau "jalur ganda" (Piven 2010) mereka, yang dapat dilihat (setidaknya) dalam tiga aspek: (i) keketatan/ketelitian karya, (ii) dampak, dan (iii) penghargaan serta sanksi. Proses penelitian (metode, pendanaan dan alokasi dana, pertanyaan penelitian, dst.) telah disebut di sebagian besar kepustakaan tentang aktivisme cendekia sebagai salah satu poin yang paling sering diperdebatkan antara akademisi dan aktivis, yang sering kali ditarik ke arah yang berlawanan antara keketatan akademik dan keketatan politik. Bagian ini tidak membahasnya secara rinci; kami sarankan untuk melihat Hale (2006) dan Edelman (2009) untuk pembahasan yang sangat baik. Argumen yang diajukan di sini: polarisasi semacam itu sering kali tidak perlu, dan bahwa proses maupun hasil di masing-masing aspek tersebut dapat saling menguntungkan baik bagi kerja akademik maupun politik. Gagasan tentang *keketatan*, *dampak*, dan *penghargaan serta sanksi* merupakan beberapa konsep yang paling rumit dan diperdebatkan dalam aktivisme cendekia.

Keketatan

Penelitian dan publikasi akademik haruslah ketat/teliti (*rigorus*). Secara umum, berarti penelitian dan publikasi mesti dilakukan secara menyeluruh, cermat, tepat, penuh kehati-hatian, dan meyakinkan, baik secara teoretis, metodologis, maupun empiris. Namun, apa makna tepatnya dan seperti apa penerapannya tidaklah sederhana, karena bisa sangat bergantung pada konteks tertentu. Yang jelas dan mudah dipahami ialah proses yang menentukan apa yang dianggap *ketat secara akademik*. Ada para penjaga standar—mulai dari peninjau/penelaah (*reviewer*) akademik dan panel peninjau, komite editorial, hingga dewan penelitian—

yang bertugas menilai keketatan sebuah proposal hibah penelitian, naskah untuk publikasi, atau proses perekrutan dan promosi jabatan. Kunci penentu apakah suatu karya memenuhi keketatan kaidah akademik atau tidak ialah kelompok rujukan atau mitra bestari (*peer reviewers*) yang biasanya bekerja melalui proses telaah. Setiap disiplin ilmu, institusi, penerbit, dan jurnal memiliki tradisi masing-masing dalam menentukan ukuran keketatan akademik karya. Mereka juga memutuskan apakah suatu karya benar-benar memberi "kontribusi" yang berarti. Ada yang lebih menghargai kontribusi dalam hal kebaruan teoretis, ada pula yang mengutamakan kekayaan data empiris. Bagi akademisi yang terlatih dengan baik dan berdedikasi, hal ini relatif mudah dihadapi. Namun, tantangannya jadi lebih rumit ketika komitmen ganda cendekiawan-aktivis ikut terlibat.

Keketatan politik adalah tolok ukur utama bagi penelitian yang berkaitan dengan gerakan agraria. Artinya, penelitian tersebut mesti berwawasan politik sekaligus menyeluruh, peka dan bernuansa, serta tepat waktu dan relevan. Tujuannya adalah memahami sifat dan dinamika suatu perubahan sosial, memahami masa lalu untuk memengaruhi arah perkembangannya di masa kini dan masa depan. Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan "*post-mortem*" (pascakejadian) yang cenderung menitikberatkan pada analisis retrospektif (menengok ke belakang). Hal ini berarti mengambil posisi dalam proses politik yang sedang diteliti, yang pada gilirannya berisiko mengorbankan keketatan akademik penelitian. Beberapa jenis gerakan massa militan punya tradisi panjang yang tidak begitu berbeda dengan proses mitra-bestari akademik dan refleksi-diri yang kritis: dalam gerakan yang terinspirasi Marxisme, di mana perdebatan dan telaah kritis justru dianjurkan, prinsip "persatuan-perjuangan-persatuan" diberlakukan untuk mencapai keketatan akademik—atau lebih tepatnya keketatan teoretis dan politik. Prinsip ini biasanya diterapkan seiring dengan prinsip "kritik/autokritik", perpaduan antara mitra-bestari dan refleksi-diri yang kritis. Ada juga penjaga keketatan politik: gerakan agraria, terutama para pemimpin, kader, aktivis

militan, anggota biasa; dan lapisan-lapisan tak terduga dari perantara gerakan dan pendukung yang selalu memberi semangat.

Kalau hanya fokus memenuhi tuntutan keketatan akademik, *atau* keketatan politik saja, itu perkara mudah—seperti bermain di satu arena dengan aturan yang jelas. Tantangan sebenarnya bagi cendekiawan-aktivis, di mana pun mereka bernaung, ialah bagaimana memenuhi keketatan akademik *dan* politik sekaligus, dengan cara yang dapat memuaskan para "penjaga gerbang" di kedua lini. Masalahnya, keketatan akademik *dan* politik tidak selalu sejalan, dan bahkan bisa saling bertentangan, meski keduanya juga bisa saling melengkapi dan bersinergi.

Dampak

Para "penjaga gerbang" dari kedua lini (politik dan akademik) biasanya mengajukan pertanyaan mendasar tentang dampak (impak) historis, konjungtural, dan aspiratif dari penelitian seorang cendekiawan-aktivis. Maksudnya, mereka ingin tahu sejauh mana penelitian itu meninggalkan jejak penting dalam sejarah, memberi pengaruh pada momen krusial sesuai konteks zamannya, dan menginspirasi visi masa depan gerakan. Lembaga akademik dan gerakan agraria punya tradisi yang berbeda dalam memahami dan mengukur dampak penelitian, dan perbedaan ini kadang bisa saling bertentangan—meski tidak selalu demikian. Bagi gerakan sosial, jawabannya sering kali cukup jelas: membuat perubahan nyata di lapangan, seperti menghentikan pembangunan bendungan, mendistribusikan tanah kepada petani tak bertanah atau nyaris tak bertanah, menaikkan upah buruh tani, atau, yang lebih langsung, membantu gerakan sosial menyusun argumen dan kampanye yang lebih meyakinkan. Persoalan tentang dampak ini penting bagi gerakan sosial maupun bagi mereka yang mempelajarinya, terutama karena, seperti dicatat Tarrow (2005), gerakan sosial lebih sering gagal ketimbang berhasil. Dalam buku pertama mereka tentang gerakan sosial transnasional, Keck dan Sikkink (1998) juga mencatat bahwa mengukur dan meni-

lai dampak gerakan sosial transnasional bukanlah perkara mudah, tetapi pengamatan awal menunjukkan bahwa kekuatan terbesar mereka biasanya terletak pada kemampuan mengubah kerangka wacana (lihat juga McMichael 2008, yang membahas hal ini dalam konteks GAT).

Kisah dari sisi akademik sama sekali berbeda. Penilaian terkait dampak dalam kerangka akademik umumnya berpusat pada perolehan poin publikasi, yang sangat bergantung pada medium publikasi yang peringkatnya didasarkan terutama pada "faktor dampak" (*impact factor*), serta jumlah unduhan teks lengkap sebuah artikel. Dewan penelitian akademik terkemuka yang menyediakan hibah pendanaan biasanya memberikan bobot penilaian besar pada publikasi di jurnal akademik dengan faktor dampak yang tinggi. Namun, saat ini, sekadar berhasil menerbitkan artikel, bahkan di penerbit yang berperingkat tinggi sekalipun, tidak lagi cukup. Sejauh mana publikasi seseorang dikutip juga menjadi ukuran yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, di mata "penjaga gerbang" akademik. Salah satu alat pelacak dampak, yaitu indeks-h (*h-index*), digunakan untuk mengukur sejauh mana publikasi seseorang telah dikutip oleh terbitan lainnya.

Cendekiawan-aktivis pun harus berhadapan dengan tuntutan pengukuran dampak akademik ini, yang merupakan salah satu sisi dari dua dunia yang mereka jalani. Hal ini mungkin tidak mudah karena berbagai alasan. Menanggapi kritik bahwa penelitian aktivis sering dianggap terlalu sederhana, tidak diproblematisir secara mendalam, dan kurang diteoresasikan (sehingga dianggap akan mendapat skor rendah dalam pengukuran dampak akademik), Hale menyatakan "bagaimana komitmen politik mengubah metode penelitian dan kadang memprioritaskan penutupan analisis dibanding memperluas kompleksitas membuat penelitian aktivis sulit dipertahankan di lingkungan akademik" (Hale 2006: 101). Dia menjelaskan, "penelitian aktivis memuat komitmen yang tidak tunduk pada proses 'penjagaan gerbang', penilaian, atau regulasi dari dalam akademia." Dia menambahkan, "Sebaliknya, penelitian ini

menuntut adanya mediasi terus-menerus antara kedua ruang tersebut, dengan keyakinan bahwa seseorang tidak harus memilih salah satu dari keduanya atau meleburkan yang satu ke dalam yang lain" (2006: 105).

Hal ini membawa kita kembali ke persoalan keketatan akademik dan politik: ini bukan soal memilih salah satu dari dua pilihan, dan jika cendekiawan-aktivis mampu menjalankan kedua tugas ini dengan baik, tak ada alasan mereka tidak dipandang setara—atau bahkan lebih unggul—dibanding para akademisi terbaik, jika diukur dengan standar akademik terkait dampak penelitian dan publikasi. Ada beberapa perkembangan yang mungkin menjadi kabar baik bagi cendekiawan-aktivis. Tanpa membahas lebih jauh logika neoliberal yang membawa perkembangan ini memasuki universitas, tiga di antaranya kami sorot secara singkat berikut ini.

Pertama, konsep "dampak sosial" makin mendapatkan bobot di dunia akademik. Namanya berbeda-beda tergantung konteks. Dalam konteks akademik Belanda, namanya "relevansi sosial", sementara di Amerika Utara, sebagian unsurnya dimasukkan ke dalam kategori luas "keterlibatan" (*engagement*). Makna istilah-istilah ini tentu masih terbuka untuk ditafsirkan lebih lanjut. Misalnya, sebuah proyek penelitian akademik tentang perubahan iklim yang dikerjakan dengan skema kemitraan bersama sektor korporat bisa saja dianggap memenuhi kriteria relevansi sosial, begitu juga proyek penelitian yang mempelajari sekaligus memberi dukungan politik pada gerakan Extinction Rebellion, pembangkangan sipil yang menuntut pemerintah agar menangani krisis iklim dan lingkungan. Karena itu, relevansi sosial dapat dengan mudah menjadi payung serbaguna yang berisiko kehilangan potensi radikal dan emansipatorisnya. Selain itu, dorongan untuk menonjolkan relevansi sosial karya akademik bisa secara tak sengaja menggalakkan praktik-praktik instrumental, di mana akademisi merekrut mitra nonakademik, seperti gerakan agraria, gerakan lingkungan, atau lembaga penelitian independen, hanya karena kemitraan semacam itu menjadi syarat dalam pengajuan hibah penelitian atau bisa menambah poin dalam penilaian

kinerja akademik individu. Kemitraan semacam itu tidak selalu memiliki makna politis. Dalam beberapa kasus, mitra nonakademik telah dimanfaatkan secara instrumental oleh pihak akademisi—atau sebaliknya. Meski penuh jebakan semacam ini, dan meski logika neoliberal menjadi dasar sistem penilaian ini, tetap ada potensi yang bisa dimanfaatkan: sistem ini dapat menjadi wahana bagi cendekiawan-aktivis untuk mengumpulkan poin yang mereka perlukan dalam karier akademiknya, sekaligus membantu melegitimasi gagasan tentang aktivisme cendekia di dalam dunia akademik.

Perkembangan kedua, jurnal akademik kini melacak skor Altmetric terbitan, yang mengukur kuantitas dan kualitas (setiap kategori mendapat bobot nilai berbeda) sejauh mana sebuah terbitan disebut atau dibahas dalam media massa, blog, Twitter, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Ukuran dampak seperti ini justru menempatkan cendekiawan-aktivis yang tidak berbasis di akademi pada posisi yang lebih baik dalam hal pengakuan dampak, dibandingkan rekan-rekan mereka yang berbasis sepenuhnya di lembaga akademik.

Perubahan ketiga adalah dorongan arus utama untuk publikasi akses terbuka/gratis (*open access*). Sebagai contoh, Uni Eropa kini mewajibkan semua hasil penelitian yang didanai uang publik untuk diterbitkan dengan skema *open access*.

Ketiga sistem peningkatan dampak dan pelacakan dampak ini bisa saja berpihak pada kepentingan cendekiawan-aktivis, membantu mereka untuk bertahan, memperoleh legitimasi, dan mengukuhkan posisi di dalam dunia akademik. Ada banyak contoh cendekiawan-aktivis yang berbasis di lembaga penelitian nonakademik dan gerakan agraria yang justru menorehkan kinerja lebih baik seturut ukuran-ukuran dampak ini dibandingkan rekan-rekan mereka yang sepenuhnya berbasis di akademi.

Dampak lain yang tidak mudah diukur secara kuantitatif tetapi sangat dihargai di dunia akademik ialah sejauh mana sebuah publikasi mampu menginspirasi generasi baru dan memicu lonjakan minat pada

tema penelitian tertentu. Pelacakan kutipan hanya bisa menangkap sebagian kecil aspek ini. Dalam hal ini, cendekiawan-aktivis umumnya punya rekam jejak yang cukup baik. Selama bertahun-tahun, lembaga-lembaga penelitian nonakademik yang bekerja pada tema-tema besar, termasuk isu agraria, telah menghasilkan sejumlah karya klasik di bidang ini yang telah memengaruhi generasi peneliti, akademisi, dan cendekiawan-aktivis. Kita dapat menyebut, misalnya, karya-karya klasik maupun kontemporer yang dihasilkan oleh cendekiawan-aktivis di berbagai lembaga, seperti Transnational Institute, Institute for Food and Development Policy/Food First, Focus on the Global South, Institute for Policy Studies, GRAIN, The Corner House, ETC Group, FIAN International, La Vía Campesina, dan Third World Network. Banyak cendekiawan-aktivis di lembaga-lembaga ini tidak hanya menghasilkan terbitan berdampak tinggi, seperti yang dibuktikan oleh statistik unduhan dokumen di internet dan jumlah sitasinya, tetapi juga berhasil menetapkan agenda penelitian strategis. Salah satu contohnya adalah karya rintisan GRAIN tentang perampasan tanah berskala global, yang dimulai dengan sebuah laporan mereka pada 2008 (GRAIN 2008).

Terakhir, cendekiawan-aktivis juga telah berperan dalam mendefinisikan ulang makna dampak sosial, yang mencakup tidak hanya kajian retrospektif, tetapi juga meliputi pelacakan dan pengkajian isu-isu yang terus bergerak, dengan tujuan memengaruhi karakter dan arah proses kebijakan maupun politik yang sedang berlangsung.

Penghargaan & Sanksi

Penghargaan dan sanksi merupakan norma serta aturan formal maupun informal yang mengikat di dalam akademi dan gerakan sosial, yang sebagian digunakan sebagai instrumen akuntabilitas untuk menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh cendekiawan-aktivis. Namun, dilemanya, seperti yang ditekankan Croteau, ialah:

> Kerja yang mendapatkan penghargaan baik di dalam akademi mungkin sebagian besar tidak relevan dengan masalah yang dihadapi aktivis gerakan di dunia nyata … [sementara] … pekerjaan yang didasarkan pada kontribusi bagi kemajuan strategis gerakan justu tidak diakui sebagai hal yang penting dalam akademi. (2005: 20)

Di dalam lembaga akademik, yang diberi penghargaan ialah karya yang dianggap mematuhi keketatan kaidah akademik, terwujud dalam terbitan aktual yang, pada gilirannya, membawa dampak signifikan berdasarkan kriteria seperti indeks-h. Bahkan jika tidak setuju dengan haluan politik cendekiawan-aktivis, pimpinan lembaga bisa saja membiarkannya, selama universitas bisa mengeklaim poin produktivitas karya tersebut. Di sisi lain, jika kinerja akademisi gagal menghasilkan dan mencapai tingkat minimum produktivitas secara berkala, mereka akan diberi sanksi. Sanksinya bisa jadi seketika dan tegas, bankah tak jarang berujung pada pemecatan. "*Publish or perish*" (terbitkan atau enyah), begitulah prinsip panduan informal yang dikenal luas di kalangan akademisi.

Sementara itu, bagi cendekiawan-aktivis yang bekerja di luar akademi, penerimaan dan pengakuan dari kalangan akademisi sering kali menjadi bentuk penghargaan terbesar yang dapat mereka raih dari kalangan akademisi. Undangan kepada cendekiawan-aktivis untuk memberikan ceramah utama (*keynote*) di sebuah konferensi akademik besar, misalnya, merupakan tanda penting bahwa para akademisi menaruh hormat sekaligus dukungan bagi kerja-kerja cendekiawan-aktivis nonakademi. Hal ini dipandang serius oleh para cendekiawan-aktivis nonakademi, karena penerimaan dan pengakuan berarti legitimasi atas kerja mereka, sekaligus membuka peluang besar bagi agenda politik radikal. Sebaliknya, penolakan dari kalangan akademisi terhadap cendekiawan-aktivis di luar akademi bisa dianggap sebagai bentuk sanksi, meski lebih sering hal itu hanyalah perwujudan sekaligus perpanjangan dari elitisme sehari-hari—yang bisa jadi merupakan arogansi atau bahkan sikap abai—di dalam akademi.

Bagi gerakan-gerakan agraria sendiri, mereka memang tidak berada dalam posisi untuk memberi penghargaan atau sanksi secara kelembagaan maupun materiel, tetapi mereka bisa dan memang memberi penghargaan atau sanksi secara politik dengan cara yang sangat menentukan bagi cendekiawan-aktivis. Penghargaan dari gerakan biasanya berupa akses lebih luas dan berkelanjutan ke dalam gerakan, bahkan kadang termasuk undangan sebagai tamu dalam pertemuan "politbiro" atau "komite pusat" gerakan. Kepercayaan yang ditunjukkan serta keterbukaan yang diberikan merupakan penghargaan yang tiada tara. Sebaliknya, sanksi dijatuhkan ketika terjadi pelanggaran atas kepercayaan, atau sekadar kecurigaan akan terjadinya pelanggaran. Sanksi biasanya dilakukan dengan seketika serta tegas, dan hampir selalu berupa penghentian akses secara tiba-tiba, yang kadang meluas menjadi isolasi politik lebih luas hingga melibatkan gerakan-gerakan lain.

Mungkin salah satu perbedaan paling tajam antara cendekiawan-aktivis di dalam akademi dan mereka yang di berada luarnya, khususnya yang berakar di gerakan sosial, terkait soal penghargaan dan sanksi. Di lingkaran akademia, penghargaan dan sanksi cenderung ditujukan pada individu: kinerja dan pencapaian diukur secara individual dan personal, melalui jabatan, promosi, publikasi atas nama pribadi, hibah penelitian individual, klaim pribadi atas hak cipta, dsb. Sebaliknya, di luar akademi, terutama dalam gerakan sosial, penghargaan dan sanksi cenderung diarahkan pada kolektif, bukan pada individu. Di lingkungan akademik, setiap kerja yang dicurahkan seorang individu biasanya diumumkan dan diberi nilai ekonomi, sering kali didasarkan pada aturan kerja yang formal dan legal. Hal ini berseberangan dengan tradisi gerakan kiri radikal, di mana dampak lebih sering diukur berdasarkan pencapaian kolektif—gerakan, komunitas, masyarakat, atau organisasi; klaim berlebihan atas prestasi individu dianggap tidak pantas dan kerap dicap secara merendahkan sebagai "oportunisme" atau "karierisme". Selain itu, menonjolkan dan memonetisasi (mengomersialkan) kerja yang dilakukan secara individual cenderung tidak dianjurkan.

Tentu saja kedua gambaran ini mengandung kadar generalisasi. Namun demikian, memang terdapat pola umum yang membuktikan kontras tersebut. Akademisi berusaha mendapatkan penghargaan (kredit) atas setiap konsep yang mereka klaim sebagai miliknya ketika digunakan orang lain. Karena itu, mereka menuntut adanya "referensi akademik individual" yang lengkap dan akurat atas ide-ide yang mereka tuangkan dalam tulisan—meskipun, pada kenyataannya, mereka sendiri tidak selalu secara penuh, jujur, dan transparan mengakui asal-usul ide-ide tersebut. Berikut sebuah contoh kasar: seorang peneliti akademik mengkaji kampanye advokasi politik sebuah gerakan agraria transnational. Dalam percakapan dengan para pemimpin gerakan, peneliti ini menemukan beberapa hal spesifik yang sebelumnya kurang dieksplorasi terkait strategi kampanye tersebut, lalu menulis dan menerbitkan sebuah artikel tentangnya. Setelah itu, siapa pun yang ingin menulis tentang hal yang sama, termasuk mereka yang mungkin sudah mengetahui hal itu, atau mereka yang telah mengumpulkan data dalam keadaan yang sepenuhnya berbeda, tetap diwajibkan merujuk pada peneliti akademik tersebut, sebagai "pemilik" pengetahuan itu. Kegagalan untuk mencantumkan rujukan pada klaim hak cipta yang dipersonalisasi seperti itu berisiko dituduh melakukan plagiat, yakni mencuri gagasan orang lain. Peneliti akademik tersebut, sadar atau tidak, telah mengapropriasi pengetahuan dari gerakan dan menyajikannya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Seperti telah disebutkan, ini memang contoh kasar, semacam karikatur—tetapi tetap bergema di banyak situasi nyata yang canggung dan sarat dilema etis. Di sini yang dipertanyakan ialah etos individualisme yang melekat di dunia akademik.

Sebaliknya, gerakan keadilan sosial justru mendorong agar individu, gerakan lain, dan masyarakat luas merangkul serta menghayati ide-ide gerakan sebagai milik bersama, tanpa harus merujuk pada individu tertentu, melainkan pada koletivitas gerakan, sebuah bentuk "rujukan politik bersama". Ketika GRAIN merilis laporan mereka tentang perampasan tanah global pada 2008 (GRAIN 2008) yang kemudian men-

jadi sangat berpengaruh, tidak ada penulis individual yang mendaku kepemilikan atas ide-ide tersebut. Ketika mereka kemudian menerbitkan sebuah tulisan refleksi tentang proses dan dampak laporan 2008 tersebut (GRAIN 2013), mereka kembali menekankan atribusi kolektif. Ini bukan berarti individu ditekan atau dihapus demi kepentingn kolektif dalam gerakan keadilan sosial. Hanya saja, individualisme dan orientasi karier pribadi cenderung dihindari dalam gerakan keadilan sosial radikal, sedangkan dalam dunia akademik justru sering dirayakan.

Yang ingin kami tekankan di sini ialah bahwa tidak ada yang salah dengan penghargaan dan peluang yang bersifat perseorangan, baik di dalam maupun di luar dunia akademik. Masalah muncul ketika prinsip ini menjadi satu-satunya logika, atau logika dominan, dan ketika prinsip tersebut mulai bertentangan dengan rasa "kebaikan bersama" atau komunitas yang lebih luas. Sebaliknya, tidak ada yang secara inheren baik dalam kerangka kerja kolektif atau komunitas, baik di dalam maupun di luar dunia akademik. Dalam praktiknya, pendekatan semacam ini kadang bisa menghambat berkembangnya agensi individu, dan bahkan mendorong perilaku "menumpang gratis" (*free-riding*). Sebagian dari poin yang kami soroti di sini ialah dilema yang dihadapi cendekiawan-aktivis: mereka harus mengarungi dua tradisi yang berlainan, yakni tradisi akademik yang menekankan penghargaan individual dan tradisi gerakan sosial yang mengedepankan kolektivitas. Tantangannya ialah bagaimana menemukan dan menjaga keseimbangan antara keduanya; dalam hal ini situasinya mirip dengan cara E.P. Thompson dan James C. Scott merumuskan gagasan tentang ekonomi moral (Thompson 1971; Scott 1976) yang menyangkut individu, kelas, dan kolektivitas sekaligus. Hal ini membawa kita kembali pada tiga ciri utama aktivisme cendekia yang sudah disebutkan sebelumnya: relasional, menyejarah, dan kultural.

*****

Sebagai rangkuman dari pembahasan sejauh ini: bagi akademisi konvensional, termasuk akademisi radikal kiri, perhatian utamanya ialah

memahami dunia untuk semakin memperkaya teori, termasuk teori tentang bagaimana mengubah dunia. Sementara itu, bagi seorang cendekiawan-aktivis, titik beratnya ialah menggali teori untuk memajukan kerja-kerja praksis politik, yang sering kali bersifat mendesak, demi mengubah dunia. Keduanya sama-sama bertungkus lumus dengan teori—dengan apa yang disebut Mitchell (2004) sebagai "daya abstraksi"—tetapi dengan titik berangkat dan tujuan akhir yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk rasa kemendesakan dan tempo kerja mereka masing-masing. Kerja akademik murni, termasuk yang berhaluan radikal kiri, tidak menuntut peneliti untuk bergerak dengan tingkat kemendesakan yang sama seperti yang dibutuhkan dalam praksis politik, juga tidak memaksa mereka untuk terburu-buru mencapai kesimpulan analitis—hal yang selalu menjadi tekanan bagi cendekiawan-aktivis. Sebagai contoh, seorang akademisi radikal yang mempelajari perampasan tanah dan implikasinya bagi kaum pekerja mungkin memilih menunggu beberapa tahun hingga data empiris dapat diamati, agar bisa menghasilkan kajian yang lebih kokoh secara teoretis tentang bagaimana perusahaan baru yang dibangun di atas tanah rampasan itu membawa dampak pada kehidupan pekerja. Sebaliknya, seorang cendekiawan-aktivis hampir pasti tidak akan menunggu sampai bisa mendapatkan lebih banyak data empiris guna menarik kesimpulan yang dianggap memadai untuk mendukung prakarsa intelektual dan politik yang diupayakan mengintervensi langsung jalannya perampasan tanah—misalnya, untuk melawan dan menolaknya sejak awal. Ini bukan berarti salah satu pendekatan lebih unggul daripada yang lain. Keduanya punya alasan dan relevansi yang berlainan, dan meski penting untuk memahami perbedaan itu, membandingkan keduanya untuk menilai pendekatan mana yang lebih baik tidaklah berguna. Tidak ada satu pun dari dua pendekatan itu yang, secara sendirian, dapat menghasilkan atau mewakili semua pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai perubahan sosial radikal yang diinginkan. Kuncinya adalah memahami bagaimana cara merangkai kedua pendekatan tersebut

bisa bersama-sama menantang *status quo* dalam produksi, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan. Dalam konteks perjuangan antikapitalis, Wright (2019) menegaskan bahwa persoalannya bukan memilih satu bentuk perjuangan antikapitalis yang dianggap ideal dibanding yang lain, melainkan bagaimana memadukan berbagai bentuk perjuangan ideal hingga akhirnya mampu mengikis kapitalisme. Pada tingkat individual, pertanyaannya juga bukan apakah kerja cendekiawan-aktivis Susan George dari Transnational Institute lebih baik daripada kerja akademisi radikal Henry Bernstein; yang lebih penting ialah bagaimana kerja-kerja mereka dapat saling melengkapi.

AKTIVISME CENDEKIA & AKTIVISME POLITIK

Di Bab 1, kita sudah membahas soal keberadaan sekutu eksternal bagi petani dan gerakan sosial yang mewakili mereka, sambil melacak beberapa akar sejarahnya dalam *Eighteenth Brumaire* karya Marx maupun dalam gerakan Narodnaya Volya di Rusia pada paruh kedua abad XIX. Bagi kaum tani dan gerakan agraria, kebutuhan akan cendekiawan-aktivis sebagai sekutu bukanlah persoalan. Yang jadi soal ialah syarat dari hubungan persekutuannya. Dalam konteks ini, otonomi—yakni sejauh mana pengaruh eksternal turut menentukan pengambilan keputusan internal—menjadi titik acuan utama. Dan ini berlaku bagi kedua belah pihak: otonomi sama pentingnya bagi cendekiawan-aktivis seperti halnya bagi gerakan agraria. Hubungan yang bersifat memanfaatkan pihak lain (instrumentalis) telah menandai banyak interaksi antara cendekiawan-aktivis dan gerakan agraria. Dari pola ini, muncul dua varian utama.

Kepeloporan (*Vanguardism*) Cendekiawan-Aktivis, Pengekoran (*Tailism*) Gerakan Agraria

Varian pertama ialah kecenderungan yang berangkat dari asumsi tersirat bahwa kaum pekerja pedesaan dan gerakan agraria mereka berpengetahuan minim serta memiliki tingkat pemahaman dan kapasitas yang rendah untuk mengerti dan mengubah keadaan mereka. Asumsi ini

kadang berangkat dari pembacaan ekonomi-politik yang ketat mengenai posisi kaum pekerja pedesaan dalam lingkup produksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam pandangan Marx di *The Eighteenth Brumaire*, di mana dia menggambarkan petani ibarat "kentang dalam karung" dan menyatakan bahwa "mereka tidak dapat mewakili diri mereka sendiri, sehingga harus diwakili" (Marx 1968 [1852]). Kita juga melihat tendensi serupa dalam pembahasan panjang Gramsci tentang mengapa "kaum tani tidak memiliki intelektual publik mereka sendiri" (Gramsci 1971). Bersamaan dengan gencarnya serangan ideologis kalangan Marxis ortodoks terhadap kalangan populis dan neopopulis Rusia beserta para pengikutnya, semakin menguat pula anggapan khas Marxis ortodoks tentang siapa sebenarnya kaum tani, bagaimana watak gerakan mereka, serta apa yang dapat dan tidak dapat mereka capai. Bukan hanya kritikus Marxis yang membuat asumsi tentang petani dan politik agraria seperti itu. Pemikir borjuis liberal teknokratis, terutama yang berkiblat pada ekonomi neoklasik dan ekonomi kelembagaan baru, sering kali punya pandangan senada, meski berasal dari tradisi ideologis yang sangat berbeda. Bahkan, sebagian cendekiawan-aktivis di lembaga penelitian independen nonakademik maupun di gerakan sosial pun kadang tidak jauh berbeda dari rekan-rekan akademisi mereka dalam hal ini. Nyatanya, bukanlah hal asing bila ada "penjaga gerbang" gerakan agraria yang sesekali bertindak dan berbicara layaknya *caudillo*, *cacique*, "kepala suku", atau "panglima kecil"; bertindak bak "tuan" bagi kaum tani.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apa yang disebut cendekiawan-aktivis sangatlah beragam secara ideologis, dan dengan demikian mereka punya pandangan berbeda-beda soal agensi politik dan otonomi petani serta gerakan yang mewakilinya. Bagi sebagian tipe cendekiawan-aktivis, tugas utama mereka ialah melakukan penelitian untuk masyarakat miskin pedesaan beserta gerakannya, lalu menggunakan pengetahuan itu untuk mendukung kerja politik atau mendorong proses kebijakan resmi, sehingga bisa membantu memperkuat kemampuan masyarakat miskin. Dalam pola ini, produksi pengetahuan tetap dipandang sebagai

ranah utama cendekiawan-aktivis. Cara pandang tentang kaum tani dan gerakan agraria seperti ini berasal dari tradisi panjang yang memandang massa petani miskin sebagai kelompok yang kurang memiliki agensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan juga tidak memiliki cukup otonomi serta kemampuan untuk mengubahnya. Seperti dibahas di bagian lain buku ini, pandangan tersebut merupakan bagian dari sejarah berliku kalangan intelektual kiri radikal, partai politik, dan berbagai proyek politik mereka. Inilah salah satu alasan mengapa gerakan agraria pasca-partai politik umumnya alergi terhadap segala bentuk "*vanguardism*" atau bahkan sekadar kesan akan hal ini, khususnya oleh cendekiawan-aktivis dan intelektual pada umumnya, terutama yang dekat dengan partai politik.

Pendekatan *vanguardism* ini sangat meragukan kemampuan kelas pekerja pedesaan, menempatkan gerakan agraria sebagai bawahan, dan memberikan peran kepeloporan kepada cendekiawan-aktivis dalam hal produksi pengetahuan. Dalam tradisi semacam ini, gerakan agraria pada dasarnya diperlakukan sekadar sebagai pelengkap agenda intelektual dan/atau politik cendekiawan-aktivis, dan banyak gerakan, karena berbagai alasan, cenderung menurut saja. Bentuk ekstrem dari kecenderungan ini menimbulkan masalah ganda: kepeloporan (*vanguardism*) oleh cendekiawan-aktivis dan pengekoran (*tailism*) oleh gerakan agraria. Alhasil, kita kerap menjumpai organisasi gerakan agraria besar di mana segelintir pelopor (hampir selalu intelektual, cendekiawan-aktivis, penjaga gerbang, atau partai politik terkemuka) yang bersuara lantang dan mendaku diri sebagai wakil; sementara basis massanya sudah lama kehilangan daya gerak dan cenderung mati suri.

Pengekoran (*Tailism*) Cendekiawan-Aktivis, Kepeloporan (*Vanguardism*) Gerakan Agraria

Varian kedua—kebalikan dari yang pertama, dan dalam beberapa kasus mungkin muncul sebagai reaksi terhadapnya—ialah kecenderungan ketika gerakan agraria yang menetapkan agenda, sementara cendekiawan-

aktivis hanya mengekor. Varian ini didasarkan pada gagasan yang terlalu romantis bahwa semua yang dikatakan dan dilakukan gerakan agraria selalu baik dan benar, sehingga harus didukung tanpa syarat oleh cendekiawan-aktivis. Dalam istilah Maois, ini dapat disebut sebagai bentuk "garis massa" (*mass line*), yang dibawa ke titik ekstrem atau ditarik jauh ke luar konteksnya. Mari kita ingat kembali apa yang dikatakan Mao: "Massa adalah pahlawan sejati, sementara kita sendiri sering kali kekanak-kanakan dan tidak tahu apa-apa, dan tanpa pemahaman ini, mustahil memperoleh pengetahuan paling dasar sekalipun" (Mao 1975: 12). Jika garis massa dalam tradisi Maois ini terlalu diromantisir dan ditarik jauh di luar konteksnya, hasilnya ialah pemahaman yang agak naif tentang dinamika politik dan bagaimana gerakan agraria sesungguhnya bekerja.

Untuk melihat secara lebih umum hubungan antara ilmuwan, kaum kiri, dan gerakan, Lemisch merangkum beberapa kontradiksi dan dilema yang terkait dengan poin pembahasan kami:

> membiarkan sebuah gerakan menentukan tujuan keilmuan Anda dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan bukanlah hal yang baik bagi kaum kiri. Sumber terpenting perdebatan dan kritik akan terputus jika kalangan intelektual kiri terjebak menjadi tawanan gerakan kiri tertentu dan mengerdilkan perannya menjadi … sekadar "mendampingi" .... Bagi seorang intelektual, sekadar mendampingi berarti mengabaikan tanggung jawab kritis seorang sejarawan .... Kita tidak benar-benar melayani rakyat jika yang kita berikan hanyalah kekaguman tanpa kritik. (Lemisch 2004: 193)

Kembali ke konteks spesifik aktivisme cendekia agraria, kita bisa mengajukan pertanyaan: di latar-latar yang tidak ada kontestasi politik terbuka dan gerakan yang terorganisir, apa arti aktivisme cendekia? Apakah hanya untuk mendampingi masyarakat miskin, mendokumentasikan, dan menulis tentang kondisi mereka? Ataukah bisa lebih dari itu, bahkan

sampai turun langsung "menggali parit di garis depan" dan bekerja di dalamnya untuk membangun gerakan, misalnya? Di tempat-tempat yang sudah ada kelompok terorganisir, dinamika internal gerakan agraria tidak hanya jauh dari sempurna, tetapi juga merupakan proses yang dipandu oleh hasrat kekuasaan, kadang dimanipulasi, dan selalu diperebutkan oleh aktor serta faksi yang bersaing, baik dari dalam maupun dari luar gerakan. Representasi tidak selalu berjalan demokratis, dan akuntabilitas internal tidak selalu menjadi isu penting dalam gerakan agraria—sebagaimana dalam gerakan politik lainnya. Mendez membagikan apa yang dia saksikan langsung di dalam organisasi, sekaligus memberi peringatan kepada cendekiawan-aktivis:

> Cendekiawan-aktivis mesti berhati-hati agar tidak mentah-mentah mengamini pandangan *Pollyanna*—terlalu optimis—tentang organisasi lokal yang miskin dan polos, yang tak mampu "memanfaatkan" cendekiawan-aktivis atau proyek penelitian untuk mendukung agenda individu, politik, atau kelompok kecil tertentu. Kita tidak boleh begitu saja berasumsi ada hubungan manis nan romantis antara cendekiawan-aktivis dengan organisasi "lokal". Di era globalisasi, kita juga mesti waspada terhadap kecenderungan meromantisasi komunitas lokal sebagai lumbung "kebenaran lokal yang autentik". Komunitas dan organisasi tidaklah homogen, juga tidak bebas dari konflik internal, perebutan kekuasaan, dan kontradiksi …. Ketika berhadapan dengan konflik internal seperti ini, hampir mustahil bagi cendekiawan-aktivis untuk mengambil posisi sebagai pengamat netral. (Mendez 2006: 153)

Menerima mentah-mentah perkataan dan tindakan pemimpin gerakan sering kali menggiring cendekiawan-aktivis untuk menulis atau mendukung proses-proses yang sebenarnya tidak layak didukung, atau sebaliknya, gagal mendukung perjuangan yang justru layak didukung. Dalam pola ini, cendekiawan-aktivis cenderung memperkuat kepemimpinan

bermasalah seperti tipe pemimpin *caudillo-cum-cacique*—semacam tokoh karismatik sekaligus patron otoriter—atau ikut melegitimasi peran bermasalah yang dimainkan perantara gerakan yang tidak demokratis dan bahkan despotik, atau mendukung posisi politik yang problematik. Akibatnya, mereka tanpa sengaja mengabaikan gerakan-gerakan dan aksi kolektif yang sebenarnya menarik dan penting, hanya karena gerakan itu tidak memiliki pemimpin yang piawai mengartikulasikan atau menggemakan capaian-capaian penting. Sebaliknya, mereka bisa terjebak mendukung gerakan yang sebenarnya hanyalah cangkang kosong, hanya karena gerakan itu kebetulan memiliki elite pimpinan yang pandai bicara, atau yang mampu merogoh kocek untuk hadir di pertemuan dan konferensi, baik di ibukota nasional maupun di mancanegara. Edelman telah memperingatkan kita tentang:

> kecenderungan aktivis menampilkan "narasi resmi" yang terlalu mulus dan koheren tentang gerakan mereka, serta mengajukan klaim-klaim "representasi" yang bisa saja tidak selalu punya dasar yang kuat. Para peneliti akademik dan intelektual profesional lainnya kadang, sadar atau tidak, ikut terlibat dalam menciptakan dan menyebarkan narasi-narasi semacam itu, serta turut "menghapus noda" (atau, dalam istilah kekinian, "photoshop") dimensi-dimensi biografi aktivis dan praksis gerakan sosial yang sebenarnya rumit, penuh kontradiksi, atau bahkan bertentangan dengan gambaran atau garis "resmi". Pertanyaan pentingnya: Apakah pendekatan kosmetik semacam ini—yang dalam bentuk ekstremnya kerap dikritik sebagai "swasensor", "kekaguman tanpa kritik", atau bahkan "pemandu sorak"—benar-benar membantu memenuhi kebutuhan gerakan sosial? (Edelman 2009: 249)

Selain itu, tidak jarang sebuah organisasi petani yang kaya berupaya mendulang dukungan luas dengan mendaku diri mewakili semua petani: kecil, menengah, dan besar. Dalam situasi seperti ini, skenario

terburuknya ialah munculnya interaksi segitiga yang saling memperkuat antara tiga pihak: pimpinan gerakan agraria bergaya *caudillo* (yang kerap mempromosikan gerakan kosong atau gerakan petani kaya yang mengaku berbicara atas nama kepentingan seluruh "kaum pemilik nengeri"); lapisan perantara gerakan dan pemandu sorak (banyak dari mereka adalah intelektual kelas menengah borjuis kecil yang romantis dan gegabah); dan cendekiawan-aktivis yang tidak kritis (terutama mereka yang tidak menggunakan analisis kelas secara ketat), yang menerima begitu saja klaim-klaim besar para pemimpin, perantara, dan pemandu sorak gerakan. Dalam konteks ini, peran kepeloporan yang dirayakan dan diromantisasi dilekatkan pada gerakan agraria, sementara cendekiawan-aktivis ditempatkan pada posisi bawahan. Di sini, cendekiawan-aktivis dikerdilkan menjadi pelengkap agenda politik dan logistik gerakan agraria, dan diam-diam menerima pengerdilan ini. Versi ekstrem dari kecenderungan ini melahirkan masalah ganda: kepeloporan (*vanguardism*) dalam gerakan agraria dan pengekoran (*tailism*) oleh cendekiawan-aktivis.

Keterlibatan Interaktif Cendekiawan-Aktivis & Gerakan Agraria

Kedua kecenderungan dominan yang telah dibahas sebelumnya sama-sama bersifat instrumentalis dan bermasalah. Karena itu, dibutuhkan pendekatan ketiga: yakni pendekatan yang interaktif, saling menguatkan, dan berjalan dua arah dalam hubungan antara gerakan agraria dan cendekiawan-aktivis. Di satu sisi, pendekatan ini menghargai keahlian cendekiawan-aktivis dalam membantu gerakan agraria untuk mengatasi tantangan dan halangan yang dihadapi, sekaligus memperluas jangkauan perjuangan politik mereka. Di sisi lain, pendekatan ini juga menghargai otonomi gerakan agraria dalam membangun gerakan dan aksi kolektifnya sendiri. Menyadari besarnya potensi sinergi untuk menyatukan kekuatan, cendekiawan-aktivis dan gerakan agraria dapat menbangun aliansi yang saling menguntungkan. Inilah, kurang lebih,

asumsi dasar yang dikemukakan oleh para perintis penelitian aksi partisipatoris (*participatory action research*) seperti sosiolog Colombia Orlando Fals Borda (Rappor, 2020). Seperti dikatakan Edelman, "beberapa sinergi penting antara gerakan sosial dan akademisi bisa berupa pertukaran pengetahuan dan jaringan, diskusi strategi bersama, memublikasikan platform dan aktivitas organisasi, menganalisis sejarah mereka, dan terlibat dalam penelitian dan pelatihan kolaboratif" (2009: 247). Langkah awal yang penting bagi pendekatan semacam ini ialah pemahaman yang jujur dan objektif tentang latar belakang kedua belah pihak dan motivasi masing-masing untuk berinteraksi. Pendekatan ini mengakui otonomi kedua belah pihak, dan karena itu perlu ada proses negosiasi atas bentuk dan persyaratan keterlibatan mereka. Pendekatan ini juga menekankan bahwa gerakan agraria dan cendekiawan-aktivis sama-sama punya kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan, meskipun dengan cara yang berbeda, dan memahami bahwa pengetahuan tersebut bisa jauh lebih kuat jika dipadukan.

Kedua kelompok aktor tersebut punya latar belakang berbeda, juga titik awal dan kepentingan kelembagaan yang berlainan dalam menghasilkan pengetahuan maupun terlibat dalam perjuangan politik. Hal ini makin rumit jika ditinjau dari perspektif sempit tentang cendekiawan-aktivis. Sebagai contoh, cendekiawan-aktivis mungkin berpikir untuk membangun teori tentang kedaulatan pangan sebagai sistem pangan alternatif, sementara organisasi gerakan agraria lokal justru lebih tertarik pada isu mendesak seperti menjalin kerjasama dengan program makan siang gratis untuk siswa sekolah. Atau justru sebaliknya: cendekiawan-aktivis hanya fokus menyelesaikan proyek penelitian satu tahun dan menargetkan publikasi artikel jurnal, sementara gerakan agraria memikirkan tujuan yang jauh lebih besar, seperti program redistribusi tanah secara menyeluruh di masyarakat. Perbedaan titik awal dan kepentingan kelembagaan ini membuat keterlibatan antara gerakan agraria dan cendekiawan-aktivis selalu sarat dengan potensi, tetapi juga penuh ketegangan dan bahkan konflik nyata.

Croteau *et al.* (2005: xv–xvi) menjelaskan: "baik teoretikus gerakan sosial maupun aktivis gerakan sama-sama berada dalam sistem struktural yang menciptakan batasan bagi upaya bersama sekaligus peluang untuk bertindak nyata." Mereka juga menegaskan bahwa "ketegangan antara teori dan praksis perlu dipahami dalam kaitannya dengan kuasa struktural yang lebih besar, bukan dipersonalisasi sebagai masalah atau visi seorang akademisi atau aktivis saja" (2005: xv–xvi). Sementara itu, sebagaimana diingatkan oleh Routledge dan Derickson, cendekiawan-aktivis mengidentifikasi dan berpihak pada "perjuangan komunitas marginal dengan cara yang menolak, tetapi tetap mengakui, sejarah kekerasan dan imperialisme dari dunia akademik" (2015: 391). Bagi Fox, kedua pihak berada dalam posisi terbaik "untuk menemukan sinergi positif antara kebutuhan mitra aktivis dan keketatan kaidah akademik dalam keilmuan, jika [mereka] saling mengakui adanya ketegangan di antara kekuatan-kekuatan yang membentuk agenda masing-masing" (2006: 30). Dalam mengkaji gerakan agraria di Amerika Latin, Edelman menjelaskan bahwa "ketegangan antara aktivis dan akademisi … cenderung lebih sempit, yakni seputar proses penelitian serta tujuan dan metode produksi dan penyebaran pengetahuan" (2009: 247). Perbedaan-perbedaan ini bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi. Seperti diingatkan Fox, "kemitraan antara aktivis dan ilmuwan, jika ingin berjalan baik, mesti didasarkan pada kesalingpahaman, penghormatan atas perbedaan, tujuan bersama yang dapat dicapai, dan kesediaan untuk bersepakat tidak sepakat" (2006: 31). Fox menyimpulkan:

> Gagasan seperti kemitraan dan koalisi—lebih daripada solidaritas, misalnya—mengakui bahwa para peserta adalah aktor otonom yang masing-masing membawa agenda, prioritas, dan—entah kita menyadarinya atau tidak—beban tertentu ke meja pertemuan. Koalisi dan kemitraan yang bisa langgeng bertumpu tidak hanya pada nilai-nilai bersama, tetapi juga pada kepentingan bersama." (2006: 32)

Dalam pembahasannya tentang keberlanjutan pembangunan, Ian Scoones menggarisbawahi ketegangan serupa, dan menggambarkan interaksi yang tak beraturan di antara para aktor yang terlibat dalam politik pengetahuan. Dia menjelaskan, "Transformasi menuju keberlanjutan dan pembangunan tidak dapat diatur, dikelola, dan dikendalikan, melainkan harus lahir dari aliansi politik yang tak teratur, pengetahuan yang beragam, dan organisasi kolektif" (Scoones 2016: 308). Pendekatan dua arah yang saling memperkuat dalam hubungan antara cendekiawan-aktivis dan gerakan agraria dengan sendirinya akan mengarah pada proses saling menghayati semangat sekaligus kontradiksi dari kedua belah pihak. Dalam merefleksikan keterlibatannya dalam perjuangan atas tanah di Nikaragua, Hale menyatakan:

> Gerakan-gerakan ini sekaligus menginspirasi dan juga sarat kompromi; para aktivis gerakan adalah pembela keadilan lokal dan global yang berani, tetapi sebagian terlibat dalam sistem penindasan yang mereka lawan. Argumen saya terbentuk dengan melihat kedua sisi ini melalui satu lensa. Untuk menyelaraskan diri pada perjuangan politik sambil melakukan penelitian tentang isu-isu terkait perjuangan itu berarti sedang menempati ruang keilmuan yang sangat produktif. Namun, ketika kita berada dalam ruang semacam itu, kita juga mau tak mau terseret dalam beragam proses politik yang penuh kompromi. Kontradiksi-kontradiksi yang dihasilkan menjadikan penelitian lebih sulit dilakukan, tetapi juga, sebaliknya, menghasilkan pengetahuan yang tak mungkin diraih dengan cara lain. Wawasan inilah, pada gilirannya, yang menjadi dasar—meski sering tak diakui—bagi pemahaman analitis dan inovasi teoretis. (2006: 98)

Ringkasnya, cendekiawan-aktivis dan gerakan agraria tumbuh secara otonom satu sama lain. Namun, dalam proses menapaki jalannya masing-masing, keduanya kerap saling terlibat erat. Hubungan ini bisa terwujud dalam beragam bentuk, dan terkadang hasilnya bisa juga kurang

produktif atau bahkan problematik. Hubungan interaktif yang saling memperkuat antara keduanya bisa menghasilkan dinamika keterlibatan yang berantakan, tetapi sekaligus mengandung potensi terbesar untuk mendorong perubahan progresif di masyarakat. Namun demikian, sekalipun kita mengakui adanya agensi politik yang kuat baik di kalangan cendekiawan-aktivis maupun gerakan agraria, mereka sebenarnya tetap menajalankan kerja intelektual dan politik dalam lingkungan yang tidak mereka pilih sendiri dan dalam situasi yang serbasulit, bahkan kerap tidak bersahabat. Di Bab 4, kita akan membahas tantangan-tantangan lain dalam mewujudkan aktivisme cendekia.

CATATAN

1 Lihat https://casasouth.org/sample-page/.

2 Lihat juga Martinez-Alier *et al*. (2011) dalam konteks keilmuan dan aktivisme gerakan keadilan lingkungan.

BAB 4

Apa yang Harus Dilakukan? Tantangan Aktivisme Cendekia Agraria di Masa Depan

Ian Scoones menelaah politik yang melingkupi Asesmen Internasional atas Pengetahuan, Sains, dan Tekhnologi untuk Pembangunan (IAASTD)[1] dan tiba pada kesimpulan:

> sebagian dari kontestasi pengetahuan yang terlibat dalam asesmen ini … menyingkap empat pertanyaan kunci di jantung teori dan praktik demokrasi masa kini: bagaimana pengetahuan dibingkai; bagaimana praktik dan metodologi yang berbeda-beda diterapkan dalam proses lintas budaya dan global; bagaimana "representasi" dibangun dan diabsahkan; serta bagaimana, sebagai hasilnya, pemahaman kolektif tentang isu-isu global terbentuk? … dalam asesmen semacam ini, politik pengetahuan mesti dibuat lebih gamblang, dan negosiasi seputar politik serta nilai-nilai, bingkai, dan perspektif perlu ditempatkan di pusat perancangan asesmen. (2009b: 547)

Politik pengetahuan dimainkan di berbagai ruang, salah satunya dalam perebutan tafsir tentang dunia dan bagaimana cara mengubahnya. Pertarungan sengit seputar politik pengetahuan yang ditunjukkan Scoones berdasarkan pengalaman IAASTD lebih dari satu dekade silam itu kini kembali muncul dengan pola serupa dalam perdebatan tentang perubahan iklim. Jesse Ribot menyoroti dinamika politik pengetahuan ini:

> Kerangka dominan yang seolah-olah ilmiah untuk menilai kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim biasanya menempatkan

> peristiwa iklim sebagai penyebab utamanya. Pendekatan ini justru menutupi dan membungkam beragam faktor lain penyebab krisis yang tidak berkaitan langsung dengan iklim, seperti faktor sosial dan ekonomi-politik. Dengan mengembalikan dimensi sosial ke dalam analisis, kita dapat melihat berbagai penyebab dan kemungkinan jalan keluar yang lebih utuh. Namun, pendekatan ini pun sarat kontroversi, karena menyingkap bahwa masalahnya kerap bersumber dari keputusan [politik], kebijakan [publik], dan lembaga [berkuasa]—yang berarti mengisyaratkan adanya tanggung jawab dan kesalahan. Memilih pendekatan sosial dan ekonomi-politik dalam analisis [atas krisis] membawa implikasi pada tindakan dan etika, karena memperluas kemampuan [untuk bertindak] serta tanggung jawab [etis] dalam merespons persoalan. (2022: 683)

Aktivisme cendekia, pada intinya, adalah upaya menggugat asumsi-asumsi dominan yang cacat terkait masalah sosial, termasuk isu perubahan iklim. Namun, seperti diingatkan Scoones dan Ribot, arena pengetahuan selalu dipenuhi beragam suara dan pembingkaian yang saling bersaing: suara siapa yang didengar, bingkai mana yang diterapkan, dan mengapa? Sirkuit pengetahuan global yang sangat tidak demokratis dan bercorak neokolonial justru memperkuat, memperbesar, sekaligus mengabsahkan suara serta bingkai dari kelas-kelas dan kelompok sosial dominan terkait berbagai masalah seperti pertanahan, agraria, pangan, dan politik iklim. Karena itu, salah satu tugas penting cendekiawan-aktivis adalah menentang politik pengetahuan ini sekaligus mendorong demokratisasi sirkuit pengetahuan—tugas yang tak dapat dipisahkan dari perjuangan lebih luas untuk keadilan sosial.

Sebagai tema akademik sekaligus rujukan politik, politik agraria—khususnya politik pertanahan—kini kembali mencuat dan mendapat tempat dalam agenda pembangunan global. Persoalan-persoalan klasik dalam penelitian maupun politik tetap relevan hingga kini, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula persoalan-persoalan baru. Isu-isu yang

diperdebatkan pun kini jauh lebih luas dibandingkan kajian agraria konvensional. Perubahan ini turut membentuk sekaligus dibentuk oleh karakter gerakan agraria kontemporer yang, seperti halnya setiap gerakan sosial, mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Masa perang tani dan gerakan agraria yang terhubung dengan proyek politik revolusioner nasional memang telah berakhir sekitar empat dekade lalu, dan sejak itu muncul jenis gerakan agraria baru yang sangat berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspresi dan ekspansi gerakan ini di kancah transnasional menjadi salah satu perkembangan paling menarik dalam lanskap politik agraria global. Dimensi kelas, yang berkelindan dengan berbagai poros perbedaan lain (ras, etnisitas, kasta, gender, generasi, agama, dan kebangsaan) saling berinteraksi secara dinamis, sehingga membuat gerakan agraria kontemporer amat kompleks dan mustahil dipahami secara sederhana. Transformasi gerakan ini menjadi *atau* bertumpang tindih dengan gerakan keadilan lingkungan/iklim serta gerakan pangan menunjukkan terjadinya pergeseran terpenting dalam lanskap politik gerakan agraria. Situasi ini mendesakkan penggunaan berbagai perangkat analisis teoretis serta metodologis baik yang klasik maupun kontemporer dalam kajian agraria, yang dipadukan dengan perangkat analisis baru yang belum sempat terpikirkan dan diciptakan.

Tantangan ini perlu dipahami dalam konteks kesinambungan sejarah dan politik, yang membentang dari tradisi klasik dalam *The Eighteenth Brumaire* karya Marx, sorotan atas gagasan populisme agraria klasik Rusia pada paruh kedua abad XIX, hingga gagasan inti tentang perjuangan antikapitalis abad XXI seperti terjelaskan dalam tipologi perjuangan antikapitalis oleh Erik Olin Wright dan dalam gagasan "perjuangan antikapitalis serta translingkungan untuk ekososialisme" oleh Nancy Fraser (Wright 2019; Fraser 2021).

Wright memerinci lima "logika strategis" dalam perjuangan antikapitalis: "menghancurkan kapitalisme", "membongkar kapitalisme", "menjinakkan kapitalisme", "melawan kapitalisme", dan "mengelak dari kapitalisme" (2019: 38–64).

Menghancurkan kapitalisme adalah logika revolusioner khas tradisi Marxis, yang bertumpu pada gagasan bahwa sistem lama harus dihancurkan terlebih dahulu agar bisa dibangun sistem baru yang sama sekali berbeda, dan ini mensyaratkan perebutan kekuasaan negara (Wright 2019: 42). Merebut kekuasaan negara hanya mungkin dilakukan melalui "partai sosialis berbasis massa, yang mampu memenangkan pemilu dan bertahan langgeng di tahta kekuasaan" (43). Sementara itu, *membongkar kapitalisme* punya tujuan fundamental yang mirip, tetapi lebih skeptis terhadap penggulingan kapitalisme secara tiba-tiba dan menyeluruh. Dengan berpegang pada prinsip sosialisme demokratis, logika ini mengandung gagasan inti yang mendorong "pembongkaran kapitalisme secara bertahap sembari membangun alternatifnya melalui tindakan negara yang berkesinambungan" (43). Baik menghancurkan maupun membongkar kapitalisme, pada dasarnya, sama-sama ingin mencapai "kemungkinan akhir menggantikan kapitalisme dengan struktur yang sepenuhnya berbeda, yakni sosialisme" (44).

Menjinakkan kapitalisme berangkat dari pandangan bahwa kapitalisme adalah penyebab utama kerusakan di masyarakat, dan mengusulkan agenda alternatif berupa "sosial demokrasi". Logika ini bertumpu pada gagasan bahwa "kapitalisme mestinya tidak dibiarkan berjalan liar sesuai mekanismenya sendiri; kapitalisme dapat dijinakkan melalui kebijakan negara yang dirancang dengan cermat" (Wright 2019: 45). Dengan kata lain: "kapitalisme dapat ditundukkan melalui regulasi ketat dan redistribusi yang signifikan, sehingga daya rusaknya bisa ditekan dan sistemnya masih bisa memberikan laba yang cukup agar rodanya tetap berputar," dan "untuk mencapainya, diperlukan mobilisasi rakyat dan kemauan politik; upaya ini tidak mungkin bergantung pada kebaikan hati kaum elite yang tercerahkan" (45). Wright menjelaskan bahwa "gagasan menjinakkan kapitalisme tidak mengingkari kecenderungan dasar kapitalisme membuat kerusakan; pendekatan ini hanya sekadar menekan dampaknya" (46).

Melawan kapitalisme mendorong "perjuangan yang menentang kapitalisme dari luar negara tanpa merebut kekuasaan negara" (Wright 2019: 49); sementara *mengelak dari kapitalisme* mencerminkan sikap penarikan diri: "salah satu respons tertua terhadap daya rusak kapitalisme adalah 'melarikan diri'" (49). Pendekatan ini menganggap kapitalisme terlalu kuat untuk dilawan dan dikalahkan, sehingga hal terbaik yang bisa kita lakukan ialah mengisolasi diri dari dampak buruknya, mengelak dari "serbuannya yang merusak, ke lingkungan yang lebih terlindungi" (49).

Ada dua dimensi dalam tipologi Wright: pertama, tujuan strategi, yakni fokus pada menetralisasi daya rusaknya atau melampaui strukturnya; dan kedua, lokus strategi, yaitu bertumpu pada negara atau masyarakat sipil. Dari karya Wright, kita dapat menarik tiga poin pokok yang relevan dengan pembahasan ini: (i) terdapat banyak ragam tipe ideal perjuangan antikapitalis; (ii) tidak ada satu pun tipe ideal yang dapat diterapkan secara efektif untuk melawan kapitalisme; (iii) kuncinya adalah memadukan beragam tipe ideal perjuangan antikapitalis untuk mengikis kapitalisme. Singkatnya, perjuangan antikapitalis secara inheren bersifat majemuk, lintas kelas, berlangsung di banyak ranah, dan di berbagai skala—seperti ini pulalah perjuangan agraria kontemporer, yang intinya ialah perjuangan atas tanah, mestinya dijalankan, sebagaimana dibahas di Bab 2.

Bagi Fraser (2021), di era perubahan iklim, perjuangan antikapitalis mesti berjalan beriringan dengan apa yang dia sebut sebagai gerakan "translingkungan". Dia menyayangkan bahwa gerakan keadilan lingkungan kontemporer umumnya hanya berfokus pada kerusakan yang dialami komunitas lokal tertentu, tanpa koordinasi yang memadai secara sistemik, dan kurang terhubung dengan perjuangan antikapitalis lebih luas; artinya, gerakan yang "hanya berhaluan lingkungan" ini jarang terhubung dengan perjuangan terkait berbagai isu lainnya, seperti kerja perawatan dan reproduksi sosial, kondisi kerja, dsb. Fraser menggunakan

istilah "translingkungan" untuk menekankan pentingnya gerakan lingkungan yang mampu menjalin keterhubungan sistemik sekaligus bertopang pada perspektif antikapitalis dan ekososialis—dengan kata lain, melampaui "hanya gerakan lingkungan". Kami terinspirasi dari argumen Fraser ini dan mengembangkannya pada konteks gerakan agraria: bahwa gerakan ini harus mampu melampui "hanya gerakan agraria"; inilah salah satu pesan kunci kami yang sejak awal kami tekankan dalam pembahasan tentang topologi isu dan perjuangan atas tanah di Bab 2.

Kerangka normatif tentang perjuangan yang diajukan Wright dan Fraser mencerminkan perubahan pengaturan global, termasuk perubahan dalam dunia agraria. Inilah latar penting bagi aktivisme cendekia agraria abad XXI, yang membedakannya dari pendekatan di masa lalu yang sangat berfokus pada tipe ideal penghancuran/pembongkaran kapitalisme, dan didominasi oleh tradisi Marxis ortodoks. Meski Marxisme ortodoks tetap sangat berpengaruh dalam kajian agraria kritis dan kerja advokasi agraria hingga kini, corak ideologi yang mewarnai pemikiran dan praksisnya jauh lebih banyak, beragam, dan eklektik (Li 2014; Kothari *et al*. 2019; Gerber 2020; Roman-Alcalá 2021). Semua ini sebaiknya dipahami bukan sebagai penolakan terhadap masa lalu, melainkan sebagai kesinambungan: suatu transisi dari kajian agraria klasik menuju kajian agraria kritis (Borras 2023). Dalam kesinambungan ini, penting bagi kita untuk menandai tempatnya para pemikir berpengaruh beserta gagasan mereka yang tetap hidup tentang politik agraria dan peran sekutu. Kerja-kerja cendekiawan-aktivis agraria dalam konteks kekinian mensyaratkan strategi yang "berorientasi pada gerakan", yang umumnya dapat dimaknai dalam dua cara. Pertama, strategi ini berorientasi pada gerakan karena tidak menghindar dari keterhubungan dengan—serta memberi kontribusi kepada—gerakan agraria emansipatoris dan proyek politik. Kedua, strategi ini berorientasi pada gerakan karena bertujuan melakukan penelitian, baik secara individual maupun kolektif, di dalam dan melalui gerakan penelitian aktivis dan cendekiawan-aktivis.

Gerakan penelitian aktivis dan cendekiawan-aktivis yang dikemukakan di sini memiliki karakteristik gerakan sosial: ia didasarkan pada asumsi dan visi bersama yang luas tentang dunia yang kita hidupi saat ini serta dunia yang ingin kita bangun, juga pada kepentingan bersama; gerakan ini bisa saja tanpa bentuk, cair, dan informal, tapi juga penuh inspirasi sekaligus menginspirasi, kreatif dan tidak segan menantang pakem, berani sekaligus subversif. Gerakan ini mesti berupa kolektif yang longgar: komunitas rekan sejawat, kawan seperjuangan, dan kawan sejalan. Gerakan ini memerlukan dan melibatkan jaringan penelitian formal, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ia harus bisa terorganisir sekaligus spontan, mampu mengarungi medan sulit antara kepeloporan dan pengekoran dalam hubungannya dengan gerakan agraria, dan mesti menyebar luas tapi tetap memiliki simpul-simpul jelas yang menjadi tempat berdenyutnya imajinasi dan kreativitas intelektual-politik, dengan cara kerja yang polisentris. Gerakan ini mesti dijalankan bersama dan disebarkan secara demokratis di tiga arena utama: akademik, lembaga penelitian independen nonakademik, dan pusat-pusat penelitian berbasis gerakan sosial. Hanya dengan gerakan semacam inilah kita dapat melampaui sekadar "perumusan agenda" dan pencapaian individual dalam penelitian cendekiawan-aktivis, mengatasi kontradiksi antara dunia akademik yang cenderung egosentris dan gerakan sosial yang berorientasi kolektif, serta pada saat bersamaan mentransformasikan penelitian cendekiawan-aktivis menjadi kekuatan yang lebih besar untuk mendorong perubahan sosial radikal.

Lantas, bagaimana agar aktivisme cendekia tetap relevan dan makin kuat dalam konteks masa kini? Apa yang harus dilakukan? Untuk memperluas jangkauan cendekiawan-aktivis dan menjadikannya kekuatan yang lebih besar bagi keadilan sosial, diperlukan kejelasan mengenai: (i) tujuan kerja cendekiawan-aktivis; (ii) pengetahuan transformatif; (iii) tindakan afirmatif; dan (iv) solidaritas serta internasionalisme. Pembahasan berikutnya menyoroti masing-masing aspek tersebut; urai-

annya cenderung bersifat normatif sekaligus praktis, dan melintasi tiga arena kelembagaan.

TUJUAN: AKSES, KESETARAAN, OTONOMI

Jika tujuan besarnya ialah memperkuat sekaligus memperluas barisan dan jangkauan aktivisme cendekia agraria, maka setiap kegiatan dan agenda mesti memiliki tujuan yang jelas agar bisa efektif. Dalam konteks ini, ada tiga tujuan utama yang sangat penting bagi aktivisme cendekia agraria kontemporer, yang bisa dirangkum dalam tiga konsep kunci: *akses*, *kesetaraan*, dan *otonomi*.

Tujuan pertama berkaitan dengan akses dasar, yakni terpenuhinya sarana dan kondisi pokok yang dibutuhkan agar kerja cendekiawan-aktivis berjalan efektif. Wujudnya bisa berbeda-beda di setiap kasus, bergantung pada sejarah struktural serta kelembagaan dan keadaan saat ini, baik yang bersifat politik maupun materiel. Secara politis, kebutuhan paling mendasar dari akses ini ialah hak untuk memiliki hak (Franco *et al*. 2015). Namun, kami setuju dengan argumen Jesse Ribot bahwa "hak untuk membentuk hak-hak itu sendiri jauh lebih penting—yakni hak atas sarana dan kebebasan untuk memengaruhi mereka yang berkuasa. Inilah yang disebut emansipasi" (2014: 697).

Gagasan dan praksis aktivisme cendekia, kendatipun berwatak subversif, memerlukan akses atas hal-hak sipil dan politik mendasar (baik yang dijamin hukum nasional maupun perjanjian internasional) (Franco dan Monsalve 2018). Mungkin ini terdengar sepele bagi cendekiawan-aktivis yang hidup dan bekerja di masyarakat dengan kondisi politik demokrasi liberal, di mana kebebasan dasar untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat relatif terjamin, setidaknya sampai batas tertentu, tanpa terlalu takut akan pembalasan. Namun, di banyak masyarakat lain dengan kondisi politik yang kurang demokratis, kebebasan semacam itu sama sekali tidak boleh dianggap remeh; dalam konteks masyarakat semacam ini, keterlibatan dalam bentuk advokasi tertentu bisa mengakibatkan pembalasan kejam dari negara dan elite

berkuasa, yang berujung pada hilangnya pekerjaan atau bahkan nyawa. Ironisnya, kondisi yang paling tidak bersahabat justru kerap ditemukan di masyarakat yang paling membutuhkan kehadiran aktivisme cendekia subversif. Dalam situasi yang demikian, tugas paling mendesak bagi cendekiawan-aktivis ialah memperjuangkan hak untuk memiliki hak, serta hak untuk membentuk hak guna melancarkan kerja cendekiawan-aktivis secara bebas.

Selain hak-hak sipil dan politik, ada juga kebutuhan materiel dan logistik yang tak kalah penting untuk mewujudkan kerja aktivisme cendekia yang efektif. Misalnya akses atas dana penelitian dan fasilitas penelitian seperti perpustakaan yang memadai. Perpustakaan bisa disebut memadai bila dilengkapi dengan sumberdaya yang memadai, termasuk buku dan langganan jurnal ilmiah internasional terkemuka. Fasilitas ini krusial bagi para peneliti, karena memungkinkan mereka mengetahui kondisi paling mutakhir di berbagai bidang dan disiplin ilmu pada setiap saat. Namun, bagi sebagian besar cendekiawan-aktivis, distribusi dan akses atas kebutuhan materiel semacam ini masih sangat terbatas; mungkin hanya segelintir yang bisa menikmatinya secara penuh. Ketimpangan ini, sekali lagi, mesti dilihat dalam konteks struktural dan kelembagaan seperti yang dijelaskan di atas.

Salah satu kebutuhan materiel terpenting dalam memperkuat aktivisme cendekia secara global adalah akses atas layanan dan fasilitas terkait bahasa. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa bahasa Inggris tak hanya dominan di lembaga akademik, tetapi juga di lembaga penelitian independen maupun gerakan sosial. Dalam dunia akademik saat ini, jika publikasi ilmiah diterbitkan di jurnal atau buku berbahasa non-Inggris, besar kemungkinan "nilainya" tidak akan diakui sebagaimana semestinya. Mayoritas jurnal akademik yang "terindeks" dan menduduki peringkat tinggi dalam skala penilaian jurnal internasional adalah jurnal berbahasa Inggris. Sangat jarang ada jurnal berbahasa lain yang masuk dalam ketegori terindeks, apalagi yang menempati peringkat tinggi dalam sistem pemeringkatan jurnal internasional. Hal yang sama

berlaku dalam penerbitan buku. Banyak sistem pemeringkatan jurnal maupun buku didasarkan pada perhitungan rumit yang bertumpu pada jumlah kutipan (Web of Science dan Google Scholar). Karena infrastruktur kelembagaan dan sistem insentif sudah sejak awal condong pada penerbitan berbahasa Inggris—misalnya, sebagian besar jurnal yang diindeks di Web of Science memang berbahasa Inggris—maka kutipan yang dihitung melalui sistem Web of Science pun berpihak pada artikel-artikel berbahasa Inggris. Contoh tentang penghargaan kelembagaan untuk penerbitan buku juga cukup jelas: sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit berbahasa Inggris yang berbasis di Eropa kemungkinan besar akan memberi penulisnya poin insentif maksimum dari universitas, sedangkan buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia nyaris tidak akan dihitung, atau kalaupun dihitung, hanya akan memperoleh poin insentif minimal. Namun, penerbitan dalam bahasa Inggris pun tidak serta-merta membuat arena permainan menjadi setara: seorang penulis bisa memperoleh poin insentif penuh jika menerbitkan bukunya melalui penerbit berbahasa Inggris yang berpusat di Belanda, tetapi sedikit atau bahkan sama sekali tidak memperoleh poin jika menerbitkan dengan penerbit berbahasa Inggris di Filipina. Struktur penilaian atas publikasi akademik, yang menjadi tempat bernaung para cendekiawan-aktivis, pada dasarnya sangat tidak demokratis.

Dengan demikian, tugas lain yang tak kalah mendesak bagi para cendekiawan-aktivis adalah membongkar struktur sosial yang timpang tersebut. Karena itulah, sebagaimana disoroti oleh Castree (2000), universitas perlu dilihat sebagai garda depan perjuangan di mana perlawanan harus dijalankan dan dipertahankan. Mengingat betapa kokohnya basis struktural dan kelembagaan yang mendasari kondisi yang tidak demokratis ini, mengubah sistem jelas merupakan perjuangan jangka panjang. Cendekiawan-aktivis harus mengatasi tantangan ini dengan memperjuangkan akses atas layanan bahasa. Paling tidak, ini mencakup penerjemahan tulisan maupun komunikasi lisan ke dalam bahasa Inggris, serta dukungan penyuntingan bahasa untuk karya yang diterbitkan.

Kedengarannya sepele, tetapi layanan semacam ini memerlukan biaya cukup besar, yang mana cendekiawan-aktivis kerap tidak mampu menanggungnya, terutama mereka yang berada di Selatan Global, dan/atau berasal dari kelompok sosial yang kurang beruntung. Sebagian besar peneliti di Selatan Global atau yang berbasis di lembaga penelitian independen kecil maupun gerakan sosial tidak punya kemewahan semacam itu: bahkan, nominal biaya layanan tersebut bisa setara dengan gaji sebulan penuh peneliti di universitas. Karena itu, akses atas sumberdaya untuk membayar layanan dan fasilitas bahasa merupakan kebutuhan mendasar bagi cendekiawan-aktivis; namun, jalan untuk mengatasi hambatan dan kendala ini tidaklah mudah. Dalam konteks ini, pengalaman beberapa gerakan sosial transnasional kontemporer mungkin relevan. Dua atau tiga dasawarsa lalu, mereka menghadapi persoalan serupa dan menemukan sebagian solusi melalui lahirnya gerakan terorganisir yang dikenal sebagai "penerjemah solidaritas lintas bahasa".

Tujuan kedua berkaitan dengan kesetaraan. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa banyak calon cendekiawan-aktivis maupun cendekiawan-aktivis yang sudah berkiprah bahkan sama sekali tak punya akses minimum atas beberapa kebutuhan materiel dan politik mendasar untuk bisa menjalankan kerja aktivisme cendekia yang efektif. Seperti dibahas di bab-bab sebelumnya, kerja cendekiawan-aktivis selalu bersifat relasional, terhubung di dalam maupun di luar lingkaran cendekiawan-aktivis. Karena itu, penting untuk tidak melihat akses sebagai masalah yang berdiri sendiri; jika akses ini dipandang semata-mata sebagai urusan individu, hal itu justru berisiko menguatkan individualisme dan elitisme. Dengan kata lain, akses individu mesti dipahami dalam kaitannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penting untuk melihat persoalan akses ini dalam konteks pengaturan struktural dan kelembagaan yang timpang, di mana cendekiawan-aktivis—beserta sekutu, pesaing, ataupun lawan mereka—sama-sama bergerak.

Ada banyak poros ketimpangan yang bisa dikenali: di antara cendekiawan-aktivis sendiri, baik di dalam satu lembaga maupun antarlembaga,

yang ditandai dengan diferensiasi sosial berdasarkan kelas dan berbagai sumbu perbedaan lain yang saling membentuk; dan antara cendekiawan-aktivis dengan pihak lain di luar mereka. Sama seperti masalah akses, ketimpangan ini tampak jelas dalam konteks kebutuhan materiel dan politik yang berbeda-beda untuk menjalankan kerja aktivisme cendekia. Ketimpangan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan hasil langsung dari sejarah panjang sistem kolonial dan pascakolonial yang sarat dengan penjarahan, eksploitasi, dan penindasan, serta dari relasi kekuasaan masa kini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sebuah universitas terkemuka di Inggris Raya memiliki sumberdaya yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah universitas di Zimbabwe, misalnya. Manifestasi ketimpangan materiel dan politik semacam ini bisa ditemukan dalam bentuk yang nyaris tak terbatas.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dua sarana utama dalam produksi pengetahuan bagi cendekiawan-aktivis adalah buku dan jurnal ilmiah, seumpama alat bajak dan tanah bagi petani. Pola umum distribusi akses atas dua sumberdaya utama ini mencerminkan sekaligus melanggengkan poros-poros eksploitasi dan penindasan. Jika pengetahuan adalah kekuasaan, maka akses yang timpang atas sarana produksi pengetahuan berarti juga melestarikan distribusi kekuasaan yang tidak setara. Dengan begitu, persoalan akses tidak bisa dilihat sekadar sebagai urusan teknis, atau semata soal hak dan kesempatan individu yang muncul secara acak, melainkan perpanjangan sekaligus cerminan dari struktur kekuasaan yang berlaku.

Mengakhiri ketimpangan tersebut dan membangun kembali medan yang lebih demokratis—di mana cendekiawan-aktivis dapat bertunas, tumbuh, dan berkembang—menjadi keharusan yang mendesak. Yang makin kentara ialah bahwa perjuangan untuk mendistribusikan sarana serta infrastruktur produksi pengetahuan secara lebih adil tidak dapat dilepaskan dari perjuangan yang lebih luas, yakni melawan dan melampaui kapitalisme.

Tujuan ketiga—yang secara langsung terkait dengan masalah akses dan kesetaraan yang dibahas sebelumnya—adalah membangun massa kritis cendekiawan-aktivis lintas lokasi dengan tingkat *otonomi dan kapasitas* yang tinggi. Hal ini secara logis mengandaikan adanya upaya untuk mengejar model aktivitas dan agenda yang mampu meningkatkan otonomi *dan* kapasitas tersebut, atau singkatnya: pemberdayaan. Yang kami maksud dengan otonomi di sini ialah *sejauh mana* sebuah gerakan mampu melindungi proses internalnya dari campur tangan pihak luar. Hal ini tentu berbeda dengan konsep "kemandirian", yang secara inheren merupakan jenis pertanyaan ya atau tidak, atau memilih salah satu dari dua pilihan (Fox 1993). Sementara itu, kapasitas berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, dengan keterampilan dan sumberdaya yang diperlukan. Suatu gerakan mungkin saja memiliki otonomi tinggi untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, tetapi belum tentu punya kapasitas untuk mewujudkannya; sebaliknya, bisa jadi gerakan itu punya kapasitas untuk melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mencapai tujuannya. Dalam kedua situasi itu, aspirasi yang diusung tetap tidak akan tercapai (Fox 1993). Tantangan ini juga dialami cendekiawan-aktivis, apa pun latar kelembagaannya. Misalnya, seorang cendekiawan-aktivis mungkin ingin menekuni penelitian dan advokasi politik yang secara terang-terangan antikapitalis dan berhaluan sosialis, akan tetapi satu-satunya sumber dana yang tersedia berasal dari lembaga pemerintah atau donor korporat filantropis. Jadi, sekalipun cendekiawan-aktivis itu memiliki kemampuan, keterampilan, dan sumberdaya untuk menjalankan penelitian, otonomi yang dibutuhkan agar tujuan itu tercapai justru tidak dipunyai.

Apa pun basis kelembagaannya, cendekiawan-aktivis selalu menghadapi beragam kendala untuk memperkuat tingkat otonomi dan kapasitas. Di berbagai konteks masyarakat saat ini, kondisi politik yang dominan justru cenderung mempersempit ruang otonomi. Di sisi lain, meski banyak universitas dan lembaga penelitian resmi di Selatan mulai

meningkatkan infrastruktur penelitian dan investasi logistik, tingkatnya masih di bawah lembaga-lembaga serupa di Utara. Selain itu, di semua ranah kelembagaan, cendekiawan-aktivis juga dibedakan secara sosial seturut diferensiasi sosial yang kompleks—berbasis kelas dan poros perbedaan lain yang saling membentuk (ras, suku, gender, generasi, kasta, kebangsaan, agama, bahasa). Seorang lelaki kulit putih dari keluarga kelas atas di Utara, yang berkuliah di universitas papan atas dunia dan terbiasa bergaul dengan para cendekiawan-aktivis global terkemuka, tentu tidak akan menghadapi kendala sehari-hari untuk terlibat dalam aktivisme cendekia yang efektif, sebagaimana dihadapi oleh seseorang dari latar belakang BIPOC (*Black*, *Indigenous*, *People of Colour*/Kulit Hitam, Pribumi, Kulit Berwarna), berpenghasilan rendah, berkuliah di kampus komunitas yang "tidak dikenal", dan bekerja di pinggiran lingkaran akademisi maupun aktivis elite. Tingkat otonomi dan kapasitas kedua jenis cendekiawan-aktivis ini tentu saja sangat berlainan. Singkatnya, dalam memahami persoalan otonomi dan kapasitas, penting untuk berangkat dari kesadaran bahwa kategori cendekiawan-aktivis itu sendiri sangat terbeda-bedakan seturut kelas maupun poros perbedaan lainnya, terlepas dari basis kelembagaan masing-masing. Mengabaikan hal ini hanya akan membuat kita terjebak mengulang dan memperkuat diferensiasi sosial yang mencerminkan struktur sosial dan pranata eksploitasi serta penindasan yang lebih luas. Sederhananya, untuk memahami persoalan otonomi dan kapasitas cendekiawan-aktivis, kita perlu menyadari bahwa lingkup cendekiawan-aktivis bukanlah ruang yang secara ideal egaliter, melainkan sebuah arena yang dibentuk oleh hierarki status sosial dan elitisme.

Tingkat otonomi dan kapasitas cendekiawan-aktivis pada dasarnya selalu bergerak dinamis dari waktu ke waktu, dan sangat dipengaruhi oleh proyek dan kampanye tertentu yang mereka jalani, kondisi kelembagaan tempat mereka bernaung, serta sumber pendanaan yang tersedia. Dalam praktiknya, cendekiawan-aktivis berada di antara dua kutub ekstrem: yaitu kubu otonomi dan kapasitas tinggi, dan kubu otonomi

dan kapasitas rendah. Jika tujuan besarnya ialah menanamkan keberadaan cendekiawan-aktivis secara global di tiga ranah utama—dunia akademik, lembaga penelitian, dan gerakan sosial—maka tugas mendesak yang mesti dilakukan ialah merancang berbagai aktivitas dan agenda yang dapat membangun otonomi sekaligus memperkuat kapasitas para calon cendekiawan-aktivis maupun cendekiawan-aktivis yang sudah berkiprah.

PENGETAHUAN TRANSFORMATIF

Akses dan kesetaraan dalam sarana produksi pengetahuan, yang berfungsi membangun otonomi dan memperkuat kapasitas melalui beragam aktivitas dan agenda, merupakan persyaratan mendasar bagi fondasi aktivisme cendekia: penciptaan, pengakuan, dan penggunaan pengetahuan transformatif. Ketiga hal tersebut dapat—dan sering kali memang—melanggengkan struktur serta pranata eksploitasi dan penindasan. Di sinilah letak ciri khas cendekiawan-aktivis: setidaknya secara normatif, mereka tidak sekadar mencari jenis penciptaan, pengakuan, dan penggunaan pengetahuan secara acak, melainkan berupaya mengarahkan seluruh proses itu agar berhaluan transformatif: kerangka dan metode kerja yang berupaya agar infrastruktur pengetahuan tidak digunakan untuk melanggengkan eksploitasi dan penindasan secara lebih luas. Singkatnya, cendekiawan-aktivis bercita-cita (dan semestinya bercita-cita) menghadirkan pengetahuan yang bersifat emansipatoris, baik dalam produksi, atribusi (pengakuan), maupun penggunaannya.

Tatanan sosial dan hierarki dalam produksi pengetahuan saat ini mencerminkan sekaligus mereproduksi sistem sosial yang lebih luas, termasuk karakteristik eksploitasi dan penindasannya. Sifat dan pola produksi pengetahuan kerap digunakan untuk membangun serta mempertahankan perspektif hegemonik sekaligus membenarkan kapitalisme global. Beberapa sarana mendasar untuk menghasilkan pengetahuan—buku, jurnal akademik, sekolah, dan fasilitas penelitian—telah mengalami proses komodifikasi, dijadikan ajang mencari keuntungan.

Akibatnya, hanya segelintir negara, kelompok sosial, atau individu yang mampu menikmati akses penuh atas sarana produksi pengetahuan ini, sedangkan sebagian besar lainnya justru terpinggirkan. Berbagai aspek komodifikasi universitas, penelitian, dan pengetahuan merupakan elemen yang menopang reproduksi sistem yang tidak adil. Hal ini dapat terwujud dalam aktivitas penelitian yang kelihatannya sepele—bahkan tampak tidak berbahaya atau malah positif—padahal sebenarnya ikut melanggengkan ketakadilan. Ambil contoh soal hibah penelitian. Bahkan hibah yang diklasifikasikan sebagai hibah ilmiah kini makin diarahkan untuk mendukung agenda negara maupun perusahaan demi memperluas dan melanggengkan akumulasi modal. Panggilan untuk pengajuan proposal hibah penelitian biasanya sudah disiapkan dengan kerangka tertentu, misalnya untuk program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis pasar, atau hibah dari lembaga filantropi dengan tema seperti "bagaimana membuat revolusi hijau baru agar berhasil di Afrika." Tema terbuka dalam penelitian ilmiah dan penelitian berorientasi kebijakan makin jarang ditemukan. Masalah yang ditimbulkan oleh neoliberalisasi universitas kini bersifat global. Burawoy menjelaskan bahwa ketika pendanaan publik makin surut, sehingga universitas mesti mencari pembiayaan mandiri, maka universitas "mencari sumber pendapatan baru … dan strategi pemangkasan anggaran" (2014: xi). Dia berpendapat:

> Dalam persaingan memperebutkan dana yang terbatas, universitas memasuki arena permainan "pemeringkatan", yang melibatkan manipulasi rumit dan mahal, yang pada gilirannya membuat kegiatan ilmiah tunduk pada kalkulasi jangka pendek atau kriteria sewenang-wenang yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Perpaduan antara komodifikasi dan rasionalisasi ini telah menyebabkan polarisasi kondisi pendidikan tinggi di setiap tingkat: di dalam dan di antara disiplin ilmu, di dalam dan di antara universitas, di dalam dan di antara negara …. Akademisi diha-

> dapkan pada beberapa pilihan: hanya menjadi penonton pasif proses neoliberalisasi, turut aktif berpartisipasi dalam prosesnya, atau sebaliknya, mempertahankan karakter publik universitas dan membela otonominya dengan cara membangun aliansi tandingan bersama kelompok masyarakat yang juga mengalami tekanan serupa dari komersialisasi dan rasionalisasi. (Burawoy 2014: xi)

Dalam konteks diagnosis Burawoy tentang kondisi universitas saat ini, soal pengakuan pengetahuan barangkali menjadi salah satu wujud paling nyata dari ketakadilan kerja-kerja pengetahuan yang didorong oleh komodifikasi. Neoliberalisasi universitas dan penelitian secara umum juga memperkuat klaim individual atas hak kekayaan intelektual sebagai milik pribadi, yang menambah dilema baru bagi keilmuan radikal dan aktivisme cendekia. Seperti yang diingatkan secara presisi oleh Sudbury dan Okazawa-Rey, cendekiawan-aktivis pada dasarnya "hidup dalam kontradiksi" (2009: 12), dan terus-menerus dibayangi dilema etika maupun politik. Masalah ini memang akut dan meluas terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan dunia agraria, yang terlihat jelas dalam praktik komersialisasi partisipasi dan kolaborasi penelitian dengan individu ataupun organisasi yang berbasis di Selatan Global. Seorang kolaborator berbayar yang diberi label "asisten penelitian", "pengumpul data", atau "pencacah data" (enumerator), misalnya, tidak serta-merta punya klaim untuk diakui sebagai penulis bersama dalam publikasi hasil penelitian tersebut. Berikut ini sebuah contoh hipotetis yang konkret: seorang akademisi yang tidak tahu-menahu tentang dinamika gerakan agraria di suatu negara tertentu ingin menulis soal topik itu, tetapi dia tidak mampu melakukan kerja lapangan secara mendalam, antara lain karena tidak menguasai bahasa setempat. Jadi, bayangkan dua intelektual-aktivis lokal berpengalaman, yang sangat paham tentang gerakan agraria di negera tersebut, dipekerjakan sebagai "asisten penelitian" untuk melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus atas nama sang akademisi tersebut, dengan kesepakatan bayaran tertentu.

Nilai bayarannya tidak seberapa dibandingkan anggaran universitas kaya di Eropa atau Amerika Utara, tetapi beberapa kali lipat dari gaji yang biasanya diterima kedua intelektual-aktivis itu dari universitas negeri atau LSM/OMS setempat. Penelitian pun dijalankan, data diserahkan kepada akademisi, bayaran dilunasi, lalu terbitlah sebuah artikel jurnal dengan nama sang akademisi sebagai satu-satunya penulis. Dialah kini yang secara sah memegang "hak milik pribadi" atas data dan pengetahuan yang tertuang dalam dalam tulisan itu. Salah satu ciri khas dari sistem pengakuan yang timpang seperti ini adalah hadirnya konsep "hak milik pribadi" dalam pengetahuan: hak cipta. Varian lain dari praktik umum ini adalah begitu saja mengambil dan menggunakan ide-ide dari laporan umum yang diterbitkan organisasi radikal nonakademik dan gerakan sosial. Dalam kasus semacam ini, biasanya tidak ada pengakuan hak cipta, karena akademisi menganggap materi tersebut sebagai materi "abu-abu", sesuatu yang tidak sepenuhnya dianggap "terbit" seturut definisi akademisi. Ironisnya, jika kemudian organisasi-organisasi itu ingin menggunakan artikel jurnal berhak cipta yang sesungguhnya telah mengambil alih gagasan mereka, mereka diwajibkan merujuk artikel akademik tersebut secara layak, sebagai "sumber orisinal" gagasan itu.

Sekilas, tampaknya tidak ada yang salah, baik secara legal maupun etis, dalam contoh hipotetis pertama di atas: pembeli dan penjual jasa sama-sama merasa puas dengan transaksi yang terjalin. Lagi pula, praktik semacam itu memang lazim dilakukan di seluruh dunia. Namun, jika kita melihatnya dengan lensa politik dari perspektif cendekiawan-aktivis, penilaian kita bisa berbeda. Cendekiawan-aktivis atau calon cendekiawan-aktivis perlu merefleksikan praktik-praktik tersebut secara lebih kritis, terutama dalam konteks *politik*.

Hal yang sama berlaku untuk hak cipta. Secara umum, tidak ada yang keliru dengan gagasan tentang hak cipta itu sendiri. Namun, kalau klaim hak cipta berangkat dari sistem pengakuan (atribusi) yang cacat, maka ada risiko hak cipta justru melegitimasi klaim atribusi yang bermasalah tersebut. Situasinya mirip dengan sertifikat hak milik atas tanah:

pada dasarnya, kepemilikan tanah pribadi itu sendiri bukanlah masalah, asalkan tidak didasarkan pada sistem distribusi tanah yang timpang atau klaim kepemilikan tanah yang bermasalah. Jika berangkat dari dasar yang cacat, sertifikat hak milik tanah justru bisa berfungsi mengukuhkan ketimpangan berbasis tanah atau ketakadilan agraria. Dalam kasus ekstrem, para asisten peneliti dalam contoh di atas bisa sampai pada titik di mana mereka tak bisa lagi bebas merujuk pengetahuan mereka sendiri tentang gerakan agraria tanpa harus mengutip si akademisi Eropa yang mempekerjakan mereka untuk mengumpulkan data. Jika mereka menggunakan pengetahuan sendiri tanpa merujuk pada artikel jurnal si akademisi Eropa, secara hukum dan teknis mereka bisa dituding melakukan plagiat—sebuah pelanggaran berat dalam dunia akademik. Dengan kata lain, agar hak cipta—yang dianggap begitu sakral di dunia akademik—dapat berlaku secara adil, maka ia harus didasarkan pada sistem atribusi pengetahuan yang adil juga. Masalah pelik ini membuka zona abu-abu yang amat luas di ranah akademik. Beberapa baris dari lagu Woody Guthrie berjudul "This Land is Your Land" (Tanah Ini adalah Tanahmu)—yang ditulis hampir seabad lalu dalam konteks dan isu yang berbeda—dapat membantu memperjelas situasinya:

Was a high wall there that tried to stop me;
A sign was painted said: Private Property,
But on the backside it didn't say nothing.

(Ada tembok tinggi di sana yang hendak menghentikanku;
Sebuah papan bertuliskan: "Milik Pribadi",
Tapi di sisi sebaliknya, tidak ada tulisan apa-apa)

Kami tidak sedang menganjurkan bahwa satu-satunya solusi ialah menjadikan semua orang yang memberi kontribusi pada sebuah proyek produksi pengetahuan otomatis sebagai penulis bersama. Yang kami tekankan ialah perlunya upaya serius untuk meninggalkan praktik-praktik

yang sangat tidak demokratis dan tidak adil, sebagaimana tergambarkan melalui contoh hipotetis di atas, atau praktik-praktik lain yang sepola. Jalan keluar yang paling masuk akal barangkali terletak di antara dua kutub ekstrem: penyingkiran total atau pelibatan total. Jika menjadikan semua pihak sebagaai penulis bersama tidak praktis dan mustahil dilakukan, setidaknya sikap yang lebih murah hati dalam memberi pengakuan pada mereka yang berkontribusi penting dalam proses penelitian—sesuatu yang jauh lebih sederhana secara teknis—seharusnya bisa diwujudkan. Masalah atribusi yang digambarkan di sini menjadi makin akut dan pelik karena bangunan struktural dan kelembagaan, beserta kerangka ideologis yang menopangnya, sangat timpang dan tidak demokratis. Akibatnya, sebagian akademisi dan pihak yang mengeklaim pengetahuan, baik di dalam maupun di luar ranah akademik, memiliki kuasa jauh lebih besar untuk membuat sekaligus memaksakan klaimnya, dibandingkan pihak-pihak lain.

Dalam konteks ini, para intelektual organik dalam gerakan agraria, peneliti dalam kondisi rentan, aktivis di lembaga penelitian independen radikal berskala kecil, serta gerakan agraria yang sibuk berjuang di garis depan, semuanya bisa berada di sisi kalah yang terbenam di balik tembok-tingginya Woody Guthrie. Poin ini tidak serta-merta meremehkan arti penting klaim kepemilikan hak cipta atau perlunya aturan antiplagiarisme serta penegakannya. Yang ingin digarisbawahi di sini ialah: jika kita memang harus menjalankan dan menegakkan gagasan tentang klaim hak cipta individual dan aturan antiplagiarisme, maka hal itu mesti didahului atau setidaknya dibarengi dengan demokratisasi menyeluruh di seluruh ranah produksi, atribusi, peredaran, dan penggunaan pengetahuan. Tidak bisa dibiarkan karya intelektual yang diambil atau diklaim secara tidak demokratis lalu mendapatkan perlindungan penuh dari perangkat hukum hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta hanya bisa adil—baik secara prinsip maupun praktis—jika didasarkan pada sistem atribusi pengetahuan yang demokratis.

Tentu saja, ini bukan berarti kepenulisan harus selalu bersifat kolaboratif; ada banyak kesempatan ketika kepenulisan individu justru sepenuhnya tepat dan sah. Misalnya, bagi para cendekiawan-aktivis yang memilih mengambil jeda demi terlibat dengan apa yang disebut sebagai "daya abstraksi" (Mitchell 2004).

Kalau kita melihat "neraca" yang ada, mereka yang berbasis di lingkaran elite akademik cenderung berada di sisi yang diuntungkan—bukan semata karena mereka ingin mengambil keuntungan dari "pihak lain" melalui tembok tinggi ala Woody, melainkan karena memang begitulah pengaturan struktural dan kelembagaan tempat mereka bernaung. Ada sebagian yang masih bisa menggunakan ruang gerak dan kapasitasnya untuk berupaya mengatasi berbagai keterbatasan dalam sistem, bahkan berusaha mendorong restrukturisasi radikal di universitas mereka sebagaimana dibayangkan Castree (2000)—meski bagi banyak orang, langkah sebesar itu mungkin terasa terlalu berat. Misalnya, tradisi lama dan dijunjung tinggi di dunia akademik terkait kepenulisan bersama pada dasarnya bersifat transaksional: seseorang baru bisa disebut sebagai penulis bersama kalau benar-benar ikut berkontribusi menulis terbitan terkait. Sering kali "kontribusi" di sini dipahami sebagai sesuatu yang "konkret", yang dalam praktiknya hampir selalu berarti keterlibatan langsung dalam penulisan naskah. Di sinilah basis struktural dan kelembagaan dari praktik penyingkiran (eksklusi) muncul dengan jelas, sebab untuk bisa dianggap berkontribusi cukup signifikan hingga layak diterakan sebagai penulis bersama sering kali mensyaratkan kepiawaian menulis dalam bahasa Inggris akademik. Terlalu sering hal ini berujung pada pengucilan terhadap para penutur-nonpribumi bahasa Inggris, terutama mereka yang berasal dari Selatan Global. Ketika kontribusi pengetahuan direduksi menjadi sesuatu yang teknis—seperti kemampuan menulis dalam bahasa Inggris "akademik", atau keahlian dalam teknik kuantitatif tertentu yang menjadi kunci dalam sebuah terbitan—maka praktik itu sesungguhnya menjadi salah satu mekanisme

de facto paling signifikan dalam praktik eksklusi. Lebih jauh lagi, hal ini juga membuka ruang bagi terjadinya pengambilalihan dan pemelintiran dalam proses produksi serta atribusi pengetahuan.

Sementara itu, mereka yang berkecimpung dalam gerakan sosial, lembaga penelitian independen kecil, atau universitas dengan dana terbatas di Selatan Global tetap berada di sisi dirugikan dari "neraca" tersebut. Menurut kami, jalan terbaik bagi cendekiawan-aktivis ialah pendekatan yang berorientasi pada proses: terlibat dalam upaya "membangun jembatan" dengan kesadaran penuh akan kesulitan praktis dalam mewujudkan sebuah medan atribusi pengetahuan yang benar-benar demokratis. Membangun jembatan dapat diwujudkan melalui praktik sehari-hari, misalnya dengan memastikan keterwakilan yang memadai dan tepat dari peneliti Selatan Global dalam proyek penerbitan seperti jurnal edisi khusus (*special issue*), buku suntingan bunga rampai (*edited book*), dsb., khususnya yang berkaitan langsung dengan dunia Selatan Global. Intinya, keterlibatan cendekiawan-aktivis dalam membangun jembatan yang berorientasi pada proses dapat membuat kondisi saat ini lebih demokratis.

Pada akhirnya, ranah *penggunaan pengetahuan* barangkali merupakan salah satu dimensi yang paling timpang dalam jagat pengetahuan global. Memang, era digital sedikit banyak telah mengikis monopoli kalangan elite atas informasi dan pengetahuan, tetapi masih banyak jenis pengetahuan dan informasi yang tetap tak bisa diakses oleh mayoritas orang. Bayangkan, biaya langganan tahunan untuk sebuah jurnal internasional ternama bisa sampai sekitar Rp16.000.000. Jelas tak mungkin banyak universitas miskin, lembaga penelitian independen, maupun gerakan sosial (bahkan yang ada di Utara) mampu membayar biaya tersebut. Hal ini menyebabkan, antara lain, situasi sangat ironis: pengetahuan yang sebenarnya dihasilkan oleh intelektual organik yang berjibaku di garis depan perjuangan agraria diambil alih oleh pihak luar, entah itu sekutu atau bukan, cendekiawan-aktivis atau bukan. Lebih pahit lagi, intelektual organik itu sendiri kerap tak bisa mengakses hasil

pengetahuan tersebut dalam format terbitan karena tak mampu membeli buku mahal atau berlangganan jurnal berbayar, atau bahkan—dan ini menambah lapisan ketakadilan—karena mereka tidak bisa membaca tulisan dalam bahasa Inggris.

Masa depan lebih positif dalam upaya dekolonisasi dan demokratisasi produksi pengetahuan serta pemajuan aktivisme cendekia mensyaratkan akses terbuka bagi para pengguna pengetahuan. Upaya untuk mewujudkannya merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan di dalam dan melawan kapitalisme. Produksi, atribusi, dan penggunaan pengetahuan merupakan tiga ranah yang saling terkait dalam infrastruktur pengetahuan. Karena itu, tugas mendesak lainnya bagi cendekiawan-aktivis ialah memperjuangkan dekolonisasi dan demokratisasi akses atas pengetahuan, demi mendorong demokratisasi—atau pemassalan—penggunaan pengetahuan.

LANGKAH AFIRMATIF

Berbeda dengan akademisi murni yang bekerja dalam lanskap neoliberal berbasis persaingan individu—di mana kemajuan ditentukan oleh kemampuan untuk tampil "lebih baik" daripada yang lain—kekuatan seorang cendekiawan-aktivis tidak sepenuhnya bertumpu pada pencapaian atau prestasi individu, melainkan pada kekuatan komunitas dan kolektivitas. Untuk mencapai dan menjaga kekuatan semacam ini, diperlukan pembangunan komunitas yang berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar lembaga akademik. Termasuk di dalamnya tindakan afirmatif. Ada tiga kategori sosial yang seharusnya menjadi sasaran sekaligus penggerak tindakan afirmatif: (i) mereka yang berada di dalam lembaga akademik dan berasal dari atau berposisi di Selatan Global atau (ii) mereka yang terpinggirkan di sepanjang poros perbedaan sosial; dan (iii) cendekiawan-aktivis di luar lembaga akademik.

Bagi para peneliti yang berasal dari atau berbasis di Selatan Global, ada kondisi sosial dan materiel yang membuat mereka sulit terlibat dalam produksi, pertukaran, dan penggunaan pengetahuan dengan sya-

rat dan peluang yang sama seperti yang dipunyai rekan-rekan mereka di Utara Global. Sebagian besar hambatan ini telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan ketika (sebagian) sarana produksi pengetahuan dapat diakses dengan mudah, para peneliti ini biasanya hanya bekerja di dalam negeri karena minimnya sumberdaya dan jaringan yang diperlukan untuk melakukan penelitian lintas negara. Menerbitkan hasil penelitian, bahkan ketika seseorang memiliki data penelitian yang penting dan perangkat teoretis yang mumpuni, bisa menjadi tantangan besar. Hambatannya antara lain kurangnya akses ke kelompok sejawat dan jaringan penting yang mudah dijangkau rekan-rekan mereka di Utara Global, misalnya melalui keikutsertaan dalam konferensi akademik internasional, koneksi dengan akademisi kunci yang menjadi editor atau terkait dengan jurnal, maupun ketersediaan dana untuk membayar layanan bahasa agar tulisan memenuhi standar bahasa Inggris akademik yang layak untuk publikasi. Namun, sekalipun semua rintangan tersebut dapat diatasi dan penelitian mereka terbit di jurnal bereputasi, hasilnya kerap terkurung di balik "pintu berbayar" (*paywall*) sehingga tidak beredar luas. Sementara itu, rekan-rekan mereka dari Utara mampu membayar biaya mahal "*Gold Open Access*" (akses terbuka penuh) yang menjamin karya mereka bisa diakses gratis secara permanen. Karena itu, peneliti yang berasal dari atau berbasis di Selatan Global membutuhkan dukungan nyata untuk melewati semua rintangan ini dan mengatasi keterbatasan yang kerap terasa sangat sulit.

Ada juga kelompok sosial yang mungkin dirugikan dalam dunia akademik global. Kerugian ini diakibatkan oleh kelas sosial dan berbagai poros perbedaan yang saling membentuk: ras, suku, kasta, gender, generasi, agama, kebangsaan. Bahkan di beberapa universitas kaya di Utara sekalipun, peneliti dari kelompok-kelompok sosial ini menghadapi tantangan dalam hal produksi, atribusi, dan penggunaan pengetahuan, dibandingkan rekan-rekan mereka dari kelompok sosial lain. Maka dari itu, jika Anda masih muda, perempuan, non-Kristen, migran BIPOC, atau peneliti non-penutur asli bahasa Inggris di Eropa atau Amerika Utara,

kemungkinan besar Anda akan menghadapi tantangan yang biasanya tidak dialami oleh rekan-rekan Anda yang berkulit putih, laki-laki, kelas menengah atau atas, serta nonmigran. Dengan demikian, hubungan eksploitatif dalam ruang produksi pengetahuan dapat ditemukan di dalam lembaga itu sendiri, termasuk universitas. Jamak terjadi seorang ilmuwan menjadi "pelaku eksploitasi" dalam satu konteks, sementara pada saat yang sama "dieksploitasi" dalam konteks lain.

Cendekiawan-aktivis di luar lembaga akademik—yaitu mereka yang berbasis di gerakan sosial atau lembaga penelitian independen radikal berskala kecil—sering kali termasuk dalam satu atau bahkan kedua kategori yang disebutkan di atas. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi tantangan khas yang sudah kami tunjukkan, yang muncul ketika melakukan penelitian di luar lingkungan akademik. Akibatnya, para peneliti ini biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal persyaratan keterlibatan di ranah produksi, atribusi, dan penggunaan pengetahuan.

Karena itu, cendekiawan-aktivis merasa terpanggil untuk mengambil langkah afirmatif dalam upaya dekolonisasi dan demokratisasi struktur serta kelembagaan yang membentuk ruang produksi, atribusi, pertukaran, dan penggunaan pengetahuan global. Langkah ini dapat dilakukan dengan membantu mengurangi hambatan sekaligus menyingkirkan belenggu yang selama ini membatasi cendekiawan-aktivis yang berasal dari kelompok terpinggirkan. Cara terpenting untuk mencapainya ialah dengan mendukung kelompok-kelompok yang dirugikan ini untuk membentuk dan mengorganisir gerakan sosial, yang kemudian bisa secara subversif menantang *status quo* sekaligus membangun lingkup global yang lebih demokratis dalam hal penciptaan, sirkulasi, dan penggunaan pengetahuan.

SOLIDARITAS & INTERNASIONALISME

Pada akhirnya, cendekiawan-aktivis harus menjalankan tugas mendasar mereka: menafsirkan dunia dengan berbagai cara untuk mengubahnya,

menuju keadilan sosial yang lebih luas. Bagi cendekiawan-aktivis yang berbasis di lingkungan akademik, ruang akademik itu sendiri merupakan tempat berlindung sekaligus medan pertempuran—sebuah tempat yang memberi rasa aman tapi juga penuh pergulatan. Menanggapi seruan para geograf radikal yang mendorong keterhubungan dengan para aktivis di luar dunia akademik, Castree justru mengajukan pandangan sebaliknya:

> Di sini saya ingin mengemukakan argumen bahwa perlu ada proyek aktivisme di dalam sistem pendidikan tinggi itu sendiri, tempat pangkalan dari mana para geograf kiri merasa berkewajiban menjangkau dunia luar. Jika pandangan ini terasa aneh, itu semata karena kita sudah terlalu terbiasa menganggap bahwa aktivisme seharusnya berfokus "di luar sana", di "dunia nyata". (2000: 960)

Kami sepakat dengan Castree bahwa dunia akademik itu sendiri mesti diperlakukan sebagai arena perjuangan aktivisme cendekia (lihat juga Burawoy 2014; Deere 2018). Dan, seperti yang dia tekankan dalam esainya, tugas ini hanya mungkin dilakukan secara kolektif—sebagaimana setiap perjuangan politik pada umumnya. Individualisme dan egosentrisme, yang menjadi ciri khas akademisi konvensional, bertolak belakang dengan semangat aktivisme cendekia yang berhaluan pada komunitas dan kolektif. Tugas tersebut mengharuskan cendekiawan-aktivis untuk terus-menerus mengorganisir diri sekaligus memperluas barisan: cendekiawan-aktivis perlu punya naluri pengorganisir komunitas. Tingkat aksi yang dirumuskan Alinsky—yakni lokal, mikro, dan lingkungan—mungkin terasa kurang relevan di masa kini, ketika perjuangan yang lebih berani, lebih besar, dan berskala multilevel lebih dibutuhkan. Namun, gagasan Alinksy tentang pengorganisir komunitas yang selalu tidak tunduk pada otoritas, dan selalu subversif, tetap sama relevannya, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya, baik di dalam maupun di luar akademia.

Kelompok sosial yang secara tradisional terpinggirkan dan miskin sumberdaya kerja penelitian akademik maupun penelitian cendekiawan-aktivis sesungguhnya tidak sepenuhnya tanpa daya dan tanpa bekal. Mereka masih memiliki satu sama lain, dan ketika bersatu, mereka dapat menghimpun kumpulan sumberdaya global. Bentuknya bisa beragam bentuk, besar maupun kecil, mulai dari meruntuhkan tembok berbayar penerbitan jurnal ilmiah dengan memanfaatkan celah abu-abu hukum dalam platform berbagi publikasi daring, hingga aksi-aksi kolektif yang lebih luas dan terorganisir untuk menghasilkan dampak maksimal. Aksi-aksi itu bisa dilakukan secara individual dan tersebar terpencar-pencar, tapi juga dapat dirancang berskala besar melaui pengorganisasian bersama. Dalam kelompok terpinggirkan ini, masing-masing anggotanya mungkin punya sesuatu yang bisa ditawarkan dan dipertukarkan dengan orang lain, semacam bentuk solidaritas berbasis timbal balik. Sebagai contoh, penyuntingan naskah berbahasa Inggris dapat dilakukan bukan dengan tarif pasar terbuka yang ditentukan oleh Utara Global, melainkan dengan "tarif solidaritas" yang lebih terjangkau, atau bahkan melalui skema pertukaran jasa. Sejarah menunjukkan bahwa gerakan keadilan sosial transnasional masa kini tidak akan lahir tanpa adanya barisan aktivis penerjemah dan juru bahasa yang terorganisir. Begitu pula, sulit membayangkan perjuangan untuk mendemokratisasi medan global produksi, sirkulasi, dan penggunaan pengetahuan dapat berlangsung tanpa keterlibatan korps aktivis penerjemah dan editor yang terorganisir. Bagaimana hal ini dapat diorganisasikan dalam skala besar masih perlu dipikirkan bersama.

Jaringan global memegang peranan kunci dalam proses produksi, sirkulasi, dan penggunaan pengetahuan. Sederhananya, ini soal bagaimana seseorang terlibat dalam jaringan kekuasaan: dalam konteks sekarang, hal itu berarti posisi seorang akademisi di dalam jaringan kekuasaan politik di dunia akademik, sekaligus dalam jaringan kekuasaan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia di luarnya (Derickson dan Routledge 2015: 5). Posisi dalam jaringan kekuasaan ini bisa muncul

dalam berbagai bentuk dan cara. Khususnya di dunia akademik, jaringan ini biasanya diatur berdasarkan disiplin ilmu, bidang kajian, dan tema, atau berdasarkan negara dan kawasan dunia. Jejaring ini sangat penting untuk memahami denyut nadi sebuah bidang, mengetahui perkembangan terkini, mengikuti perdebatan mutakhir, mengenali para peneliti kunci, menerima umpan balik dari rekan sejawat tentang gagasan maupun draf tulisan, hingga menjalin aliansi untuk memperkuat tim penelitian, baik agar mampu memenangkan perebutan dana hibah ataupun menyusun publikasi secara kolaboratif yang berdampak besar. Melalui jaringan seperti inilah seseorang bisa mengenal editor seri buku dari penerbit universitas papan atas, atau editor jurnal bergengsi. Banyak jaringan dan asosiasi akademisi konvensional yang mensyaratkan biaya keanggotaan serta rutin menyelenggarakan konferensi internasional. Banyak (tapi tidak semua) beroperasi mirip klub berbasis keanggotaan elite.

Banyak peneliti dari kelompok sosial yang secara tradisional terpinggirkan, termasuk cendekiawan-aktivis, kesulitan masuk ke dalam jaringan dan lingkaran elite tersebut, karena berbagai alasan. Biasanya karena mahalnya ongkos perjalanan internasional secara rutin, kesulitan mendapatkan visa, biaya keanggotaan, keterbatasan untuk terlibat berdasarkan standar mutakhir bidangnya, serta persyaratan bahasa Inggris yang berlaku, dsb. Alih-alih pasrah menerima pengucilan dari lapisan elite seperti itu, cendekiawan-aktivis dari kelompok terpinggirkan bisa membangun jaringan mereka sendiri: bisa bersifat paralel (sejajar dengan jaringan elite yang ada), komplementer (melengkapi jaringan elite yang sudah ada), dan/atau bahkan alternatif (jaringan yang sama sekali berbeda dan bahkan menantang cara kerja jaringan elite). Hal ini tentu tidak akan langsung menghilangkan hambatan dan keterbatasan struktural serta kelembagaan yang mereka hadapi, tetapi bisa menandai dimulainya upaya yang lebih terorganisir untuk mengatasinya. Akan menarik untuk melihat dua jaringan paralel yang bisa menjadi saling bersaing atau saling melengkapi: satu yang mirip dengan klub dengan

keanggotaan khusus elite yang nyaman dengan *status quo* di akademi; dan satunya lebih menyerupai versi multilokasi dari asosiasi komunitas Alinsky yang tak kenal kompromi, yang bertujuan menggoyang *status quo* di dunia akademik global.

Tugas untuk membongkar basis struktural dan kelembagaan dunia pengetahuan yang tidak demokratis—dalam hal produksi, atribusi, maupun penggunaannya—merupakan pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Upaya ini tidak dapat dipisahkan dari perjuangan lebih luas di dalam dan melawan kapitalisme. Jaringan di antara para cendekiawan-aktivis memang diperlukan, tetapi yang tidak kalah mendesak ialah bagaimana upaya tersebut bisa ditransformasikan menjadi gerakan emansipatoris yang padu, yang berlandaskan pada solidaritas dan internasionalisme. Hal ini berarti tidak hanya menekankan perlunya mengatasi masalah praktis sehari-hari yang dihadapi cendekiawan-aktivis atau organisasi gerakan agraria di tempat dan waktu tertentu, tetapi juga menghubungkan perjuangan untuk mewujudkan ruang pengetahuan yang demokratis dalam hal produksi, pertukaran, dan penggunaannya, dengan perjuangan yang lebih luas di dalam dan melawan kapitalisme. Gerakan cendekiawan-aktivis berbasis solidaritas merupakan tandingan terhadap norma individualistis, oportunistis, dan narsisistik yang lazim di dunia akademik. Gerakan ini mengutamakan prinsip umum ekonomi moral—maju bersama atau terpuruk bersama—dan memastikan tak seorang pun ditinggalkan. Internasionalisme menjadi kunci untuk melawan utang ekonomi yang terus direproduksi oleh negara-negara utara-barat. Terinspirasi secara umum oleh konsep-konsep seperti "utang ekologis" dan "utang iklim", kami menggunakan istilah "utang akademik" untuk merujuk pada utang yang ditanggung oleh negara-negara bekas penjajah dan imperialis, yang penjarahannya terhadap banyak negeri di Selatan Global telah mengakibatkan penghancuran jangka panjang otonomi dan kapasitas negeri-negeri tersebut untuk membangun lembaga akademik mereka sendiri yang kokoh dan mandiri, tanpa harus tunduk, baik secara materiel maupun ideologis, pada pusat-pusat imperium

global. Internasionalisme berarti membangun koalisi di antara para cendekiawan-aktivis di seluruh dunia untuk mengatasi utang akademik ini dan membangun sebuah aktivisme cendekia global yang benar-benar emansipatoris.

*****

Bagi kami, perjuangan atas tanah yang tidak terhubung dengan perjuangan lebih luas melawan kapitalisme mungkin tampak dramatis, tetapi tidak akan mengubah dunia secara signifikan. Sebaliknya, perjuangan di dalam dan melawan kapitalisme tanpa pemahaman yang tepat tentang perjuangan agraria dan tanpa terhubung dengannya hanya akan menuai kegagalan. Perjuangan yang lebih menjanjikan ialah yang mampu melampaui gagasan "hanya agraria": yakni, perjuangan yang menghubungkan berbagai perjuangan kelas dan sektoral di dunia pedesaan dan agraria untuk membentuk perjuangan antisistemik, yang pada gilirannya terhubung dengan perjuangan antikapitalis secara menyeluruh (Wright 2019; Fraser 2021). Tugas membangun gerakan antikapitalis global semacam ini, di mana perjuangan atas tanah menjadi salah satu bagian intinya, membutuhkan kontribusi intelektual publik, dalam pengertian Gramsci (1971). Dan untuk tugas ini, semua jenis politik pengetahuan akan diperlukan: progresif, radikal, aktivis, aktivisme cendekia.

Pada akhirnya, cendekiawan-aktivis—bahkan mereka yang berasal dari kelompok sosial yang terpinggirkan—secara definisi tetap termasuk dalam subkategori yang relatif lebih beruntung dalam hierarki sosial lebih luas dibandingkan mereka yang mengalami eksploitasi dan penindasan. Ada godaan untuk bekerja sebagai cendekiawan-aktivis *bagi* mereka yang dieksploitasi dan tertindas, dan hal ini memang memiliki basis materiel yang kuat untuk dilakukan. Kerja ini mencerminkan etos pengetahuan revolusioner dan emansipatoris sekaligus bentuk advokasi politik radikal. Jenis keilmuan radikal semacam ini mungkin merupakan yang paling penting dari semua jenis produksi pengetahuan progresif dan revolusioner, dan potensinya bisa jauh lebih luas. Namun,

bagi kami, bukan inilah yang menentukan secara mutlak apa yang disebut cendekiawan-aktivis. Menulis untuk dan bersama mereka yang dieksploitasi dan tertindas hanyalah salah satu subkategori kecil dari keilmuan radikal ini, tetapi subkategori ini sangatlah penting. Ini menyiratkan bahwa cendekiawan-aktivis ialah mereka yang secara konsisten berkomitmen pada gerakan politik yang tidak teratur, sebagaimana telah dibahas sebelumnya berdasarkan karya Frances Fox Piven. Meski selalu ada ketegangan antara cendekiawan-aktivis—dalam pengertian sempit yang digunakan di buku ini—dengan produsen, perantara, dan pengguna pengetahuan lainnya, baik yang radikal ataupun yang tidak, mereka tidak selalu atau secara otomatis bermusuhan. Dalam banyak kesempatan dan terkait banyak isu, mereka bisa menjadi sekutu untuk kebaikan bersama.

Sebagai simpulan: di seluruh dunia, perjuangan atas tanah kemungkinan besar bakal semakin intensif dan meluas dalam waktu dekat, seiring makin menguatnya konsensus arus utama atas apa yang disebut sebagai solusi berbasis alam untuk perubahan iklim—seperti upaya mencapai emisi nol bersih melalui proyek kompensasi karbon (*carbon offset*)—yang diperkirakan akan memicu lebih banyak perampasan tanah. Hal ini membuat peran cendekiawan-aktivis agraria makin mendesak dan penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa cendekiawan-aktivis mengemban tugas ganda: unggul dalam kerja akademik sekaligus dalam kerja politik. Tugas ganda ini membutuhkan komitmen yang besar, baik waktu maupun tenaga. Dalam konteks ini, cendekiawan-aktivis agraria, di mana pun berada, terkadang merasa seperti kaum tani ala Chayanov: produksi mereka tidak sepenuhnya berorientasi atau layak secara komersial, sebagian besar tenaga kerja mereka tidak dibayar, sumbangsih mereka pada masyarakat luas sebagian besar tidak diakui, dan kerja mereka jarang menghasilkan keuntungan besar dan lebih cenderung bersaldo nol. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mengeksploitasi diri sendiri (swaekploitasi), menggabungkan jam kerja yang panjang dengan pengorbanan diri yang terkadang bahkan mencakup kebutuhan pokok

dalam hidup. Namun demikian, mereka merasakan kepuasan mendalam yang tidak dapat diukur secara materiel maupun moneter semata. Izinkan kami menutup buku ini dengan meminjam kata-kata Piven, yang secara utuh dan kuat menangkap perasaan yang kami yakini akan disetujui oleh sebagian besar cendekiawan-aktivis agraria:

> Cendekiawan-aktivis sebaiknya berhenti menganggap diri mereka sebagai martir. Kita menjadi aktivis karena kelegaan yang diberikan oleh kerja politik, karena bekerja memperjuangkan masyarakat kita agar lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, bahkan kalaupun kita gagal, memberi kepuasan yang tiada tara, karena kawan seperjuangan yang kita jumpai dalam upaya ini adalah kawan yang tiada duanya, dan juga karena upaya aktivisme kita memungkinkan kita memahami dunia sosial dan politik dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh keilmuan akademik semata. (Piven 2010: 810)

CATATAN

1 International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development merupakan proyek yang didanai oleh berbagai badan PBB, yang mengikutsertakan sekitar 400 ahli dari berbagai negara (termasuk Indonesia). Setelah proses konsultasi yang penuh perselisihan pendapat, laporan ringkasan hasilnya, *Agriculture at a Crossroads* (IAASTD 2009), berkesimpulan bahwa pertanian sedunia harus meninggalkan praktik dominan pertanian skala-besar monokultur yang bergantung pada energi murah, merusak ekosistim, dan boros air, dan harus beralih ke pertanian campuran skala-kecil yang lebih irit air, mendukung biodiversitas, dan memberi penghidupan lebih baik bagi penduduk miskin dipedesaan. Beberapa sponsor IAASTD, di antaranya Bank Dunia dan FAO, menjauhkan diri dari kesimpulan tersebut.

PUSTAKA

ADNAN, S. 2013. "Land Grabs and Primitive Accumulation in deltaic Bangladesh: Interactions between neoliberal globalization, state interventions, power relations and peasant resistance." *Journal of Peasant Studies* 40(1): 87–128.

AGARWAL, B. 1994. *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

_____. 2014. "Food sovereignty, food security and democratic choice: Critical contradictions, difficult conciliations." *Journal of Peasant Studies* 41(6): 1247–1268.

AJL, M. 2021. *A People's Green New Deal*. London (Inggris): Pluto Press.

AKRAM-LODHI, A.H. 2021. "The ties that bind? Agroecology and the agrarian question in the twenty-first century." *Journal of Peasant Studies* 48(4): 687–714.

AKRAM-LODHI, A.H. dan C. KAY. 2010a. "Surveying the agrarian question (part 1): Unearthing foundations, exploring diversity." *Journal of Peasant Studies* 37(1): 177–202.

_____. 2010b. "Surveying the agrarian question (part 2): Current debates and beyond." *Journal of Peasant Studies* 37(2): 255–284.

AKRAM-LODHI, A.H., S.M. BORRAS JR., dan C. KAY. 2007. *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*. London (Inggris): Routledge.

ALINSKY, S. 1969 [1946]. *Reveille for Radicals*. New York (Amerika Serikat): Vintage.

_____. 1971. *Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals*. New York (Amerika Serikat): Vintage.

ALONSO-FRADEJAS, A. 2021. "'Leaving no one unscathed' in sustainability transitions: The life purging agro-extractivism of corporate renewables." *Journal of Rural Studies* 81: 127–138.

ALTIERI, M.A. dan V.M. TOLEDO. 2011. "The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants." *Journal of Peasant Studies* 38(3): 587–612.

ANDRADE, D. 2020. "Populism from above and below: The path to regression in Brazil." *Journal of Peasant Studies* 47(7): 1470–1496.

ANDREAS, J., S.S. KALE, M. LEVIEN, dan Q.F. ZHANG. 2020. "Rural land dispossession in China and India." *Journal of Peasant Studies* 47(6): 1109–1142.

ARBOLEDA, M. 2020. "Towards an agrarian question of circulation: Walmart's expansion in Chile and the agrarian political economy of supply chain capitalism." *Journal of Agrarian Change* 20(3): 345–363.

ARSEL, M. dan B. BÜSCHER. 2012. "NatureTM Inc.: Changes and continuities in neoliberal conservation and market-based environmental policy." *Development and Change* 43(1): 53–78.

ARSEL, M., B. HOGENBOOM, dan L. PELLEGRINI. 2016. "The extractive imperative in Latin America." *The Extractive Industries and Society* 3(4): 880–887.

ASHWOOD, L., J. CANFIELD, M. FAIRBAIRN, dan K. DE MASTER. 2020. "What owns the land: The corporate organization of farmland investment." *Journal of Peasant Studies* 49(2): 233–262.

BACHRIADI, D. 2010. "Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements in Indonesia Post-1965." Disertasi di University of Flinders, Australia.

BAKSH-SOODEEN, R. dan W. HARCOURT, ed. 2015. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*. New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.

BARBESGAARD, M. 2018. "Blue growth: Savior or ocean grabbing?" *Journal of Peasant Studies* 45(1): 130–149.

BAUD, M. dan R. RUTTEN. 2004. *Popular Intellectuals and Social Movements: Framing Protest in Asia, Africa, and Latin America*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

BAVISKAR, A. dan M. LEVIEN. 2021. "Farmers' protests in India: Introduction to the JPS Forum." *Journal of Peasant Studies* 48(7): 1341–1355.

BELLO, W. 2003. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. London (Inggris): Zed Books.

BENJAMINSEN, T.A. dan I. BRYCESON. 2012. "Conservation, green/blue grabbing and accumulation by dispossession in Tanzania." *Journal of Peasant Studies* 39(2): 335–355.

BERNSTEIN, H. 2006. "Is there an agrarian question in the twenty-first century?" *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 27(4): 449–460.

_____. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

_____. 2014. "Food sovereignty via the "peasant way": A sceptical view." *Journal of Peasant Studies* 41(6): 1031–1063.

_____. 2018. "The 'peasant problem' in the Russian revolution(s), 1905–1929." *Journal of Peasant Studies* 45(5–6): 1127–1150.

BERNSTEIN, H. dan T. BYRES. 2001. "From peasant studies to agrarian change." *Journal of Agrarian Change* 1(1): 1–56.

BHATTACHARYA, T. 2017. *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*. London (Inggris): Pluto.

BIEKART, K. dan M. JELSMA, ed. 1994. *Peasants Beyond Protest in Central America*. Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.

BORRAS, S.M. 2020. "Agrarian social movements: The absurdly difficult but not impossible agenda of defeating right-wing populism and exploring a socialist future." *Journal of Agrarian Change*, 20(1): 3–36.

_____. 2023. "Politically engaged, pluralist and internationalist: Critical agrarian studies today." *Journal of Peasant Studies*, https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2163164.

BORRAS, S.M. dan J.C. FRANCO. 2009. "Transnational agrarian movements struggling for land and citizenship rights." IDS Working Papers 323: 01–44. Brighton (Inggris): Institute of Development Studies.

_____. 2013. "Global land grabbing and political reactions 'from below'." *Third World Quarterly* 34(9): 1723–1747.

_____. 2018. "The challenge of locating land-based climate change mitigation and adaptation politics within a social justice perspective: Towards an idea of agrarian climate justice." *Third World Quarterly* 39(7): 1308–1325.

BORRAS, S.M., J.C. FRANCO, S. GÓMEZ, C. KAY, dan M. SPOOR. 2012. "Land grabbing in Latin America and the Caribbean." *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 845–872.

BORRAS, S.M., J.C. FRANCO, R. ISAKSON, L. LEVIDOW, dan P. VERVEST. 2016. "The rise of flex crops and commodities: Implications for research." *Journal of Peasant Studies* 43(1): 93–115.

BORRAS, S.M., J.C. FRANCO, dan Z. NAM. 2020. "Climate change and land: Insights from Myanmar." *World Development* 129: 104864.

BORRAS, S.M., J.C. FRANCO, D. RA, T. KRAMER, M. KAMOON, P. PHYU, … dan J. YE. 2021. "Rurally rooted cross-border migrant workers from Myanmar, Covid-19, and agrarian movements." *Agriculture and Human Values* 39: 315–338.

BORRAS, S.M., I. SCOONES, A. BAVISKAR, M. EDELMAN, N.L. PELUSO, dan W. WOLFORD. 2022a. "Climate change and agrarian struggles: An invitation to contribute to a JPS Forum." *Journal of Peasant Studies* 49(1): 1–28.

BORRAS, S.M., J.C. FRANCO, T. MOREDA, Y. XU, N. BRUNA, dan B.A. DEMENA. 2022b. "The value of so-called 'failed' large-scale land acquisitions." *Land Use Policy* 119: 106199.

BREM-WILSON, J. 2014. "From 'here' to 'there': Social movements, the academy and solidarity research." *Socialist Studies/Études Socialistes* 10(1): 111–132.

BRENNER, N. dan C. SCHMID. 2014. "The 'urban age' in question." *International Journal of Urban and Regional Research* 38(3): 731–755.

BRENT, Z.W. 2015. "Territorial restructuring and resistance in Argentina." *Journal of Peasant Studies* 42(3–4): 671–694.

BROCKINGTON, D. 2002. *Fortress Conservation: The Preservation of the Mkomazi Game Reserve, Tanzania*. Bloomington dan Indianapolis (Amerika Serikat): Indiana University Press.

BROCKINGTON, D. dan R. DUFFY, ed. 2011. *Capitalism and Conservation*. London (Inggris): John Wiley & Sons.

BURAWOY, M. 2014. "Foreword," dalam *The Public Sociology Debate: Ethics and Engagement*, disunting oleh A. HANEMAAYER dan C. SCHNEIDER, ix–xviii. Vancouver (Kanada): University of British Columbia Press.

BURCHARDT, H.J. dan K. DIETZ. 2014. "(Neo-)extractivism: A new challenge for development theory from Latin America." *Third World Quarterly* 35(3): 468–486.

BURNETT, K. dan S. MURPHY. 2014. "What place for international trade in food sovereignty?" *Journal of Peasant Studies* 41(6): 1065–1084.

BÜSCHER, B., S. SULLIVAN, K. NEVES, J. IGOE, dan D. BROCKINGTON. 2012. "Towards a synthesized critique of neoliberal biodiversity conservation." *Capitalism Nature Socialism* 23(2): 4–30.

BYRES, T.J. 1979. "Of neo-populist pipe-dreams: Daedalus in the Third World and the myth of urban bias." *Journal of Peasant Studies* 6(2): 210–244.

_____. 1981. "The new technology, class formation and class action in the Indian countryside." *Journal of Peasant Studies* 8(4): 405–454.

_____. 2004. "Neo-classical neo-populism 25 years on: Déjà vu and déjà passé. Towards a critique." *Journal of Agrarian Change* 4(1–2): 17–44.

CALMON, D., C. JACOVETTI, dan M. KONÉ. 2021. "Agrarian climate justice as a progressive alternative to climate security: Mali at the

intersection of natural resource conflicts." *Third World Quarterly* 42(12): 2785–2803.

CAOUETTE, D. dan S. TURNER, ed. 2009. *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia*. London (Inggris): Routledge.

CAROLAN, M. 2020. "Automated agrifood futures: Robotics, labor and the distributive politics of digital agriculture." *Journal of Peasant Studies* 47(1): 184–207.

CARTER, M., ed. 2015. *Challenging Social Inequality: The Land- less Rural Workers' Movement and Agrarian Reform in Brazil*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

CASTREE, N. 2000. "Professionalisation, activism, and the university: Whither 'critical geography?" *Environment and Planning A: Economy and Space* 32(6): 955–970.

CHAGNON, C.W., F. DURANTE, B.K. GILLS, S.E. HAGOLANI-ALBOV, S. HOKKANEN, S.M. KANGASLUOMA, … dan M.P. VUOLA. 2022. "From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept." *Journal of Peasant Studies* 49(4): 760–792.

CHAMBATI, W. 2017. "Changing forms of wage labour in Zimbabwe's new agrarian structure." *Agrarian South: Journal of Political Economy* 6(1): 79–112.

CHAYANOV, A.V. 1966 (1925). *The Theory of the Peasant Economy*. Manchester (Inggris): Manchester University Press.

CHOUDRY, A. 2020. "Reflections on academia, activism, and the politics of knowledge and learning." *The International Journal of Human Rights* 24(1): 28–45.

CLAEYS, P. 2015. *Human Rights and the Food Sovereignty Movement: Reclaiming Control*. London (Inggris): Routledge.

CLAEYS, P. dan D. DELGADO PUGLEY. 2017. "Peasant and indigenous transnational social movements engaging with climate justice." *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 38(3): 325–340.

CLAEYS, P. dan M. EDELMAN. 2020. "The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas." *Journal of Peasant Studies* 47(1): 1–68.

CLAPP, J. 2014. "Financialization, distance and global food politics." *Journal of Peasant Studies* 41(5): 797–814.

CLAPP, J., P. NEWELL, dan Z.W. BRENT. 2018. "The global political economy of climate change, agriculture and food systems." *Journal of Peasant Studies* 45(1): 80–88.

CORBERA, E. 2012. "Problematizing REDD+ as an experiment in payments for ecosystem services." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 4(6): 612–619.

CORONADO, S. 2019. "Rights in the time of populism: land and institutional change amid the re-emergence of right-wing authoritarianism in Colombia." *Land* 8(8): 119.

_____. 2022. "Peasants, Protests and Litigation: Struggles over land and institutions in Colombia." Disertasi di International Institute of Social Studies, Belanda.

CORRADO, A., C. DE CASTRO, dan D. PERROTTA, ed. 2016. *Migration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area*. London (Inggris): Routledge.

COTULA, L. 2013. "The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale, geography and drivers." Dalam *The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals*, disunting oleh B. WHITE *et al.*, 43–74. London (Inggris): Routledge.

COUSINS, B. 2022. "Land, social reproduction and agrarian change." Dalam *The Oxford Handbook of Land*, disunting oleh S.M. BORRAS JR. dan J.C. FRANCO. Oxford (Inggris): Oxford University Press.

CROTEAU, D. 2005. "Which side are you on? The tension between movement scholarship and activism." Dalam *Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship*,

disunting oleh D. CROTEAU *et al.*, 20–40. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.

CROTEAU, D., W. HAYNES, dan C. RYAN. 2005. "Integrating social movement theory and practice." Dalam *Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship*, disunting oleh D. CROTEAU *et al.*, xi–xviii. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.

DAIGLE, M. 2019. "Tracing the terrain of Indigenous food sovereignties." *Journal of Peasant Studies* 46(2): 297–315.

DAVIS, J., A.A. MOULTON, L. VAN SANT, dan B. WILLIAMS. 2019. "Anthropocene, capitalocene, plantationocene? A manifesto for ecological justice in an age of global crises." *Geography Compass* 13(5): e12438.

DAY, A.F. dan M. SCHNEIDER. 2018. "The end of alternatives? Capitalist transformation, rural activism and the politics of possibility in China." *Journal of Peasant Studies* 45(7): 1221–1246.

DEERE, C.D. 1995. "What difference does gender make? Rethinking peasant studies." *Feminist Economics* 1(1): 53–72.

_____. 2018. "The practice of Latin American studies: dilemmas of scholarly communication." *Lasa Forum* 49(3): 7–23.

DEININGER, K. 2011. "Challenges posed by the new wave of farmland investment." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 217–247.

DEININGER, K. dan H. BINSWANGER. 1999. "The evolution of the World Bank's land policy: Principles, experience, and future challenges." *The World Bank Research Observer* 14(2): 247–276.

DE JANVRY, A., G. GORDILLO, J-P. PLATTEAU, dan E. SADOULET, ed. 2001. *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.

DE JONG, S., R. ICAZA, R. VÁZQUEZ, dan S. WITHAECKX. 2017. "Editorial: Decolonising the University." *Tijdschrift voor Genderstudies* 20(3): 227–231.

DELGADO-WISE, R. dan H. VELTMEYER. 2016. *Agrarian Change, Migration and Development*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

DELL'ANGELO, J., P. D'ODORICO, M.C. RULLI, dan P. MARCHAND. 2017. "The tragedy of the grabbed commons: Coercion and dispossession in the global land rush." *World Development* 92: 1–12.

DERICKSON, K. dan P. ROUTLEDGE. 2015. "Resourcing scholar-activism: Collaboration, transformation, and the production of knowledge." *The Professional Geographer* 67(1): 1–7.

DE SCHUTTER, O. 2011. "How not to think of land grabbing: Three critiques of large-scale investments in farmland." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 249–279.

DESLIPPE, D., E. FURE-SLOCUM, dan J.W. MCKERLEY. 2016. "Introduction: Challenges of engaged scholarship and teaching." Dalam *Civic Labors: Scholar Activism and Working-class Studies*, disunting oleh D. DESLIPPE, E. FURE-SLOCUM, dan J.W. MCKERLEY, 1–10. Champaign (Amerika Serikat): University of Illinois Press.

DESMARAIS, A. 2007. *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Halifax (Kanada): Fernwood; London (Inggris): Pluto.

DE WIT, M.M., A. SHATTUCK, A. ILES, G. GRADDY-LOVELACE, A. ROMAN-ALCALÁ, dan M.J. CHAPPELL. 2021. "Operating principles for collective scholar-activism." *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development* 10(2): 1–19.

DISKIN, M. 1989. "El Salvador: Reform prevents change." Dalam *Searching for Agrarian Reform in Latin America*, disunting oleh W. THIESENHUSEN, 429–450. London (Inggris): Unwin Hyman.

DRESSLER, W.H. dan E.R. GUIEB III, E.R. 2015. "Violent enclosures, violated livelihoods: Environmental and military territoriality in a Philippine frontier." *Journal of Peasant Studies* 42(2): 323–345.

DUNCAN, J., P. CLAEYS, M.G. RIVERA-FERRE, E. OTEROS-ROZAS, B. VAN DYCK, C. PLANK, dan A.A. DESMARAIS. 2021. "Scholar-activists in an

expanding European food sovereignty movement." *Journal of Peasant Studies* 48(4): 875–900.

DUNLAP, A. 2018. "Counterinsurgency for wind energy: The Bií Hioxo wind park in Juchitán, Mexico." *Journal of Peasant Studies* 45(3): 630–652.

DWYER, M.B. 2015. "The formalization fix? Land titling, land concessions and the politics of spatial transparency in Cambodia." *Journal of Peasant Studies* 42(5): 903–928.

EDELMAN, M. 1999. *Peasants Against Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*. Stanford (Amerika Serikat): Stanford University Press.

_____. 2009. "Synergies and tensions between rural social movements and professional researchers." *Journal of Peasant Studies* 36(1): 245–265.

_____. 2013. "What is a peasant? What are peasantries? A briefing paper on issues of definition." First session of the Intergovernmental Working Group on a United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, Jenewa, 15–19 Juli.

_____. 2021. "Hollowed out Heartland, USA: How capital sacrificed communities and paved the way for authoritarian populism." *Journal of Rural Studies* 82: 505–517.

EDELMAN, M. dan S.M. BORRAS JR. 2016. *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

EDELMAN, M. dan A. LEÓN. 2013. "Cycles of land grabbing in Central America: An argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras." *Third World Quarterly* 34(9): 1697–1722.

EDELMAN, M. dan W. WOLFORD. 2017. "Introduction: Critical agrarian studies in theory and practice." *Antipode* 49(4): 959–976.

EDELMAN, M., C. OYA, dan S.M. BORRAS JR. 2013. "Global land grabs: Historical processes, theoretical and methodological implications and current trajectories." *Third World Quarterly* 34(9): 1517–1531.

ENGELS, F. 1894. *The peasant question in France and Germany*. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/ peasant-question/index.htm, diunduh pada 11 Februari 2019.

FAIRBAIRN, M. 2014. "'Like gold with yield': Evolving intersections between farmland and finance." *Journal of Peasant Studies* 41(5): 777–795.

_____. 2020. *Fields of Gold: Financing the Global Land Rush*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

FAIRHEAD, J., M. LEACH, dan I. SCOONES. 2012. "Green grabbing: A new appropriation of nature?" *Journal of Peasant Studies* 39(2): 237–261.

FAMEREE, C. 2016. "Political contestations around land deals: Insights from Peru." *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 37(4): 541–559.

FERNANDES, B.M. 2013. "Re-peasantization, resistance and subordination: The struggle for land and agrarian reform in Brazil." *Agrarian South: Journal of Political Economy* 2(3): 269–289.

FOSTER, J.B. 1999. "Marx's theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology." *American Journal of Sociology* 105(2): 366–405.

FOX, J. 1990. "Editor's introduction." Dalam *The Challenge of Rural Democratisation: Perspectives from Latin America and the Philippines*, disunting oleh J. FOX, 1–14. London (Inggris): Frank Cass.

_____. 1993. "State–society interaction and distributive reform in Mexico." Dalam *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization, Food Systems and Agrarian Change*, disunting oleh J. FOX, 12–44. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

_____. 2006. "Lessons from action-research partnerships: LASA/Oxfam America 2004 Martin Diskin Memorial Lecture." *Development in Practice* 16(1): 27–38.

FOX, J. 2010. "Coalitions and networks." Dalam *International Encyclopedia of Civil Society*, disunting oleh H. ANHEIER dan S. TOEPLER, 41–82. New York (Amerika Serikat): Springer.

FRANCO, J.C. 2001. *Elections and Democratization in Philippines*. London (Inggris): Routledge.

_____. 2008a. "Making land rights accessible: Social move-ments and political-legal innovation in the rural Philippines." *Journal of Development Studies* 44(7): 991–1022.

_____. 2008b. "Peripheral justice? Rethinking justice sector reform in the Philippines." *World Development* 36(10): 1858–1873.

_____. 2014. "Reclaiming Free Prior and Informed Consent (FPIC) in the context of global land grabs." Amsterdam (Belanda): Transnational Institute.

FRANCO, J.C. dan S.M. BORRAS JR., ed. 2013. *Land Concentration, Land Grabbing and People's Struggles in Europe*. Mons (Belgia): European Coordination Via Campesina (ECVC); Amsterdam (Belanda): Hands of the Land Network, Transnational Institute.

_____. 2019. "Grey areas in green grabbing: Subtle and indirect interconnections between climate change politics and land grabs and their implications for research." *Land Use Policy* 84: 192–199.

_____. 2021. "The global climate of land politics." *Globalizations* 18(7): 1277–1297.

FRANCO, J.C. dan S. MONSALVE SUÁREZ. 2018. "Why wait for the state? Using the CFS Tenure Guidelines to recalibrate political-legal struggles for democratic land control." *Third World Quarterly* 39(7): 1386–1402.

FRANCO, J.C., L. LEVIDOW, D. FIG, L. GOLDFARB, M. HÖNICKE, dan M. LUÍSA MENDONÇA. 2010. "Assumptions in the European Union biofuels

policy: Frictions with experiences in Germany, Brazil and Mozambique." *Journal of Peasant Studies* 37(4): 661–698.

FRANCO, J.C., L. MEHTA, dan G.J. VELDWISCH. 2013. "The global politics of water grabbing." *Third World Quarterly* 34(9): 1651–1675.

FRANCO, J.C., S. MONSALVE, dan S.M. BORRAS JR. 2015. "Democratic land control and human rights." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 15: 66–71.

FRASER, A. 2019. "Land grab/data grab: Precision agriculture and its new horizons." *Journal of Peasant Studies* 46(5): 893–912.

FRASER, N. 2021. "Climates of capital: For a trans-environmental eco-socialism." *New Left Review* 127: 94–127.

FRIEDMANN, H. dan P. MCMICHAEL. 1989. "The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present." *Sociologia Ruralis* 29(2): 93–117.

GAVENTA, J. DAN R. TANDON. 2010. *Globalising Citizens: New Dynamics of Inclusion and Exclusio*. London (Inggris): Zed Books.

GERBER, J.F. 2020. "Degrowth and critical agrarian studies." *Journal of Peasant Studies* 47(2): 235–264.

GILBERT, J. 2015. *Planning Democracy: Agrarian Intellectuals and the Intended New Deal*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

GRAIN. 2008. *Seized*. Barcelona (Spanyol): GRAIN

_____. 2013. "Collating and dispersing: GRAIN's strategies and methods." *Journal of Peasant Studies* 40(3): 531–536.

GRAJALES, J. 2011. "The rifle and the title: Paramilitary violence, land grab and land control in Colombia." *Journal of Peasant Studies* 38(4): 771–792.

GRAMSCI, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York (Amerika Serikat): International Publishers.

GREENWOOD, D. 2006. "Theoretical research, applied research, and action research." Dalam *Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship*, disunting oleh C. Hale, 319–340. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

GRIFFIN, K., A.R. KHAN, dan A. ICKOWITZ. 2002. "Poverty and distribution of land." *Journal of Agrarian Change* 2(3): 279–330.

GYAPONG, A.Y. 2019. "Land deals, wage labour, and everyday politics." *Land* 8(6): 94.

HALE, C. 2006. "Activist research v. cultural critique: Indigenous land rights and the contradictions of politically engaged anthropology." *Cultural Anthropology* 21(1): 96–120.

_____. 2008. "Introduction." Dalam *Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship*, disunting oleh C. HALE, 1–30. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

HALL, D., P. HIRSCH, dan T. LI. 2010. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: NUS Press.

HALL, R. 2011. "Land grabbing in Southern Africa: The many faces of the investor rush." *Review of African Political Economy* 38(128): 193–214.

HALL, R., M. EDELMAN, S.M. BORRAS JR., I. SCOONES, B. WHITE, dan W. WOLFORD. 2015. "Resistance, acquiescence or incorporation? An introduction to land grabbing and political reactions 'from below'." *Journal of Peasant Studies* 42(3–4): 467–488.

HALL, R., I. SCOONES, dan D. TSIKATA. 2017. "Plantations, outgrowers and commercial farming in Africa: Agricultural commercialisation and implications for agrarian change." *Journal of Peasant Studies* 44(3): 515–537

HARRISS-WHITE, B. 2022. "Petty commodity production." *Journal of Peasant Studies* 1–20, https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2138354.

HARVEY, N. 1998. *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

HENDERSON, T.P. 2018. "The class dynamics of food sovereignty in Mexico and Ecuador." *Journal of Agrarian Change* 18(1): 3–21.

HISANO, S., M. AKITSU, dan S.R. MCGREEVY. 2018. "Revitalising rurality under the neoliberal transformation of agriculture: Experiences

of re-agrarianisation in Japan." *Journal of Rural Studies* 61: 290–301.

HO, P. 2001. "Who owns China's land? Policies, property rights and deliberate institutional ambiguity." *The China Quarterly* 166: 394–421.

HOBSBAWM, E. 1973. "Peasants and politics." *Journal of Peasant Studies* 1(1): 3–22.

HOLLEMAN, H. 2018. *Dust Bowls of Empire*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

HOLT-GIMÉNEZ, E. dan A. SHATTUCK. 2011. "Food crises, food regimes and food movements: Rumblings of reform or tides of transformation?" *Journal of Peasant Studies* 38(1): 109–144.

HOLT-GIMÉNEZ, E., A. SHATTUCK, dan I. VAN LAMMEREN. 2021. "Thresholds of resistance: Agroecology, resilience and the agrarian question." *Journal of Peasant Studies* 48(4): 715–733.

HOSPES, O. 2014. "Food sovereignty: The debate, the deadlock, and a suggested detour." *Agriculture and Human Values* 31(1): 119–130.

HUIZER, G. 1975. "How peasants become revolutionaries: Some cases from Latin America and Southeast Asia." *Development and Change* 6(3): 27–56.

HUNSBERGER, C., E. CORBERA, S.M. BORRAS JR., J.C. FRANCO, K. WOODS, C. WORK, … dan C. VADDHANAPHUTI. 2017. "Climate change mitigation, land grabbing and conflict: Towards a landscape-based and collaborative action research agenda." *Canadian Journal of Development Studies* 38(3): 305–324.

IAASTD. 2009. *Synthesis Report: Agriculture at a Crossroads: International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development*. Washington (Amerika Serikat): Island Press.

ILES, A. 2022. "Sustaining agrarian struggles through painting invasion and resistance: the work of BoyD." *Journal of Peasant Studies* 49(6): 1348–1354.

ISAKSON, S.R. 2014. "Food and finance: The financial transformation of agro-food supply chains." *Journal of Peasant Studies* 41(5): 749–775.

ITO, T., N.F. RACHMAN, dan L.A. SAVITRI. 2014. "Power to make land dispossession acceptable: A policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia." *Journal of Peasant Studies* 41(1): 29–50.

JACOBS, R. 2018. "An urban proletariat with peasant characteristics: Land occupations and livestock raising in South Africa." *Journal of Peasant Studies* 45(5–6): 884–903.

JANSEN, K. 2015. "The debate on food sovereignty theory: Agrarian capitalism, dispossession and agroecology." *Journal of Peasant Studies* 42(1): 213–232.

JODHKA, S.S. 2021. "Why are the farmers of Punjab protesting?" *Journal of Peasant Studies* 48(7): 1356–1370.

KAUTSKY, K. 1988 (1899). *The Agrarian Question (Vol. 1)*. London (Inggris): Zwan.

KAY, C. 2002. "Why East Asia overtook Latin America: Agrarian reform, industrialization and development." *Third World Quarterly* 23(6): 1073–1102.

_____. 2009. "Development strategies and rural development: Exploring synergies, eradicating poverty." *Journal of Peasant Studies* 36(1): 103–137.

KECK, M.E. dan K. SIKKINK. 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca (Amerika Serikat): Cornell University Press.

KEPE, T. dan R. HALL. 2018. "Land redistribution in South Africa: Towards decolonisation or recolonisation?" *Politikon* 45(1): 128–137.

KERKVLIET, B. 2009. "Everyday politics in peasant societies (and ours)." *Journal of Peasant Studies* 36(1): 227–243

KOTHARI, A., A. SALLEH, A. ESCOBAR, F. DEMARIA, dan A. ACOSTA. 2019. *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*. New Delhi (India): Tulika Books.

KRÖGER, M. 2021. *Iron Will: Global Extractivism and Mining Resistance in Brazil and India*. Ann Arbor (Amerika Serikat): University of Michigan Press.

KUMAR, S. 2021. "Class, caste and agrarian change: the making of farmers' protests." *Journal of Peasant Studies* 48(7): 1371–1379.

LAHIFF, E., S.M. BORRAS JR., dan C. KAY. 2007. "Market-led agrarian reform: Policies, performance and prospects." *Third World Quarterly* 28(8): 1417–1436.

LAMB, V. dan N. DAO. 2017. "Perceptions and practices of investment: China's hydropower investments in Vietnam and Myanmar." *Canadian Journal of Development Studies* 38(3): 395–413.

LEHMANN, D., ed. 1974. *Peasants, Landlords and Governments: Agrarian Reform in the Third World*. New York (Amerika Serikat): Holmes and Meier Publishers.

LEMISCH, J. 2004. "Cheers for bridging the gap between activism and the academy: Or, stay and fight." Dalam *Taking Back the Academy: History of Activism, History as Activism*, disunting oleh J. DOWNS dan J. MANION, 187–208. London (Inggris): Routledge.

LENIN, V.I. 2004 (1905). *Development of Capitalism in Russia*. Honolulu (Amerika Serikat): University Press of the Pacific.

LERCHE, J. 2021. "The farm laws struggle 2020–2021: class-caste alliances and bypassed agrarian transition in neoliberal India." *Journal of Peasant Studies* 48(7): 1380–1396.

LEVIEN, M. 2013. "Regimes of dispossession: From steel towns to special economic zones." *Development and Change* 44(2): 381–407.

_____. 2018. *Dispossession Without Development: Land Grabs in Neoliberal India*. New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.

_____. 2021. "Coercive rentier networks: 'Land Mafias' in neoliberal India." *Sociology of Development* 7(2): 159–185.

LEVIEN, M., M. WATTS, dan H. YAN. 2018. "Agrarian Marxism." *Journal of Peasant Studies* 45(5–6): 853–883.

LEVKOE, C. 2021. "Scholars as allies in the struggle for food systems transformation." *Agriculture and Human Values* 38: 611–614.

LEVKOE, C., J. BREM-WILSON, dan C.R. ANDERSON. 2019. "People, power, change: Three pillars of a food sovereignty research praxis." *Journal of Peasant Studies* 46(7): 1389–1412.

LI, T. 2011. "Centering labor in the land grab debate." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 281–298.

_____. 2014. *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier.* Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

_____. 2015. "Can there be food sovereignty here?" *Journal of Peasant Studies* 42(1): 205–211.

LI, T.M. dan P. SEMEDI. 2021. *Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone.* Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

LIPTON, M. 1977. *Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development.* London (Inggris): Temple Smith; Canberra (Australia): ANU Press.

LUND, C. 2016. "Rule and rupture: State formation through the production of property and citizenship." *Development and Change* 47(6): 1199–1228.

_____. 2021. *Nine-Tenths of the Law.* New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

MAGNAN, A., M. DAVIDSON, dan A.A. DESMARAIS. 2022. "'They call it progress, but we don't see it as progress': farm consolidation and land concentration in Saskatchewan, Canada." *Agriculture and Human Values*: 1–14, https://doi. org/10.1007/s10460-022-10353-y.

MALSEED, K. 2008. "Where there is no movement: Local resistance and the potential for solidarity." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 489–514.

MAMONOVA, N. 2015. "Resistance or adaptation? Ukrainian peasants' responses to large-scale land acquisitions." *Journal of Peasant Studies* 42(3–4): 607–634.

MAMONOVA, N. dan L.A. SUTHERLAND. 2015. "Rural gentrification in Russia: Renegotiating identity, alternative food production and social tensions in the countryside." *Journal of Rural Studies* 42: 154–165.

MAO, Z. 1975. "Preface and postscript to rural surveys (March and April 1941)." Dalam *Selected Works of Mao Tse-Tung: Vol. III*. Beijing (Tiongkok): Foreign Languages Press.

MARGULIS, M.E., N. MCKEON, dan S.M. BORRAS JR. 2013. "Land grabbing and global governance: Critical perspectives." *Globalizations* 10(1): 1–23.

MARTINEZ-ALIER, J., L. TEMPER, D. DEL BENE, dan A. SCHEIDEL. 2016. "Is there a global environmental justice movement?" *Journal of Peasant Studies* 43(3): 731–755.

MARTINEZ-ALIER, J., H. HEALY, L. TEMPER, M. WALTER, B. RODRIGUEZ-LABAJOS, J.F. GERBER, dan M. CONDE. 2011. "Between science and activism: learning and teaching ecological economics with environmental justice organisations." *Local Environment* 16(1): 17–36.

MARTINEZ-TORRES, M.E. dan P.M. ROSSET. 2010. "La Vía Campesina: The birth and evolution of a transnational social movement." *Journal of Peasant Studies* 37(1): 149–175.

MARX, K. 1968 (1852). "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte." Dalam *Selected Works in One Volume*, karya K. Marx dan F. Engles, 96–166. London (Inggris): Lawrence and Wishart.

_____. 1983 (1881). "The reply to Zasulich." Dalam *Late Marx and the Russian Road*, disunting oleh T. Shanin, 123–124. London (Inggris): Routledge and Kegan Paul.

MCCARTHY, J. 2019. "Authoritarianism, populism, and the environment: Comparative experiences, insights, and perspectives." *Annals of the American Association of Geographers* 109(2): 301–313.

MCCLINTOCK, N. 2014. "Radical, reformist, and garden-variety neoliberal: Coming to terms with urban agriculture's contradictions." *Local Environment* 19(2): 147–171.

MCELWEE, P. 2022. "Advocating afforestation, betting on BECCS: land-based negative emissions technologies (NETs) and agrarian livelihoods in the global South." *Journal of Peasant Studies*: 1–30, https://doi.org/10.1080/03066150.2 022.2117032.

MCKAY, B.M. 2017. "Agrarian extractivism in Bolivia." *World Development* 97: 199–211.

MCKAY, B.M., A. ALONSO-FRADEJAS, dan A. EZQUERRO-CAÑETE, ed. 2021. *Agrarian Extractivism in Latin America*. London: Routledge.

MCKEON, N. 2009. *The United Nations and Civil Society Legitimating Global Governance: Whose Voice?* London (Inggris): Zed Books.

MCMICHAEL, P. 2008. "Peasants make their own history, but not just as they please …." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 205–228.

_____. 2013. *Food Regimes and Agrarian Questions*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

_____. 2020. "Does China's 'going out' strategy prefigure a new food regime?" *Journal of Peasant Studies* 47(1): 116–154.

MEHTA, L., G.J. VELDWISCH, dan J.C. FRANCO. 2012. "Introduction to the Special Issue: Water grabbing? Focus on the (re)-appropriation of finite water resources." *Water Alternatives* 5(2): 193–207.

MENDEZ, J.B. 2006. "Globalizing scholar activism: Opportunities and dilemmas through a feminist lens." Dalam *Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship*, disunting oleh C. HALE, 136–163. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

MEYER, D. 2005. "Scholarship that might matter." Dalam *Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship*,

disunting oleh D. Croteau *et al.*, 191–205. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.

MILLS, E.N. 2021. "The politics of transnational fishers' movements." *Journal of Peasant Studies*, https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1975271.

MINTZ, S. 1973. "A note on the definition of peasantries." *Journal of Peasant Studies* 1(1): 91–106.

MITCHELL, D. 2004. "Radical scholarship: A polemic on making a difference outside the academy." Dalam *Radical Theory/Critical Praxis: Making a Difference Beyond the Academy?*, disunting oleh D. FULLER dan R. KITCHIN, 21–31. Vernon dan Victoria (Kanada): Praxis (e)Press.

MONJANE, B. dan N. BRUNA. 2020. "Confronting agrarian authoritarianism: Dynamics of resistance to PROSAVANA in Mozambique." *Journal of Peasant Studies* 47(1): 69–94.

MONSALVE, S. 2013. "The human rights framework in contemporary agrarian struggles." *Journal of Peasant Studies* 40(1): 239–290.

MONTEFRIO, M.J.F. dan W.H. DRESSLER. 2016. "The green economy and constructions of the 'idle' and 'unproductive' uplands in the Philippines." *World Development* 79: 114–126.

MOORE JR., B. 1967. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Modern World*. Harmondsworth (Inggris): Penguin.

MOORE, J.W. 2017. "The Capitalocene, part I: On the nature and origins of our ecological crisis." *Journal of Peasant Studies* 44(3): 594–630.

MOREDA, T. 2017. "Large-scale land acquisitions, state authority and indigenous local communities: Insights from Ethiopia." *Third World Quarterly* 38(3): 698–716.

MOYO, S. 2011. "Three decades of agrarian reform in Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(3): 493–531.

MOYO, S. dan P. YEROS, ed. 2005. *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. London (Inggris): Zed Books.

MOYO, S., P. YEROS, dan P. JHA. 2012. "Imperialism and primitive accumulation: Notes on the new scramble for Africa." *Agrarian South: Journal of Political Economy* 1(2): 181–203.

MOYO, S., P. JHA, dan P. YEROS. 2013. "The classical agrarian question: Myth, reality and relevance today." *Agrarian South: Journal of Political Economy* 2(1): 93–119.

MUDIMU, G., T. ZUO, dan N. NALWIMBA. 2022. "Inside an enclave: The dynamics of capitalism and rural politics in a post-land reform context." *Journal of Peasant Studies* 49(1): 101–128.

NEWELL, P. 2022. "Climate justice." *Journal of Peasant Studies* 49(5), 915–923.

NEWELL, P. dan O. TAYLOR. 2018. "Contested landscapes: The global political economy of climate-smart agriculture." *Journal of Peasant Studies* 45(1): 108–129.

NIKULIN, A.M. dan I.V. TROTSUK. 2016. "Utopian visions of contemporary rural–urban Russia." *Third World Thematics: A TWQ Journal* 1(5): 673–690.

NINO, H.P. 2017. "Migrant workers into contract farmers: Processes of labour mobilization in colonial and contemporary Mozambique." *Africa* 87(1): 79–99.

NYGREN, A., M. KRÖGER, dan B. GILLS. 2022. "Global extractivisms and transformative alternatives." *Journal of Peasant Studies* 49:4, 734–759, https://doi.org/10.1080/03066150.2022. 2069495.

O'BRIEN, K. dan L. LI. 2006. *Rightful Resistance in China*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

OJEDA, D. 2012. "Green pretexts: Ecotourism, neoliberal conservation and land grabbing in Tayrona National Natural Park, Colombia." *Journal of Peasant Studies* 39(2): 357–375.

O'LAUGHLIN, B. 2008. "Governing capital? Corporate social responsibility and the limits of regulation." *Development and Change* 39(6): 945–957.

_____. 2021. "No separate spheres: the contingent reproduction of living labor in Southern Africa." *Review of International Political Economy*: 1–20, https://doi.org/10.1080/09692290.2021.1950025.

OYA, C. 2012. "Contract farming in sub-Saharan Africa: A survey of approaches, debates and issues." *Journal of Agrarian Change* 12(1): 1–33.

_____. 2013. "The land rush and classic agrarian questions of capital and labour: A systematic scoping review of the socioeconomic impact of land grabs in Africa." *Third World Quarterly* 34(9): 1532–1557.

PAHNKE, A., R. TARLAU, dan W. WOLFORD. 2015. "Understanding rural resistance: Contemporary mobilization in the Brazilian countryside." *Journal of Peasant Studies* 42(6): 1069–1085.

PAIGE, J. 1978. *Agrarian Revolution*. New York (Amerika Serikat): Free Press.

PAPROCKI, K. 2019. "All that is solid melts into the bay: Anticipatory ruination and climate change adaptation." *Antipode* 51(1): 295–315.

PARK, C.M.Y. dan B. WHITE. 2017. "Gender and generation in Southeast Asian agro-commodity booms." *Journal of Peasant Studies* 44(6): 1103–1110.

PATEL, R. 2007. *Stuffed and Starved: From Farm to Fork: The Hidden Battle for the World Food System*. New York (Amerika Serikat): Melville House.

_____. 2009. "Grassroots voices: Food sovereignty." *Journal of Peasant Studies* 36(3): 662–706.

PATEL, R. dan J. GOODMAN. 2020. "The long new deal." *Journal of Peasant Studies* 47(3): 431–463.

PATTENDEN, J. 2018. "The politics of classes of labour: Fragmentation, reproduction zones and collective action in Karnataka, India." *Journal of Peasant Studies* 45(5–6): 1039–1059.

_____. 2023. "Progressive politics and populism: Classes of labour and rural-urban political sociology: An introduction to the Special Issue." *Journal of Agrarian Change* 23(1): 3–21.

PELEK, D. 2022. "Ethnic residential segregation among seasonal migrant workers: From temporary tents to new rural ghettos in southern Turkey." *Journal of Peasant Studies* 49(1): 54–77.

PELLEGRINI, L., M. ARSEL, F. FALCONÍ, dan R. MURADIAN. 2014. "The demise of a new conservation and development policy? Exploring the tensions of the Yasuní ITT initiative." *The Extractive Industries and Society* 1(2): 284–291.

PELUSO, N.L. dan C. LUND. 2011. "New frontiers of land control: Introduction." *Journal of Peasant Studies* 38(4): 667–681.

PELUSO, N.L., S. AFIFF, dan N.F. RACHMAN. 2008. "Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia." *Journal of Agrarian Change* 8(2–3): 377–407.

PERFECTO, I. dan J. VANDERMEER. 2010. "The agroecological matrix as alternative to the land-sparing/agriculture intensification model." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107(13): 5786–5791.

PETERS, C. 2005. "Knowing what's wrong is not enough: Creating strategy and vision." Dalam *Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship*, disunting oleh D. CROTEAU *et al.*, 41–56. Minneapolis (Amerika Serikat): University of Minnesota Press.

PETERS, P.E. 2022. "Struggles over land under customary tenure in contemporary sub-saharan Africa." Dalam *The Oxford Handbook of Land Politics*, disunting oleh S.M. BORRAS JR. dan J.C. FRANCO. Oxford (Inggris): Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780197618646.013.2.

PETRAS, J. dan H. VELTMEYER. 2001. "Are Latin American peasant movements still a force for change?" *Journal of Peasant Studies* 28(2): 83–118.

PIMBERT, M. 2009. "Towards food sovereignty." Gatekeeper series 141. London (Inggris): International Institute for Environment and Development.

PIVEN, F.F. 2010. "Reflections on scholarship and activism." *Antipode* 42(4): 806–810.

POPKIN, S. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

PUTZEL, J. 1995. "Managing the 'main force': The communist party and the peasantry in the Philippines." *Journal of Peasant Studies* 22(4): 645–671.

PYE, O. 2021. "Agrarian Marxism and the proletariat: A palm oil manifesto." *Journal of Peasant Studies* 48(4): 807–826.

RA, D. dan K.K. JU. 2021. "'Nothing about us, without us': reflections on the challenges of building Land in Our Hands, a national land network in Myanmar/Burma." *Journal of Peasant Studies* 48(3): 497–516.

RAPPAPORT, J. 2020. *Cowards Don't Make History: Orlando Fals Borda and the Origins of Participatory Action Research*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

RIBOT, J. 2014. "Cause and response: Vulnerability and climate in the Anthropocene." *Journal of Peasant Studies* 41(5): 667–705.

_____. 2022. "Violent silence: framing out social causes of climate-related crises." Journal *of Peasant Studies* 49(4): 683–712.

RIBOT, J. dan N. PELUSO. 2003. "A theory of access." *Rural Sociology* 68(2): 153–181.

RIGG, J., M. PHONGSIRI, B. PROMPHAKPING, A. SALAMANCA, dan M. SRIPUN. 2020. "Who will tend the farm? Interrogating the ageing Asian farmer." *Journal of Peasant Studies* 47(2): 306–325.

ROBBINS, M.J. 2015. "Exploring the 'localization' dimension of food sovereignty." *Third World Quarterly* 36(3): 449–468.

RODNEY, W. 2019. *The Groundings with My Brothers*. New York (Amerika Serikat): Verso.

ROMAN-ALCALÁ, A. 2015. "Broadening the land question in food sovereignty to northern settings: A case study of occupy the farm." *Globalizations* 12(4): 545–558.

_____. 2021. "Agrarian anarchism and authoritarian populism: Towards a more (state-)critical 'critical agrarian studies'." *Journal of Peasant Studies* 48(2): 298–328.

ROSSET, P. 2013. "Grassroots voices: Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Via Campesina." *Journal of Peasant Studies* 40(4): 721–775.

ROSSET, P.M. dan M.A. ALTIERI. 2017. *Agroecology: Science and Politics*. Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

ROUTLEDGE, P. dan K.D. DERICKSON. 2015. "Situated solidarities and the practice of scholar-activism." *Environment and Planning D: Society and Space* 33(3): 391–407.

SANKEY, K. 2022. "We, campesinos: The potentials and pitfalls of agrarian populism in Colombia's agrarian strike." *Journal of Agrarian Change*, https://doi.org/10.1111/joac.12516.

SAUER, S. dan S. PEREIRA LEITE. 2012. "Agrarian structure, foreign investment in land, and land prices in Brazil." *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 873–898.

SCHEIDEL, A. dan C. WORK. 2018. "Forest plantations and climate change discourses: New powers of 'green' grabbing in Cambodia." *Land Use Policy* 77: 9–18.

SCHEIDEL, A., DEL BENE, D., LIU, J., NAVAS, G., MINGORRÍA, S., DEMARIA, F., … dan J. MARTÍINEZ-ALIER. 2020. "Environmental conflicts and defenders: A global overview." *Global Environmental Change* 63: 102104.

SCHNEIDER, S. dan P.A. NIEDERLE. 2012. "Resistance strategies and diversification of rural livelihoods: The construction of

autonomy among Brazilian family farmers." *Journal of Peasant Studies* 37(2): 379–405.

SCOONES, I. 2009a. "Livelihoods perspectives and rural development." *Journal of Peasant Studies* 36(1): 171–196.

_____. 2009b. "The politics of global assessments: the case of the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)." *Journal of Peasant Studies* 36(3): 547–571.

_____, ed. 2010. *Zimbabwe's Land Reform: Myths and Realities*. London (Inggris): James Currey.

_____. 2015. *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

_____. 2016. "The politics of sustainability and development." *Annual Review of Environment and Resources* 41(1): 293–319.

SCOONES, I., K. AMANOR, A. FAVARETO, dan G. QI, ed. 2016. "A new politics of development cooperation? Chinese and Brazilian engagements in African agriculture." *World Development* 81 (Special Issue).

SCOONES, I., M. EDELMAN, S.M. BORRAS JR., R. HALL, W. WOLFORD, dan B. WHITE. 2018. "Emancipatory rural politics: confronting authoritarian populism." *Journal of Peasant Studies* 45(1): 1–20.

SCOONES, I., R. SMALLEY, R. HALL, dan G. TSIKATA. 2019. "Narratives of scarcity: Framing the global land rush." *Geoforum* 101: 231–241.

SCOTT, J. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.

_____. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven (Amerika Serikat):Yale University Press.

SEKINE, Y. 2021. "Emerging 'agrarian climate justice' struggles in Myanmar." *Journal of Peasant Studies* 48(3): 517–540.

SELWYN, B. 2021. "A green new deal for agriculture: For, within, or against capitalism?" *Journal of Peasant Studies* 48(4): 778–806.

SHAH, A. 2022. "Rethinking 'just transitions' from coal: the dynamics of land and labour in anti-coal struggles." *Journal of Peasant Studies*: 1–20, https://doi.org/10.1080/03066150 .2022.2142568.

SHAH, A. dan B. HARRISS-WHITE. 2011. "Resurrecting scholarship on agrarian transformations." *Economic and Political Weekly* 46(39): 13–18.

SHAH, A. dan J. LERCHE. 2020. "Migration and the invisible economies of care: Production, social reproduction and seasonal migrant labour in India." *Transactions of the Institute of British Geographers* 45(4): 719–734.

SHANIN, T. 1971. *Peasants and Peasant Societies*. London (Inggris): Penguin.

_____. 1972. *The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society Russia 1910–1925*. Oxford (Inggris): Clarendon Press.

_____. 1973. "The nature and logic of the peasant economy 1: A generalisation 1." *Journal of Peasant Studies* 1(1): 63–80.

_____. 1983a. "Late Marx: Gods and craftsmen." Dalam *Late Marx and the Russian Road*, disunting oleh T. SHANIN, 3–39. London (Inggris): Routledge and Kegan Paul.

_____. 1983b. "Marxism and the vernacular revolutionary traditions." Dalam *Late Marx and the Russian Road*, disunting oleh T. SHANI, 243–279. London (Inggris): Routledge and Kegan Paul.

SHIVJI, I.G. 2017. "The concept of 'working people." *Agrarian South: Journal of Political Economy* 6(1): 1–13.

SIEBERT, A. 2020. "Transforming urban food systems in South Africa: Unfolding food sovereignty in the city." *Journal of Peasant Studies* 47(2): 401–419.

SOPER, R. 2020. "From protecting peasant livelihoods to essentializing peasant agriculture: problematic trends in food sovereignty discourse." *Journal of Peasant Studies* 47(2): 265–285.

SOSA VARROTTI, A.P. dan C. GRAS. 2021. "Network companies, land grabbing, and financialization in South America." *Globalizations* 18(3): 482–497.

SPOOR, M., ed. 2008. *The Political Economy of Rural Livelihoods in Transition Economies: Land, Peasants and Rural Poverty in Transition*. London (Inggris): Routledge.

STOCK, R. dan T. BIRKENHOLTZ. 2021. "The sun and the scythe: Energy dispossessions and the agrarian question of labor in solar parks." *Journal of Peasant Studies* 48(5): 984–1007.

STANDING, G. 2011. *The Precariat: The New Dangerous Class*. New York (Amerika Serikat): Bloomsbury.

SUD, N. 2014. "The men in the middle: A missing dimension in global land deals." *Journal of Peasant Studies* 41(4): 593–612.

SUDBURY, J. dan M. OKAZAWA-REY. 2009. "Introduction: Activist scholarship and the neoliberal university'." Dalam *Activist Scholarship: Antiracism, Feminism, and Social Change*, disunting oleh J. SUDBURY dan M. OKAZAWA-REY, 1–16. New York (Amerika Serikat): Routledge.

TADEM, E.C. 2016. *Living in Times of Unrest: Bart Pasion and the Philippine Revolution*. Quezon City (Filipina): University of the Philippines Press.

TAGGART, P. 2000. *Populism*. Milton Keynes (Inggris): Open University Press.

TARROW, S. 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.

TAYLOR, M. 2018. "Climate-smart agriculture: What is it good for?" *Journal of Peasant Studies* 45(1): 89–107.

TEMUDO, M.P. 2012. "'The white men bought the forests': Conservation and contestation in Guinea-Bissau, Western Africa." *Conservation and Society* 10(4): 354–366.

THOMPSON, E.P. 1971. "The moral economy of the English crowd in the eighteenth century'." *Past & Present* 50: 76–136.

_____. 1991 (1963). *The Making of the English Working Class*. London (Inggris): Penguin.

THUON, R. 2018. "Holding corporations from middle countries accountable for human rights violations: A case study of the Vietnamese company investment in Cambodia." *Globalizations* 15(1): 152–167.

TILZEY, M. 2019. "Authoritarian populism and neo-extractivism in Bolivia and Ecuador: The unresolved agrarian question and the prospects for food sovereignty as counter-hegemony." *Journal of Peasant Studies* 46(3): 626–652.

TORRES CONTRERAS, G.A. 2021. "Twenty-five years under the wind turbines in La Venta, Mexico: Social difference, land control and agrarian change." *Journal of Peasant Studies*, https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1873293.

TRAMEL, S. 2016. "The road through Paris: Climate change, carbon, and the political dynamics of convergence." *Globalizations* 13(6): 960–969.

TSIKATA, D. dan J.A. YARO. 2014. "When a good business model is not enough: Land transactions and gendered livelihood prospects in rural Ghana." *Feminist Economics* 20(1): 202–226.

VAN DER PLOEG, J.D. 2008. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London (Inggris): Earthscan.

_____. 2013. *Peasants and the Art of Farming: A Chayanovian Manifesto*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris0: Practical Action Publishing.

VAN DER PLOEG, J.D., J.C. FRANCO, dan S.M. BORRAS JR. 2015. "Land concentration and land grabbing in Europe: A preliminary analysis." *Canadian Journal of Development Studies* 36(2): 147–162.

VELTMEYER, H. 1997. "New social movements in Latin America: The dynamics of class and identity." *Journal of Peasant Studies* 25(1): 139–69.

VELTMEYER, H. dan J. PETRAS. 2014. *The New Extractivism: A Post-neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-first Century?* London (Inggris): Zed Books.

VERGARA-CAMUS, L. 2014. *Land and Freedom: The MST, the Zapatistas, and Peasant Alternatives to Neoliberalism*. London (Inggris): Zed Books.

VERWEIJEN, J. dan E. MARIJNEN. 2018. "The counterinsurgency/conservation nexus: Guerrilla livelihoods and the dynamics of conflict and violence in the Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo." *Journal of Peasant Studies* 45(2): 300–320.

VIGIL, S. 2022. *Land Grabs, Environment and Migration in a Changing Climate*. London (Inggris): Routledge.

VISSER, O., N. MAMONOVA, dan M. SPOOR. 2012. "Oligarchs, megafarms and land reserves: Understanding land grabbing in Russia." *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 899–931.

VISSER, O., J. CLAPP, dan S.R. ISAKSON. 2015. "Introduction to a symposium on global finance and the agri-food sector: Risk and regulation." *Journal of Agrarian Change* 15(4): 541–548.

WANG, C. dan Y. XU. 2022. "Reflecting on the Plantationocene: the political economy of sugarcane plantations in Guangxi, China." *Journal of Peasant Studies*: 1–22, https:// doi.org/10.1080/03066150.2022.2087180.

WEIS, T. 2007. *The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming*. London (Inggris): Zed Books.

_____. 2010. "The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture." *Journal of Agrarian Change* 10(3): 315–341.

WELCH, C. dan S. SAUER. 2015. "Rural unions and the struggle for land in Brazil." *Journal of Peasant Studies* 42(6): 1109–1135.

WHITE, B. 2016. "Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945–1966)." *Journal of Peasant Studies* 43(1): 1–16.

_____. 2020. *Agriculture and the Generation Problem*. Halifax (Kanada): Fernwood; Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.

WHITE, B., S.M. BORRAS JR., R. HALL, I. SCOONES, dan W. WOLFORD. 2012. "The new enclosures: Critical perspectives on corporate land deals." *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 619–647.

WHITE, M. 2018. *Freedom Farmers: Agricultural Resistance and the Black Freedom Movement*. Chapel Hill (Amerika Serikat): University of North Carolina Press.

WITTMAN, H., A. DESMARAIS, dan N. WIEBE, ed. 2010. *Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature & Community*. Halifax (Kanada): Fernwood; Oxford (Inggris): Pambazuka.

WOLF, E. 1966. *Peasants*. Englewood Cliffs (Amerika Serikat): Prentice-Hall.

_____. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. Norman (Amerika Serikat): University of Oklahoma Press.

WOLFORD, W. 2005. "Agrarian moral economies and neoliberalism in Brazil: Competing worldviews and the state in the struggle for land." *Environment and Planning A: Economy and Space* 37(2): 241–261.

_____. 2010. *This Land is Ours Now: Social Mobilization and the Meanings of Land in Brazil*. Durham (Amerika Serikat): Duke University Press.

_____. 2021. "The Plantationocene: A lusotropical contribution to the theory." *Annals of the American Association of Geographers* 111(6): 1622–1639.

WOLFORD, W., S.M. BORRAS JR., R. HALL, I. SCOONES, dan B. WHITE. 2013. "Governing global land deals: The role of the state in the rush for land." *Development and Change* 44(2): 189–210.

WOODHOUSE, P. 2012. "New investment, old challenges: Land deals and the water constraint in African agriculture." *Journal of Peasant Studies* 39(3–4): 777–794.

WRIGHT, E.O. 2019. *How to be an Anticapitalist in the Twenty-first Century*. New York (Amerika Serikat): Verso.

WUYTS, M. 1994. "Accumulation, industrialisation and the peasantry: A reinterpretation of the Tanzanian experience." *Journal of Peasant Studies* 21(2): 159–193.

XIUHTECUTLI, N. dan A. SHATTUCK. 2021. "Crisis politics and US farm labor: Health justice and Florida farmworkers amid a pandemic." *Journal of Peasant Studies* 48(1): 73–98.

XU, Y. 2019. "Politics of inclusion and exclusion in the Chinese industrial tree plantation sector: The global resource rush seen from inside China." *Journal of Peasant Studies* 46(4): 767–791.

YAN, H. dan Y. CHEN. 2015. "Agrarian capitalization without capitalism? Capitalist dynamics from above and below in China." *Journal of Agrarian Change* 15(3): 366–391.

YAN, H., BUN, K.H. dan X. Siyuan. 2021. "Rural revitalization, scholars, and the dynamics of the collective future in China." *Journal of Peasant Studies* 48(4): 853–874.

YAŞIN, Z. 2022. "The environmentalization of the agrarian question and the agrarianization of the climate justice movement." *Journal of Peasant Studies* 49(7): 1355–1386.

YE, J. 2015. "Land transfer and the pursuit of agricultural modernization in China." *Journal of Agrarian Change* 15(3): 314–337.

YE, J., J.D. VAN DER PLOEG, S. SCHNEIDER, dan T. SHANIN. 2020. "The incursions of extractivism: Moving from dispersed places to global capitalism." *Journal of Peasant Studies* 47(1): 155–183.

YEH, E., K. O'BRIEN, dan J. YE. 2013. "Rural politics in contemporary China." *Journal of Peasant Studies* 40(6), Special Issue.

ZASULICH, V. 1983 (1881). "A letter to Marx." Dalam *Late Marx and the Russian Road*, disunting oleh T. SHANIN, 98–99. London (Inggris): Routledge and Kegan Paul.

ZOOMERS, A. 2010. "Globalisation and the foreignisation of space: Seven processes driving the current global land grab." *Journal of Peasant Studies* 37(2): 429–447.

ZOOMERS, A. dan G. VAN DER HAAR, ed. 2000. *Current Land Policy in Latin America: Regulating Land Tenure Under Neo-Liberalism* Amsterdam (Belanda): Royal Tropical Institute.

insist
PRESS

Bagaimana aktivisme cendekia dan perjuangan agraria saling membentuk dan memperkuat dalam memperjuangkan keadilan sosial? Aktivisme cendekia merupakan cara kerja yang berupaya mengubah masyarakat dengan menggabungkan kekuatan tradisi akademik radikal dan aktivisme politik, meskipun upaya ini tidak lepas dari kontradiksi dan tantangan.

Buku ini pun diniatkan bukan sebagai puja-puji atas keberhasilan aktivisme cendekia, bukan pula panduan tentang bagaimana cara "menjadi" cendekiawan-aktivis. Sebaliknya, buku ini mengangkat isu-isu sensitif seputar aktivisme cendekia yang kerap luput dibahas—atau hanya disinggung setengah hati ketika tak bisa dihindari untuk dibicarakan.

Wawasan yang disajikan dalam buku kecil ini lahir dari pengalaman kedua penulisnya yang bergulat di tiga poros utama peredaran pengetahuan global: institusi akademik, lembaga penelitian independen yang berpihak pada praksis politik, serta gerakan agraria kiri.

Sebuah buku yang sangat penting, yang akan menjadi rujukan berpengaruh bagi para cendekiawan-aktivis yang menggeluti isu agraria dan pertanahan di berbagai belahan dunia.

Ian Scoones, Institute of Development Studies, Universitas of Sussex, Britania Raya

Sebuah refleksi mendalam tentang politik agraria dan peran penting teori sekaligus praksis dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Buku ini adalah persembahan berharga bagi siapa saja yang memedulikan keadilan agraria.

Diana Ojeda, Universitas Los Andes, Bogota, Kolombia

ICAS
Initiatives in Critical Agrarian Studies

International Institute of Social Studies

Erasmus University Rotterdam

University of the Western Cape

PLAAS
Research, teaching and policy engagement | 1995-2025
Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies

COHD 人文与发展学院
College of Humanities and Development Studies (COHD)

insist PRESS
www.insistpress.com

INSISTPress
@insistpress
@insistpress

ISBN: 978-623-6179-36-9 (PDF)